KABUPATEN
MAHAKAM ULU

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2021-2026

SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang RPJM Nasional tahun 2O2O-2O24 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 - 2026, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 perlu dilakukan perubahan
c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;

(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah;

(3) Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;

(4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu;

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagi unsur penyelanggara pemerintah Daerah;

(6) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiuan dan Pengembangan Daerah disebut Bappelitbangda adalah lembaga teknis yang melaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan serta pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah;

(7) Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

(8) Pemerintah Kampung adalah Pemerintahan Kampung dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

(9) Perencanaan adalah Suatu Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;

(10) Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah;

(11) Pembangunan Daerah adalah Perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah;

(12) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.

(13) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

(14) Strategi adalah langkah - langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

(15) Arah Kebijakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu;

(16) Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

(17) Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

(18) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2025;

(19) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

(20) Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam ulu tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu adalah dekumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

(21) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokuemn perencanaan perangkat daerah lingkup kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 5 (lima) tahun yatitu tahun 2021-2026;

(22) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaanPerangkat Daerah lingkup Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 5 (lima) tahunya itu Tahun 2021 – 2026;

(23) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Mahakam untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;

(24) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH;

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD;

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN

BAB IX : PENUTUP.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c. terjadinya perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya: bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional ; dan/ atau
d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(3) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan ÷ di Ujoh Bilang
Pada tanggal ÷ 22 April 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.11/28/1/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir *"Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Mahakam Ulu Tahun 2021-2026"* ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Rancangan Akhir *"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Mahakam Ulu Tahun 2021-2026"* ini disusun sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan rancangan perubahan RPJMD Kab. Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.86 Tahun 2017, yang memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan isu strategis daerah, perumusah strategi dan arah kebijakan dilengkapi dengan program prioritas pencapaian visi dan misi kepala daerah, indikasi program dan pendanaan dan indicator kinerja.

Penyusunan Rancangan Akhir *"Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Mahakam Ulu Tahun 2021-2026"* ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pusat Studi Teknologi dan Sumber Daya Kelautan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk, baik sumbang saran, kritik dan masukannya dalam penyusunan Rancangan Akhir *"Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Mahakam Ulu Tahun 2021-2026"* ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Ujoh Bilang, September 2023

Atas Nama
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I – 1**
1.1. LATAR BELAKANG ..... I – 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I – 4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... I – 8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I – 10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I – 11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... **II – 1**
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... II – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II – 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II – 21
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ..... II – 25
2.1.4. Demografi ..... II – 28
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II – 32
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II – 32
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 43
2.2.3. Fokus Seni, Budaya, dan Olah Raga ..... II – 56
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM ..... II – 59
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... II – 59
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... II – 82
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ..... II – 94
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH ..... II – 95
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II – 95
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur ..... II – 100
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II- 101
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II – 102
2.5. STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) ..... II – 104

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... **III – 1**
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU ..... III – 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III – 2
3.1.2. Neraca Daerah ..... III – 8
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ..... III – 11
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III – 11
3.3. KERANGKA PENDANAAN ..... III – 12
3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024-2026 ..... III – 13
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... III – 18

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ..... **IV – 1**
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ..... IV – 1
4.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... IV – 1

4.2. ISU - ISU STRATEGIS ..... IV – 25
4.2.1 ISU-ISU STRATEGIS LEVEL GLOBAL ..... IV – 25
4.2.2 ISU-ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL ..... IV – 30
4.2.3 ISU-ISU STRATEGIS LEVEL REGIONAL/DAERAH ..... IV – 34
4.2.4 KAJIAN ATAS DOKUMEN RTRW KAB. MAHAKAM ULU 2016-2023 ..... IV – 38
4.2.5 KAJIAN ATAS DOKUMEN RPJPD KAB. MAHAKAM ULU 2016-2025 .....
4.2.6 KAJIAN ATAS DOKUMEN RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024- 2026 ..... IV – 85 IV – 94
4.2.7 PENELAAHAN ATAS DOKUMEN RPJMD DAERAH LAIN ..... IV – 96
4.2.8 KAJIAN KLHS MAHAKAM ULU 2021 –2026 ..... IV – 97

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V – 1
5.1. VISI ..... V – 1
5.2. MISI ..... V – 4
5.3. TUJUAN DAN SASARAN ..... V – 13

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI – 1
6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ..... VI – 1
6.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI – 15

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII – 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII – 1

BAB IX PENUTUP IX – 1
9.1. PEDOMAN TRANSISI ..... IX – 1
9.2. KAIDAH PELAKSANAAN ..... IX – 2

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan Nasional	I - 9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mahakam Ulu	II – 2
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mahakam Ulu	II – 6
Gambar 2.3	Peta lokasi Sungai di Kabupaten Mahakam Ulu	II – 8
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Mahakam Ulu	II – 10
Gambar 2.5	Satuan Peta Tanah (SPT) Kabupaten Mahakam Ulu	II – 12
Gambar 2.6	Peta Sebaran Curah Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu	II – 18
Gambar 2.7	Peta Penutupan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu	II – 19
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu	II – 20
Gambar 2.9	Peta Potensi Kabupaten Mahakam Ulu	II – 24
Gambar 2.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015-2022	II – 28
Gambar 2.11	Distribusi Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022	II – 29
Gambar 2.12	Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022	II – 45
Gambar 2.13	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mahakam Ulu 2015-2022 (%)	II – 54
Gambar 2.14	Status Akreditasi Sekolah di Mahakam Ulu Tahun 2021	II – 63
Gambar 2.15	Jenjang Pendidikan Guru di Mahakam Ulu Tahun 2021	II – 65
Gambar 2.16	Proporsi Guru Bersertifikat Pendidik di Mahakam Ulu Tahun 2021	II – 66
Gambar 2.17	Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2017-2021 (%)	II – 73
Gambar 2.18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	II – 90
Gambar 2.19	Perkembangan Kredit Perbankan di Kab. Mahakam Ulu, 2018-2022 (Juta Rp)	II – 100
Gambar 3.1	Tren Perolehan PAD 2016-2022	III – 3
Gambar 3.2	Grafik Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2016-2022	III – 4
Gambar 3.3	Perkembangan dan Tren Perkembangan Penerimaan Pendapatan Kabupaten Mahakam Ulu	III – 13
Gambar 4.1	Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Mahakam Ulu	IV – 41
Gambar 4.2	Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Mahakam Ulu	IV – 51
Gambar 4.3	Status Capaian TPB di Mahakam Ulu	IV – 101
Gambar 5.1	Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Mahakam Ulu	V – 3
Gambar 5.2	Skema keterkaitan Visi–Misi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023	V – 9
Gambar 5.3	Skema keterkaitan Visi–Misi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024	V – 10
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026	VI – 11

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.1	Letak Geografis dan Luas Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kecamatan	II - 2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Desa	II – 3
Tabel 2.3a	Luas Kelas Lereng Kabupaten Mahakam Ulu	II – 5
Tabel 2.3b	Luas Kelas Lereng Kabupaten Mahakam Ulu Per Kecamatan	II – 5
Tabel 2.4	Nama dan Tinggi Gunung di Kabupaten Mahakam Ulu	II – 5
Tabel 2.5	Sungai-sungai di Kabupaten Mahakam Ulu	II – 7
Tabel 2.6	Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu	II – 9
Tabel 2.7	Keterangan Kelas SPT, Kabupaten Mahakam Ulu	II – 11
Tabel 2.8	Luas Unit Tanah Kabupaten Mahakam Ulu	II – 11
Tabel 2.9	Sifat Fisik dan Sifat-sifat Kimia Tanah Serta Status Kesuburan Tanah di Kabupaten Mahakam Ulu	II – 14
Tabel 2.10	Sebaran Curah Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu	II – 15
Tabel 2.11	Rata-rata Curah Hujan per Hari dalam Satu Bulan	II – 16
Tabel 2.12	Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kecamatan	II – 16
Tabel 2.13a	Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kecamatan	II – 17
Tabel 2.13b	Suhu dan Kelembaban Setiap Bulan	II – 17
Tabel 2.14	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu	II – 19
Tabel 2.15	Ketersediaan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu	II – 21
Tabel 2.16	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015-2022	II – 22
Tabel 2.17	Perkembangan Perkebunan Mahakam Ulu, 2022	II – 22
Tabel 2.18	Populasi Ternak di Kabupaten Mahakam Ulu (ekor), Tahun 2015-2022	II – 23
Tabel 2.19	Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur	II – 27
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio dan Kepadatan Tahun 2022	II – 30
Tabel 2.21	Perbandingan Kepadatan Penduduk antar Daerah Se-Kalimantan Timur Tahun 2020-2023	II – 31
Tabel 2.22	Perbandingan Pertumbuhan Penduduk antar Daerah se Kalimantan Timur Tahun 2020-2022	II – 31
Tabel 2.23	PDRB Kabupaten Mahakam Ulu ADHB 2017-2022 (Juta Rp)	II – 32
Tabel 2.24	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022 (%)	II – 33
Tabel 2.25	Rata-rata Proporsi dan Rata-rata Pertumbuhan Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022 (%)	II – 35
Tabel 2.26	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mahakam Ulu ADHK 2017-2022	II – 36
Tabel 2.27	Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran 2017-2022 (%)	II – 37
Tabel 2.28	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi se-Kalimantan Timur 2017-2022 (%)	II – 38
Tabel 2.29	Perbandingan Kontribusi PDRB se-Kalimantan Timur Tahun 2017-2022 (%)	II – 39
Tabel 2.30	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB se-Kalimantan Timur 2017-2022 (Rp juta)	II – 40
Tabel 2.31	Perkembangan Inflasi Kabupaten Mahakam Ulu Berdasarkan Deflator PDRB Tahun 2017-2022	II – 41
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif se-Kalimantan Timur 2016-2021	II – 43
Tabel 2.33	Rincian Indikator IPM Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022	II – 45
Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Kalimantan Timur2017-2022	II – 46
Tabel 2.35	Jumlah Sekolah Per Kecamatan Tahun 2022/2023	II - 48
Tabel 2.36	Jumlah Guru Per Kecamatan Tahun 2022/2023	II - 48

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.37	Rasio Murid-Guru Per Kecamatan tahun 2022/2023	II - 49
Tabel 2.38	Perkembangan APK dan APM SD/MI/Sederajat se Kalimantan Timur Tahun 2018-2021	II – 50
Tabel 2.39	Perkembangan APK dan APM SMP/MTs/Sederajat se Kalimantan Timur Tahun 2018-2021	II – 51
Tabel 2.40	Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA Sederajat se Kalimantan Timur Tahun 2014-2021	II – 51
Tabel 2.41	Fasilitas Kesehatan di Mahakam Ulu 2021-2022	II – 52
Tabel 2.42	Tenaga Kesehatan di Mahakam Ulu 2022	II – 53
Tabel 2.43	Perbandingan Indikator Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2017-2022 (%)	II – 55
Tabel 2.44	Perbandingan Indeks Gini se Provinsi Tahun 2011-2022	II – 56
Tabel 2.45	Jumlah Koperasi Tahun 2022	II – 58
Tabel 2.46	Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kalimantan Timur 2021	II – 59
Tabel 2.47	Indikator Pendidikan Mahakam Ulu Tahun 2021-2022	II – 60
Tabel 2.48	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Tahun 2022/2023	II – 61
Tabel 2.49	Rasio Murid, Guru, dan Sekolah Tahun 2022/2023	II – 61
Tabel 2.50	Status Akreditasi Sekolah Dasar Tahun 2019/2020	II – 61
Tabel 2.51	Status Akreditasi SMP Tahun 2019/2020	II – 62
Tabel 2.52	Jenjang Pendidikan Guru di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020	II – 64
Tabel 2.53	Angka Kesakitan Penduduk Tahun 2022	II – 67
Tabel 2.54	Status Kepemilikan Kartu Imunisasi Balita Tahun 2022	II – 67
Tabel 2.55	Balita dengan Imunisasi Lengkap Tahun 2022	II – 68
Tabel 2.56	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (km) Tahun 2019	II – 70
Tabel 2.57	Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (km) Tahun 2020	II – 71
Tabel 2.58	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang berwenang mengelolanya di Kabupaten Mahakam Ulu (Km) Tahun 2019	II – 71
Tabel 2.59	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (Km) 2019	II – 68
Tabel 2.60	Status Air Minum yang Dikonsumsi Rumah Tangga Tahun 2022	II – 73
Tabel 2.61	Rekapitulasi Kehilangan Air Rata-Rata Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	II – 75
Tabel 2.62	Luas Lantai Rumah Tahun 2022 (m2)	II – 78
Tabel 2.63	Status Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2022	II – 78
Tabel 2.64	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	II – 79
Tabel 2.65	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur	II – 81
Tabel 2.66	Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu	II – 81
Tabel 2.67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2022	II – 82
Tabel 2.68	Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2022	II – 83
Tabel 2.69	Perbandingan Tingkat Pengangguran se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)	II – 84
Tabel 2.70	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2012-2022	II – 85
Tabel 2.71	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2020-2022	II – 86
Tabel 2.72	Perkembangan IPM Perempuan, Tahun 2012-2022	II – 87
Tabel 2.73	Produksi Padi di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kalimantan Timur Tahun 2021-2022	II – 88
Tabel 2.74	Pasangan Usia Subur Tahun 2019	II – 92
Tabel 2.75	Penggunaan Alat Kontrasepsi 2019	II – 93

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.76	Peserta KB Aktif Tahun 2022	II – 93
Tabel 2.77	Perbandingan Investasi di Kalimantan Timur Tahun 2022	II – 94
Tabel 2.78	Penggunaan Listrik Sebagai Sumber Penerangan Tahun 2022	II – 95
Tabel 2.79	Nilai LQ Kabupaten Mahakam Ulu, 2018-2022	II – 97
Tabel 2.80	Nilai Shift-Share Kabupaten Mahakam Ulu, 2018-2022	II – 99
Table 2.81	Jumlah Desa dengan Ketersediaan Jaringan Komunikasi	II – 101
Tabel 2.82	Realisasi Investasi 2022 di Mahakam Ulu per Semester	II – 102
Tabel 2.83	Struktur Umur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Tahun 2022	II - 103
Tabel 2.84	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Per Bulan Pekerja Formal, Tahun 2022	II - 104
Tabel 2.85	Rata-rata Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja Informal Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2022	II - 104
Tabel 3.1	Tren Perolehan PAD 2016-2022	III – 2
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	III – 6
Tabel 3.3	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2015-2021	III – 7
Tabel 3.4	Analisis Neraca Kabupaten Mahakam Ulu	III – 9
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Aparatur	III – 11
Tabel 3.6	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024-2026	III – 15
Tabel 3.7	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2026.	III – 17
Tabel 3.8	Proyeksi Pembiayaan Daerah Periode 2024-2026	III – 18
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2026	III – 19
Tabel 3.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2026	III – 19
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV – 2
Tabel 4.2	Penentuan Isu Strategis Kab. Mahakam Ulu	IV – 36
Tabel 4.3	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Mahakam Ulu	IV – 60
Tabel 4.4	Arahan Pemanfaatan Ruang Kab. Mahakam Ulu	IV – 62
Tabel 4.5	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Ke-2 (2021-2025)	IV – 87
Tabel 4.6	Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu	IV – 89
Tabel 4.7	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026	IV – 94
Tabel 4.8	Arah Kebijakan Dan Fokus Pembangunan RPD Prov. Kalimantan Timur Untuk Kab. Mahakam Ulu	IV – 95
Tabel 4.9	Capaian TPB Kabupaten Mahakam Ulu	IV – 99
Tabel 4.10	Isu-Isu Strategis berdasarkan Hasil Kajian TPB	IV – 100
Tabel 5.1	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Mahakam Ulu	V – 1
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Mahakam Ulu	V – 12
Tabel 5.3	Keselarasan RPJMD dengan SDG's	V – 14
Tabel 5.4	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	V – 15
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Serta Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kab. Mahakam Ulu 2021-2026	VI – 3
Tabel 6.2	Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah	VI – 21
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kab. Mahakam Ulu Periode 2021-2026	VI – 24
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, Kabupaten Mahakam Ulu (Ribu Rupiah)	VII – 2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026	VII – 3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mahakam Ulu 2021 – 2026	VIII – 2

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu 2021 - 2026	VIII – 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan sebagai akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan.

Sebagai daerah yang baru terbentuk, berbagai tantangan dan kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik terus meningkat dan berubah secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di daerah. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan terutama sumber daya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dokumen perencanaan yang baik.

Perencanaan yang baik akan mampu memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan

daerah, memanfaatkan berbagai peluang sekaligus mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi dengan mengoptimalkan potensi yang ada.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Bagi Kabupaten Mahakam Ulu, dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yaitu 6 (enam) bulan setelah pasangan Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Yohanes Avun, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Kalimantan Timur. RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan dikarenakan adanya perubahan mendasar yang akan sangat berpengaruh pada proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Mahakam Ulu, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1) Hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, khususnya keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Renstra perangkat daerah;
2) Beberapa program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, belum mengakomodir perubahan sebagaimana yang

diatur dalam Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

3) Adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan yang dibentuk setelah RPJMD dijalankan, sehingga program serta anggaran belum terakomodir dalam RPJMD yang lama; dan
4) Penyesuaian dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian.

Beberapa hal yang melandasi Perubahan RPJMD ini sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya sesuai dengan amanat Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan pasal 264 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila (i). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri; (ii). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (iii). Apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, serta memiliki sisa masa berlaku tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Perubahan Renstra PD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan

tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
c. Landasan Operasional :
   1) Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
   2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
   3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
   5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
   6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur;
33) Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
35) Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No. 2 tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Mahulu tahun 2021-2026.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan Nasional

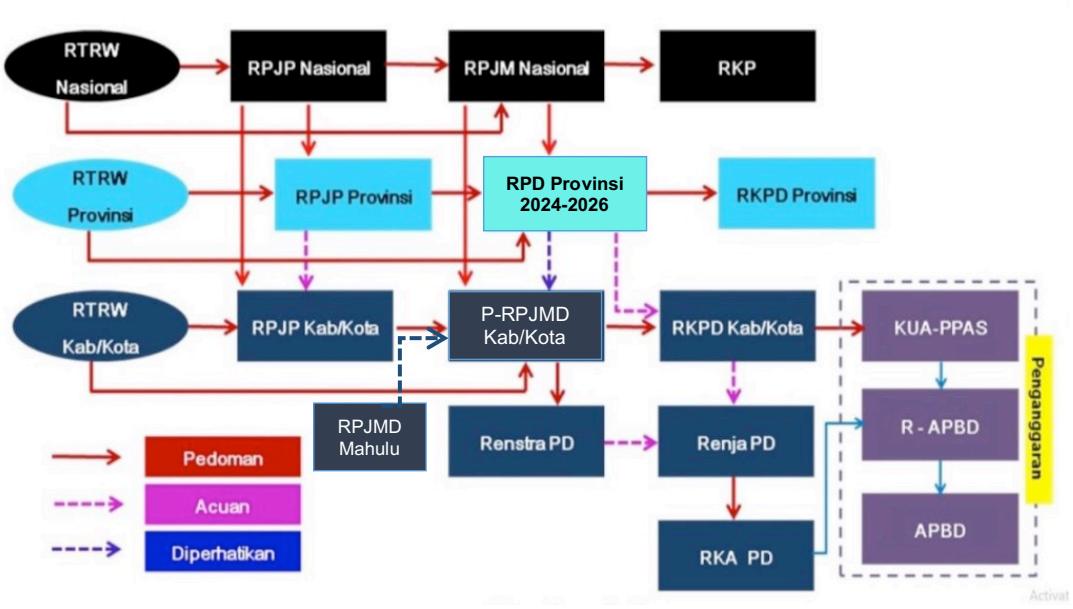

Hubungan antar dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Mahakam Ulu dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;

b) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan transisi atas dokumen RPJMD Provinsi Kaltimantan Timur 2018-2023;

c) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 merupakam jabaran RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu tahap ke-II;
d) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman/acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026. Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun;
e) Pada pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
f) Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian RKPD;
g) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mahakam Ulu. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Mahakam Ulu; dan
h) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah menyesuaikan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini yang

dihadapi Kabupaten Mahakam Ulu, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah:

1) Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
2) Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2024-2026;
3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Mahakam Ulu dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5) Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Mahakam Ulu yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Mahakam Ulu saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah

serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta

perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 ini

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ibukota Ujoh Bilang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Dengan luas sekitar 15.315 Km^2 atau kurang lebih 7,26% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu kawasan perbatasan darat yang secara geostrategik merupakan pintu gerbang dari wilayah Indoensia ke wilayah Malaysia (Serawak). Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah :

1. Sebelah Utara: Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh dan Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, serta Sarawak (Malaysia Timur);
2. Sebelah Timur: Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebelah Selatan: Desa Kelian Luar Kecamatan Long Iram dan Desa Tutung Kecamatan Linggang Bigung di Kabupaten Kutai Barat, serta Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung dan Desa Liang Nyering Kecamatan Sumber Barito di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebelah Barat: Desa Kariho Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Ulu Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mahakam Ulu

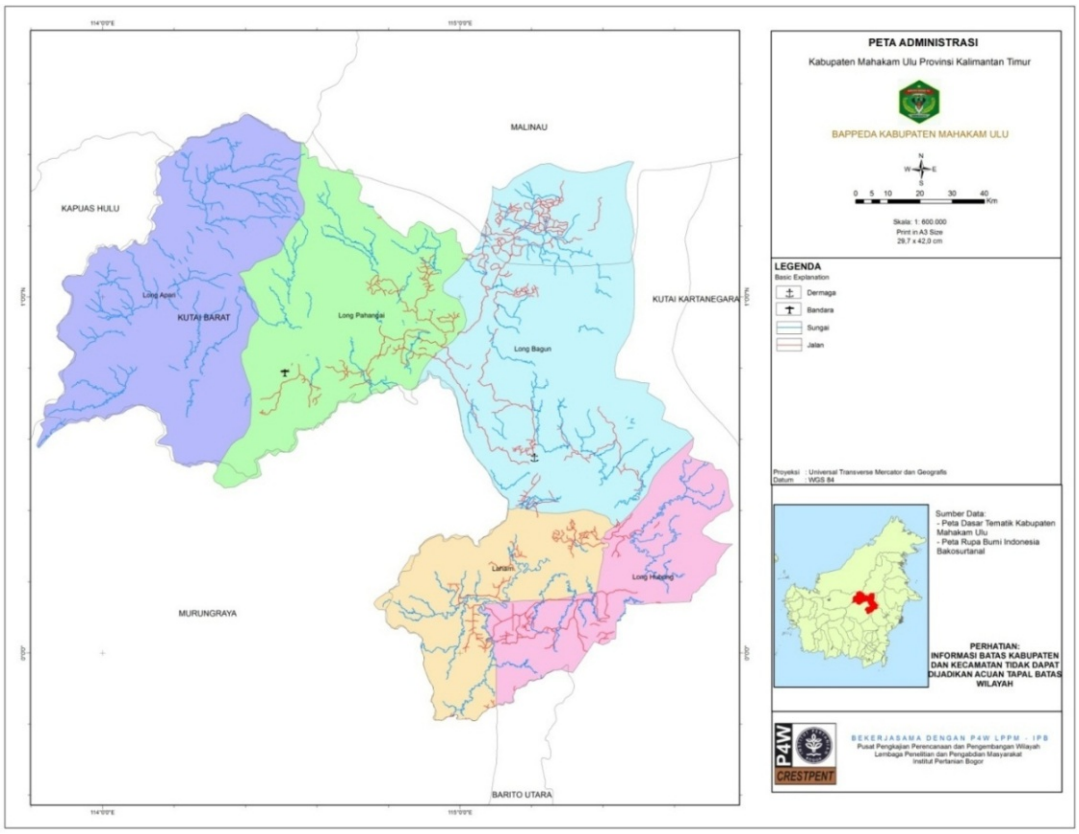

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

b. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113˚48'49" - 115°45'49" Bujur Timur, serta diantara 1˚31'05" Lintang Utara - 0˚09'00" Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Letak Geografis dan Luas Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kecamatan

Kecamatan	Bujur Timur	Lintang	Luas (km²)
1. Laham	114°46'05"-115°26'11"	0°24'LU-0°11'LU	901,80
2. Long Hubung	115°02'35"-115°45'49"	0°36'LU-0°09'LS	530,90
3. Long Bagun	114°53'35"-115°39'08"	1°23'LU-0°21'LU	4.971,20
4. Long Pahangai	114°22'54"-115°01'46"	1°26'LU-0°27'LU	3.420,40
5. Long Apari	113°48'49"-114°34'22"	1°31'LU-0°31'LU	5.490,70
Total	**15.315,00**		

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka 2023 dan RPJPD Mahakam Ulu 2025.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Desa

No	Kecamatan/Desa	Luas (Km²)
A	**Kecamatan Long Hubung**	**530,90**
	. Desa Mamahak Teboq	76,17
	. Desa Lutan	137,32
	. Desa Datah Bilang Ilir	21,24
	. Desa Datah Bilang Ulu	73.24
	. Desa Long Hubung	27,46
	. Desa Mata libaq	100,70
	. Desa Wana Pariq	16,55
	. Desa Tri Pariq Makmur	20,00
	. Desa Sirau	42,84
	. Desa Datah Bilang Baru	15,38
	. Desa Long Hubung Ulu	12,46
B	**Kecamatan Laham**	**901,80**
	. Desa Long Gelawang	137,32
	. Desa Muara Ratah	45,77
	. Desa Danum Paroy	197,75
	. Desa Laham	352,52
	. Desa Nyaribungan	168,44
C	**Kecamatan Long Bagun**	**4.971,20**
	. Desa Long Hurai	100
	. Desa Long Merah	60
	. Desa Mamahak Ilir	78,22
	. Desa Mamahak Ulu	996,208
	. Desa Long Melaham	880,29
	. Desa Ujoh Bilang	31,002
	. Desa Long Bagun Ilir	92,48
	. Desa Batoq Kelo	1.940
	. Desa Batu Majang	213,66
	. Desa Long Bagun Ulu	567,04
	. Desa Rukun Damai	12,3
D	**Kecamatan Long Pahangai**	**3.420,40**
	. Desa Delang Kerohong	35
	. Desa Long Pakaq	449,85
	. Desa Pulau Lanting	161,27
	. Desa Lirung Ubing	66,31
	. Desa Tanjung Isuy	146,27
	. Desa Long Isun	781,04
	. Desa Naha Aruq	292,55
	. Desa Long Pahangai II	313,71
	. Desa Long Pahangai I	46,00
	. Desa Long Tuyoq	126,95
	. Desa Liu Malang	146,27
	. Desa Long Pakaq Baru	126,68
	. Desa Long Lunuk Baru	31,21
E	**Kecamatan Long Apari**	**5.490,70**
	. Desa Long Penaneh I	446,05
	. Desa Tiong Ohang	849,62
	. Desa Long Keriok	382,33
	. Desa Long Penaneh III	223,47

No	Kecamatan/Desa	Luas (Km²)
	. Desa Long Penaneh II	312,41
	. Desa Tiong Bu'u	424,81
	. Desa Naha Buan	212,41
	. Desa Naha Tifab	403,57
	. Desa Long Apari	1.236,47
	. Desa Noha Silat	999,00

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2023.

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar 0 – 1.500 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan kemiringan antara 0 – 25 persen. Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai pegunungan yang membujur dari Utara ke Selatan di bagian Barat Laut berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter dpl dengan kemiringan 30 persen. Pegunungan ini terjadi karena peristiwa geologi berupa lipatan dan sisipan sehingga bentuknya berjalur-jalur sejajar dengan garis pantai. Dengan kondisi fisiografi dan topografi yang demikian, maka pemukiman penduduk lebih banyak dijumpai di wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Mahakam dengan kondisi yang lebih datar.

Kecamatan Long Bagun, Long Apari dan Long Pahangai berada pada ketinggian lebih dari 100 m dpl, sedangkan wilayah kecamatan lainnya sebagian besar terletak di bawah ketinggian 100 m dpl. Daerah-daerah yang terjal sebagian besar terletak di wilayah bagian Utara yang meliputi wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Dengan kondisi topografi yang demikian, diharapkan wilayah di bagian utara menjadi pelindung bagi kawasan di selatan yang kondisi pembangunannya lebih berkembang.

Tabel 2.3a
Luas Kelas Lereng Kabupaten Mahakam Ulu

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)
1	0 - 2 %	11.184,25
2	2 - 8 %	8.375,27
3	9 - 15 %	18.944,65
4	16 - 25 %	954.339,26
5	26 – 40%	50.363,75
6	41 – 60%	842.800,75
7	>60%	-

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka, 2023.

Tabel 2.3b
Luas Kelas Lereng Kabupaten Mahakam Ulu Per Kecamatan

Kecamatan	Kemiringan					
	0 - 2 %	2 - 8 %	9 - 15 %	16 - 25 %	26 – 40%	41 – 60%
Laham	1 377,87	4 958,16	6 038,69	183 269,55	10 503,29	14 750,04
Long Hubung	378,63	1 500,25	-	207 687,93	4 804,41	17 041,13
Long Bagun	4 595,16	1 916,86	12 905,96	242 244,93	27 684,98	218 133,07
Long Pahangai	2 808,37	-	-	203 537,49	514,06	227 867,39
Long Apari	2 024,23	-	-	117 599,37	6 857,02	365 009,13
Mahakam Ulu	**11 184,25**	**8 375,27**	**18 944,65**	**954 339,26**	**50 363,75**	**842 800,75**

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka, 2023.

Tabel 2.4
Nama dan Tinggi Gunung di Kabupaten Mahakam Ulu

No	Nama Gunung	Kecamatan	Tinggi (m)
1	Batu Putih	Long Hubung	964,7
2	Kiau	Long Bagun	1.759,5
3	Uduk	Long Bagun	679,8
4	Ular	Long Bagun	775,3
5	Keramo	Long Bagun	1.360,1
6	Suling	Long Bagun	1.178,1
7	Tumo	Long Bagun	1.042,7
8	Bulu Uk	Long Bagun	1.286,7
9	Perak	Long Bagun	1.318,7
10	Payang	Long Bagun	1.212,5
11	Wayang	Long Bagun	1.322,5
12	Punjung	Long Bagun	1.421,7

13	Batu Busung	Long Bagun	1.647,7
14	Batu Ayau	Long Bagun	1.457,7
15	Aca	Long Apari	1.123
16	Tuko Poso	Long Apari	1.279
17	Tukon Pohan	Long Apari	1.417
18	Len	Long Hubung	659

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka, 2023.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mahakam Ulu

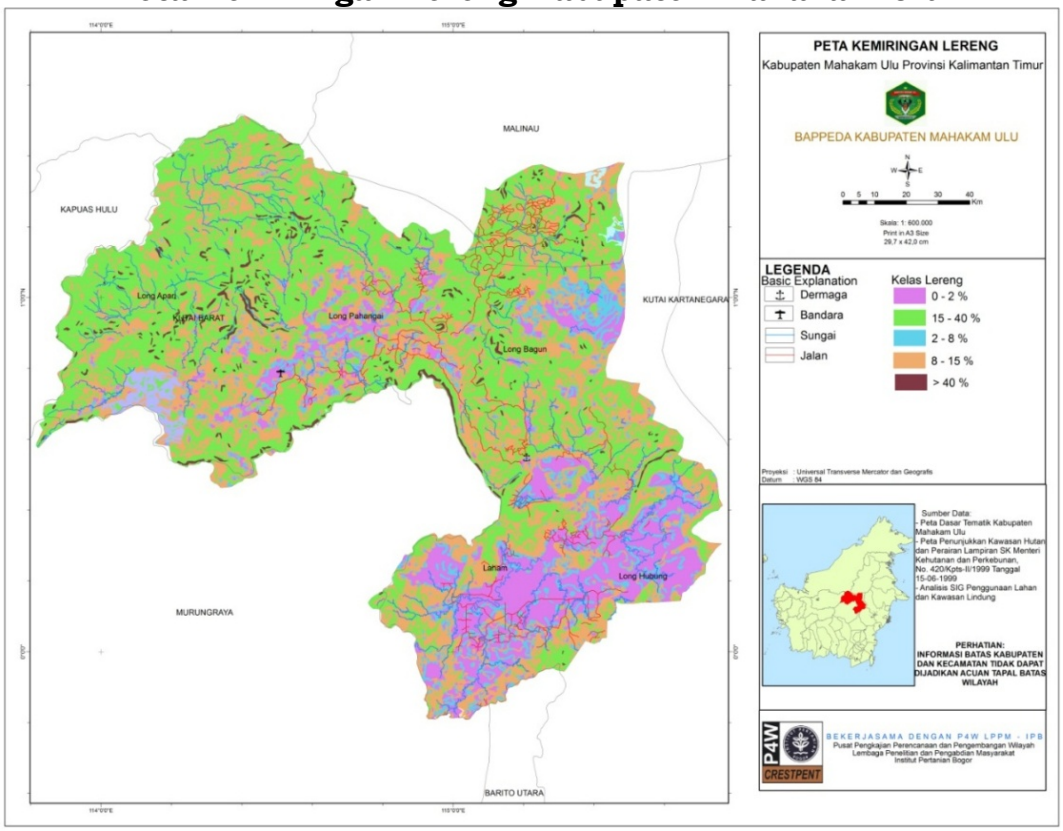

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

d. Hidrologi

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sepuluh sungai besar. Sungai-sungai tersebut terdapat di seluruh kecamatan, dimana masing-masing kecamatan dialiri oleh dua sungai. Selain untuk pertanian, sungai juga menjadi alat transportasi yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah lain seperti Kabupaten Kutai Barat. Selain sungai,

secara geologis di Mahakam Ulu juga terdapat empat gunung: tiga diantaranya terdapat di Kecamatan Long Apari; dan satu di Kecamatan Long Hubung. Dari keempat gunung tersebut, gunung Tukon Pohan merupakan gunung tertinggi yaitu 1.417 meter dpl sedangkan gunung Len yang terdapat di Kecamatan Long Hubung merupakan gunung terendah dengan ketinggian 659 meter dpl.

Sungai-sungai yang mengalir melalui Kabupaten Mahakam Ulu ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Sungai-sungai di Kabupaten Mahakam Ulu

Kecamatan	Jumlah Sungai	Total Panjang (Km)
Laham	12	390,04
Long Hubung	11	256,58
Long Bagun	88	1357,63
Long Pahangai	58	982,21
Long Apari	76	1269,97
Jumlah	245	4256,43

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka, 2023.

Gambar 2.3
Peta lokasi Sungai di Kabupaten Mahakam Ulu

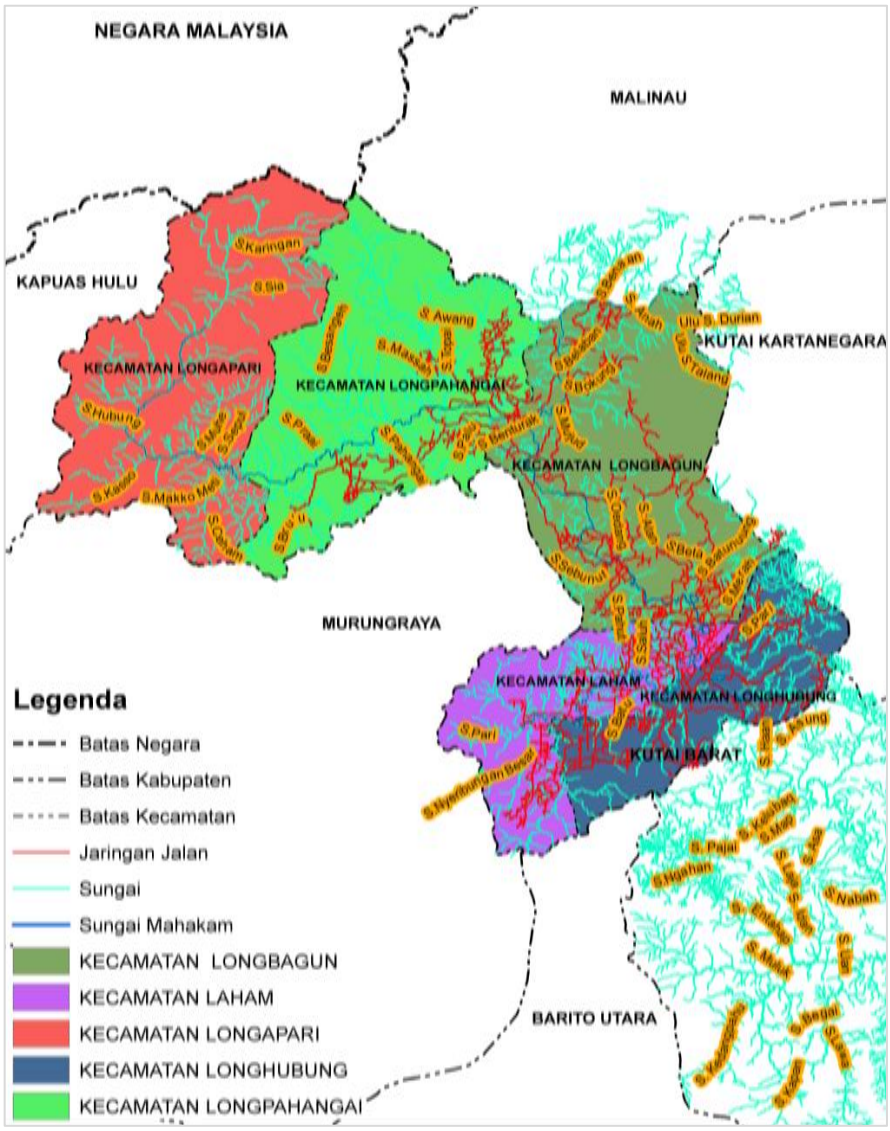

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Keberadaan sepuluh sungai besar tersebut berpotensi sebagai sumber air baku air bersih atau air minum. Potensi ini merupakan potensi besar untuk menyediakan sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih maupun air minum.

e. Geologi

Struktur geologi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh batuan sedimen liat berlempung. Disamping itu terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwarter. Formasi batuan endapan utama terdiri dari batuan pasir kwarsa dan batuan liat. Dari struktur geologi, di daerah ini banyak dijumpai patahan dan lipatan yang pada umumnya terdapat di wilayah pantai. Beberapa formasi geologi di Provinsi Kalimantan Timur antara lain utamanya Palau Balang Beds, Balikpapan Beds, Pemaluan Beds dan Kampung Baru Beds.

Tabel 2.6
Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Nama Formasi	Luas (Ha)
1	Ang.Batupasir Lemuning	7.722
2	Ang.Btgping Batubelah	6.816
3	Ang.batupasir Lenmuning	2.196
4	Ang.btgping Ritan Fmhaloq	4.267
5	Bat.Gunung Api Metulang	253.707
6	Bat.Gunung Api Nyaan	11.092
7	Batuan Terobosan Sintang	4.129
8	Endapan Aluvial	21.271
9	Fm.Haloq & Fm.batu Kelau	37.056
10	Fm.Ujoh Bilang	169.548
11	Fm.Ujoh bilang	20.331
12	Formasi Balikpapan	341
13	Formasi Batu Ayau	145.006
14	Formasi Haloq	182.832
15	Formasi Kelinjau	17.211
16	Formasi Kuaro	39.795
17	Granit Alan	5.232
18	Granit Era	195
19	Granit Topai	6.275
20	Kelompok Embaluh	403.163
21	Kelompok Selangkai	189.291
22	Komplek Kapuas	1.261
23	Komplek Mafik Danau	2.763
Total		**1.531.500**

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Mahakam Ulu

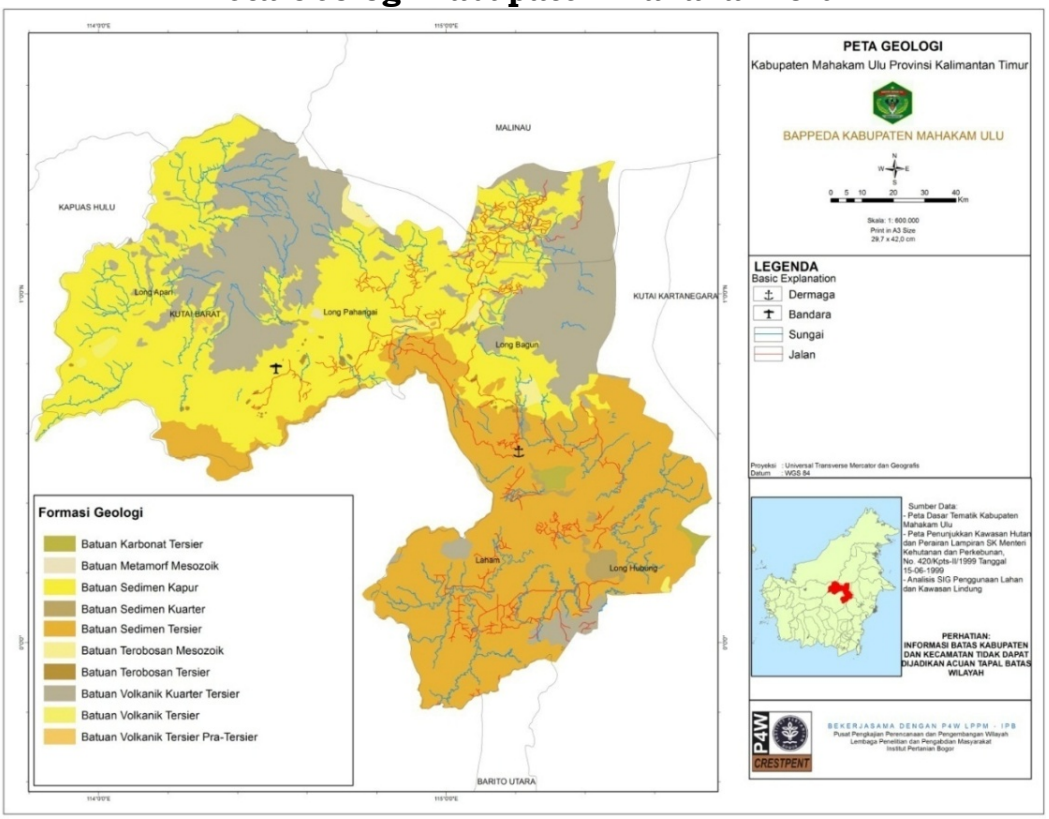

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Komposisi sifat tanah dan karakteritik lingkungan fisik lahan merupakan instrumen utama dalam menilai potensi sumberdaya lahan sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pengembangan basis data unit lahan secara simultan diturunkan dari unit parameter dan/atau komposisi sifat fisik kimia tanah uji analisis laboratorium dan karakteristik fisik lingkungan lahan atas pertimbangan dasar karakteristik tingkat homogenitas dan kompleks lahan sebagai informasi in-situ. Satuan peta tanah Kabupaten Mahakam Ulu menurut kegiatan Kajian Masterplan Pertanian Kutai Barat telah mempertimbangkan parameter (i) elevasi lahan, (ii) batuan utama pembentuk tanah, (iii) sebaran jenis tanah, dan (iv) tingkat kelerengan.

Pertimbangan tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai satuan peta tanah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, dimana dengan skala informasi 1:50.000, diperoleh sebaran 9 unit lahan, yang menggambarkan karakteritik fisik alami. Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 menyajikan informasi satuan peta tanah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, sementara peta sebarannya tersaji pada Gambar 2.5.

Tabel 2.7
Keterangan Kelas SPT, Kabupaten Mahakam Ulu

SPT	Klasifikasi Tanah	Sub Relief	Bahan Induk
SPT 1	Dystrudepts Eutrudepts	Pegunungan Tektonik	Sedimen dan vulkanik
SPT 2	Hapludults Dystrudepts	Perbukitan tektonik	Sedimen
SPT 3	Endoaquepts Sulfaquents	Basin Aluvial (Lakustrin)	Aluvium dan Organik
SPT 4	Hapludults Dystrudepts	Pegunungan Tektonik	Sedimen
SPT 5	Hapludults Dystrudepts	Perbukitan tektonik	Sedimen
SPT 6	Hapludults Dystrudepts	Dataran Tektonik	Sedimen
SPT 7	Endoaquepts Dystrudepts	Jalur Aliran Sungai	Aluvium
SPT 8	Hapludults Plinthudults	Dataran Tektonik	Sedimen
SPT 9	Haprendolls Hapludalfs	Perbukitan Karst	Batu gamping

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Tabel 2.8
Luas Unit Tanah Kabupaten Mahakam Ulu

Kecamatan	SPT 1	SPT 2	SPT 3	SPT 4	SPT 5	SPT 6	SPT 7	SPT 8	SPT 9
Laham	-	2.549	-	5.852	2.462	-	79.317	-	-
Long Apari	267.003	19.946	9.022	-	13.619	77.648	161.832	-	-
Long Bagun	-	12.897	-	60.777	71.790	51.704	297.603	-	2.349
Long Hubung	-		-	-	7.414	2.109	43.353	-	214
Long Pahangai	-	27.237	-	-	20.761	110.821	178.348	4.873	-
Total	**267.003**	**62.629**	**9.022**	**66.629**	**116.046**	**242.282**	**760.453**	**4.873**	**2.563**
%	**17,43**	**4,09**	**0,59**	**4,35**	**7,58**	**15,82**	**49,65**	**0,32**	**0,17**

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Gambar 2.5
Satuan Peta Tanah (SPT) Kabupaten Mahakam Ulu

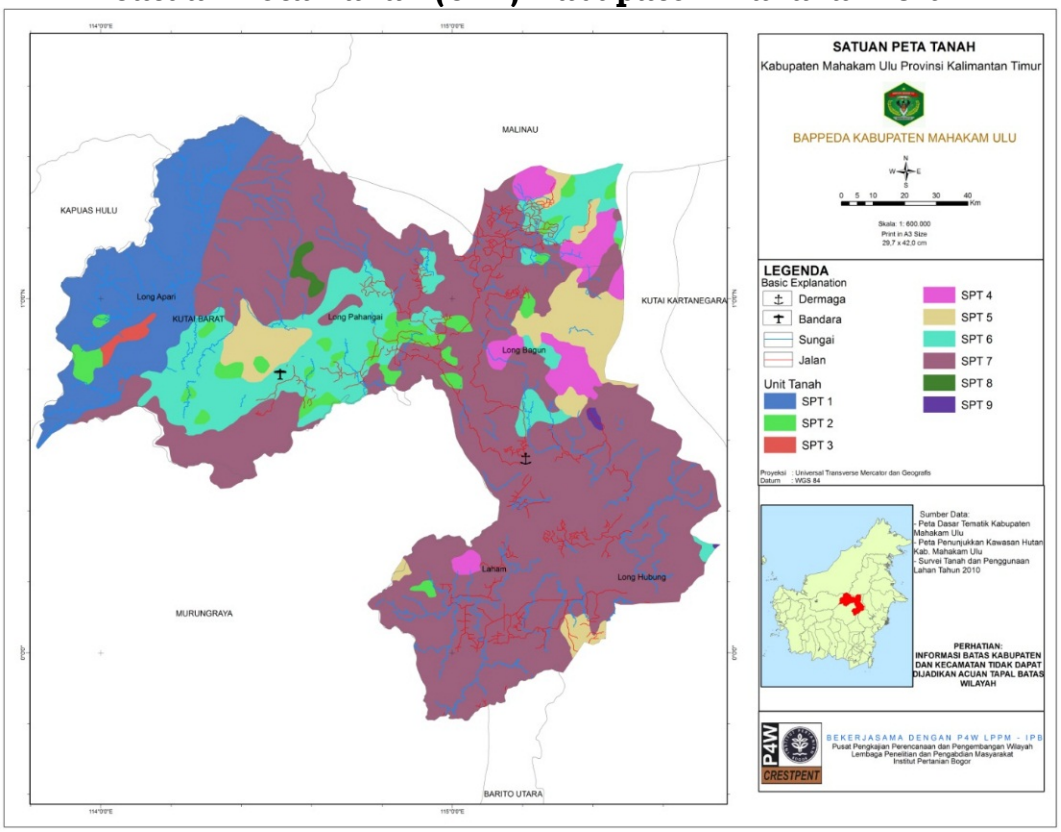

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Potensi lahan di Kabupaten Mahakam Ulu dapat diketahui dari hasil evaluasi tingkat kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah dalam menyediakan kondisi lingkungan untuk mendukung pertumbuhan optimal tanaman. Kesuburan tanah ini merupakan hasil kombinasi dari tiga sifat utama tanah, yaitu sifat fisik, kimia dan biologi. Dalam pelaksanaan evaluasi lahan umumnya status kesuburan tanah didekati berdasarkan kombinasi dari lima sifat kimia tanah utama yang sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu kapasitas tukar kation (KTK), kejenuhan basa (KB), kandungan P total, kandungan K total, dan kandungan C-organik tanah.

Kriteria penilaian sifat kimia tanah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Analisis Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk (Balai Penelitian Tanah, 2005). Hasil penilaian sifat-sifat kimia tanah dan status kesuburan tanah Kabupaten Mahakam Ulu dapat merujuk pada kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Data kesuburan yang digunakan bersumber dari data sekunder hasil survei kegiatan penyusunan masterplan pertanian Kabupaten Kutai Barat. Selain tujuan praktikal untuk penentuan status kesuburan tanah, penilaian sifat-sifat kimia-fisik tanah digunakan pula untuk mengetahui kadar dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman.

Berdasarkan data pada Tabel 2.9 diketahui bahwa secara umum tanah-tanah di Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai status kesuburan sangat rendah. Hal ini disebabkan tanah-tanah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar berasal terutama dari bahan induk sedimen yang bersifat masam dan bertekstur pasir. Rendahnya tingkat kesuburan tanah dicirikan oleh kandungan fosfat tersedia yang rendah, dan kadar unsur hara esensial N dan K yang rendah sampai sangat rendah. Pada daerah bergelombang dan berbukit umumnya solum tanah dangkal sampai sedang (<40 cm) dan dibeberapa tempat ditemukan batuan di permukaan. Untuk daerah yang sesuai bila diusahakan sebagai lahan pertanian dengan hasil optimal diperlukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, seperti pemupukan dan penambahan bahan organik.

Selain kesuburan tanah rendah, faktor lain yang akan membatasi kesesuaian lahan adalah kemiringan lereng yang umumnya berbukit dan bergunung, terutama di bagian utara, yaitu di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Faktor ini terkait erat dengan potensi erosi yang dapat terjadi apabila lahan-lahan dengan kemiringan curam diusahakan untuk areal pertanian tidak disertai dengan tindakan konservasi tanah yang memadai.

Tabel 2.9
Sifat Fisik dan Sifat-sifat Kimia Tanah Serta Status Kesuburan Tanah di Kabupaten Mahakam Ulu

No.	SPT	Tekstur			pH H_2O	C-org	N-tot	(C/N)	P	K	KTK	KB	Status Kesuburan
		Pasir	Debu	Liat									
1	SPT 1	52	12	36	4,9	3,95	0,31	13	196	7	5,37	12	
		Liat berpasir			Sm	T	S	S	ST	SR	R	SR	SR
2	SPT 2	36	29	35	4,4	2,41	0,19	13	4	6	3,57	5	
		Lempung berliat			Sm	S	R	S	SR	SR	SR	SR	SR
3	SPT 3	61	19	20	4,5	1,07	0,09	12	3	7	5,51	13	
		Lempung liat berpasir			Sm	R	SR	S	SR	SR	R	SR	SR
4	SPT 4	60	23	17	5,0	0,17	0,02	9	3	5	3,63	8	
		Lempung liat berpasir			Sm	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	SR
5	SPT 5	52	10	38	4,3	2,58	0,17	15	6	7	7,10	13	
		Liat berpasir			Sm	S	R	S	SR	SR	R	SR	SR
6	SPT 6	27	45	28	4,6	0,55	0,05	11	14	13	7,78	12	
		Pasir berlempung			Sm	SR	SR	S	R	R	R	SR	SR
7	SPT 7	53	32	15	4,7	2,90	0,21	14	144	8	3,83	13	
		Lempung berpasir			Sm	S	S	S	ST	SR	SR	SR	SR
8	SPT 8	36	29	35	29	35	4,4	2,41	0,19	13	4	6	
		Lempung berliat			Sm	S	R	S	SR	SR	SR	SR	SR
9	SPT 9	60	23	17	23	17	5,0	0,17	0,02	9	3	5	
		Lempung liat berpasir			Sm	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	SR

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Keterangan:

SPT=Satuan Peta Tanah; KTK=kapasitas tukar kation; KB=kejenuhan basa; SM=sangat masam; M=masam; SR=sangat rendah; R=rendah; S=sedang; T=tinggi

f. Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori iklim tropika humida dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan April dan terendah di bulan Agustus serta tidak menunjukkan adanya bulan kering atau sepanjang bulan dalam satu tahun selalu terdapat sekurang-kurangnya tujuh hari hujan. Karena terletak di daerah khatulistiwa, maka iklim Kabupaten Mahakam Ulu dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei - Oktober. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim angin barat hujan turun sekitar sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim timur hujan relatif kurang, hal ini terjadi pada sekitar bulan April sampai bulan September. Meskipun demikian, dalam tahun-tahun terakhir ini tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan yang jauh lebih panjang.

Tabel 2.10
Sebaran Curah Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu

No	Kecamatan	Curah hujan (mm/tahun)		
		2.800-3.000	3.200-3.400	3.400-3.600
1	Laham		90.180	
2	Long Apari		512.194	36.876
3	Long Bagun	2.381	494.739	
4	Long Hubung	15.085	38005	
5	Long Pahangai		342.040	
Total		**17.466**	**1.477.158**	**552.006**

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Temperatur rendah terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari, sedangkan temperatur tinggi terjadi antara bulan Agustus sampai dengan bulan September. Secara umum Kabupaten Mahakam Ulu beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 22,8°C sampai dengan 34,8°C dengan rata-rata 22,9°C. Selain itu sebagai daerah beriklim tropis dengan habitat hutan yang luas, Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai kelembaban udara relatif tinggi. Kelembaban udara paling rendah sebesar 50,2 persen yang dipantau melalui Stasiun Meteorologi Samarinda, sedangkan yang paling tinggi sebesar 97,8 persen dengan rata-rata 76,9 persen yang terpantau di Stasiun Meteorologi Balikpapan. Kedua stasiun tersebut merupakan stasiun klimatologi terdekat dari Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.11
Rata-rata Curah Hujan per Hari dalam Satu Bulan

Kecamatan	Rata-rata Curah Hujan per Hari											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1. Long Hubung	0	16	12	19	16	15	18	14	13	16	17	19
2. Long Bagun	16	0	20	21	21	9	0	0	0	0	0	0
3. Long Pahangai	16	17	19	17	16	9	0	0	0	0	0	0
4. Long Apari	22	17	26	25	22	8	8	6	5	18	25	12
5. Laham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata	**10,8**	**10,0**	**15,4**	**16,4**	**15,0**	**8,2**	**5,2**	**4,0**	**3,6**	**6,8**	**8,4**	**6,2**

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Tabel 2.12
Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Curah Hujan (mm)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Long Hubung	582	519	500	0	0	0	0	0	0	520	409	545
2. Long Bagun	697	587	1500	603	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Long Pahangai	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0
4. Long Apari	650	423,5	458	561	0	0	0	0	0	435	25	164,5
5. Laham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Tabel 2.13a
Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Hari Hujan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1. Long Hubung	19	20	19	0	0	0	0	0	0	16	17	19
2. Long Bagun	16	16	20	21	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Long Pahangai	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
4. Long Apari	23	22	21	24	0	0	0	0	0	18	25	12
5. Laham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Tabel 2.13b
Suhu dan Kelembaban Setiap Bulan Tahun 2022

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	21,1	28,7	34,1	49	77,2	98
Februari	22,8	28,8	34,8	49	75,3	97
Maret	22,4	28,8	35,1	52	77,6	98
April	22,8	29,2	35,2	50	76,4	98
Mei	22,8	29,5	34,8	47	76,6	98
Juni	22,8	28,9	35	51	78,3	97
Juli	23,2	28,7	34,4	54	78,5	98
Agustus	22,6	28,8	34,2	52	77,7	98
September	23,2	28,7	34,8	52	78,2	98
Oktober	23,4	29,1	34,6	53	76,5	97
November	23,2	28,9	35,5	50	76,8	98
Desember	23,4	29,4	35,6	43	73,7	98
Rata-rata	22,8	22,9	34,8	50,2	76,9	97,8

Sumber: Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka, 2023.

Gambar 2.6
Peta Sebaran Curah Hujan di Kabupaten Mahakam Ulu

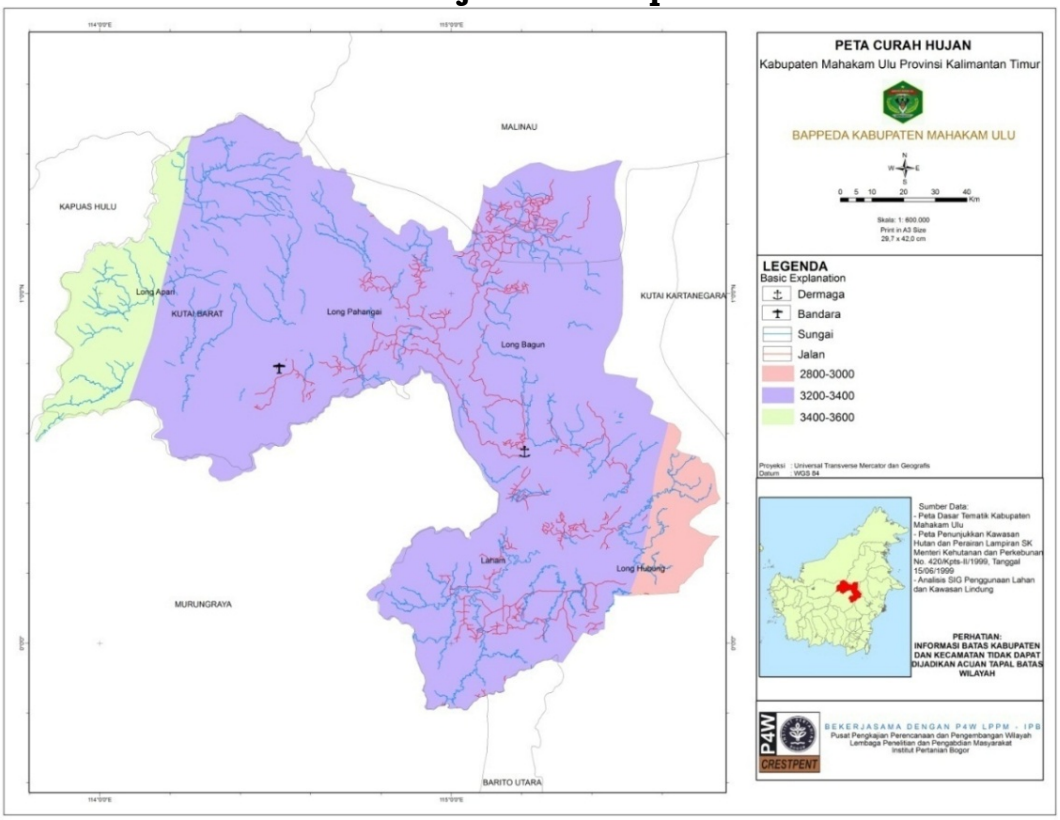

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

g. Penggunaan Lahan

Kondisi penutupan lahan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu secara umum merupakan penutupan vegetasi, hanya saja vegetasi hutannya sudah berkurang sangat banyak bila dibandingkan dengan kondisi tiga dekade sebelumnya. Sebagian besar hutannya sudah mengalami kegiatan pembalakan hutan dengan jumlah pohon yang semakin menurun. Sementara itu, hutan-hutan yang belum mengalami kegiatan pembalakan hutan terletak di wilayah pegunungan atau di wilayah sebelah Utara. Hutan yang masih hijau termasuk dalam status hutan lindung. Sementara itu, tutupan lahan yang berupa hutan sekunder dan semak belukar umumnya berada di hutan produksi. Hutan yang masih hijau termasuk hutan konservasi maupun hutan lindung ini kurang lebih berkisar 668.821 Ha dengan

hutan tanaman sekitar 12.092 Ha, dari yang seharusnya berupa kawasan hutan ± 758.526 Ha. Hutan produksi memiliki luas ± 107.316 Ha. Lahan yang berupa hutan sekunder dan semak belukar seluas ± 1.020.529 Ha dan rawa-rawa seluas 152 Ha. Kawasan hutan produksi seharusnya menjadi kawasan hutan produktif, namun kenyataan di lapangan hanyalah berupa hutan sekunder ataupun semak belukar.

Tabel 2.14
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Belukar	125.801
2	Belukar Rawa	105
3	Hutan Primer	372.886
4	Hutan Rawa Sekunder	47
5	Hutan Sekunder	964.430
6	Hutan Tanaman	12.092
7	Pertanian lahan Kering Campur Semak	56.099
8	Tanah Terbuka	40
Total		**1.531.500**

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

Gambar 2.7
Peta Penutupan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu

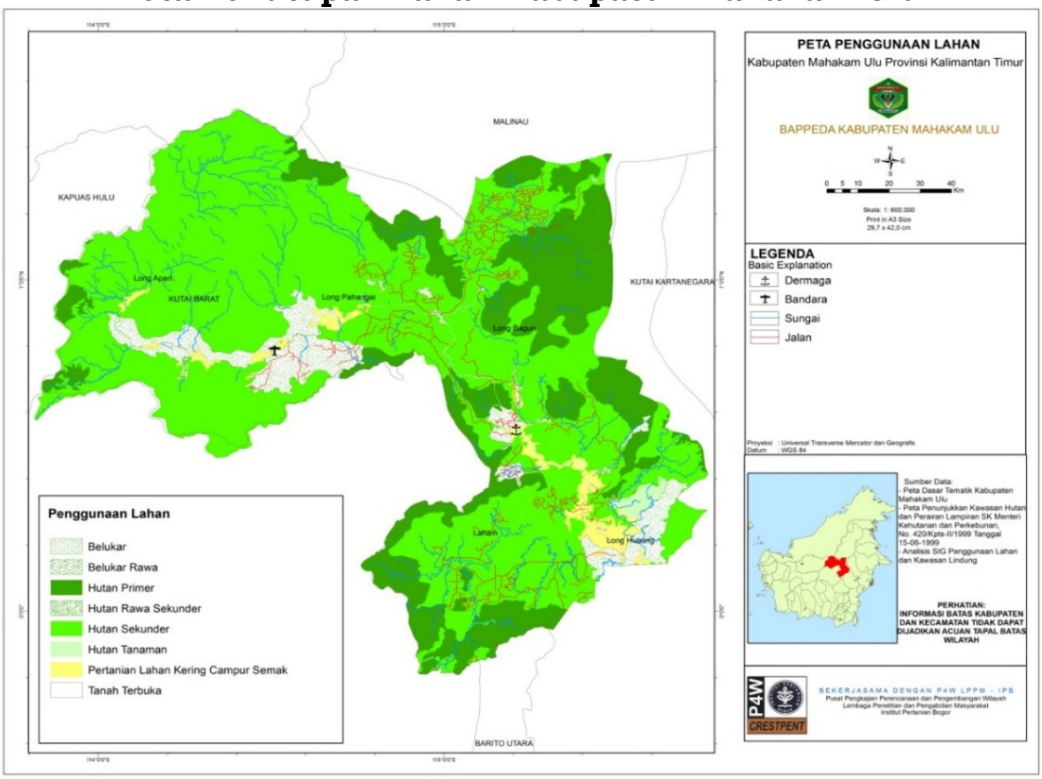

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih didominasi kawasan hutan, yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 668.821 Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 556.185 Ha dan kawasan hutan produksi seluas 107.316 Ha, sehingga luas total kawasan hutan adalah 86,99 persen dari luas Kabupaten.

Hutan lindung di Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar masih didominasi oleh vegetasi alami yang terdapat di daerah hulu sungai Mahakam dan merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*). Hutan produksi terbatas masih didominasi oleh vegetasi alami yang keberadaannya tersebar di wilayah Utara, sedangkan hutan produksi yang keberadaan vegetasinya terdiri dari tanaman kayu dan semak belukar juga terletak di sebelah Utara.

Gambar 2.8
Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

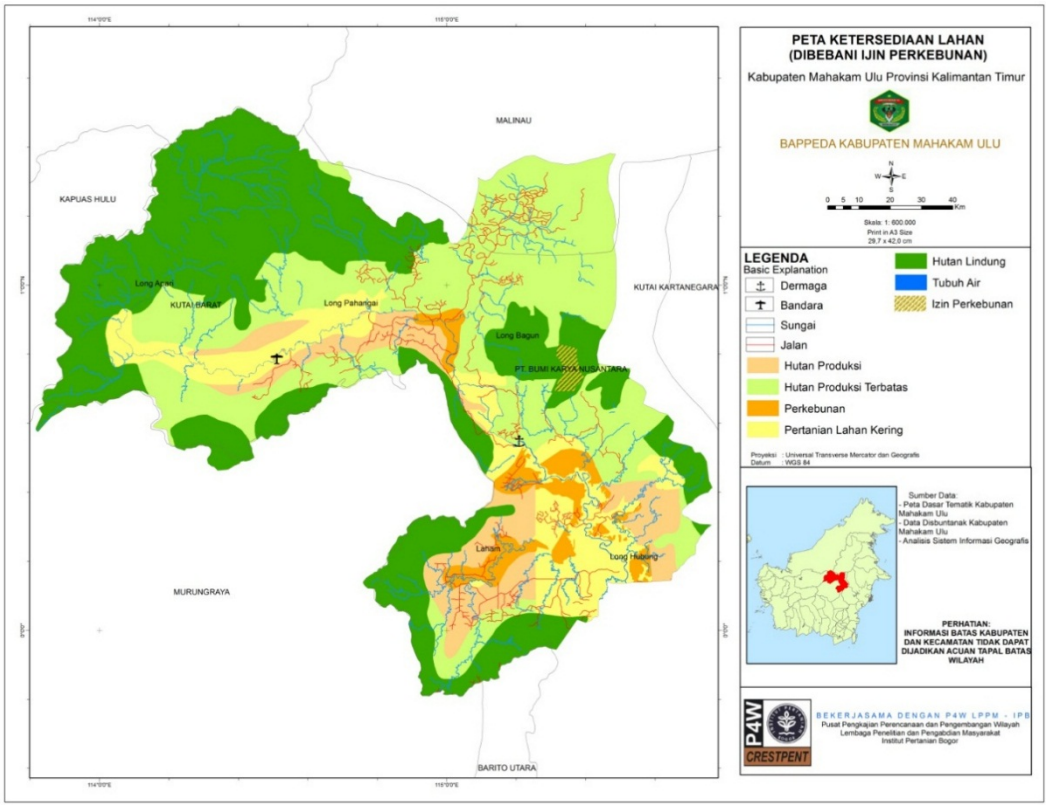

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Tabel 2.15
Ketersediaan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu

No	Kecamatan	HL	HP	HPT	KBN	APL	TA
1	Laham	29.855	25.788	9.138	14.655	10.379	365
2	Long Apari	379.629	6.268	117.686		44.844	613
3	Long Bagun	104.845	13.694	301.521	32.599	42.643	1.818
4	Long Hubung	13.476	10.217	7.286	8.228	13.321	562
5	Long Pahangai	141.016	51.349	120.554	4.549	23.467	1.135
Total		**668.821**	**107.316**	**556.185**	**60.031**	**134.654**	**4.493**

Sumber: Dokumen RPJPD Mahakam Ulu 2016-2025.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta industri dengan karakteristik yang berbeda jauh dengan Kabupaten Kutai Barat selaku kabupaten induk. Potensi Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dan diyakini akan berkembang pesat. Dari sub sektor pertanian tanaman pangan, luas lahan padi terbesar berada di kecamatan Long Pahangai dan terkecil di kecamatan Laham. Hal ini membawa konsekuensi produksi padi terbesar juga berasal dari kecamatan Long Pahangai dan terkecil berasal dari kecamatan Laham yaitu. Untuk sub sektor perkebunan, terdapat tiga jenis tanaman perkebunan yang dominan yaitu karet, kelapa sawit, dan kakao.

Dari ketiga jenis tanaman perkebunan tersebut, tanaman kelapa sawit memiliki area terluas, berikutnya adalah tanaman kakao. Menurut kecamatan, areal tanaman karet terluas berada di kecamatan Long Pahangai dan tersempit berada di kecamatan Laham. Untuk tanaman kelapa sawit luas area di semua kecamatan relatif tidak banyak perbedaan. Untuk tanaman kakao, kecamatan Long Pahangai memiliki area terluas dengan produksi terbesar. Dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu padi dan tanaman perkebunan masih sangat potensial untuk dikembangkan. Pengembangan

pertanian merupakan program strategis yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi bagi pemerintah daerah. Luas panen padi pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan, namun produktifitas padi mengalami peningkatan dari 2,329 ton/ha menjadi 4,014 ton/ha sedangkan pula produksi padi mengalami penurunan dari 1081,75 ton menjadi 932,09 ton. Tahun 2022 luas panen kembali mengalami penurunan menjadi 201,45 ha dan produksi serta produktivitas juga mengalami penurunan hamper 50%.

Tabel 2.16
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2022

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2020	464,44	1081,75	2,329
2021	232,22	932,09	4,014
2022	201,45	489,42	2,429

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023.

Kondisi perkebunan di Mahakam Ulu untuk kelapa sawit dan karet menunjukkan peningkatan luasan selama 2021-2022 sedangkan untuk kakao tidak berubah. Untuk kelapa sawit meski menunjukkan peningkatan areal luas, namun produksinya menunjukkan penurunan selama 2021-2022 dari 127.323 ton menjadi 124.824 ton sedangkan produksi kakao meningkat dari 288 ton di tahun 2021 menjadi 339 ton di tahun 2022.

Tabel 2.17
Perkembangan Perkebunan Mahakam Ulu

Komoditi	2021		2022	
	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
Karet	1.763	n.a.	1.837	n.a.
Kelapa Sawit	41.095	127.323	61.651	124.824
Kakao	2.329	288	2.329	339

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023.

Disamping hasil perkebunan, peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal pada tahun 2021, populasi ternak di Mahakam Ulu didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 76.000 ekor, ayam kampung 62.561 ekor dan babi 1.036 ekor. Disamping itu, terdapat populasi kambing sebanyak 93 ekor dan sapi potong sebanyak 409 ekor yang tersebar di seluruh kecamatan. Di tahun 2022 jumlah ayam kampung naik menjadi 64.438 ekor, babi sebanyak 1.067 ekor, sapi potong sebanyak 421 ekor, dan kambing sebanyak 96 ekor.

Tabel 2.18
Populasi Ternak di Kabupaten Mahakam Ulu (ekor), Tahun 2020-2022

No	Hewan	2020	2021	2022
1	Babi	2.319	1.036	1.067
2	Sapi Potong	327	409	421
3	Kambing	177	93	96
4	Ayam Kampung	63.407	62.561	64.438
5	Ayam Ras Pedaging	75.085	76.000	n.a.

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu 2022 dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023

Gambar 2.9
Peta Potensi Kabupaten Mahakam Ulu

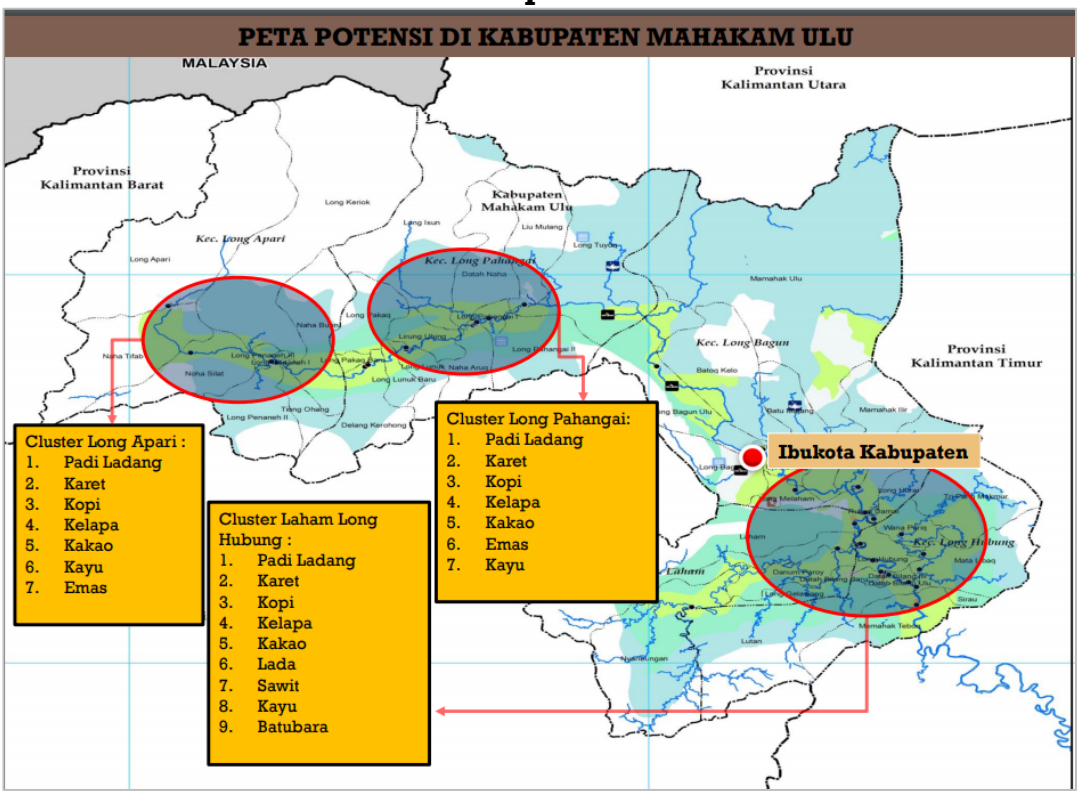

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, 2019.

Melihat kondisi geografi Kabupaten Mahakam Ulu, sektor tanaman perkebunan masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan khususnya tanaman karet. Beberapa tanaman jenis lain seperti kakao, lada, dan kopi juga memiliki potensi seperti di Kabupaten Kutai Barat dimana tingkat produksi tanaman tersebut bagus. Selain itu, tanaman kelapa sawit juga belum berkembang dengan baik di Kabupaten Mahakam Ulu, sangat berbeda dengan di Kabupaten Kutai Barat yang berkembang dengan pesat. Melihat kondisi geografis yang tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Kutai Barat, tanaman kelapa sawit dan kakao berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sub sektor peternakan masih belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari relatif sedikitnya populasi unggas dan ternak di

Kabupaten Mahakam Ulu. Jumlah unggas relatif tinggi apabila dibandingkan julah hewan ternak ruminansia. Populasi unggas dan ternak terbesar berada di kecamatan Long Hubung. Kecamatan Long Apari memiliki populasi ternak dan unggas yang paling sedikit.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang berkaitan dengan sumber daya hutan adalah kayu, gaharu, damar, dan rotan. Potensi ini cukup besar apabila sumberdaya hutan dimanfaatkan secara optimal, Selain itu, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki potensi pariwisata. Hampir setiap kecamatan memilki objek-objek yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata, terutama wisata alam. Potensi tersebut diantaranya; keindahan hutan dan sungai, jeram sungai, air terjun, gua, artefak, dan makam gua.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Mahakam Ulu secara geografis memiliki cukup banyak sungai, serta sebagian besar areal adalah hutan, sehingga memiliki kerawanan terhadap bencana kebakaran hutan khususnya asaat musim kemarau. Saat ini pemerintah daerah sedang melaksanakan pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Kondisi alam yang berbukit menyebabkan adanya kerawanan bencana alam tanah longsor. Sementara itu sungai yang ada rawan terhadap bahaya banjir akibat curah hujan yang tinggi. Di Kabupaten Mahakam Ulu tidak terdapat gunung api aktif sehingga termasuk aman. Namun demikian sebagian besar Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kerentanan terhadap gerakan tanah menengah, yaitu sekitar 47,85% dari total luas wilayah kabupaten.

- Kerentanan tanah sangat stabil (6,64% dari total luas wilayah kabupaten) terjadi terdapat di lembah sungai, yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun, sebagian wilayah Kecamatan

Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung. Gerakan tanah di kawasan ini hampir tidak pernah terjadi.

- Kerentanan tanah stabil (16,95% dari total luas wilayah kabupaten) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun, sebagian wilayah Kecamatan Long Pahangai, dan sebagaian wilayah Kecamatan Long Apari. Pada kawasan ini gerakan tanah di kawasan ini sangat jarang terjadi, kecuali jika gangguan pada lereng.
- Kerentanan tanah menengah (47,85% dari total luas wilayah kabupaten) terjadi pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan atau lereng jika lereng mengalami gangguan. Jika sebelumnya terjadi gerakan tanah pada daerah ini, maka gerakan tanah tersebut akan kembali aktif akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat.
- Kerentanan tanah labil (17,38% dari total luas wilayah kabupaten) dan sangat labil (11,38% dari total luas wilayah kabupaten) terjadi pada kawasan yang sering mengalami gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat. Gerakan tanah ini terjadi pada tingkat kelerengan cukup terjal, baik terjadi secara alamiah maupun karena terpicu aktivitas manusia, seperti akibat galian untuk pengambilan mineral ataupun penggundulan lereng.

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel 2.19
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	188
2	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sungai Mahakam	100
		Merdeka	200
4	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
5	Kabuaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sungai Tunan	20
7	Kabupaten Mahakam Ulu	Sungai Mahakam	500
8	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	82
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
9	Kota Samarinda	Karangmumus	5
		Karangasam Besar	47
		Karangasam Kecil	22
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	28
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
10	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	0

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu

mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

2.1.4 Demografi

Dari segi demografi pada tahun 2022 jumlah penduduk Mahakam Ulu mencapai 33.535 jiwa berdasarkan data BPS Kabupaten Mahakam Ulu. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlahnya 32.969.

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2015-2022

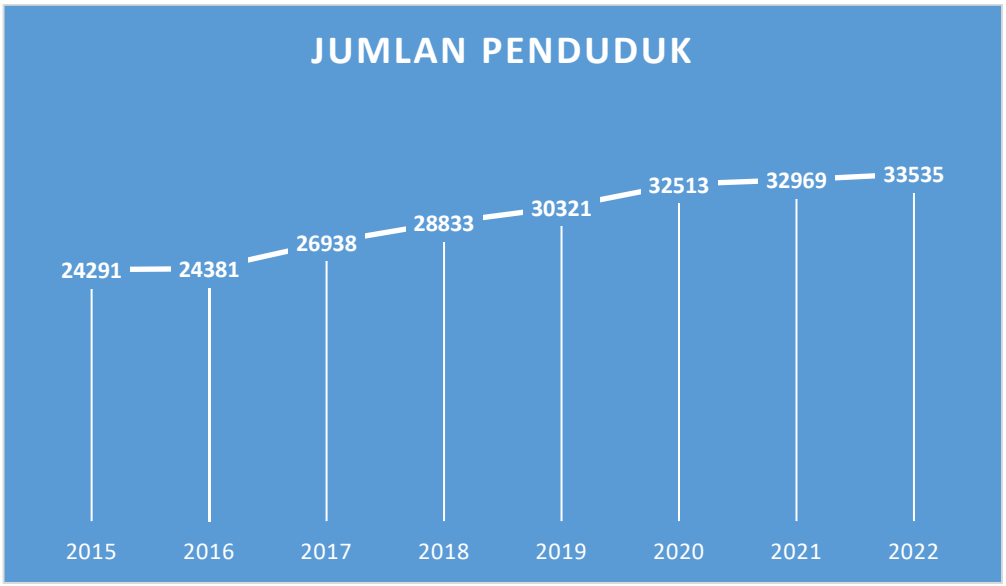

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Mahakam Ulu Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023.

Persebaran penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kecamatan, baik itu dari jumlah

penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu banyak berdomisili di Kecamatan Long Bagun yaitu sebesar 13.412 jiwa atau sekitar 40% dari total populasi penduduk. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Laham yaitu sebesar 2.705 jiwa (8,1%).

Gambar 2.11
Distribusi Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 (%)

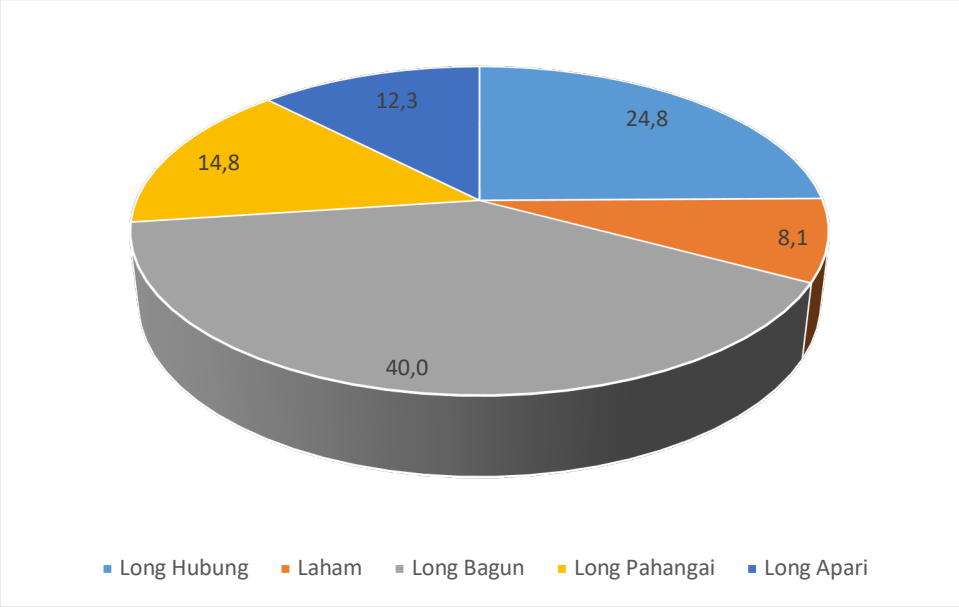

Sumber: Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka, 2023.

Meskipun Long Bagun merupakan kecamatan yang berpenduduk terbanyak di Kabupaten Mahakam Ulu, namun bukanlah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk per km terbesar. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Long Hubung yaitu sebesar 15,31 per km^2 yang artinya ada sekitar 15 hingga 16 orang per kilometernya. Selanjutnya, Kecamatan Laham memiliki kepadatan penduduk yang terbanyak kedua yaitu sebesar 2,97. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling kecil adalah Kecamatan Long Apari yaitu sebesar 0,76.

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Kabupaten Mahakam Ulu berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai lebih dari 70% dari total penduduk Mahakam Ulu, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Rasio ketergantungan Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sekitar 38% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 37 orang yang tidak produktif dan belum produktif.

Jika dilihat rasio jenis kelamin, tahun 2022 rasio jenis kelamin Kabupaten Mahakam Ulu adalah 114. Hal ini berarti ada sebanyak 114 hingga 115 orang laki laki setiap 100 orang perempuan yang artinya jumlah laki- laki lebih banyak daripada jumlah perempuan.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio dan Kepadatan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km^2)
1	Long Hubung	8.319	112	15,31
2	Laham	2.705	124	2,97
3	Long Bagun	13.412	114	2,52
4	Long Pahangai	4.976	112	1,45
5	Long Apari	4.123	113	0,76
Jumlah		**33.535**	**114**	**2,12**

Sumber: Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka, 2023.

Bila dbandngkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah, yaitu hanya 2,12 jiwa per km^2. Dengan wilayah yang luas namun tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan fisik misalnya, akan membutuhkan sumber daya yang besar agar dapat dinikmati oleh

masyarakat mengingat tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah.

Tabel 2.21
Perbandingan Kepadatan Penduduk antar Daerah
se Kalimantan Timur Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Paser	26	25	26
Kutai Barat	13	13	13
Kutai Kartanegara	27	28	27
Kutai Timur	14	14	15
Berau	12	12	12
Penajam Paser Utara	56	62	58
Mahakam Ulu	2	2	2
Balikpapan	1.350	1.357	1.380
Samarinda	1.155	1.160	1.165
Bontang	1.113	1.109	1.139
Kalimantan Timur	30	30	30

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2023

Tingkat kepadatan yang rendah tersebut salah satunya disebabkan oleh relative rendahnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu. Selama 2010-2020, rata-rata pertumbuhan penduduk di Mahakam Ulu sebesar 2,58% dan selama 2020-2022 rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 1,78%. Meski bukan yang terendah, namun pertumbuhan penduduk tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah Mahakam Ulu.

Tabel 2.22
Perbandingan Pertumbuhan Penduduk antar Daerah
se Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	2010-2020	2020-2022
Paser	1,75	0,95
Kutai Barat	2,02	1,22
Kutai Kartanegara	1,48	0,69
Kutai Timur	5,27	4,45
Berau	3,20	2,40
Penajam Paser Utara	2,18	1,39

Mahakam Ulu	2,58	1,78
Balikpapan	2,06	1,26
Samarinda	1,26	0,47
Bontang	2,15	1,35
Kalimantan Timur	2,13	1,41

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022 dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 3.169.293 juta atau sekitar 3,2 triliun. Dari nilai PDRB sebesar itu, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai tahun 2022 mencapai 74,53% sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 74,72%. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini secara gradual terjadi selama periode 2017-2022. Di sisi lain beberapa sektor selama 2017-2022 juga menunjukkan penurunan kontribusi PDRB seperti sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan, sedangkan sektor konstruksi, sektor perdagangan, serta sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan peningkatan kontribusi selama 2017-2022.

Tabel 2.23
PDRB Kabupaten Mahakam Ulu ADHB 2017-2022 (Juta Rp)

Kategori/Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.793.863,56	1.899.319,00	2.023.270,57	2.078.854,78	2.221.036,09	2.362.151,33
B. Pertambangan dan Penggalian	176.718,58	186.340,64	201.197,23	186.811,59	197.013,67	199.479,06
C. Industri Pengolahan	12.532,31	13.501,33	14.558,68	14.672,68	14.975,84	15.778,67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	439,55	550,87	624,46	701,78	814,36	942,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	706,58	777,62	862,90	924,37	1.018,37	1.126,49
F. Konstruksi	128.116,76	149.003,77	171.210,56	179.101,64	203.282,95	213.223,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	97.204,15	114.051,75	135.638,59	138.692,95	148.221,94	159.932,81

H. Transportasi dan Pergudangan	79.420,53	92.399,67	109.441,15	98.151,89	112.249,03	135.800,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.651,65	3.136,84	3.743,16	3.549,20	3.761,58	4.140,17
J. Informasi dan Komunikasi	4.031,18	4.650,33	5.235,60	5.893,98	6.713,50	7.832,26
K. Jasa Keuangan	1.908,97	2.403,88	2.677,83	2.898,91	3.188,26	3.801,75
L. Real Estate	3.689,50	4.016,73	4.481,14	4.691,10	5.110,52	5.345,39
M,N. Jasa Perusahaan	730,31	780,34	855,40	851,90	885,82	939,90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	28.480,36	32.107,38	35.201,99	39.385,84	42.473,58	46.106,67
P. Jasa Pendidikan	3.726,27	4.234,11	4.763,68	5.368,83	5.831,84	6.341,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.321,42	2.659,89	2.883,97	3.539,16	4.297,58	4.548,54
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.154,41	1.348,28	1.578,66	1.611,41	1.669,12	1.802,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.337.696,08	2.511.282,43	2.718.225,58	2.765.702,01	2.972.544,04	3.169.293,29

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu

Berdasarkan kontribusi sektoral ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi di Mahakam Ulu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya alam, yaitu sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Lebih dari 80% perekonomian di Mahakam Ulu ditopang oleh kedua sektor tersebut dan hal ini sesuai dengan kondisi geografis Mahakam Ulu. Sebagai daerah yang baru terbentuk yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat, hal ini sangat dipahami. Secara perlahan, pembangunan sarana dan prasarana fisik di Mahakam Ulu terus dilakukan dan hal ini terlihat dari kontribusi sektor konstruksi yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pengembangan sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan membutuhkan sarana dan prasarana fisik sehingga pembangunan fisik yang terus dilakukan diharapkan memberikan efek multiplier sektor-sektor yang lain.

Tabel 2.24
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022 (%)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	76,74	75,63	74,43	75,17	74,72	74,53

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
B. Pertambangan dan Penggalian	7,56	7,42	7,4	6,75	6,63	6,29
C. Industri Pengolahan	0,54	0,54	0,54	0,53	0,5	0,5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
F. Konstruksi	5,48	5,93	6,3	6,48	6,84	6,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,16	4,54	4,99	5,01	4,99	5,05
H. Transportasi dan Pergudangan	3,4	3,68	4,03	3,55	3,78	4,28
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,11	0,12	0,14	0,13	0,13	0,13
J. Informasi dan Komunikasi	0,17	0,19	0,19	0,21	0,23	0,25
K. Jasa Keuangan	0,08	0,1	0,1	0,1	0,11	0,12
L. Real Estate	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
M,N. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22	1,28	1,3	1,42	1,43	1,45
P. Jasa Pendidikan	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,2
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,1	0,11	0,11	0,13	0,14	0,14
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu

Bila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan proporsinya, selama 2017-2022 rata-rata pertumbuhan proprosi sektor pertanian serta sektor pertambangangan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan rata-rata proporsinya terhadap PDRB mengalami penurunan -0,05% sedangkan sektor pertambangan mengalami rata-rata penurunan -0,33%. Sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor jasa keuangan menunjukkan peningkatan tertinggi tiap tahun dengan rata-rata kenaikan proporsi sebesar 0,74% namun kontribusi sektor ini dalam PDRB sangat kecil sehingga pengaruh kenaikan proporsi tersebut tergolong kecil dampaknya terhadap nilai PDRB. Selama 2017-2022 rata-rata kenaikan proporsi per tahun terlihat kecil yaitu di bawah 1%. Hal ini

mengindikasikan selama 2017-2022 belum terjadi perubahan struktur perekonomian yang signifikan.

Tabel 2.25
Rata-rata Proporsi dan Rata-rata Pertumbuhan Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022 (%)

Lapangan Usaha	Rata-rata Proporsi 2017-2022	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2017-2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75,20	-0,05
B. Pertambangan dan Penggalian	7,01	-0,33
C. Industri Pengolahan	0,53	-0,14
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,52
F. Konstruksi	6,29	0,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,79	0,35
H. Transportasi dan Pergudangan	3,79	0,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,30
J. Informasi dan Komunikasi	0,21	0,70
K. Jasa Keuangan	0,10	0,74
L. Real Estate	0,17	0,11
M,N. Jasa Perusahaan	0,03	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	0,31
P. Jasa Pendidikan	0,18	0,41
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,12	0,61
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,06	0,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		

Sumber: BPS Mahakam Ulu, diolah.

Dari aspek pertumbuhan nilai outputnya, pertumbuhan ekonomi Mahakam Ulu pada tahun 2022 mencapai 0,91% dan angka ini lebih kecil bila diandingkan dengan tahun 2021 yang besarnya 1,27%. Sektor dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 adalah sektor jasa keuangan yang pada tahun 2022 tumbuh sebesar 17,52% dan disusul kemudian sektor informs dan komunikasi yang tumbuh sebesar 13,15%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 disebabkan karena pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor konstruksi menunjukkan pertumbuhan negative masing-

masing sebesar -0,92% serta -0,27%, sementara sektor tersebut memiliki kontribusi cukup tinggi dalam struktur PDRB. Meski beberapa sektor selian kedua sektor tersebut juga menunjukkan penurunan pertumbuhan selama 2021-2022, namun kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB adalah rendah. Misal sektor pengadaan listrik dan gas, pada tahun 2021 memiliki pertumbuhan sebesar 15,66% dan pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 12,36% namun kontribusi sektor jasa keuangan dalam PDRB hanya 0,03%. Demikian pula dengan sektor real estate yang mengalami penurunan pertumbuhan cukup tajam dari 2021 ke 2022, namun kontribusi sektor tersebut dalam PDRB sangat kecil yaitu sekitar 0,17%.

Tabel 2.26
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mahakam Ulu
ADHK 2017-2022

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan 2017-2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,71	5,09	4,93	1,04	-0,71	0,05	2,05
B. Pertambangan dan Penggalian	2,05	1,98	2,62	-12,43	3,90	-0,92	-1,16
C. Industri Pengolahan	3,25	4,34	4,40	-0,14	-0,47	0,26	1,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15,24	15,47	9,64	12,07	15,66	12,36	13,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,57	4,16	5,98	6,44	6,65	7,04	6,05
F. Konstruksi	7,91	8,06	9,13	4,12	13,47	-0,27	6,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,92	9,49	10,71	1,18	6,82	7,07	7,00
H. Transportasi dan Pergudangan	11,08	9,83	12,43	-12,59	8,16	11,41	5,40
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,35	12,03	12,35	-5,70	4,91	7,41	5,99
J. Informasi dan Komunikasi	11,41	11,88	12,07	12,23	12,88	13,15	12,44
K. Jasa Keuangan	18,19	20,48	9,57	7,78	8,98	17,52	12,75
L. Real Estate	6,75	5,37	7,22	2,67	6,64	2,34	4,83
M,N. Jasa Perusahaan	2,43	3,10	6,08	-2,67	1,55	1,28	1,83
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib	5,15	6,64	3,57	6,46	7,63	8,40	6,53
P. Jasa Pendidikan	7,03	7,17	6,78	7,64	8,60	8,70	7,77
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,42	7,96	7,15	22,38	21,03	5,01	12,47
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,42	8,36	8,79	-1,48	3,54	7,52	5,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,29	5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91	2,55

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023, diolah.

Dilihat dari sisi pengeluaran atau penggunaannya, PDRB Mahakam Ulu didominasi oleh ekspor bersih (ekspor dikurangi impor). Pada tahun 2022 ekspor bersih di Mahakam Ulu mencapai 32,87% dan angka ini naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 32,41%. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 sebesar 24,43% meningkat dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 24,08%. Berdasarkan struktur PDRB yang menggunakan pendekatan pengeluaran ini maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu ditopang cukup besar oleh ekspor bersih serta pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa pembangunan fisik Mahakam Ulu berjalan dinamis. Hal ini berbeda dengan struktur PDB nasional yang lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.27
Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran 2017-2022 (%)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22,47	23,62	24,24	24,56	24,08	24,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,93	1,05	1,07	1,05	1	0,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,1	12,55	12,84	12,61	12,26	12,79
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,94	27,83	28,69	28,72	30,18	28,89
Perubahan Inventori	0,26	0,24	0,19	0,19	0,06	0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	39,3	85,65	32,97	32,87	32,41	32,87
PDRB	100	50,95	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu 2023, diolah.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi Mahakam Ulu tahun 2021 tersebut adalah yang terkecil dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Semua daerah di Kalimantan Timur di tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur sendiri jauh di atas Mahakam Ulu, yaitu 4,48%. Penurun pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 hanya terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu dan

Kabupaten Paser sedangkn daerah lain menunjukkan peningkatan yang cukup besar selama 2021-2022. Tahun 2018 Mahakam Ulu pernah memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se Kalimantan Timur, yaitu 5,40% dan setelah itu terlihat kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengantiipasi hal ini ke depan, diperlukan kebijakan dan strategi yang mampu memberikan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Mahakan Ulu memerlukan suatu sektor atau komoditas yang mampu menjadi mesin pertumbuhan dan memiliki efek multiplier yang luas.

Tabel 2.28
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi se-Kalimantan Timur 2017-2022 (%)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	1,17	3,69	3,99	-2,86	5,39	1,09
Kutai Barat	3,64	5,06	5,69	-2,87	4,19	4,77
Kutai Kartanegara	1,63	2,16	3,92	-4,21	2,68	3,71
Kutai Timur	3,28	2,38	8,17	-3,08	-0,89	5,58
Berau	3,01	2,07	5,63	-3,32	5,36	3,95
Penajam Paser Utara	2,44	1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49
Mahakam Ulu	***4,29***	***5,4***	***5,52***	***-0,22***	***1,27***	***0,91***
Balikpapan	3,84	4,97	4,99	-0,91	4,56	4,94
Samarinda	3,85	4,96	5	-0,99	2,78	6,58
Bontang	0,55	-4,08	-2,15	-2,74	1,6	2,46
Kalimantan Timur	3,13	2,64	4,7	-2,9	2,55	4,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Peran perekonomian Mahakam Ulu di Kalimantan Timur masih sangat kecil. Peran PDRB Mahakam Ulu terhadap PDRB provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 hanya 0,34% dan angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yang besarnya 0,34%. Kontribusi ini paling kecil dibandingkan daerah lain. Potensi sumber daya alam di Mahakam Ulu yang cukup besar diharapkan akan memperkuat perekonomian Kalimantan Timur sehingga ke depan diharapkan Mahakam Ulu menjadi salah satu pusat pengembangan sumber daya alam di provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.29
Perbandingan Kontribusi PDRB se-Kalimantan Timur
Tahun 2017-2022 (%)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	7,44	7,56	7,33	7,11	7,74	8,27
Kutai Barat	4,37	4,46	4,45	4,47	4,61	4,71
Kutai Kartanegara	25,26	25,48	24,76	24,5	25,47	26,09
Kutai Timur	20,36	20,14	20,44	18,99	19,61	22,91
Berau	6,04	5,93	5,97	5,83	6,18	6,53
Penajam Paser Utara	1,44	1,4	1,39	1,49	1,45	1,43
Mahakam Ulu	***0,4***	***0,4***	***0,42***	***0,45***	***0,43***	***0,34***
Balikpapan	14,85	15,38	16,06	17,08	15,99	13,82
Samarinda	9,89	10	10,32	10,94	10,22	9,04
Bontang	9,97	9,25	8,86	9,15	8,32	6,85
Kalimantan Timur	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

b. PDRB per Kapita

PDRB perkapita menunjukkan PDRB setiap penduduk sehingga besar kecilnya PDRB perkapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk di masing-masing daerah. Nilai PDRB perkapita menggambarkan secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun masih mengandung kelemahan.

Kontribusi PDRB Mahakam Ulu dalam struktur PDRB Kalimantan Timur adalah terkecil dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, namun PDRB perkapita Mahakam Ulu bukanlah yang terkecil. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Mahakam Ulu yang tergolong sedikit dibandingkan daerah lain. Tahun 2022 PDRB perkapita Mahakam Ulu mencapai 94,51 juta. Hal ini berarti setiap orang rata-rata menghasilkan PDRB sebesar 94,51 juta per tahun, atau dengan kata lain bila dipergunakan sebagai ukuran pendapatan perkapita, maka rata-rata pendapatan setiap penduduk di Mahakam Ulu adalah 94,51 juta per tahun.

Angka ini jauh di atas Penajam Paser Utara sehingga menempatkan Mahakam Ulu dengan PDRB perkapita terendah kedua setelah Penajam Paser Utara. Tahun 2021 lalu PDRB perkapita

Mahakam Ulu lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Samarinda, namun di tahun 2022 ini PDRB perkapita Mahakam Ulu lebih rendah dibandingkan dengan Kota Samarinda. PDRB perkapita Mahakam Ulu tahun 2022 ini menunjukkan kenaikan yang dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 90,17 juta.

Tabel 2.30
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB se-Kalimantan Timur 2017-2022 (Rp juta)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	160,3	171,64	173,34	157,18	194,12	272,09
Kutai Barat	175,43	192,1	195,4	158,03	184,46	246,65
Kutai Kartanegara	198,41	210,47	212,76	204,5	241,84	325,67
Kutai Timur	346,12	353,74	367,11	268,8	304,16	450,27
Berau	161,63	166,27	173,83	143,67	170,34	232,68
Penajam Paser Utara	53,77	55,7	57,76	50,78	55,85	72,05
Mahakam Ulu	***88,87***	***95,32***	***102,45***	***85,38***	***90,17***	***94,51***
Balikpapan	137,92	151,3	165,69	151,31	160,2	180,96
Samarinda	69,29	74,08	79,95	80,36	85,6	99,82
Bontang	345,15	337,45	327,06	311,88	320,44	344,56
Kalimantan Timur	165,55	174,16	180,26	161,8	182,92	238,7

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Data inflasi untuk Kabupaten Mahakam Ulu tidak tersedia, sehingga dipergunakan pendekatan PDRB deflator. Bila inflasi dihitung menggunakan pendekatan deflator PDRB, maka pada tahun 2022 inflasi tertinggi terjadi di sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 8,59% dan yang terkecil adalah sektor jas Pendidikan yang mencapai 0,14%. Secara keseluruhan nilai inflasi di Mahakam Ulu tahun 2022 dengan deflator PDRB adalah 5,66%, turun dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 6,13%. Inflasi sektor pertanian terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Mhakam Ulu, sementara sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi struktur perekonomian. Oleh karena itu sangat penting untuk mengendalikan harga di sektor ini.

Pendekatan PDRB deflator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa sementara untuk Indeks Harga Konsumen menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. PDRB deflator juga dipergunakan sebagai *proxy* dalam hal informasi Indeks Harga Konsumen belum tersedia.

Tabel 2.31
Perkembangan Inflasi Kabupaten Mahakam Ulu
Berdasarkan Deflator PDRB Tahun 2017-2022

Kategori/Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.06	0,75	1,52	1,69	7,61	6,30
B. Pertambangan dan Penggalian	7.06	3,39	5,22	6,03	1,51	2,19
C. Industri Pengolahan	2.28	3,26	3,29	0,93	2,55	5,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.14	8,53	3,39	0,28	0,33	2,96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.73	5,66	4,71	0,64	3,30	3,34
F. Konstruksi	6.96	7,63	5,29	0,47	0,02	5,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.38	7,16	7,42	1,06	0,05	0,78
H. Transportasi dan Pergudangan	4.89	5,93	5,35	2,60	5,74	8,59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.10	5,60	6,21	0,55	1,02	2,47
J. Informasi dan Komunikasi	2.09	3,11	0,46	0,31	0,91	3,11
K. Jasa Keuangan	4.19	4,52	1,67	0,44	0,91	1,46
L. Real Estate	4.13	3,32	4,05	1,97	2,16	2,21

Kategori/Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
M,N. Jasa Perusahaan	3.89	3,64	3,34	2,32	2,40	4,76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.74	5,71	5,86	5,09	0,20	0,14
P. Jasa Pendidikan	5.91	6,03	5,36	4,70	0,03	0,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.97	6,13	1,19	0,27	0,33	0,79
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7.88	7,78	7,63	3,61	0,04	0,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.64	1,93	2,58	1,97	6,13	5,66

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu, diolah.

d. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk melihat ukuran inklusivitas pembangunan ekonomi, dipergunakan sutau indeks yang disebut dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

Pembangunan ekonomi inklusif memiliki 3 pilar yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut memiliki delapan sub-pilar utama serta 21 indikator yang terangkum menjadi IPEI. Pada prinsinya, dalam pembangunan ekonomi inklusif pembangunan ekonomi yang dilaksanakan seyogyanya mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Nilai IPEI dikelompokkan menjadi 3: Kurang Memuaskan (skor 1-3), Memuaskan (skor 4-7), dan Sangat Memuaskan (skor 8-10).

Posisi IPEI Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2021 menunjukkan skor 4,89 dan masuk dalam kategori ***memuaskan***, namun dbanding daerah lain di Kalimantan Timur nilai ini masih berada di peringkat terbawah, masih cukup jauh dari nilai IPEI provinsi

Kalimantan Timur maupun nasional. Mengingat Kabupaten Mahakam Ulu merupakan darah yang relatif masih baru, skor IPEI tersebut dapat dianggap wajar. Salah satu indikasi dari nilai ini adalah bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan namun berjalan secara optimal. Dengan demikian dalam setiap implementasi perencanaan pembangunan ekonomi, perlu mempertimbangkan secara matang seberapa besar efeknya dalam mendorong perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, serta memperkecil tingkat kesenjangan.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif se-Kalimantan Timur 2016-2021

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	5,21	5,29	5,36	5,51	5,30	5,56
Kutai Barat	4,88	5,05	5,15	5,28	5,16	5,40
Kutai Kartanegara	5,22	5,30	5,31	5,44	5,34	5,53
Kutai Timur	4,83	5,03	5,04	5,23	5,04	5,18
Berau	5,16	5,31	5,36	5,48	5,35	5,44
Penajam Paser Utara	5,10	5,12	5,16	5,20	5,17	5,32
Mahakam Hulu	4,23	4,37	4,65	4,73	4,66	4,89
Kota Balikpapan	6,04	6,06	6,07	6,20	6,03	6,21
Kota Samarinda	5,92	5,79	5,90	5,87	5,84	5,93
Kota Bontang	5,92	6,00	6,07	6,09	5,96	6,24
Kalimantan Timur	5.85	6.04	5.95	6.22	5.77	6.24
Nasional	5.66	5.76	5.77	5.97	5.54	6.00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Mahakam Ulu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Pembangunan daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya

untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

IPM Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022 mencapai 68,75; naik dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 67,95. Selama periode 2017-2022 IPM Mahakam Ulu menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 menunjukkan penurunan sebagai dampak Pandemi Covid yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meski demikian secara umum IPM Mahakam Ulu ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penurunan IPM di tahun 2020 tersebut terjadi di komponen pengeluaran perkapita, sementara komponen lain yaitu harapan lama sekolah, umur harapan hdup, serta komponen rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan.

Gambar 2.12
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022

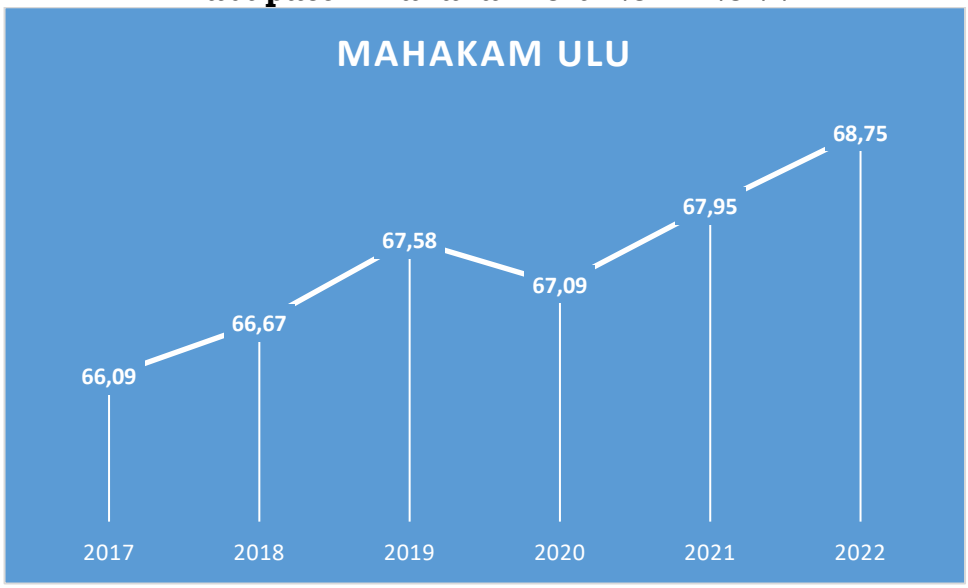

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

Dari keempat komponen tersebut, selama 2017-2022 menunjukkan tren kenaikan kecuali komponen pengeluaran perkapita per bulan yang turun di tahun 2020. Tahun 2022 rata-rata lama sekolah adalah 8,36 tahun yang berarti masyarakat Mahakam Ulu rata-rata masih berpendidikan SMP sederajat.

Tabel 2.33
Rincian Indikator IPM Kabupaten Mahakam Ulu 2017-2022

Tahun	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Umur Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran Perkapita (Ribuan/kapita /tahun)	Rata-rata Lama Seolah (tahun)
2017	12.47	71.25	7364.00	7.68
2018	12.48	71.56	7653.00	7.69
2019	12.50	71.90	8008.00	7.89
2020	12.51	72.10	7524.00	7.97
2021	12.61	72.33	7802.00	8.18
2022	12.62	72.35	8215.00	8.36

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah.

Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur nilai IPM Mahakam Ulu ini masih yang terkecil. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat Mahakam Ulu merupakan daerah yang belum lama

terbentuk sehingga memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan daerah lain dalam berbagai hal, khususnya infrastruktur. Penurunan IPM Kabupaten Mahakam Ulu di tahun 2020 dipicu oleh factor penurunan pengeluaran perkapita per bulan dari Rp8.008.000 menjadi Rp7.534.000 atau turun -5,92%. Hal ini disebabkan oleh lemahnya daya beli beli masyarakat akibat pandemic covid yang terjadi sehingga penghasilan masyarakat sangat tertekan. Selain itu masih rendahnya IPM Kabupaten Mahakam Ulu juga dipengaruhi komponen Harapan Lama Sekolah serta Rata-rata Lama Sekolah yang menempati urutan terakhir diantara daerah lain di Kalimantan Timur.

Tabel 2.34
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Kalimantan Timur
2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	71,16	71,61	72,29	72,04	72,93	73,44
Kutai Barat	70,18	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92
Kutai Kartanegara	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67
Kutai Timur	71,91	72,56	73,49	73	73,81	74,35
Berau	73,56	74,01	74,88	74,71	75,2	75,74
Penajam Paser Utara	70,59	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
Mahakam Ulu	66,09	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75
Balikpapan	79,01	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13
Samarinda	79,46	79,93	80,2	80,11	80,76	81,43
Bontang	79,47	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

b. Pendidikan

Pendidikan meruapakan factor penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah ke depan memerlukan sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas. Di sisi lain, pendidikan merupakan salah satu hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, bahkan undang-undang mensyaratkan alokasi dana pemerintah sebesar 20% untuk pendidikan.

Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada Semester 2 Tahun 2022/2023, total jumlah sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 139 terdiri dari 59 negeri (N) dan 80 swasta (S). Sekolah terbanyak berada di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Laham. Jumlah sekolah yaitu SMA ada 7 dan SMK ada 2 sebenarnya cukup, namun geografis Mahakam Ulu yang luas menjadi permasalahan dalam hal akses masyarakat menuju sekolah sehingga misal rasio penduduk terhadap sekolah cukup, namun luasnya wilayah membuat tidak mudahnya penduduk menuju sekolah.

Rasio murid terhadap guru menunjukkan angka yang sangat kecil, untuk jenjang SD hanya 1:6 yang artinya 1 guru menangani 6 murid. Untuk SMP memiliki rasio 1:4 sedangkan SMA memiliki rasio 1:10 dan SMK memiliki rasio 1:6. Nilai rasio ini mengindikasikan kurangnya murid di masing-masing sekolah, atau jumlah guru yang lebih dari cukup. Jumlah guru untuk jenjang SD adalah 430 dan 148 diantaranya berada di Kecamatan Long Bagun. Jumlah guru SMP sebanyak 299 dan SMA sebanyak 103. Dibandingkan dengan jumlah murid misal SMP sebanyak 1.099 dan SMA yang jumlahnya 1.009, jumlah guru tersebut masih mencukupi karena menghasilkan rasio yang kecil. Permasalahan yang perlu dicermati adalah kompetensi guru sesuai mata pelajaran yang diampu.

Berdasarkan data yang ada, aspek pendidikan antar kecamatan masih belum merata. Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung merupakan dua kecamatan yang memiliki jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah murid terbanyak dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan jumlah penduduk usia sekolah antar kecamatan serta kondisi infrastruktur pendukung.

Tabel 2.35
Jumlah Sekolah Per Kecamatan Tahun 2022/2023

Wilayah	Total			TK			KB			PKBM		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
KEC. LONG BAGUN	40	19	21	10	1	9	9	0	9	1	0	1
KEC. LONG HUBUNG	40	14	26	11	0	11	12	0	12	0	0	0
KEC. LONG PAHANGAI	28	12	16	8	0	8	8	0	8	0	0	0
KEC. LONG APARI	17	8	9	7	0	7	2	0	2	0	0	0
KEC. LAHAM	14	6	8	4	0	4	2	0	2	0	0	0
Total	**139**	**59**	**80**	**40**	**1**	**39**	**33**	**0**	**33**	**1**	**0**	**1**

Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
KEC. LONG BAGUN	11	11	0	5	5	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0
KEC. LONG HUBUNG	9	9	0	5	4	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0
KEC. LONG PAHANGAI	8	8	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
KEC. LONG APARI	5	5	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
KEC. LAHAM	5	4	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Total	**38**	**37**	**1**	**17**	**16**	**1**	**7**	**4**	**3**	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tabel2.36
Jumlah Guru Per Kecamatan Tahun 2022/2023

Wilayah	Total			TK			KB			PKBM		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
KEC. LONG BAGUN	356	110	246	34	0	34	18	0	18	1	1	0
KEC. LONG HUBUNG	299	88	211	46	0	46	34	0	34	0	0	0
KEC. LONG PAHANGAI	172	55	117	13	1	12	14	0	14	0	0	0
KEC. LONG APARI	127	65	62	17	0	17	5	0	5	0	0	0
KEC. LAHAM	92	34	58	9	0	9	4	0	4	0	0	0
Total	**1046**	**352**	**694**	**119**	**1**	**118**	**75**	**0**	**75**	**1**	**1**	**0**

Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
KEC. LONG BAGUN	148	48	100	114	49	65	36	12	24	3	0	3	2	0	2
KEC. LONG HUBUNG	95	36	59	85	31	54	25	15	10	14	6	8	0	0	0
KEC. LONG PAHANGAI	82	29	53	45	18	27	18	7	11	0	0	0	0	0	0
KEC. LONG APARI	59	35	24	25	18	7	21	12	9	0	0	0	0	0	0
KEC. LAHAM	46	21	25	30	13	17	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Total	**430**	**169**	**261**	**299**	**129**	**170**	**103**	**46**	**57**	**17**	**6**	**11**	**2**	**0**	**2**

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tabel 2.37
Rasio Murid-Guru Per Kecamatan tahun 2022/2023

Wilayah	Total			TK			KB			PKBM		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
KEC. LONG BAGUN	5,5	0,9	3,8	1,7	-	0,9	4,6	-	2,4	0,0	0,0	-
KEC. LONG HUBUNG	5,0	8,6	3,5	1,1	-	0,5	0,8	-	0,5	-	-	-
KEC. LONG PAHANGAI	3,8	6,1	2,8	1,2	9,0	0,6	1,6	-	0,8	-	-	-
KEC. LONG APARI	4,1	4,2	4,0	0,7	-	0,4	0,0	-	0,0	-	-	-
KEC. LAHAM	2,7	4,1	1,8	1,0	-	0,4	1,0	-	0,3	-	-	-
Total	4,7	7,1	3,4	1,2	78,0	0,6	1,8	-	0,9	0,0	0,0	-

Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
KEC. LONG BAGUN	5,6	9,1	3,9	4,0	5,1	3,2	13,1	18,9	10,2	16,0	-	7,0	0,0	-	0,0
KEC. LONG HUBUNG	7,4	9,9	5,8	4,9	6,6	3,9	9,9	8,5	12,1	4,3	4,7	4,0	-	-	-
KEC. LONG PAHANGAI	4,0	5,3	3,3	3,8	5,3	2,7	6,9	9,6	5,3	-	-	-	-	-	-
KEC. LONG APARI	5,8	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,4	8,4	-	-	-	-	-	-
KEC. LAHAM	3,8	4,6	3,2	1,8	2,6	1,2	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-
Total	5,5	7,2	4,4	3,7	4,5	3,0	9,8	11,1	8,8	6,4	9,2	4,8	0,0	-	0,0

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Salah satu aspek untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah seberapa besar masyarakat yang dapat mengkases pendidikan. Banyaknya masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan tersebut Antara lain tercermin melalui besarnya angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK).

Selama 2018-2020 baik APK maupun APM SD sederajat di Mahakam Ulu menunjukkan tren yang terus meningkat dan di tahun 2021 APK dan APM SD menunjukkan penurunan. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur APK dan APM untuk SD sederajat ini adalah yang terendah. APK merupakan indicator yang menggambarkan perbandingan antara banyaknya murid SD sederajat yang bersekolah SD sederajat, terhadap penduduk usia SD sederajat (yaitu 7-12 tahun). APK SD Mahakam Ulu tahun 2021 mencapai 100,68 yang berarti dari 100 penduduk yang bersekolah di jenjang SD sederajat, sebanyak 100-101 orang berusia antara 7-12 tahun yaitu usia sekolah dasar. APK untuk jenjang SMP sederajat di Mahakam Ulu

pada tahun 2021 sebesar 98,03. Nilai APK maupun APM Mahakan Ulu untuk SMP sederajat tahun 2021 juga terlihat paling kecil dibandingkan dengan daerah lain. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pendidikan adalah hanya sampai dengan jenjang SMP sederajat, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. APK dan APM untuk jenjang SMA sederajat sendiri di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2021 adalah masing-masing 70,61 dan 46,74. Angka ini merupakan yang terendah di Kalimantan Timur dengan selisih yang cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal pendidikan, Mahakam Ulu sebenarnya meunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun, artinya kesempatan belajar bagi masyarakat untuk jenjang SD dan SMP dan yang sederajat semakin meningkat. Namun, bila dibandingkan dengan daerah lain kondisi Mahakam Ulu masih berada di posisi terbawah dalam hal APK dan APM. Upaya peningatan APK khususnya dapat dilakukan dengan semakin memperkuat program wajib belajar setidak-tidaknya hingga jenjang SMP sederajat. Program ini tentunya perlu diikuti program pendukung lain seperti sarana dan parasarana pendidikan serta infrastruktur pendukung.

Tabel 2.38
Perkembangan APK dan APM SD/MI/Sederajat
se Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Wilayah	2018		2019		2020		2021	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	Kab. Paser	110.08	97.02	107.00	95.81	107,48	96,66	104,39	94,92
2	Kab. Kutai Kartanegara	108.27	96.92	107.77	96.98	107,13	97,27	104,75	96,31
3	Kab. Berau	107.62	95.12	107.53	94.40	110,19	98,24	109,53	99,29
4	Kab. Kutai Barat	104.69	94.48	104.53	93.80	105,91	96,52	106,11	97,77
5	Kab. Kutai Timur	104.32	92.94	106.01	95.41	108,15	98,86	108	99,35
6	Kab. Penajam Paser Utara	107.39	95.52	105.92	94.26	104,52	94,76	103,32	94,48
7	**Kab. Mahakam Ulu**	**92.73**	**78.03**	**93.64**	**80.16**	***102,16***	***89,29***	***100,68***	***90,15***

8	Kota Samarinda	103.90	95.20	104.74	96.96	103,45	96,25	102,63	96,62
9	Kota Balikpapan	103.01	94.75	105.78	96.99	106,03	98,59	103,89	97,91
10	Kota Bontang	101.07	92.50	101.84	89.98	102,33	95,04	99,93	93,33
	Kalimantan Timur	**105.39**	**95.02**	**105.86**	**95.71**	**106,1**	**97,14**	**104,6**	**96,88**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 2023 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Tabel 2.39
Perkembangan APK dan APM SMP/MTs/Sederajat
se Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Wilayah	2018		2019		2020		2021	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	Kab. Paser	96.45	71.83	100.87	74.107	99,34	74,42	99,43	74,71
2	Kab. Kutai Kartanegara	99.47	75.21	101.92	77.505	105,95	79,15	105,86	80,38
3	Kab. Berau	101.98	75.98	106.76	78.499	108,54	78,28	109,06	79,44
4	Kab. Kutai Barat	93.32	67.88	95.35	72.01	98,22	72,31	97,69	76,66
5	Kab. Kutai Timur	97.81	72.83	100.55	75.412	101,25	76,21	100,24	76,17
6	Kab. Penajam Paser Utara	101.31	75.78	105.20	79.305	108,97	81,91	108,75	83,05
7	**Kab. Mahakam Ulu**	**92.36**	**62.77**	**97.02**	**66.145**	***97,41***	***69,78***	***98,03***	***71,65***
8	Kota Samarinda	109.95	79.83	112.23	93.292	109,24	79,98	109,27	81,13
9	Kota Balikpapan	105.68	78.08	103.73	86.083	109,92	82,65	110,87	84,97
10	Kota Bontang	108.26	81.36	114.28	85.93	106,58	81,16	105,95	81,47
	Kalimantan Timur	96.45	71.83	**104.81**	**81.87**	**106,22**	**78,98**	**106,26**	**80,29**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, 2023 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Tabel 2.40
Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA Sederajat
se Kalimantan Timur Tahun 2014-2021

No.	Wilayah	2014		2021	
		APK	APM	APK	APM
1	Kab. Paser	63,10	52,46	92,68	65,89
2	Kab. Kutai Kartanegara	68,67	51,14	84,89	60,78
3	Kab. Berau	81,81	66,94	104,53	73,82
4	Kab. Kutai Barat	84,86	66,29	89,95	62,01
5	Kab. Kutai Timur	75,45	56,88	103,74	72,15
6	Kab. Penajam Paser Utara	84,43	61,71	107,75	80,5
7	**Kab. Mahakam Ulu**	**47,28**	**37,03**	***70,41***	***46,74***
8	Kota Samarinda	88,35	70,15	104,57	72,03
9	Kota Balikpapan	83,17	67,38	108,15	77,88
10	Kota Bontang	101,14	61,53	120,13	87,33

	Kalimantan Timur	**79,47**	**61,42**	**99,73**	**70,57**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, 2023 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

c. Kesehatan

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini untuk menjamin terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera yang menjadi salah satu tujuan pokok pembangunan.

Dari sisi sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan bidang kesehatan di Mahakam Ulu memang dipandang masih perlu ditingkatkan. Dari sisi rumah sakit, tahun 2022 hanya ada dua rumah sakit yang terletak di Long Bagun dan Long Pahangai. Untuk puskesmas, selama 2021-2022 belum ada perubahan, yaitu masih ada 1 puskesmas di masing-masing kecamatan. Jumlah puskesmas pembantu (pustu) dan jumlah posyandu selama 2021-2022 cukup banyak yaitu 39, namun kondisi geografis tidak jarang membuat akses ke sarana kesehatan menjadi sulit. Jumlah apotek hanya ada 5 dan itupun terletak di Kecamatan Long Bagun.

Tabel 2.41
Fasilitas Kesehatan di Mahakam Ulu 2021-2022

Kecamatan	Rumah Sakit		Puskesmas		Pustu		Posyandu		Apotek	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Laham			1	1	4	4	6			
Long Hubung			1	1	7	7	10			
Long Bagun	1	1	1	1	11	11	14		5	5
Long Pahangai	1	1	1	1	12	12	14			
Long Apari			1	1	5	5	10			
Mahakam Ulu	2	2	5	5	39	39	54		5	5

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka 2023, diolah.

Untuk tenaga kesehatan, tahun 2022 jumlah dokter ada 23 dan jumlah perawat 209. Jumlah ini dipandang masih sangat kurang apabila didasarkan pada jumlah penduduk serta kondisi geografis

Mahakam Ulu. Demikian pula dengan tenaga kesehatan lain yang masih memerlukan peningkatan. Dari sisi penyebarannya, sebagian besar tenaga kesehatan berada di Kecamatan Long Bagun dan paling sedikit di Kecamatan Laham dan Long Apari.

Tabel 2.42
Tenaga Kesehatan di Mahakam Ulu 2022

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Tenaga SKM
Laham	3	16	9	2	1	3
Long Hubung	7	59	31	10	1	5
Long Bagun	12	92	47	15	4	5
Long Pahangai	0	10	11	4		3
Long Apari	1	32	11	3		3
Mahakam Ulu	23	209	109	34	6	19

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu, 2023, diolah.

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Tingkat kemiskinan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan total jumlah penduduk, sedangkan penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selama periode 2015-2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan tren kenaikan yang, meski sempat menurun di tahun 2019 dan 2022. Di tahun 2022 tingkat kemiskinan 11,55% turun sedikit dibanding tahun 2021 yang mencapai 11,9%. Tingkat kemiskinan di Mahakam Ulu ini tergolong tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan provinsi dan nasional.

Gambar 2.13
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mahakam Ulu 2015-2022 (%)

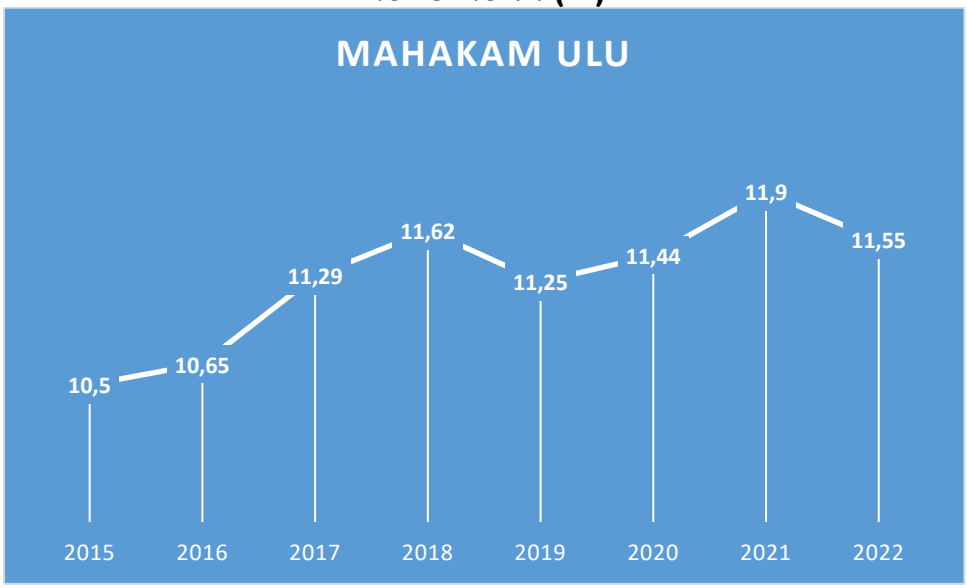

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu dan BPS Provinsi Kalimantan Tmur

Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, tingkat kemiskinan Mahakam Ulu sepanjang 2017-2022 adalah yang tertinggi. Indikator kemiskinan lain seperti P1 (kedalaman kemiskinan) maupun P2 (keparahan kemiskinan) juga terlihat masih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, meski bukan yang tertinggi (tertinggi kedua setelah Kutai Timur). Tingginya tingkat kemiskinan ini dipengaruhi oleh factor tingginya garis kemiskinan untuk Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.43

Perbandingan Indikator Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2017-2022 (%)

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)				Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)				Indeks P1		Indeks P2	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2017	2022	2017	2022
Paser	8,95	9,23	9,73	9,43	477440	515414	527659	556371	1,321	1,35	0,268	0,29
Kutai Barat	9,09	9,29	10,24	10,20	542393	583532	598037	635478	0,906	1,56	0,159	0,42
Kutai Kartanegara	7,20	7,31	7,99	7,96	503968	548423	569640	605321	1,504	1,18	0,439	0,26
Kutai Timur	9,48	9,55	9,81	9,28	569449	610858	626492	659136	1,263	2,33	0,254	0,78
Berau	5,04	5,19	5,88	5,65	526615	568500	595550	624948	0,489	0,98	0,070	0,22
PPU	7,18	7,36	7,61	7,25	466918	499807	513666	538002	1,110	1,07	0,236	0,25
Mahakam Ulu	11,25	11,44	11,9	11,55	588756	631517	644910	684644	0,993	2,08	0,185	0,58
Balikpapan	2,42	2,57	2,89	2,45	572108	613622	657521	680499	0,235	0,17	0,028	0,02
Samarinda	4,59	4,76	4,99	4,85	658307	719710	750055	784198	0,681	0,59	0,127	0,13
Bontang	4,22	4,38	4,62	4,54	582188	636491	665572	697326	0,923	0,37	0,245	0,05

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah.

e. Ketimpangan

Ketimpangan di Kabupaten Mahakam Ulu dapat lihat dari nilai rasio Gini atau Indeks Gini. Selama periode 2018-2020 nilai Indeks Gini Mahakam Ulu menunjukkan penurunan, bahkan pada tahun 2020 nilai Indeks Gini Mahakam Ulu adalah yang terendah di Kalimantan Timur. Hal ini menandakan bahwa distribusi pendapatan antar penduduk di Mahakam Ulu relative merata, namun yang perlu mendapatkan perhatian bukan hanya masalah merata atau tidaknya saja tetapi juga aspek lain seperti kemiskinan. Bila dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi hal ini menindikasikan bahwa distribusi pendapatan antar penduduk memang merata namun dalam arti merata yang belum sejahtera.

Di tahun 2020-2022 nilai Indeks Gini Mahakam Ulu menunjukkan kenaikan hingga tahun 2022 yang mencapai 0,288. Meski mengalami kenaikan namun angka ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur.

Tabel 2.44
Perbandingan Indeks Gini se Provinsi Tahun 2011-2022

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	0,3119	0,3588	0,2755	0,3070	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282
Kutai Barat	0,2435	0,2967	0,2858	0,2855	0,311	0,334	0,338	0,317	0,3
Kutai Kartanegara	0,2992	0,2984	0,3072	0,3117	0,302	0,278	0,294	0,283	0,269
Kutai Timur	0,2913	0,3099	0,3107	0,3047	0,326	0,346	0,325	0,328	0,304
Berau	0,3190	0,3076	0,3305	0,3204	0,303	0,345	0,300	0,377	0,352
Penajam Paser Utara	0,3046	0,3241	0,3264	0,3255	0,313	0,322	0,292	0,263	0,274
Mahakam Ulu					0,334	0,302	0,259	0,27	0,288
Balikpapan	0,3292	0,3608	0,3061	0,3370	0,356	0,302	0,311	0,325	0,334
Samarinda	0,3066	0,3332	0,3115	0,3076	0,317	0,341	0,324	0,322	0,346
Bontang	0,3694	0,3913	0,3564	0,3533	0,376	0,338	0,405	0,34	0,324

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.3. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Perkembangan di bidang seni budaya antara lain ditunjukkan dengan eksistensi berbagai kelompok seni di Mahakam Ulu. Di Mahakam

Ulu, bidang seni yang berkembang adalah seni tari. Kelompok seni tari tradisional ini terdapat di setiap kecamatan di Mahakam Ulu. Terdapat 23 kelompok seni tari di Mahakam Ulu, 7 diantaranya terdapat di Kecamatan Long Pahangai dan hanya ada satu di Kecamatan Laham. Dari jumlah kelompok seni tersebut, terdapat 330 anggota yang tersebar di berbagai kelompok seni.

Di Mahakam Ulu terdapat 18 sanggar seni yang tersebar di 5 kecamatan. Salah satu kebudayaan yang sangat terkenal adalah Hudoq. Hudoq memiliki makna mendalam bagi Suku Dayak di Kalimantan Timur yaitu sebuah cerita tentang penghormatan orang Dayak kepada bumi dan alam. Tentang orang-orang yang percaya bahwa restu leluhur menjadi keutamaan untuk tanah yang subur. Tarian persembahan kepada bumi dan ritual permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar hasil pertanian mereka diberikan hasil yang melimpah ruah menjadi salah satu cara untuk mengucap syukur. Masyarakat Dayak di Mahakam Ulu biasanya memang memiliki topeng Hudoq disetiap rumah untuk menyambut pesta rakyat. Topeng Hudoq yang terbuat dari kayu Jelutung ini akan disisipkan dengan daun-daun pisang yang masih segar untuk menguatkan kesan dewa yang memberkati kehidupan.

Pemerintah daerah sangat mendukung kelestarian adat dan budaya di Mahakam Ulu agar berkembang secara optimal. Pengembangan adat dan budaya di Mahakam Ulu dilaksanakan Antara lain melalui lembaga adat. Hal ini tertnnag dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat.

Di bidang olah raga, terdapat 3 cabang olah raga yang diminati oleh masyarakat yaitu sepak bola, voli, dan bulu tangkis. Di Mahakam Ulu terdapat sarana dan prasarana olah raga tersebut, namun sebagian besar adalah sarana bola voli. Secara keseluruhan terdapat 48 sarana bola voli, 15 sarana sepak bola, 10 sarana bulu tangkis, serta 5 lain-lain. Bila

dibandingkan dengan jumlah penduduk, saran dan prasarana tersebut dipandang masih kurang sehingga secara bertahap perlu dikembangkan.

2.2.4. Fokus Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi hingga saat ini masih identic dengan kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Jumlah koperasi di Mahakam Ulu hanya 125 dan koperasi yang aktif hanya 27 atau 21,60%. Persentase jumlah koperasi aktif tersebut yang terkecil dibandingkan dengan daerah lain. Koperasi akan berkembang jika kegiatan ekonomi masyarakat juga berkembang.

Tabel 2.45
Jumlah Koperasi Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Persentase Aktif
Paser	193	322	59,94
Kutai Barat	259	768	33,72
Kutai Kartanegara	489	704	69,46
Kutai Timur	687	1154	59,53
Berau	282	440	64,09
Penajam Paser Utara	76	270	28,15
Mahakam Ulu	***27***	***125***	***21,60***
Balikpapan	429	576	74,48
Samarinda	288	1270	22,68
Bontang	70	82	85,37

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023

Dari sisi industri kecil dan menengah atau IKM, jumlah IKM di Mahakam Ulu pada tahun 2021 hanya 43, sangat jauh dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja pun juga hanya 162 orang. Pengembangan IKM dan juga koperasi perlu diprioritaskan sebagai Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. IKM dan koperasi diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran serta memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 2.46
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kalimantan Timur 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah IKM	Tenaga Kerja		
			Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1	Balikpapan	1,450	33	3,004	3,037
2	Berau	917	2,836	1,192	4,028
3	Bontang	1,446	1,242	1,021	2,263
4	Kutai Kartanegara	2,532	3,520	1,410	4,930
5	Kutai Barat	2,140	3,069	2,239	5,308
6	Kutai Timur	1,293	1,854	713	2,567
7	Mahakam Ulu	43	37	125	162
8	Paser	2,935	5,269	302	5,571
9	Penajam Paser Utara	1,397	3,036	768	3,804
10	Samarinda	1,760	3,035	763	3,798
Jumlah		**15,913**	**23,931**	**11,537**	**35,468**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur *(data yang ada merupakan data terbaru).*

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Untuk melihat keberhasilan capaian pendidikan lainnya di Mahakam Ulu dapat dilihat antara lain dari ketersediaan fasilitas pendidikan, terutama gedung sekolah dan terpenuhinya jumlah tenaga pendidik (guru). Kondisi penyediaan fasilitas pendidikan di Mahakam Ulu hingga tahun 2022 menunjukan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih menyisakan beberapa masalah. Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2022 mencapai 38 unit, dengan jumlah murid sebanyak 3.990 orang dan 462 tenaga pendidik. Jika dihitung rata – rata rasio murid terhadap sekolah yaitu 105 : 1, artinya daya tampung sekolah SD/MI rata – rata 105 murid. Selanjutnya rasio murid dengan guru adalah 9:1. Untuk jenjang SMP sederajat jumlah sekolah tahun 2022 mencapai 16 dengan 319 murid sehingga rata-rata 1 sekolah memiliki 109 murid.

Tabel 2.47
Indikator Pendidikan Mahakam Ulu Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022
Jumlah Sekolah		
-SD/MI	39	38
-SLTP/MTs	15	16
-SLTA/SMK/MA	9	9
Jumlah Guru		
-SD/MI	462	462
-SLTP/MTs	327	319
-SLTA/SMK/MA	129	127
Jumlah Murid		
-SD/MI	4000	3990
-SLTP/MTs	1828	1748
-SLTA/SMK/MA	1396	1405
Rasio Murid Sekolah		
-SD/MI	102	105
-SLTP/MTs	122	109
-SLTA/SMK/MA	155	156
Rasio Murid Guru		
-SD/MI	9	9
-SLTP/MTs	5	5
-SLTA/SMK/MA	11	11

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah

Data BPS Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan angka yang berbeda. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, Mahakam Ulu masih menempati peringkat terakhir diantara daerah lain di Kalimantan Timur, karena di semua jenjang pendidikan Mahakam Ulu memiliki jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumah guru yang paling sedikit. Hal ini dipandang wajar apabila mengingat Mahakam Ulu merupakan daerah baru yang berdiri tahun 2013. Meski demikian, pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat menjadi akan menghadapi tantangan yang berat mengingat kondisi georafis Mahakam Ulu yang berpotensi menjadi kendala masyarakat dalam akses pendidikan.

Tabel 2.48
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Tahun 2022/2023

No	Wilayah	Jumlah Sekolah				Jumlah Murid				Jumlah Guru			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kab. Kutai Kartanegara	238	94	17	12	34893	14769	7538	4429	2594	1297	696	325
2	Kota Samarinda	211	68	22	14	22520	8975	4806	3100	2472	1071	456	282
3	Kab. Kutai Timur	514	204	52	44	92562	39346	19593	13733	6327	2842	1413	882
4	Kab. Paser	240	106	24	24	53955	18547	7488	7247	3249	1422	573	478
5	Kab. Kutai Barat	175	66	19	14	34614	13849	8042	3441	2421	1103	545	300
6	Kota Balikpapan	113	45	10	10	21697	9621	4271	4066	1373	683	326	279
7	Kab. Berau	38	16	7	2	3990	1748	1260	145	462	327	105	22
8	Kab. Penajam Paser Utara	218	92	28	32	71379	34101	13267	17367	3512	1750	848	890
9	Kota Bontang	254	135	43	51	89034	42434	19872	23099	4523	2677	1365	1400
10	***Kab. Mahakam Ulu***	63	33	11	13	19964	9414	4946	4109	1117	602	364	328
	Kalimantan Timur	2064	859	233	216	444608	192804	91083	80736	28050	13774	6691	5186

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2023, diolah.

Tabel 2.49
Rasio Murid, Guru, dan Sekolah Tahun 2022/2023

No	Wilayah	Rasio Murid-Sekolah				Rasio Guru-Sekolah				Rasio Murid-Guru			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kab. Kutai Kartanegara	147	157	236	369	11	14	22	27	13	11	11	14
2	Kota Samarinda	107	132	178	221	12	16	17	19	9	8	11	11
3	Kab. Kutai Timur	180	193	261	312	12	14	19	20	15	14	14	15
4	Kab. Paser	225	175	234	302	14	13	18	20	17	13	13	15
5	Kab. Kutai Barat	198	210	366	246	14	17	25	22	14	13	15	11
6	Kota Balikpapan	192	214	267	407	12	15	20	29	16	14	13	14
7	Kab. Berau	105	109	180	73	12	20	15	11	9	5	12	7
8	Kab. Penajam Paser Utara	327	371	379	543	16	19	24	29	20	19	16	19
9	Kota Bontang	351	314	343	444	18	20	24	28	20	16	15	16
10	***KAB. MAHAKAM ULU***	317	285	380	294	18	18	28	25	18	16	14	13
	Kalimantan Timur	215	224	287	370	14	16	21	24	16	14	14	15

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2023, diolah.

Dari sisi akreditasi, pada tahun 2019/2020 untuk jenjang SD terdapat 4 sekolah atau 10,26% yang terakreditasi A dan untuk jenjang SMP terdapat 5 sekolah atau 33,33% yang terakreditasi A. Persentase ini masih berada di urutan bawah dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan dan Bontang masih mendominasi jumlah sekolah yang terakreditasi A untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu. Hal

ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mahakam Ulu dalam meningkatkan sekolah yang memiliki peringkat akreditasi A.

Tabel 2.50
Status Akreditasi Sekolah Dasar Tahun 2019/2020

No	Nama Wilayah	A	(%)	B	(%)	C	(%)	Tidak Terakreditasi	(%)
1	Kab. Paser	67	29.91	129	57.59	27	12.05	1	0.45
2	Kab. Kutai Kartanegara	125	26.65	263	56.08	79	16.84	2	0.43
3	Kab. Berau	30	20	100	66.67	20	13.33	0	0
4	Kab. Kutai Barat	26	12.44	80	38.28	102	48.8	1	0.48
5	Kab. Kutai Timur	104	48.83	79	37.09	28	13.15	2	0.94
6	Kab. Penajam Paser Utara	46	43.4	48	45.28	12	11.32	0	0
7	***Kab. Mahakam Ulu***	***4***	***10.26***	***30***	***76.92***	***5***	***12.82***	***0***	***0***
8	Kota Samarinda	74	33.64	127	57.73	19	8.64	0	0
9	Kota Balikpapan	142	77.6	37	20.22	4	2.19	0	0
10	Kota Bontang	38	67.86	12	21.43	5	8.93	1	1.79
	Prov. Kalimantan Timur	656	35.1	905	48.42	301	16.1	7	0.37

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2022 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Tabel 2.51
Status Akreditasi SMP Tahun 2019/2020

No	Nama Wilayah	A	(%)	B	(%)	C	(%)	Tidak Terakreditasi	(%)
1	Kab. Paser	25	32.89	26	34.21	25	32.89	0	0
2	Kab. Kutai Kartanegara	31	22.46	69	50	36	26.09	2	1.45
3	Kab. Berau	22	45.83	19	39.58	7	14.58	0	0
4	Kab. Kutai Barat	7	11.86	27	45.76	24	40.68	1	1.69
5	Kab. Kutai Timur	40	46.51	36	41.86	10	11.63	0	0
6	Kab. Penajam Paser Utara	10	31.25	19	59.38	3	9.38	0	0
7	***Kab. Mahakam Ulu***	***5***	***33.33***	***4***	***26.67***	***6***	***40***	***0***	***0***
8	Kota Samarinda	39	47.56	35	42.68	7	8.54	1	1.22
9	Kota Balikpapan	48	73.85	11	16.92	4	6.15	2	3.08
10	Kota Bontang	16	55.17	12	41.38	1	3.45	0	0
	Prov. Kalimantan Timur	243	38.57	258	40.95	123	19.52	6	0.95

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2022 *(data yang ada merupakan data terbaru)..*

Di tahun 2021 sekolah dengan peringkat akreditasi A untuk SD adalah 7,69% dan akreditasi B sebanyak 76,92%. Pada jenjang SMP persentase sekolah yang terakreditasi A sebanyak 33,33% dan akreditasi B sebanyak 26,67%. Untuk jenjang SMA dan SMK belum ada sekolah yang memiliki akreditasi A, bahkan untuk SMK semua masih memiliki akreditasi C. Akreditasi merupakan salah satu indicator kualitas sekolah termasuk sarana dan prasarana pembelajaran.

Gambar 2.14
Status Akreditasi Sekolah di Mahakam Ulu
Tahun 2021

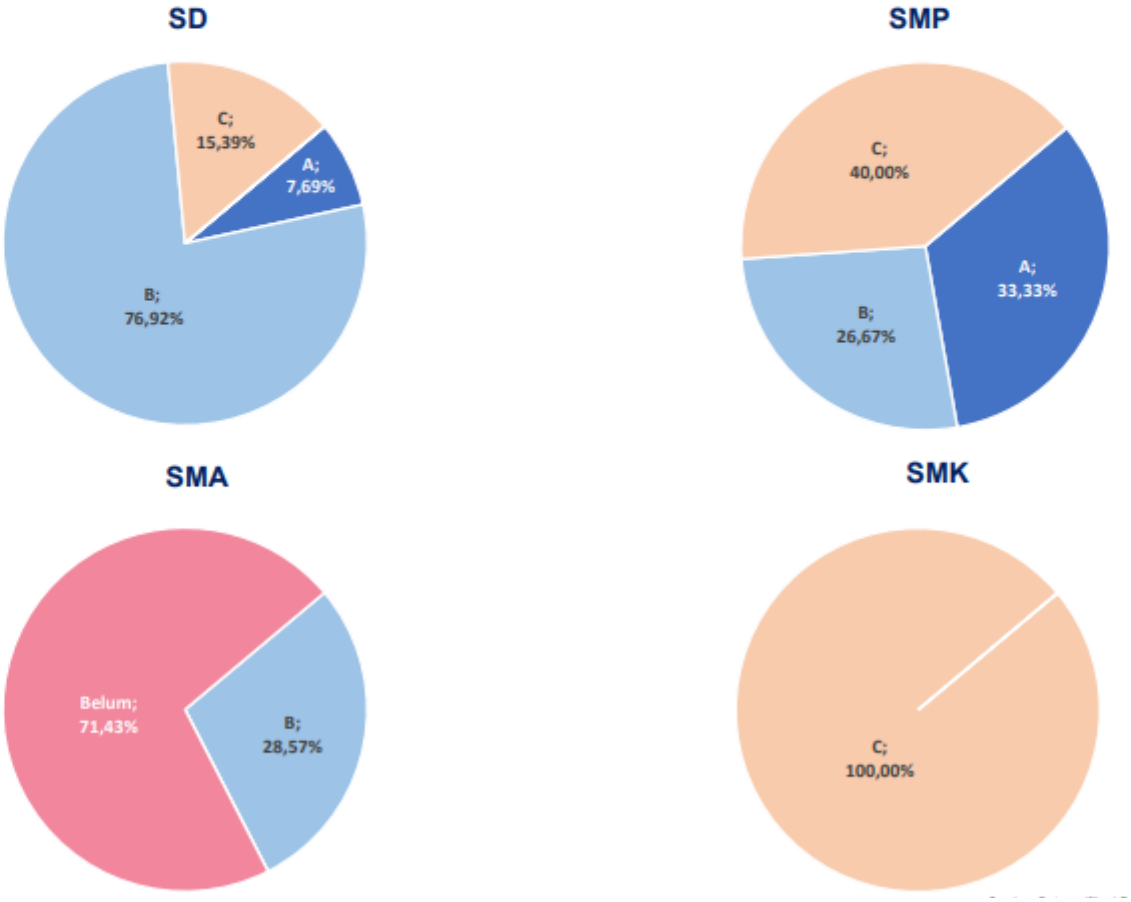

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2022
(data yang ada merupakan data terbaru).

Indikator lain yang dipergunakan untuk melihat pembangunan bidang kesehatan adalah latar belakang jenjang pendidikan guru. Di Mahakam Ulu, pada tahun 2019/2020 jenjang SD masih memiliki guru yang berlatar belakang pendidikan di bawah D4/S1 yaitu sebanyak 55,1% dan sisanya sebanyak 44,9% memiliki jenjang D4/S1 ke atas. Hal ini juga menjadi tantangan yang cukup berat, mengingat UU mensyaratkan profesi guru minimal bependidikan D4/S1 dan memiliki sertifikat pendidikan. Di sisi lain, sertifikat pendidik sendiri mensyaratkan pendidikan minimal adalah D4/S1, sehingga dapat disimpulkan proprosi guru bersertifikat pendidikan untuk jenjang SD di

Mahakam Ulu masih kecil. Kondisi serupa juga terjadi untuk jenjang pendidikan SMA yang menunjukkan bahwa proporsi guru berpendidikan di bawah D4/S1 di Mahakam Ulu meski kecil namun menjadi yang terbesar bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur.

Tabel 2.52
Jenjang Pendidikan Guru di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019/2020

No.	Nama Wilayah	SD		SMP		SMA		SMK	
		< D4/S1 (%)	>= D4/S1 (%)	< D4/S1 (%)	>= D4/S1 (%)	< D4/S1 (%)	>= D4/S1 (%)	< D4/S1 (%)	>= D4/S1 (%)
1	Kab. Paser	7.96	92.04	2.56	97.44	2.27	97.73	7.37	92.63
2	Kab. Kutai Kartanegara	8.48	91.52	4.66	95.34	1.21	98.79	5.65	94.35
3	Kab. Berau	17.9	82.1	5.45	94.55	3.22	96.78	5.07	94.93
4	Kab. Kutai Barat	34.27	65.73	12.53	87.47	2.17	97.83	6.45	93.55
5	Kab. Kutai Timur	6.86	93.14	2.16	97.84	0	100	6.95	93.05
6	Kab. Penajam Paser Utara	6.38	93.62	5.8	94.2	0.52	99.48	2.42	97.58
7	***Kab. Mahakam Ulu***	***55.1***	***44.9***	***9.92***	***90.08***	***8.7***	***91.3***	***0***	***100***
8	Kota Samarinda	10.08	89.92	4.49	95.51	2.11	97.89	5.57	94.43
9	Kota Balikpapan	5.88	94.12	3.22	96.78	1.86	98.14	3.19	96.81
10	Kota Bontang	8.39	91.61	3.21	96.79	0.69	99.31	3.11	96.89
	Prov. Kalimantan Timur	11.93	88.07	4.79	95.21	1.82	98.18	5.07	94.93

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2022 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Meskipun dari sisi jenjang pendidikan guru di Mahakam Ulu terglong cukup bagus khususnya untuk SMP, SMA, dan SMK namun dari sisi sertifikasi pendidik kondisi Mahakam Ulu masih memerlukan perhatian. Hingga tahun 2019 proporsi guru yang bersertifikat pendidikan masih sangat kecil. Hal yang menarik adalah sekalipun guru SD hanya memiliki 44,9% yang berpendidikan minimal D4/S1, namun proporsi guru SD yang bersertifikat pada tahun 2019 adalah yang terbesar yaitu 13,1%. Untuk jenjang SMP, guru yang bersertifikat sebesar 6,8% dan untuk jenjang SMA adalah 8,0% sedangkan untuk jenjang SMK meski 100% gurunya berpendidikan minimal D4/S1 namun belum ada yang bersertifikat pendidik.

Di tahun 2021 guru SD dengan jenjang Pendidikan D4 atau S1 menjadi 84,5% dan SMP serta SMA masing-masing 96,2% dan 96,3%. Untuk SMK guru dengan Pendidikan D4 atau sarjana adalah 100%. Meski pun Sebagian besar guru sudah berpendidikan D4 atau sarjana namun masih sangat sedikit guru yang memiliki sertifikat Pendidikan, padahal sertifikat Pendidikan ini merupakan kewajiban sebagaimana amanat undang-undang.

Gambar 2.15
Jenjang Pendidikan Guru di Mahakam Ulu
Tahun 2021

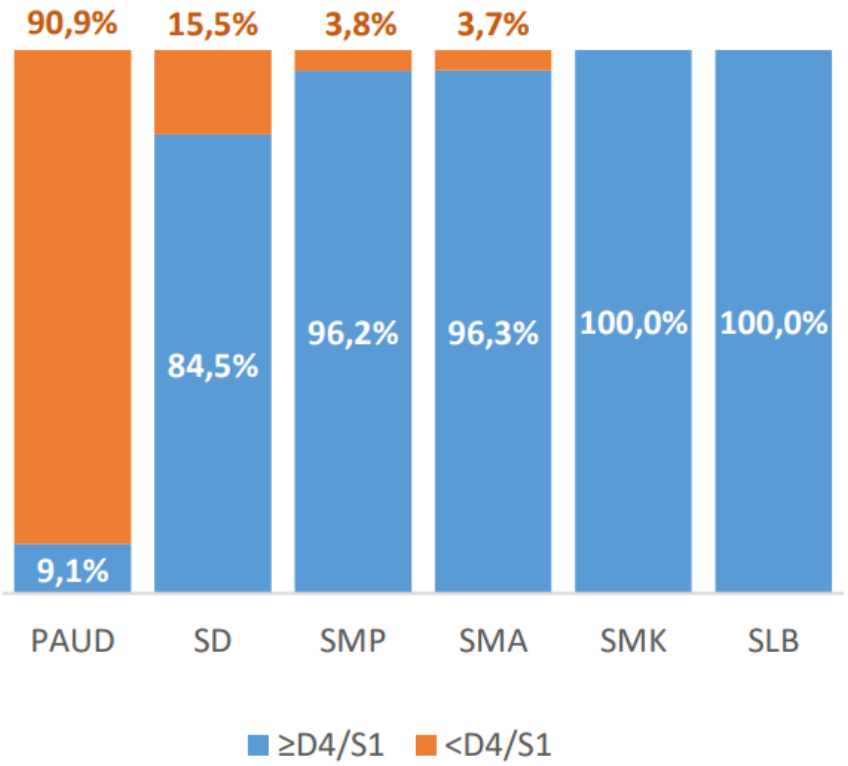

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2022.
(data yang ada merupakan data terbaru).

Gambar 2.16
Proporsi Guru Bersertifikat Pendidik
di Mahakam Ulu Tahun 2021

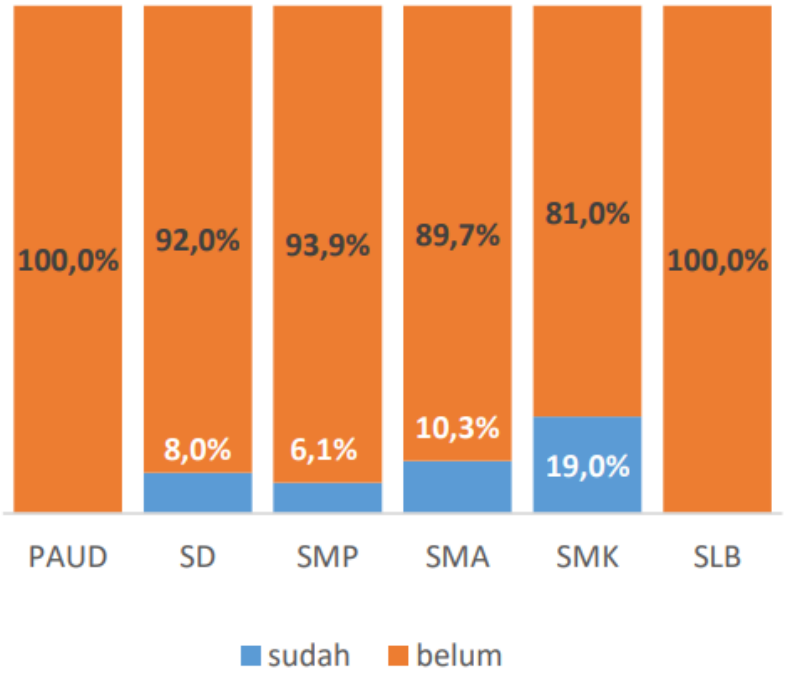

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2022.
(data yang ada merupakan data terbaru).

b. Urusan Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salag satu urusan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu ukuran yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat adalah besarnya angka kesakitan penduduk yang menggambarkan secara umum tingkat kesehatan penduduk. Berdasarkan ukuran ini angka kesakitan penduduk Mahakam Ulu pada tahun 2022 mencapai 8,22% dan tergolong terkecil kedua setelah Kota Balikpapan. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum lebih dari 90% penduduk Mahakam Ulu pada tahun 2022 adalah sehat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masalah kesehatan di Mahakam Ulu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah daerah. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan provinisi Kalimantan Timur yang mencapai 10,90%.

Tabel 2.53

Angka Kesakitan Penduduk Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki + Perempuan		
	Ya	Tidak	Total
Kabupaten Paser	8,51	91,49	100,00
Kabupaten Kutai Barat	21,27	78,73	100,00
Kabupaten Kutai Kartanegara	11,75	88,25	100,00
Kabupaten Kutai Timur	13,06	86,94	100,00
Kabupaten Berau	10,14	89,86	100,00
Kabupaten Penajam Paser Utara	8,45	91,55	100,00
Kabupaten Mahakam Hulu	8,22	91,78	100,00
Kota Balikpapan	6,45	93,55	100,00
Kota Samarinda	12,29	87,71	100,00
Kota Bontang	10,43	89,57	100,00
Kalimantan Timur	10,90	89,10	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022.

Dalam hal kesehatan balita, berdasarkan kepemilikan kartu imunisasi, pada tahun 2022 sebanyak 97,26% balita di Mahakam Ulu telah memiliki kartu imunisasi dan hanya 2,74% yang tidak memiliki kartu imunisasi. Angka ini adalah peringkat ke 3 setelah Kutai Barat dan Bontang.

Tabel 2.53

Status Kepemilikan Kartu Imunisasi Balita Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Mempunyai Kartu Imunisasi			Jumlah
	Ya, Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Ada Kartu	
Kabupaten Paser	46,37	39,88	13,75	100,00
Kabupaten Kutai Barat	73,41	25,44	1,15	100,00
Kabupaten Kutai Kartanegara	46,06	46,27	7,67	100,00
Kabupaten Kutai Timur	40,75	48,85	10,40	100,00
Kabupaten Berau	41,33	51,39	7,27	100,00
Kabupaten Penajam Paser Utara	54,80	38,31	6,90	100,00
Kabupaten Mahakam Hulu	25,00	72,26	2,74	100,00
Kota Balikpapan	72,11	23,53	4,36	100,00
Kota Samarinda	44,97	44,63	10,41	100,00
Kota Bontang	82,44	16,00	1,57	100,00
Kalimantan Timur	53,04	39,24	7,72	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022.

Dalam hal kinerja Balita yang telah memiliki imunsasi lengkap, pada tahun 2022 jumlah balita di Mahakam Ulu dengan munsasi lengkap mencapai 75,42% terdiri dari 77,94% laki-laki dan 72,99% perempuan. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 60,42% dan dibandingkan dengan daerah lain Mahakam Ulu masuk dalam peringkat ke 2 terbanyak setelah Penajam Paser Utara. Meski relative cukup banyak balita yang mendapatkan imunisasi lengkap, namun masalah imunisasi balita tetap memerlukan perhatian mengingat masih terdapat 24,58% balita yang belum mendapatkan imunsasi lengkap dengan berbagai factor penyebabnya sehingga meski yang memiliki kartu imunisasi balita cukup dominan namun belum semua imunisasi mampu diberikan pada seluruh balita.

Tabel 2.55
Balita dengan Imunisasi Lengkap Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Kabupaten Paser	55,84	69,91	62,92
Kabupaten Kutai Barat	64,39	67,96	66,14
Kabupaten Kutai Kartanegara	59,93	61,60	60,75
Kabupaten Kutai Timur	52,00	50,03	51,13
Kabupaten Berau	63,38	61,13	62,27
Kabupaten Penajam Paser Utara	85,56	84,06	84,83
Kabupaten Mahakam Hulu	77,94	72,99	75,42
Kota Balikpapan	67,47	53,76	60,84
Kota Samarinda	58,72	45,69	52,43
Kota Bontang	73,18	71,48	72,35
Kalimantan Timur	62,28	58,44	60,42

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur, antara lain jaringan jalan, sungai, dan udara. Jenis infrastruktur memiliki peranannya masing-masing yang saling bersinergi untuk menciptakan konektivitas di dalam maupun keluar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Sistem jaringan transportasi merupakan infrastruktur ekonomi yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan sekaligus mempersatukan ekonomi kawasan dalam bentuk jaringan sistem transportasi darat dan udara yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan membutuhkan dukungan terminal sebagai tempat perpindahan antarmoda transportasi. Sistem jaringan transportasi sungai yang selama ini menjadi utama, selanjutnya harus dapat terintegrasi dengan jaringan jalan. Sementara itu sistem jaringan transportasi udara akan berfungsi sebagai penghubung dengan kawasan di pedalaman Mahakam Ulu, yaitu menuju Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.

Belum semua Kecamatan dapat dilalui dengan akses darat, karena jaringan jalan masih belum terhubung. Jaringan jalan eksisting berupa jalan lingkungan dan jaringan jalan bekas perusahaan. Kondisi jalan di Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar merupakan jalan dengan perkerasan tanah dan kerikil, serta beton pada beberapa ruas. Belum terdapat jalan dengan perkerasan aspal. Lebar jalan di Kabupaten Mahakam Ulu berkisar antara 2-3 meter. Hanya beberapa jalan yang lebih dari 5 meter (jalan perusahaan).

Pengembangan jaringan jalan perlu dilakukan untuk menghemat biaya transportasi penduduk Mahakam Ulu. Untuk pengembangan jalan, diarahkan pada keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan mulai dari Mamahak Teboq hingga ke Desa Long Apari. Setelah itu akses jalan mulai dikembangkan dengan membuka keterhubungan dengan kabupaten lainnya, antara lain Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara), Kabupaten Kutai Kertanegara (Provinsi Kalimantan Timur). Kabupaten Putussibau (Provinsi Kalimantan Barat), dan Kabupaten Murung Raya (Provinsi Kalimantan Tengah). Pembukaan akses kawasan perbatasan juga perlu dilakukan dalam rangka pengangkutan barang dan pemerataan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain pembangunan

jalan, perlu dilakukan juga peningkatan perkerasan jalan, karena sebagian besar jaringan jalan masih berupa tanah dan kerikil.

Pada tahun 2019 kondisi jalan Mahakam Ulu dalam kondisi baik sepanjang 18. 796 Km, jalan dalam kondisi sedang seanjang 3.115 Km. Adapun kondisi jalan dalam kodisi rusak merupakan yang terbanyak yakni sepanjang 78.366 Km. Demikian pula dengan jalan dalam kondisi rusak berat yang mencapai 51.465 Km.

Tabel 2.56
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (km) Tahun 2019

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Laham	-	-	16.200	5.540
2	Long Hubung	1.200	-	52.800	9.000
3	Long Bagun	17.596	3.115	9.366	36.925
4	Long Pahangai	-	-	-	-
5	Long Apari	-	-	-	-
Jumlah		18.796	3.115	78.366	51.465

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Pada tahun 2020 Kabupaten Mahakam Ulu memiliki panjang jalan sepanjang 645,44km. Menurut Jenis Permukaannya, jalan yang diaspal memiliki panjang 29,05 km dan yang tidak diaspal sepanjang 57,46 km. Berdasarkan kondisinya jalan di Kabupaten Mahakam Ulu, tahun 2020 kondisi jalan masih didominasi oleh kondisi jalan yang rusak berat. Tercatat bahwa kondisi jalan yang rusak berat ada sepanjang 419,20 km sedangkan jalan yang berkondisi baik hanya sepanjang 35,31 km. Jika dipersentasekan, kondisi jalanan yang baik di kabupaten Mahakam Ulu sebesar 5,47% dari total panjang jalan di Mahakam Ulu. Kondisi jalan yang sedang sebesar 8,86% sedangkan jalan yang rusak sebesar 20,72% dan kondisi rusak berat sebesar 64,95%.

Tabel 2.57
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan
di Kabupaten Mahakam Ulu (km) Tahun 2020

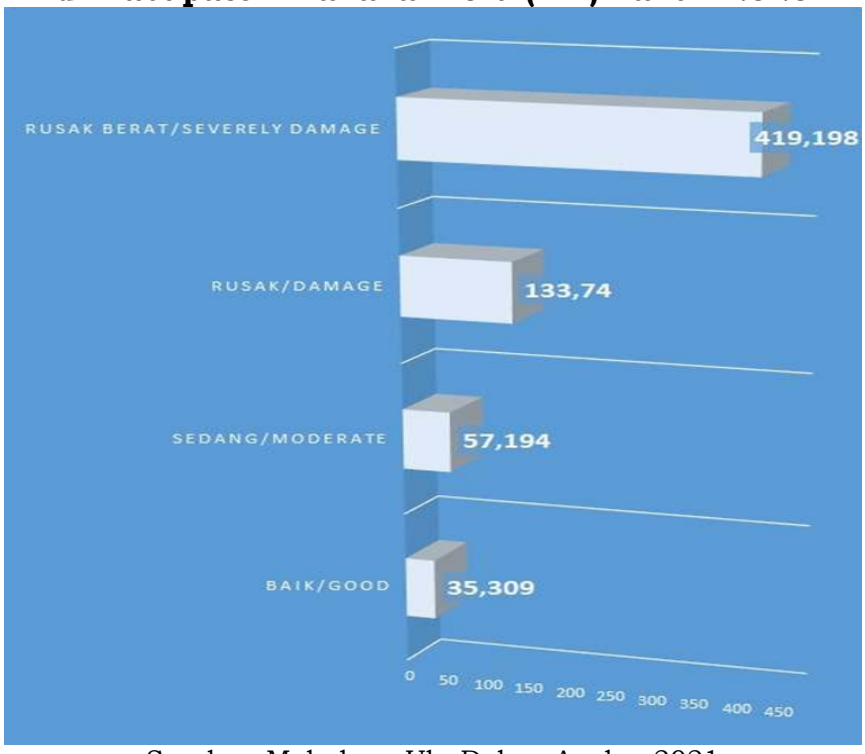

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka, 2021
(data yang ada merupakan data terbaru).

Menurut kewenangannya, panjang jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 105.348 Km dan kewenangan Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang 151.742 Km.

Tabel 2.58
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang berwenang mengelolanya di Kabupaten Mahakam Ulu (Km) Tahun 2019

No	Kecamatan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
		Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1	Laham	-	19.615	2.125	21.740
2	Long Hubung	-	36.780	26.220	63.000
3	Long Bagun	-	48.953	18.049	67.002
4	Long Pahangai	-	-	-	-
5	Long Apari	-	-	-	-
	Jumlah	-	105.348	46.394	151.742

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Panjang jalan beraspal di Mahakam Ulu sementara hanya sepanjang 16.766 Km. Panjang jalan selain aspal dan lainnya masing-masing sepanjang 35.099 Km dan 99.877 Km.

Tabel 2.59
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (Km) 2019

No	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
		Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
1	Laham	-	5.540	16.200	21.740
2	Long Hubung	-	9.000	54.000	63.000
3	Long Bagun	16.766	20.559	29.677	67.002
4	Long Pahangai	-	-	-	-
5	Long Apari	-	-	-	-
	Jumlah	16.766	35.099	99.877	151.742

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Untuk status air minum yang dikonsumsi rumah tangga, di Mahakam Ulu pada tahun 2017, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 74,05% dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga 2020. Pada tahun 2021 rumah tangga pengguna air bersih mencapai 74,08%. Persentase rumah tangga pengguna air bersih selama 2017-2020 menunjukan tren peningkatan, namun 2020-2021 terjadi penurunan dari 81,83% menjadi 74,8%. Penurunan tersebut disebabkan karena factor alam seperti musim kemarau atau musim hujan yang menyebabkan gangguan pada suplai air bersih.

Gambar 2.17
Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Tahun 2017-2021 (%)

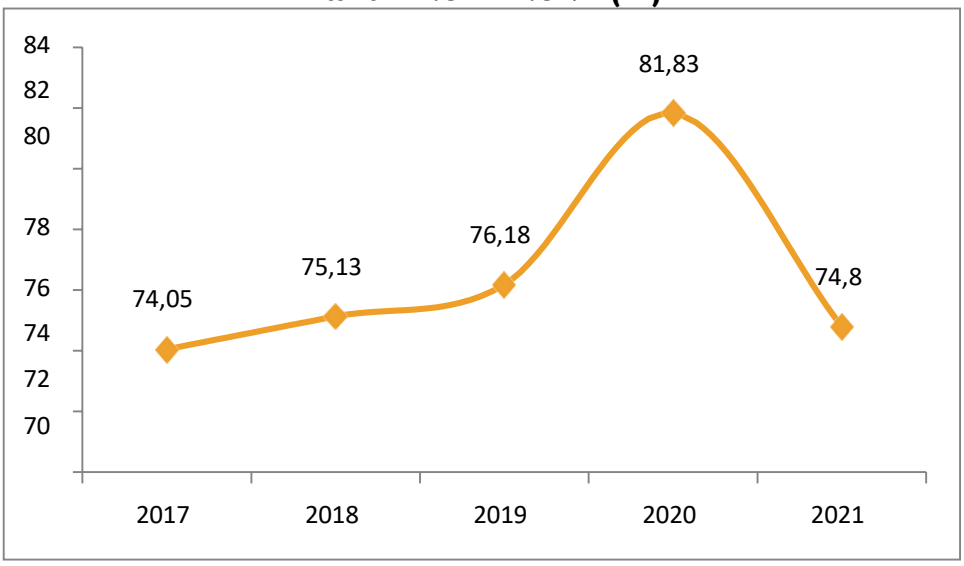

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu 2022
(data yang ada merupakan data terbaru).

Kondisi ini membuat Mahakam Ulu berada di peringkat terbawah se Kalimantan Timur dalam hal status air minum dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur.

Di tahun 2022 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih naik tajam menjadi 87,07% dan pengguna sumber air minum layak mencapai 45,53%. Untuk pengguna sumber air minum bersih Mahakam Ulu menduduki peringkat kedua terendah setelah Kutai Barat dan pengguna sumber air minum layak menduduki peringkat terendah di Kalimantan Timur.

Tabel 2.60
Status Air Minum yang Dikonsumsi Rumah Tangga Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih	Sumber Air Minum Layak
Kabupaten Paser	87,32	69,71
Kabupaten Kutai Barat	77,26	82,33
Kabupaten Kutai Kartanegara	97,27	82,11
Kabupaten Kutai Timur	93,17	78
Kabupaten Berau	93,41	82,88

Kabupaten Penajam Paser Utara	92,56	86,35
Kabupaten Mahakam Ulu	87,07	45,53
Kota Balikpapan	97,75	97,19
Kota Samarinda	99,73	94,31
Kota Bontang	100	99,86
Kalimantan Timur	**95,61**	**87,14**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022.

Cakupan layanan air minum perpipaan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 mencapai 10,85 persen dari 1.272 sambungan. Banyaknya program/kegiatan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, pemerintah dan juga oleh kabupaten/kota (melalui APBD II). Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah mulai menjadikan sektor penyediaan air minum menjadi salah satu program prioritas daerah dan nasional.

Namun dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kehandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air).

Tabel 2.61
Rekapitulasi Kehilangan Air Rata-Rata
Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Jml Unit	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Kapasitas Distribusi (l/dt)	Kapasitas Terjual (l/dt)	Idle Capacity (l/dt)	Kehilangan Air (%)
1	Kabupaten Paser	8	360	307,00	290,43	179,57	59,00	22,16
2	Kabupaten Kutai Barat	12	298	212,00	189,00	151,90	90,00	12,73
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	33	1.667	1.532,00	1.376,00	923,00	135,00	33,00
4	Kabupaten Kutai Timur	17	640	427,60	421,30	322,10	212,40	12,29
5	Kabupaten Berau	18	548	442,50	374,00	344,00	130,00	17,54
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	5	340	134,00	134,00	124,00	206,00	25,76
7	Kabupaten Mahakam Ulu	12	157	47,00	47,00	47,00	110,00	-
8	Kota Balikpapan	10	1.490	1.252,00	1.169,25	852,84	211,00	34,38
9	Kota Samarinda	13	2.425	2.587,00	2.404,17	1.534,56	80,00	33,55
10	Kota Bontang	4	470	406,69	400,74	341,62	63,31	12,93
Kalimantan Timur		**132**	**8.395**	**7.347,79**	**6.805,98**	**4.821,59**	**1.296,71**	**22,70**

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2020 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak mengalami kehilangan air yang dimana penyebab kehilangan air pada umumnya disebabkan oleh adanya kebocoran pipa jaringan distribusi yang telah tua dan belum akuratnya pencatatan meter water pelanggan, masih banyaknya water meter pelanggan yang rusak dan belum dilakukan peneraan water meter pelanggan. Hal ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Mahakam Ulu tidakada kebocoran pipa dan baiknya water meter pelanggan. Ibu Kota Provinsi yakni Kota Samarinda mengalami kehilangan air tertinggi disusul Kota Balikpapan.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan air ini adalah permasalahan distribusi yang belum merata dan menjangkau lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh antara lain jauhnya jarak antara sumber air baku ke layanan masyarakat sehingga membutuhkan energi listrik yang cukup besar dan berpengaruh pada tingginya biaya, jika

dilihat dari sisi system jaringan masih terdapat SPAM yang dibangun tetapi belum beroperasi secara maksimal karena masih terkendala infrastruktur yang kurang lengkap.

Dalam hal penataan ruang, Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat- pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   1) mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
   2) memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
   3) harus berhirarki 3 dan/atau berjejaring 4 di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan system perkotaan; dan
   4) mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
   5) Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun;
   6) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Di Mahakam Ulu hingga tahun 2022 sebagian besar perumahan penduduk memiliki luas lantai 50-99 m2 yaitu sebanyak 51,18% dan penduduk yang memiliki luas lantai ≤50m2 adalah 28,75%. Dengan demikian dari sisi luas lantai rumah penduduk dapat dikatakan cukup memadai. Di provinsi Kalimantan Tmur sendiri jumlah penduduk yang memiliki rumah dengan luas lantai 50-99m2 adalah 42,19%, cukup jauh di bawah Mahakam Ulu. Sementara itu jumah penduduk dengan luas lantai ≤50m2 di provinsi Kalimantan Timur 3,05% dan angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan Mahakam Ulu.

Tabel 2.62
Luas Lantai Rumah Tahun 2022 (m²)

Kabupten/Kota	Luas (m²)				
	<50	50-99	100-150	150+	Total
Kabupaten Paser	37,77	43,34	8,40	10,50	100,00
Kabupaten Kutai Barat	23,98	46,37	18,96	10,69	100,00
Kabupaten Kutai Kartanegara	28,04	46,27	16,36	9,34	100,00
Kabupaten Kutai Timur	34,85	48,35	8,89	7,91	100,00
Kabupaten Berau	31,79	36,35	15,70	16,16	100,00
Kabupaten Penajam Paser Utara	30,23	55,28	9,85	4,64	100,00
Kabupaten Mahakam Hulu	28,75	51,18	16,43	3,64	***100,00***
Kota Balikpapan	38,43	37,98	9,51	14,08	100,00
Kota Samarinda	27,40	37,52	19,59	15,49	100,00
Kota Bontang	21,06	39,19	20,74	19,01	100,00
Kalimantan Timur	**31,05**	**42,19**	**14,48**	**12,28**	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022.

Dalam hal kepemilikan fasilitas buang air besar di rumah tangga, kondisi Mahakam Ulu pada tahun 2022 semua rumah tangga atau 100% memiliki fasilitas buang air besar dan 92,97% diantaranya digunakan sendiri. Di Kalimantan Timur, Makaham Ulu menjadi satu-satunya daerah yang 100% memiliki fasilitas buang air besar.

Tabel 2.63
Status Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Digunakan sendiri	Digunakan Bersama	Umum	Tidak digunakan	Tidak ada	Total
Kabupaten Paser	92,46	2,06	1,15	0,40	3,93	100,00
Kabupaten Kutai Barat	89,19	5,11	4,84	0,00	0,86	100,00
Kabupaten Kutai Kartanegara	92,09	2,74	5,08	0,00	0,09	100,00
Kabupaten Kutai Timur	91,21	3,25	3,32	0,00	2,22	100,00
Kabupaten Berau	90,66	4,36	3,15	0,00	1,83	100,00
Kabupaten Penajam Paser Utara	91,34	4,08	2,02	0,62	1,95	100,00
Kabupaten Mahakam Hulu	92,97	1,74	5,28	0,00	0,00	***100,00***
Kota Balikpapan	97,55	0,82	0,81	0,00	0,83	100,00
Kota Samarinda	95,92	3,65	0,29	0,00	0,14	100,00
Kota Bontang	96,29	1,97	0,21	0,00	1,54	100,00

Kalimantan Timur	**93,87**	**2,82**	**2,21**	**0,06**	**1,04**	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan urusan ini adalah masalah pengelolaan persambahan. Berdasarkan data yang dikutip dari http://sipkp.ciptakarya.pu.go.id/ permasalahan di Kabupaten Mahakam Ulu ini berkaitan pengelolaan sampah misalnya seperti sedikitnya sampah rumah tangga yang terangkut dan 98% sampah belum tertangani. Selain itu sekitar 54,4% sampah dibakar dan 32,5% dibuang ke sungai, dan sekitar 10,3% dibuang ke lahan kosong. Hal ini antara lain disebabkan belum semua kampung memiliki TPS serta belum tersedianya sarana dan sarana pengelolaan persampahan yang memadai seperti misalnya masih belum memiliki TPA.

Dalam hal kelayakan tempat tinggal, rumah tidak layak huni merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat yang dimana kategori rumah tidak layak huni adalah rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Mahakan Ulu mencapai 1.603 unit. Masih tingginya ketidaklayakan rumah tersebut dikarenakan rendahnya segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Tabel 2.64
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	JumlahRTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
1	Kabupaten Paser	9.676	Database DPKPP Kab. Paser, BPS 2020
2	Kabupaten Kutai Barat	0	DISPERKIM Kab. Kubar 2019
3	Kabupaten Kutai	22.780	e-RTLH Kab. Kukar Th. 2020

	Kartanegara		
4	Kabupaten Kutai Timur	8.531	DISPERKIM Verifikasi Disdukcapil Kab. Kutai Timur 2020
5	Kabupaten Berau	2.103	Database DISPERKIM Kab. Berau 2020
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.091	BDT & PEMDA Kab. PPU
7	***Kabupaten Mahakam Hulu***	1.603	FORM 1B Kab. Mahulu 2020
8	Kota Balikpapan	382	FORM 1B Kota Balikpapan 2020
9	Kota Samarinda	23.989	FORM 1B Kota Samarinda 2020
10	Kota Bontang	1.726	e-RTLH Kota Bontang
Kalimantan Timur		**72.881**	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021 *(data yang ada merupakan data terbaru)*.

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur terindentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan kawasan.

Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pemutakhiran SK Bupati/Walikota 2015-2020, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur baik yang

menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah seluas 1.371,21 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 39,6 Ha berdasarkan SK No. 050.136.146/K.63/2020 dengan luasan terendah kedua setelah Kabupaten Berau dengan luasan 28,26 Ha.

Tabel 2.65
Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
1	Kabupaten Paser	179,56	No. 653/KEP-332/2020
2	Kabupaten Kutai Barat	488,59	No. 413.2/K.719/2018
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	168,12	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	Kabupaten Kutai Timur	120,63	No. 050/K.661/2015
5	Kabupaten Berau	28,26	No. 30 Tahun 2020
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	49,07	No. 593.33/270/2017
7	***Kabupaten Mahakam Hulu***	39,6	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Kota Balikpapan	153,3	No. 188.45-326/2020
9	Kota Samarinda	70,52	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Kota Bontang	73,56	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		**1.371,21**	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi sejumlah 3 (tiga) lokasi, di 3 (tiga) kecamatan dengan luas total sebesar 39,6 Ha.

Tabel 2.66
Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			RT/RW	Desa	Kec.
1	Kampung Ujoh Bilang	21,94	11	Ujoh Bilang	Long Bagun

2	KampungLaham	488,59	8	Laham	Laham
3	Kampung Datah Bilang Ilir	168,12	6	Datah Bilang Ilir	Long Hubung

Sumber: Dinas PUPERA Kab Mahakam Ulu, 2021 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 sebesar 74,83% dan tahun 2022 turun menjadi 70,51%. TPAK merupakan perbandingan antara Angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Penurunan TPAK Mahakam Ulu terjadi selama 2020-2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunya angkatan kerja. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai 2,44%; tergolong sangat kecil ditinjau dari provinsi maupun nasional. Permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pengangguran belum diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan.

Tabel 2.67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2022

Keterangan	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,31	77,12	79,00	70,55	76,21	74,83	70,51
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,75	9,05	4,17	3,69	4,37	3,14	2,44

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu 2022 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi tiga kategori lapangan usaha yaitu Sektor 1 yang meliputi sektor pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), Sektor 2 meliputi sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air; sektor pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; serta sektor konstruksi. Sektor 3 meliputi sektor perdagangan, sektor transportasi

dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan; sektor jasa Pendidikan; sektor jasa kesehatan; serta sektor jasa lainnya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 bekerja pada sektor 1 yaitu lapangan usaha pertanian yang mencapai 63,05%, diikuti dengan sektor sektor 3 sebesar 31,98% dan sektor 2 sebesar 4,97%.

Tabel 2.68
Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah (Orang)				Proporsi (%)			
	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Jumlah	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Jumlah
Kabupaten Paser	50.870	23.276	53.060	127.206	39,99	18,30	41,71	100,00
Kabupaten Kutai Barat	30.023	10.097	36.122	76.242	39,38	13,24	47,38	100,00
Kabupaten Kutai Kartanegara	107.740	85.690	163.411	356.841	30,19	24,01	45,79	100,00
Kabupaten Kutai Timur	55.520	42.740	91.755	190.015	29,22	22,49	48,29	100,00
Kabupaten Berau	29.243	27.349	51.571	108.163	27,04	25,28	47,68	100,00
Kabupaten Penajam Paser Utara	33.677	12.676	34.562	80.915	41,62	15,67	42,71	100,00
Kabupaten Mahakam Hulu	***8.737***	***689***	***4.432***	***13.858***	***63,05***	***4,97***	***31,98***	***100,00***
Kota Balikpapan	8.838	61.523	236.432	306.793	2,88	20,05	77,07	100,00
Kota Samarinda	19.724	99.484	276.271	395.479	4,99	25,16	69,86	100,00
Kota Bontang	5.079	20.712	65.617	91.408	5,56	22,66	71,78	100,00
Kalimantan Timur	**349.451**	**384.236**	**1.013.233**	**1.746.920**	**20,00**	**22,00**	**58,00**	**100,00**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2023.

Menurut kriteria BPS, penduduk secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sedangkan angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka di Mahakam Ulu yang rendah di tahun 2022 tersebut (yaitu 2,44%) menjadikan Mahakam Ulu menduduki peringkat ke 2 terendah di Kalimantan Timur setelah Penajam Paser Utara. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Timur, tingkat pengangguran Mahakam Ulu jauh lebih rendah.

Tabel 2.69
Perbandingan Tingkat Pengangguran
se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	5	4.55	4.52	5.70	4.88
Kutai Barat	4.86	5.08	4.97	5.14	4.62
Kutai Kartanegara	5.96	5.98	5.70	5.66	4.14
Kutai Timur	5.93	5.53	5.45	5.35	6.48
Berau	5.62	5.08	5.08	5.82	5.02
Penajam Paser Utara	4.76	6.26	6.22	2.95	2.12
Mahakam Ulu	4.17	3.69	3.49	3.14	2.44
Balikpapan	9.52	7.29	9.00	8.94	6.90
Samarinda	6.16	5.87	8.26	8.16	6.78
Bontang	9.61	9.19	9.46	9.92	7.81
Kalimantan Timur	6.6	6.09	6.87	6.83	5.71

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal,

misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara itu **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Mahakam ulu selama 2012-2022 terlihat menunjukkan kinerja yang baik. Tahun 2021 IPG Kabupaten Mahakam Ulu adalah 81,65 dan tahun 2022 meningkat menjadi 82,32. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur yang besarnya 86,61 di tahun 2022.

Tabel 2.70
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2012-2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	66.86	67.82	68.58	68.66	-	69.78	70.64	71.41	71,15	71.19	71.98
Kutai Barat	80.91	82.87	83.01	82.51	-	83.3	83.52	83.84	83,87	84.28	84.62
Kutai Kartanegara	74.92	76.13	76.92	77.22	-	78.54	78.83	79.14	78,90	79.12	79.80
Kutai Timur	73.54	74.17	74.9	74.94	-	75.48	76.03	76.51	76,26	76.40	77.11
Berau	85.76	86.27	87.23	87.37	-	87.77	87.92	87.93	87,61	87.76	87.76
Penajam Paser Utara	82.87	84.71	85.97	86.26	-	86.31	86.34	86.22	86,39	86.57	86.83
Mahakam Ulu	0	76.65	78.04	78.31	-	79.82	80.18	80.89	80,98	81.65	82.32
Balikpapan	86.72	87.14	90.05	89.97	-	89.74	89.76	89.71	89,65	89.83	89.96
Samarinda	88.03	88.71	89.26	89.44	-	89.26	89.42	89.41	89,27	89.27	89.75
Bontang	84.25	85.47	86.31	85.84	-	86.44	86.61	86.72	86,87	87.12	87.52
Kalimantan Timur	84.33	84.69	84.75	85.07	85.6	85.62	85.63	85.98	85,70	85.95	86.61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Indeks Pemberdayan Gender (IDG) selama 3 tahun terakhir dari 2020-2022 menunjukkan kenaikan. IDG tahun 2022 sebesar 82,32 (peringkat ke 7 se Kalimantan Timur), masih lebih tinggi dibandingkan Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.

Tabel 2.71
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Paser	65.66	65.67	71.98
Kutai Barat	60.60	65.34	84.62
Kutai Kartanegara	61.43	62.76	79.80
Kutai Timur	53.77	53.78	77.11
Berau	57.91	56.48	87.76
Penajam Paser Utara	49.75	49.85	86.83
Mahakam Ulu	***80.41***	***80.43***	***82.32***
Balikpapan	68.97	68.62	89.96
Samarinda	70.65	67.54	89.75
Bontang	51.97	45.67	87.52
Kalimantan Timur	65.54	66.64	86.61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Dalam hal IPM Perempuan selama 2012-2022 nilai IPM Perempuan Kabupaten Mahakanm Ulu juga terlihat memiliki kinerja yang cukup baik dalam arti terjadi peningkatan selama periode tersebut, hanya saja untuk tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 59,81 dari yang sebelumnya 60,28. Penurunan tersebut juga terjadi di seluruh daerah di Kalimantan Timur. Nilai IPM Perempuan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 adalah 61,64 (terendah kedua setelah Paser) dan angka tersebut masih jauh di bawah provinsi Kalimantan Timur yang besarnya 71,21. Nilai IPM Perempuan merupakan indeks komposit yang terdiri dari indeks

harapan lama sekolah perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, pengeluaran perkapita perempuan, serta umur harapan hidup perempuan.

Tabel 2.72
Perkembangan IPM Perempuan, Tahun 2012-2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	49.14	50.85	51.56	51.97	-	53.43	54.39	55.38	55,10	55.76	56.70
Kutai Barat	59.05	60.87	61.68	61.95	-	63.18	63.72	64.7	64,27	65.16	66.08
Kutai Kartanegara	56.36	57.88	59.33	59.94	-	61.4	61.89	62.63	62,36	62.88	63.86
Kutai Timur	54.86	55.77	56.58	57.1	-	58.42	59.28	60.36	59,79	60.52	61.39
Berau	64.63	66.03	67.05	67.4	-	68.41	68.88	69.74	69,46	69.96	70.49
Penajam Paser Utara	59.85	61.53	63.09	63.83	-	64.98	65.47	65.91	65,74	66.34	66.88
Mahakam Ulu	0	53.57	56.61	57.16	-	58.54	59.23	60.28	59,81	60.69	61.64
Balikpapan	70.68	71.76	74.33	74.6	-	75.43	76.16	76.45	76,33	77.03	77.48
Samarinda	71.98	72.86	73.79	74.09	-	74.69	75.22	75.48	75,29	75.94	76.90
Bontang	69.65	71.07	72.15	72.36	-	73.18	73.58	73.84	73,77	74.34	74.89
Kalimantan Timur	65.58	66.39	66.94	67.41	68.02	68.52	69.21	70.14	69,69	70.36	71.21

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

c. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu saat ini sedang berupaya mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah, salah satu upayanya melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan target akhir yang ingin dicapai, yakni mewujudkan masyarakat yang mandiri pangan di tingkat rumah tangga dengan pemanfaatan lahan pekarangan keluarga.

Salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan adalah padi atau beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Pada tahun 2021 luas panen padi di Kabupaten Mahakam Ulu adalah 232,22 Ha, dengan jumlah panen sebanyak 932,09 ton. Tahun 2022 luas panen dan produksi padi mengalami penurunan yang signifikan, luas panen padi

menjadi 201,45 Ha dengan produksi padi sebanyak 489,42 ton. Mengingat beras merupakan salah satu aspek ketahanan pangan yang penting, tentu saja perlu untuk dipertimbangkan kelestarian lingkungan dengan kebijakan pembangunan yang tidak mengganggu produksi padi dan beras. Area atau wilayah yang dipandang potensial untuk tanaman padi perlu dijaga agar ketahanan pangan di Mahakam Ulu dalam jangka panjang dapat terjaga.

Tabel 2.73
Produksi Padi di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

Kabupaten/ Kota	2021				2022			
	Luas Panen Padi (Hektar)	Produktivitas Padi (Kuintal/ Hektar)	Produksi Padi (Ton)	Produksi Beras (Ton)	Luas Panen Padi (Hektar)	Produktivitas Padi (Kuintal/ Hektar)	Produksi Padi (Ton)	Produksi Beras (Ton)
Paser	13 137,77	39,56	51 972,06	30 230,50	11 663,92	37,67	43 936,39	25 556,41
Kutai Barat	527,89	38,29	2 021,46	1 175,83	493,12	27,85	1 373,13	798,72
Kutai Kartanegara	27 635,02	37,79	104 441,83	60 750,49	28 028,04	37,86	106 117,23	61 725,02
Kutai Timur	3 660,48	35,84	13 119,61	7 631,26	3 409,53	35,69	12 170,25	7 079,05
Berau	5 756,54	38,85	22 364,87	13 008,91	5 614,17	35,07	19 689,88	11 453,00
Penajam Paser Utara	13 501,60	31,20	42 130,12	24 505,74	13 148,02	32,39	42 590,08	24 773,28
Mahakam Ulu	232,22	40,14	932,09	542,17	201,45	24,29	489,42	284,68
Balikpapan	102,67	34,49	354,13	205,99	91,07	34,66	315,61	183,58
Samarinda	1 632,33	42,82	6 988,91	4 065,23	1 312,78	39,50	5 185,17	3 016,05
Bontang	82,94	42,55	352,88	205,26	69,12	39,98	276,33	160,73
Kalimantan Timur	**66 269,46**	**36,92**	**244 677,96**	**142 321,38**	**64 031,22**	**36,25**	**232 143,49**	**135 030,52**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

Alternatif untuk menjaga ketahanan pangan di kabupaten mahakam ulu perlu dilakukan pengembangan komoditas unggulan daerah diantaranya: (1) pengembangan budidaya tanaman kakao di 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan; long hubung, laham, long bagun dan long pahangai dengan luas areal ± 641 Ha, (2) pencetakan sawah tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan luas areal ± 17.361 Ha, (3) pembangunan sistem pengairan saluran irigasi di kecamatan long bagun dan long hubung.

d. Urusan Lingkungan Hidup

Wilayah Mahakam Ulu masih didominasi oleh kawasan hutan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini diarahkan untuk mengembangkan akses jalan, namun tetap memelihara lingkungan hidup yang ada. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi atau pengendalian bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan karakteristik wilayah hulu dan wilayah hilir pada tiap kecamatan.

Kondisi tutupan lahan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar masih berupa hutan rimba, yaitu dengan persentase sebesar 92,29% dari luas total Kabupaten Mahakam Ulu atau 1.740.102,59 hektar. Proporsi hutan terbesar berada di Kecamatan Long Pahangai, yaitu sebesar sekitar 99,58% dari total luas kecamatan. Proporsi hutan terbesar kedua yaitu berada di Kecamatan Long Apari, sekitar 99,38% wilayahnya merupakan hutan rimba. Proporsi kawasan budidaya eksisting di Kabupaten Mahakam Ulu, hanya sebesar 7,70% dari total luas wilayah Kabupaten, atau 145.243,51 hektar. Kawasan budidaya yang sudah dimanfaatkan masyarakat berupa, perkebunan, sawah, tegalan/ladang, dan air sungai. Kondisi lingkungan hidup yang demikian menjadi potensi yang besar bagi Mahakam Ulu dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara intensif dengan tetap menjaga kondisi lingkungan hidup yang ada.

Kondisi lingkungan hidup secara kuantitatif digambarkan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan

indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Berdasarkan IKLH, Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 memiliki nilai IKLH tertinggi se Provinsi Kalimantan Timur yaitu 82,65 sedangkan IKLH Provinsi Kalimantan Timur sendiri adalah 74,46. Tingginya nilai IKLH dapat dipandang dari dua sisi, *pertama*, kualitas lingkungan hidup di Mahakam Ulu dapat dikelola dengan sangat baik sehingga air sungai, udara, serta tutupan lahan yang ada memiliki kondisi yang berkualitas. *Kedua*, tingginya IKLH dapat pula menggambarkan masih rendahnya aktivitas ekonomi di Mahakam Ulu sehingga tidak menmbulkan dampak kualitas lingkungan hidup.

Grafik 2.18

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

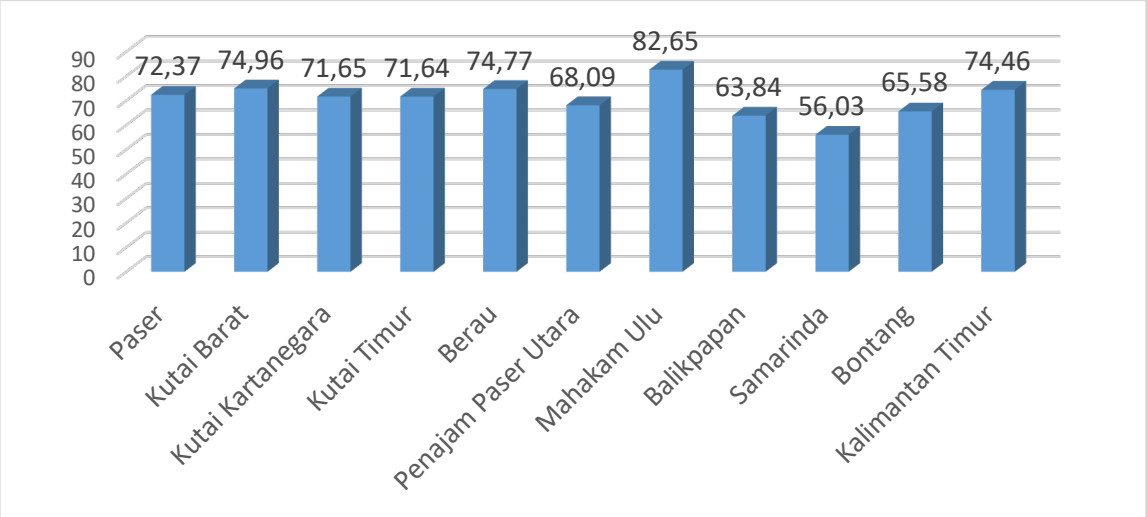

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Potensi pencemaran lingkungan datang dari aktivitas rumah tangga. Kesadaran masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup masih belum kurang sehingga menyebabkan masih tingginya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Penegelolaan sampah dan limbah masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari aspek ruang terbuka hijau (RTH), sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau sebesar 30%. Kabupaten Mahakam Ulu telah memenuhi ketentuan tersebut Bersama dengan Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Karanegara, Paser, dan Panajam Paser Utara.

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Mahakam Ulu didominasi oleh laki-laki. Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi:

1. Pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
3. Pelayanan KTP elektronik;
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI;
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA;
6. Pelayanan pencatatan kelahiran;
7. Pelayanan pencatatan kematian;
8. Pelayanan pencatatan perkawinan;
9. Pelayanan pencatatan perceraian;
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yang belum tercatat di dalam data base kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian

masyarakat masih kurang memahami pentingnya *database* kependudukan. Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

f. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk memiliki makna lain dengan pembatasan jumlah penduduk. Pengendalian penduduk penting dalam rangka perencanaan pembangunan. Pengendalian ini erat kaitannya dengan jumlah pasangan usia subur di Mahakam Ulu. Tahun 2019 jumlah pasangan usia subur mencapai 4.748 dan yang terbanyak di Kecamatan Long Bagun dan alisng sedikit di Kecamatan Laham.

Tabel 2.74
Pasangan Usia Subur Tahun 2019

Kecamatan *Subdistrict*	**Jumlah PUS** *Eligible Couples*
(1)	**(2)**
Laham	427
Long Hubung	1 221
Long Bagun	1 496
Long Pahangai	828
Long Apari	776
Mahakam Ulu	**4 748**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2020 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Berdasarkan alat kontrasepsi yang dipergunakan, sebagian besar penduduk menggunakan suntik, yaitu 1.449 dan yang paling sedikit

menggunakan MOW. Penggunaan suntik ini relative merata di setiap kecamatan. Penggunaan pil mendudukin peringkat kedua dan juga relative merata di setiap kecamatan.

Tabel 2.75
Penggunaan Alat Kontrasepsi 2019

Kecamatan	*IUD*	*MOW*	*MOP*	*Condom*	Implan	Suntik	Pil	Jumlah
Laham	2	0	0	3	19	302	370	672
Long Hubung	0	0	0	0	23	320	237	580
Long Bagun	1	1	0	18	83	486	451	1020
Long Pahangai	1	0	0	17	28	445	411	884
Long Apari	49	0	0	6	42	396	185	623
Mahakam Ulu	**53**	**1**	**0**	**44**	**195**	**1949**	**1654**	**3779**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2020 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Tahun 2022 jumlah PUS di Kabupaten Mahakam Ulu 3.485 dan dari jumlah tersebut yang menjadi peserta KB aktif adalah 1.493. Untuk peserta KB aktif sebagian besar menggunakan suntikan dan pil. Persentase peserta KB aktif di Mahakam Ulu adalah 42,84%. Angka ini adalah yang terkecil dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur.

Tabel 2.76
Peserta KB Aktif Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif								Total	Persentase Peserta KB Aktif
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	Mal		
Paser	37414	1353	592	21	435	2167	11311	6707	5	22591	60,38
Kutai Barat	24845	491	905	18	304	1217	6079	6901	18	15933	64,13
Kutai Kartanegara	103548	4035	2714	85	1267	3602	30660	19186	25	61574	59,46
Kutai Timur	46695	1167	723	49	453	2252	12464	4928	14	22050	47,22
Berau	35658	1312	632	20	304	1873	11081	3907	11	19140	53,68
Penajam Paser Utara	26294	1081	378	18	497	1274	8501	4711	1	16461	62,60
Mahakam Ulu	3485	57	62	3	21	216	557	576	1	1493	42,84
Balikpapan	94277	10317	3579	124	3100	2845	19577	9380	24	48946	51,92
Samarinda	99151	5356	2014	118	2059	1953	22587	14178	37	48302	48,72
Bontang	23622	3808	828	65	1173	934	4360	2324	5	13497	57,14
Kalimantan Timur	**494989**	**28977**	**12427**	**521**	**9613**	**18333**	**127177**	**72798**	**141**	**269987**	54,54

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, diolah

g. Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2022 nilai investasi di Kabupaten Mahakam Ulu untuk PMDN dan PMA masing-masing mencapai Rp284.958,9 juta dan US$3.808 ribu. Nilai investasi tersebut untuk proyek PMDN sebanyak 18 dan PMA sebanyak 16. Nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Mahakam Ulu tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur.

Tabel 2.77
Perbandingan Investasi di Kalimantan Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek		Realisasi Investasi	
	PMDN	PMA	PMDN (Juta Rp)	PMA (ribu US$)
1. Paser	281	43	1.616.947,7	109.068,58
2. Kutai Barat	158	58	2.631.773,8	198.435,49
3. Kutai Kartanegara	729	138	10.564.907,7	180.418,48
4. Kutai Timur	665	143	3.428.929,9	630.925,93
5. Berau	408	79	2.619.004,0	49.370,49
6. Penajam Paser Utara	221	24	1.253.095,9	9.866
7. Mahakam Ulu	18	16	284.958,9	3.808
8. Balikpapan	1.850	332	14.681.981,5	51.882,79
9. Samarinda	1.845	150	1.270.879,5	32.438
10. Bontang	531	22	1.243.154,1	8
Kalimantan Timur	**6.706**	**1055**	**39.595.633,0**	**1.266.221,77**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022.

Iklim investasi yang kondusif diharapkan dapat mendorong terciptanya dinamika perekonomian masyarakat. Untuk itu kebijakan yang mampu mendorong berkembangnya investasi perlu mendapatkan perhatian seperti penyederhanaan perizinan yang lebih sederhana dan terpadu. Hal ini akan mendorong terciptanya akses masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha akan meningkat.

2.3.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

a. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Penggunaan listrik PLN di Mahakam Ulu pada tahun 2022 mencapai 64,06% sedangkan non PLN sebesar 35,44%. Jumlah penggunaan listrik PLN ini adalah yang terkecil di Kalimantan Timur sedangkan listrik non PLN adalah yang terbesar. Hal ini memiliki keteraitan erat dengan pembangunan infrastruktur yang masih berjalan serta kondisi geografis.

Tabel 2.78
Penggunaan Listrik Sebagai Sumber Penerangan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Kabupaten Paser	98,97	1,03	0,00	100,00
Kabupaten Kutai Barat	91,28	8,72	0,00	100,00
Kabupaten Kutai Kartanegara	98,44	1,56	0,00	100,00
Kabupaten Kutai Timur	73,91	24,31	1,78	100,00
Kabupaten Berau	92,98	6,74	0,28	100,00
Kabupaten Penajam Paser Utara	99,54	0,23	0,23	100,00
Kabupaten Mahakam Hulu	64,06	35,44	0,50	100,00
Kota Balikpapan	99,36	0,64	0,00	100,00
Kota Samarinda	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Bontang	96,80	2,73	0,47	100,00
Kalimantan Timur	**95,56**	**4,20**	**0,24**	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah salah satu diantaranya dapat tercermin dari struktur PDRB berdasarkan pengeluaran. Struktur ini menggambarkan peran masing-masing komponen pengeluaran dalam PDRB. Berdasarkan pendekatan ini struktur PDRB Kabupaten Mahakam Ulu didominasi oleh ekspor bersih, namun selama 2017-2022 terdapat kecenderungan penurunan proporsi ekspor bersih. Selain itu proporsi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga cukup besar dan meski berfluktuasi namun memiliki tren yang naik. Tahun 2022 proprosi ekspor berssih adalah 32,87% sedangkan proporsi PMTB adalah 28,89%.

Tabel

Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran (%)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22,47	23,62	24,24	24,56	24,08	24,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,93	1,05	1,07	1,05	1	0,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,1	12,55	12,84	12,61	12,26	12,79
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,94	27,83	28,69	28,72	30,18	28,89
Perubahan Inventori	0,26	0,24	0,19	0,19	0,06	0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	39,3	85,65	32,97	32,87	32,41	32,87
PDRB	100	50,95	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2023.

Hal lain yang menggambarkan kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran per kapita penduduk. Besar kecilnya pengeluaran per kapita penduduk akan memberikan informasi kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pengeluaran per kapita Mahakam Ulu selama periode 2014-2022 adalah yang terendah se Kalimantan Timur meski pendapatan per kapitanya bukan yang terendah.

Tabel

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rp/kapita/tahun)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Paser	9.706	9.900	10.171	10.280	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181
Kutai Barat	9.262	9.380	9.492	9.532	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740
Kutai Kartanegara	9.984	10.250	10.593	10.692	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677
Kutai Timur	9.484	9.704	9.960	10.273	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322
Berau	11.471	11.572	11.675	11.843	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095
Penajam Paser Utara	10.807	10.913	11.019	11.126	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890
Mahakam Ulu	***7.071***	***7.162***	***7.281***	***7.364***	***7.653***	***8.008***	***7.524***	***7.802***	***8.215***
Balikpapan	13.439	13.705	13.883	14.254	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455
Samarinda	13.538	13.825	14.010	14.175	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162
Bontang	15.878	15.980	16.157	16.271	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327

Kalimantan Timur	11.019	11.229	11.355	11.612	11.917	12.359	11.728	12.116	12.641

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu sektor atau subsektor secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu sektor atau subsektor tertentu diantara sektor atau subsektor yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu sektor atau subsektor untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah. Analisis LQ dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu Static LQ (SLQ) serta Dynamic LQ (DLQ). Dinamic LQ menggunakan dasar pertumbuhan sectoral.

Jika LQ lebih besar dari 1, sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten Mahakam Ulu lebih tinggi dari tingkat provinsi, Jika LQ lebih kecil dari 1, merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi, Jika LQ sama dengan 1, berarti tingkat spesialisasi Kabupaten Mahakam Ulu sama dengan tingkat provinsi. Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: jika DLQ > 1, maka potensi perkembangan sektor i Kabupaten Mahakam Ulu lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi. Namun, jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor i di Kabupaten Mahakam Ulu lebih rendah dibandingkan provinsi secara keseluruhan. Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan tertinggal.

Berdasarkan nilai SLQ Kabupaten Mahakam Ulu memiliki daya saing yang sangat kuat untuk sektor pertanian. Selama 2018-2022 nilai LQ untuk sektor pertanian sangat tinggi yaitu di kisaran 11 yang berarti di Provinsi Kalimantan Timur peran sektor pertanian Mahakam Ulu adalah sangat penting. Sektor lain yang memiliki nilai LQ lebih dari 1

adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor ini juga memiliki daya saing dalam konteks perekonomian Kalimantan Timur. Sektor-sektor lain selain kedua sektor tersebut terlihat memiliki nilai LQ yang kecil yang merupakan indikasi bahwa daya saing sektor-sektor tersebut kecil.

Meski Sebagian besar sektor memiliki nilai LQ kecil, namun banyak sektor yang memiliki nilai DLQ di atas 1. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut menunjukkan kemajuan peran yang tinggi dan cukup dinamis. Di tahun 2022 hampir semua sektor memiliki nilai DLQ lebih besar dari 1, dengan demikian peran sektor-sektor tersebut meski memiliki daya saing yang rendah namun menunjukkan peningkatan yang sangat baik.

Tabel 2.79
Nilai LQ Kabupaten Mahakam Ulu, 2018-2022

LAPANGAN USAHA	2018		2019		2020		2021		2022	
	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,051	0,964	11,086	1,003	11,009	0,993	11,077	1,006	11,255	1,016
B. Pertambangan dan Penggalian	0,164	0,983	0,156	0,953	0,139	0,893	0,143	1,029	0,142	0,991
C. Industri Pengolahan	0,029	1,012	0,030	1,036	0,030	1,002	0,030	0,984	0,030	1,002
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,443	1,024	0,443	1,000	0,434	0,978	0,496	1,144	0,556	1,120
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,742	0,987	0,744	1,003	0,732	0,983	0,758	1,036	0,781	1,030
F. Konstruksi	0,748	0,973	0,761	1,018	0,778	1,022	0,860	1,106	0,824	0,958
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,727	0,994	0,762	1,048	0,746	0,979	0,774	1,038	0,803	1,038
H. Transportasi dan Pergudangan	1,247	1,012	1,363	1,094	1,241	0,911	1,321	1,064	1,361	1,030
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,133	1,004	0,140	1,048	0,135	0,969	0,141	1,041	0,143	1,019
J. Informasi dan Komunikasi	0,159	1,044	0,166	1,046	0,169	1,015	0,179	1,060	0,194	1,085
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,041	1,134	0,043	1,054	0,044	1,024	0,047	1,076	0,052	1,112
L. Real Estat	0,203	0,979	0,212	1,048	0,211	0,992	0,229	1,088	0,237	1,034
M,N. Jasa Perusahaan	0,173	0,957	0,177	1,027	0,173	0,978	0,174	1,004	0,173	0,995
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,626	0,989	0,618	0,987	0,666	1,077	0,712	1,069	0,742	1,043
P. Jasa Pendidikan	0,100	0,974	0,102	1,021	0,104	1,017	0,112	1,074	0,122	1,088
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,166	0,974	0,167	1,011	0,166	0,991	0,179	1,081	0,186	1,037

R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,091	0,963	0,092	1,013	0,091	0,988	0,094	1,036	0,098	1,041

Sumber: PDRB Kabupaten Mahakam Ulu, diolah

Dari tinjauan shift-share, perhitungan shift share dilakukan pada periode 2018-2022 yang dimaksudkan untuk mengetahui dampak perekonomian dalam wilayah dan luar wilayah terhadap Kabupaten Mahakam Ulu selama lima tahun terakhir. Shift-share memiliki 3 komponen pengukuran, yaitu: (1) National Share (Nij), yang dipergunakan untuk mengukur dampak dinamika perekonomian provinsi terhadap perekonomian Mahakam Ulu, (2) Regional Share (Mij), yang dipergunakan untuk melihat dampak struktur perekonomian Mahakam Ulu, serta (3) Cij, untuk melihat daya saing sektor dan pengaruhnya terhadap perekonomian Mahakam Ulu.

Berdasarkan hal tersebut pada periode 2018-2022 terlihat nilai *national share* (Nij) positip pada semua sektor dengan total nilai 149.488 juta. Hal ini berarti kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur membawa dampak positip terhadap perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu dan memberikan kontribusi sebesar sekitar 150 milyar. Sementara itu nilai *regional share* (Mij) untuk semua sektor tidak semuanya positip, bahkan cukup banyak yang negatif. Sektor-sektor yang memiliki nilai Mij negative tersebut mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu menyebabkan terjadinya kontraksi atas sektor-sektor tersebut. Secara keseluruhan nilai Mij Kabupaten Mahakam Ulu adalah negative yaitu -39.277 juta yang berarti kondisi perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu selama 2018-2022 memberikan kontraksi atau tekanan terhadap perekonomian daerah sebesar -39,277 milyar.

Nilai Cij menggambarkan daya saing suatu sektor di Kabupaten Mahakam Ulu terhadap sektor sejenis di Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, nilai Cij Kabupaten Mahakam Ulu selama periode 2018-2022 bernilai positip yaitu 19.931 juta yang berarti daya saing

sector-sektor di Kabupaten Mahakam Ulu memberikan efek positip dalam pembentukan PDRB. Nilai shift share total selama 2018-2022 adalah 127.143 juta atau sekitar 127 milyar, yang berarti selama 2018-2022 nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu naik sebesar 127 milyar yang disebabkan karena factor luar daerah (Nij) dan dalam daerah (Mij dan Cij).

Tabel 2.80
Nilai Shift-Share Kabupaten Mahakam Ulu, 2018-2022

LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	Cij	D
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114255	-54130	8048	68174
Pertambangan dan Penggalian	11514	-1328	-19856	-9670
Industri Pengolahan	913	-611	110	412
Pengadaan Listrik dan Gas	37	83	129	250
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54	90	30	173
Konstruksi	8124	8421	9480	26025
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6005	5678	7237	18920
Transportasi dan Pergudangan	5589	539	5415	11543
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	175	64	141	380
Informasi dan Komunikasi	373	1011	1149	2533
Jasa Keuangan dan Asuransi	88	96	322	507
Real Estate	276	-151	498	622
Jasa Perusahaan	50	-10	-5	35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1599	174	3361	5135
Jasa Pendidikan	219	106	549	874
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143	667	261	1071
Jasa lainnya	74	25	62	161
PDRB	149488	-39277	16931	127143

Sumber: PDRB Kabupaten Mahakam Ulu, diolah

Untuk mendukung perekonomian di Mahakam Ulu peran perbankan sebagai Lembaga keuangan sangat penting. Meski demikian, data yang ada menunjukkan belum adanya bank yang membuka cabang di Mahakam Ulu. Hal ini berdampak pada pengembangan atau dinamika

perekonomian Mahakam Ulu khususnya dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana pihak ketiga.

Kredit perbankan yang disalukan ke Mahakam Ulu relative masih kecil. Selama 2018-2021 perkembangan kredit yang disalurkan menunjukkan kenaikan yang kecil dari tahun ke tahun, namun pada 2021-2022 jumlah kredit yang disalurkan menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi.

Grafik 2.19
Perkembangan Kredit Perbankan di Kab. Mahakam Ulu, 2018-2022
(Juta Rp)

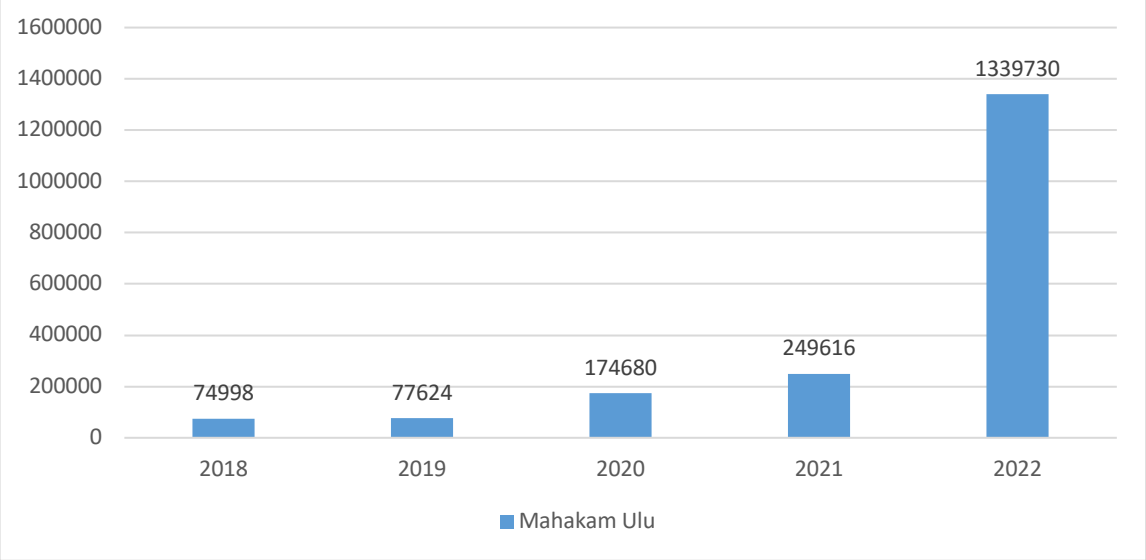

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Dalam hal infrastruktur jalan, Kabupaten Mahakam Ulu masih memiliki jalan aspal yang sangat terbatas, termasuk jalan perbatasan dengan Malaysia yang aksesnya sangat sulit. Akses jalan antar wilayah juga sangat terbatas, terlebih pada musim hujan akses jalan menjadi berbahaya akibat belum adanya pengerasan jalan. Kabupaten Mahakam Ulu juga belum memiliki status jalan negara, yang merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Keterbatasan infrasruktur jalan ini menjadi salah satu factor penghambat pertumbuhan ekonomi antar

wilayah akibat sulitnya distribusi barang. Pembangunan infrastruktur jalan memerlukan intervensi pemerintah provinsi dan pusat mengingat diperlukan pendanaan yang sangat besar sebagai akibat kondisi alam atau geografis Mahakam Ulu.

Untuk infrastruktur telekomunikasi, jumlah desa yang belum memiliki jaringan komunikasi di Mahakam Ulu tahun 2021mencapai 15 desa, dan terdapat 24 desa yang sudah ternagkau jaringan 4G/LTE serta 5 desa dengan jaringan 3G. Lambatnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini disebabkan karena factor geografis serta keterbatasan akses jalan antar wilayah.

Tabel 2.81

Jumlah Desa dengan Ketersediaan Jaringan Komunikasi

Kabupaten/Kota	2020				2021			
	4G/ LTE	3G	GPRS	Tidak ada	4G/ LTE	3G	GPRS	Tidak ada
Kabupaten Paser	70	39	12	12	81	34	10	6
Kabupaten Kutai Barat	89	34	30	24	104	39	21	15
Kabupaten Kutai Kartanegara	177	41	10	8	178	33	21	3
Kabupaten Kutai Timur	78	35	19	7	107	27	7	5
Kabupaten Berau	54	17	15	5	65	15	11	3
Kabupaten Penajam Paser Utara	45	9	0	0	48	4	2	0
Kabupaten Mahakam Hulu	18	6	5	21	24	5	6	15
Kota Balikpapan	34	0	0	0	34	0	0	0
Kota Samarinda	57	2	0	0	57	2	0	0
Kota Bontang	12	3	0	0	15	0	0	0
Kalimantan Timur	**634**	**186**	**90**	**77**	**713**	**159**	**78**	**47**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023 *(data yang ada merupakan data terbaru).*

Untuk infrastruktur listrik posisi Mahakam Ulu adalah yang terendah di Klimantan Timur. Rumah tangga pengguna listrik PLN pada tahun 2022 hanya 64,06%; sangat jauh dibandingkan daerah lain dan Provinsi Kaliamntan Timur yang mencapai sekitar 90%. Kondisi geografis di Mahakam Ulu menjadi salah satu kendala pembangunan jaringan listrik di Mahakam Ulu.

Gambar

Persentase Jangkauan Infrastruktur Listrik PLN

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2022

2.4B.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah sehingga setiap daerah selalu berupaya untuk menarik calon investor. Di Kabupaten Mahakam Ulu investasi di daerah tergolong sagat kecil dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur, sekalipun Mahakam Ulu memiliki potensi sumber daya alam yang besar khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Hal ini disebabkan karena factor keterbatasan infrastruktur di Mahakam Ulu seperti listrik, jalan, dan telekomunikasi.

Selama tahun 2022 total realisasi investasi dalam negeri sekitar Rp285 milyar dan investasi asing sebesar US$3.808.000. Investasi asing di triwulan ke 4 menunjukkan kenaikan yang sangat besar sementara untuk investasi dalam negeri justru mengalami penurunan drastic. Untuk mendorong investasi ke depan, perlu disusun road map investasi serta pemetaan potensi investasi di Mahakam Ulu. Selain itu intensitas

promosi investasi serta pemberian insentif juga penting dilakukan.

Tabel 2.82
Realisasi Investasi 2022 di Mahakam Ulu per Semester

PMDN (Rp)				
1	2	3	4	Jumlah
41.029.200.000	72.605.000.000	157.617.500.000	13.707.200.000	284.958.900.000
PMA (US$)				
1	2	3	4	Jumlah
817.400	867.200	116.700	2.006.700	3.808.000

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Penduduk Mahakam Ulu tahun 2022 sebanyak 33.535 dan didominasi oleh penduduk usia produktif dengan jumlah 23.813 atau 71%. Sebanyak 7.417 atau 22,12% merupakan penduduk bukan usia kerja (<15 tahun) dan sisanya adalah penduduk dengan usia 65 tahun ke atas yang jumlahnya mencapai 2.305 atau 6,87%. Jumlah penduduk usia produktif tersebut merupakan potensi yang diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) tahun 2022 adalah 40,83% yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 41 penduduk bukan usia produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). Raso ketergantungan antara laki-laki dan perempuan adalah lebih besar perempuan.

Tabel 2.83
Struktur Umur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Tahun 2022

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1153	1111	2264
5-9	1245	1220	2465
10-14	1429	1259	2688
15-19	1623	1509	3132
20-24	1661	1634	3295

25-29	1579	1425	3004
30-34	1454	1184	2638
35-39	1351	1129	2480
40-44	1309	1088	2397
45-49	1230	1011	2241
50-54	1045	811	1856
55-59	860	707	1567
60-64	652	551	1203
65-69	434	436	870
70-74	323	296	619
>75	450	366	816
Depedency Ratio	0,3944	0,4243	0,4083

Sumber: Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka 2023

Berkaitan dengan aspek penduduk dan ketenagakerjaan, rata-rata gaji atau upah per bulan pekerja formal di Mahakam Ulu adalah yang terkecil se Kalimantan Timur yaitu Rp3.168.445, jauh di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp3.963.732. Hal ini dapat mendorong minat calon investor untuk berinvestasi di Mahakam Ulu. Pekerja formal di sektor pertanian Mahakam Ulu memiliki standar upah tertinggi diantara daerah lain di Kalimantan Timur.

Untuk pekerja di sektor informal rata-rata upah per bulan di Mahakam Ulu mencapai Rp2.265.236. Pekerja sektor informal yang tidak tamat SD justru memiliki standar upah yang tertinggi dibandingkan misal lulusan SMA.

Tabel 2.84
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Per Bulan Pekerja Formal, Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Sektor Pertanian	Sektor Pertambangan dan Industri	Sektor Perdagangan dan Jasa	Rata-rata
Kabupaten Paser	2 945 028	4 911 903	3 270 181	3 660 665
Kabupaten Kutai Barat	3 023 037	5 187 155	2 703 913	3 238 723
Kabupaten Kutai Kartanegara	3 339 240	4 518 934	3 171 809	3 694 153
Kabupaten Kutai Timur	3 971 707	6 894 190	3 655 468	4 653 907
Kabupaten Berau	2 730 914	5 204 388	3 438 014	4 005 255
Kabupaten Penajam Paser Utara	2 775 092	3 579 569	3 267 678	3 239 634
Kabupaten Mahakam Hulu	4 068 367	4 576 923	3 079 124	3 168 445

Kota Balikpapan	1 548 768	5 946 638	3 886 082	4 373 966
Kota Samarinda	3 737 991	4 150 243	3 344 584	3 558 061
Kota Bontang	3 053 395	6 633 773	3 752 842	4 527 771
Kalimantan Timur	**3 681 564**	**5 126 059**	**3 475 003**	**3 963 732**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023

Tabel 2.85
Rata-rata Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja Informal Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Sekolah	SD	SMP	SMA ke atas	Rata-rata
Kabupaten Paser	2 059 733	2 363 118	1 722 379	2 339 129	2 180 255
Kabupaten Kutai Barat	1 907 615	1 737 204	1 775 269	2 294 647	1 962 230
Kabupaten Kutai Kartanegara	1 903 257	2 387 422	2 751 301	2 448 710	2 375 301
Kabupaten Kutai Timur	2 796 157	3 213 687	3 936 550	3 051 010	3 253 889
Kabupaten Berau	2 359 316	1 980 031	2 282 907	3 195 910	2 455 065
Kabupaten Penajam Paser Utara	1 851 237	1 799 053	1 926 224	1 957 202	1 877 266
Kabupaten Mahakam Hulu	3 373 491	2 070 542	1 830 231	2 446 445	2 265 236
Kota Balikpapan	1 936 093	2 167 496	2 396 005	3 251 152	2 789 897
Kota Samarinda	2 162 344	2 495 369	2 799 043	3 354 198	2 941 318
Kota Bontang	1 635 510	2 339 772	2 785 860	2 784 503	2 529 885
Kalimantan Timur	**2 098 701**	**2 394 834**	**2 675 412**	**2 951 105**	**2 615 014**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
6. Sosial.

Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SPM Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. Pendidikan anak usia dini.
b. Pendidikan dasar.
c. Pendidikan kesetaraan.

SPM Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
d. Pelayanan kesehatan pada balita.
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB.
l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
b. pelayanan informasi rawan bencana.
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

SPM Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
   perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2.6. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2026
			Capaian	Capaian	Target
-2	*-3*		*-400%*	*-500%*	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Urusan Bidang Pendidikan					
Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	na	30	40	80
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD	7%	9%	11%	19%
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	5%	8%	10%	21%
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	27%	27%	33%	60%
	Angka partisipasi kasar SD/MI	109,52	108,00	107,00	102,00
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,47	99,00	99,30	100,00
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)		96,00	97,00	100,00
	Angka Kelulusan SD	99%	99%	99%	100%
	Angka partisipasi kasar SMP	109,52	108,00	107,00	102,00
	Angka Partisipasi Murni SMP	98,47	99,00	99,30	100,00
	Angka partisipasi sekolah SMP		96,00	97,00	100,00
	Angka Kelulusan SMP	99%	99%	99%	100%
	Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	1	2	5	27
	Jumlah Lembaga LKP yang dibina	0	1	3	16
	Jumlah Lembaga SKB yang dibina	0	1	3	16

	Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	75%	100%	100%	100%
	Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	50%	60%	70%	100%
Program Pengembangan Kurikulum	Presentase sekolah SD terakredtiasi minimal A	na	10%	25%	76%
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0	25	30	225
	Rasio guru/murid sekolah	280	420	420	3080
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	140	140	140	1680
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP	69	50	50	340
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Jumlah Literasi Bahasa dan sastra	1	0	3	15
	Jumlah Model Pembelajaran bahasa dan sastra	0	0	1	9
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,30	0,27	0,27	0
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9	17	4
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	2	0	0
	Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita	1 : 50 balita	1 : 50 balita	1: 50 balita
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,17	1,20	1,23	1,23
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0,07
	Prevalensi stunting	27%	11%	7%	10%

	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	61 Org/ rujukan	100	1	40
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	88%	44.44%	100%	94%
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0.00039	0.00063	0,47
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus	35 Kasus	143 Kasus	42 Kasus
	Angka kejadian Malaria	14	14	11	0
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	0.14	0.05	1
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97 persen	98	99	98,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 71	1 : 70	1 : 70	1 : 86
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 59	1 : 90	1 : 90	1 : 70
	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%	100%	16.66%	90%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
	Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	100 Persen	0	50 Persen
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	100 Persen	100 Persen	78 persen
	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3,2 persen (630 RT)	600 RT	600 RT	950
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	21 KLB	1573	260	26 KLB
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,50%	5%	10%	88%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2%	8,00%	10,00%	33,00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Akses Air Limbah Layak	tda			23,00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	tda			30%
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	na	40%	50%	90%
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	tda	0,23	0,38	0,98
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	na	40%	50%	90%
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	5,00%	30%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	tda	5%	5%	25%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	tda	10%	10%	60%

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	15,43%			50,43%
Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	20,00%	50,00%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%			55,43%
Program Peningkata N Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukima N	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	15,43%			89,43%
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	98%	98%	75%
	Persentase Penegakan PERDA	75%	0%	82%	75%
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan kebencanaan	-	-	100%	100%
	Persentase Kampung Tangguh Bencana	5 %	9%	0%	30%
	Cakupan Penanggulangan Bencana	3 kampung	100%	100%	100%
	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	tda	60%	70%	100%
	Nilai Indeks Ketahan Daerah (IKD)	tda	0,20	0,25	0,45
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%

	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68.84%	68.84%	72%	100%
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	33.33%	33.33%	66,67	100%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	100%	33.33%	66,67	100%
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	0%	0%	80%	100%%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0	10%	50%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0%	0%	65%	85%

Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0%	0%	70%	90%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	75%	80%	100%
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0%	65%	70%	100%
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0%	50%	60%	100%
	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0%	55%	65%	100%
	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	0%	70%	75%	100%
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0%	80%	85%	100%
Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0%	75%	80%	100%
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0%	65%	70%	90%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kesetaraan Gender	0%	60%	70%	100%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	0%	50%	60%	100%

Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	0%	40%	60%	100%
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	0%	50%	60%	100%
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	105%	106%	107%	110%
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	92,8	98,98
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14%	13.50%	42%	10%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	85%	85%	85%
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara				
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	na	na	na	86,88

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	50%	50%	60%	85%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	50%	50%	60%	85%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Cakupan MHA yang berdayakan	100%	0	0	100%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan pendidikan dan pelatihan masyarakat	100%	0	0	100%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	na	0	0	8 Kel/Org
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	na	0	0	100%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	20%	30%	75%
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pencatatan Sipil Kependudukan Dan					
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99,00%	99,20%	99,35%	100,00%
	Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%
	Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	62%	65%	70%	90%
Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%

	Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	94%	95%	97%	100%
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	100%	100%	100%
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100%	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelayanan SIAK di 5 (lima) Kecamatan	0%	0%	20%	100%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	76%	78%	86%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama antar desa	9	5	5	5
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6	28	52
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6	42	82
	Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%	21,6%	33,6%
	Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%	6,0%	14,0%
	Persentase PKK aktif	51,2%	60,0%	63,0%	75,0%
	Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%	52,0%	60,0%

	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%	28,0%	36,0%
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Ratio Akseptor KB	73%	80%	81%	78%
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%	91%	91%	91%
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK	600 KK	600 KK	500 KK
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase layanan angkutan darat	0	0	0	5%
	Rasio Ijin Trayek	0	0	0	5%
	Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0	0	0	5%
	Pemasangan Rambu-rambu	10	0	0	35
	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0	0	0	10%
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0	0	0	10%
Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	15593org/ 87,9 ton	19637 Org/1215 ton	20.379Org /43.393 ton	16000 Org/ 220 ton
	Jumlah Arus penumpang pelayaran	773	19637	20379	870
Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5054	5500	3652	7000

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika					
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0 KIM	0 KIM	1 KIM	5 KIM
Program Aplikasi Informatika	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan pelayanan perizinan Usaha Smpan pinjam	na			100%
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi yang diawasi	na			100%
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Presentase KSP/USP Sehat	na			75%
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	na			100%
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Presentase perberdayaan dan perlindungan koperasi	na			100%
Program Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	na			100%
Program Pengembangan Umkm	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	na			75%
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	36 Proyek	17 Proyek	38 Proyek	84 Proyek

Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	na	0%	0%	84 investor
Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupakan Pelyanan Penanman Modal	100%	100%	100%	100%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase investor yang ber investasi	43%	0%	0%	70%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	100%	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif	0%	0%	0%	63%
	Persentase wirausaha muda	0%	0%	0%	25,45%
	Presentasi Pemuda yang dibina	0%	0,06%	0,24%	0,60%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	17	0	14	37
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0	0	81,08%
	Cakupan pembinaan atlet muda	0	0	0	40,00%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentasi Organisasi kepramukaan yang aktif		0	0	41,67%
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0%	0%	0%	50%
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0%	0%	0%	50%

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	2	3	15
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian	10%	30%	40%	70%
Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Literasi Sejarah dan Budaya Daerah	3	3	3	18
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	50	75	700
Program Pengelolaan Permuseuman	Presentasi Museum yang dikelola dengan baik	0	0	30%	80%
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.587 Pengunjung	1.587 Pengunjung	1.600 Pengunjung	1.800 Pengunjung
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5963 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	6.000 Judul
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasioanl dan Naskah kuno yang dilestarikan	0	0	15	30
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0%	0%	40%	60%
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0%	0%	50%	70%
Program Perijinan Penggunaan Arsip	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	0%	0%	40%	60%

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan					
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	330 Ton	380 Ton
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	150 Ton	110 Ton
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	50%	80%	80%	90%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Presentase Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	0%	4%	20%	100%
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	4	6	16	29
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan Mancanegara	5	10	10	215
	Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700	3000	6950
	Presentase PAD Sektor Pariwisata				12%
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif Unggulan	20	25	60	130
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	na	25%	35%	20%
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	1,57	1,81	2,08	3,18
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	1,60%	1,70%	2,10%

	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%	3,30%	3,40%	3,80%
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%	1,40%	1,80%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	2.633	3.000	3.600	23.800
	Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	2.300 Ha	500 Ha	750 Ha	750 Ha
	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,50%	80,50%	80,10%	83,50%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90,00%	90,10%	90,20%	90.60%
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	10.00%	40%	50%	90%
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	320 Lembaga	400 Lembaga	450 Lembaga	650 Lembaga
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	na	100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan yang aktif	na	100%	100%	100%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	20%	20%	20%	100%
Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pengusaha yang dibina	0 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	na	1 Kecamatan	1 Kecamatan	5 Kecamatan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang dikembangkan	na	1 IKM	1 IKM	5 IKM
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	na	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentasi Izin Usaha Industri yang diverifikasi	na	100%	100%	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Sekretariat Daerah					
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan urusan keekretariat bidang pemerintahan dan kesra	na	100%	100%	100%
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	na	63.97%	71.09%	95%
Sekretariat Dprd					

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan					
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	95%	97%
	persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%	95%	97%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	100%	100%	95%	97%
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	95%	97%
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%	95%	97%
Keuangan					
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan	0%	0%	100%	100%
Program Penggelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	181%	379%	64%	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	1.522.641.755.020	100%	100%	100%
	Persentase SILPA terhadap APBD	0	0%	0%	0%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	60%	62%	64%	70%
Kepegawaian					

Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,00%	75,00%	85,00%
Pendidikan Dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,00%	78,00%	84,00%
Penelitian Dan Pengembangan					
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20%			60%
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na			60%
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	na			90%
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na			80%
Pengelolaan Perbatasan					
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	na		21.74%	100%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
Inspektorat Daerah					
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	61%	71%	75%	89%

	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	42%	54%	58%	60%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80%	82%	83%	85%
	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	Level 2	Level 3
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	Level 2	Level 3
	Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	31%	33%	43.1%	53%
UNSUR KEWILAYAHAN					
Kecamatan					
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0%	20%	40,00%	100,00%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kamtibmas	100%	100%	100,00%	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11	11	11	11
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	3	3	11
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	5%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	5%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	5%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	5%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa Dan Politik					
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan wawasan Kebangsaan	98%	90%	92%	97%
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	92%	82%	86%	92%
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang dibina	89,17%	80%	84,00%	90%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi	98%	90%	92%	96%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	82,82%	83%	85%	92%

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu serta proyeksi kerangka pendanaan periode yang akan datang berdasarkan dari hasil analisis kebijakan keuangan masa lalu.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam ulu dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Salah satu indikator lain untuk mengetahui baik buruknya kinerja

keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Indikator DDF dihitung melalui perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total Pendapatan dalam APBD seperti pada Tabel 3.1 berikut. DDF digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD.

Tabel 3.1
Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kab. Mahakam Ulu

Tahun	Realisasi PAD (Rupiah)	Realisasi Total Pendapatan	DDF (%)	Keterangan Rasio
2016	8.709.661.135	1.115.741.541.082	1,68%	Sangat Rendah
2017	12.098.668.690	963.796.428.019	1,26%	Sangat Rendah
2018	17.405.627.520	1.217.740.110.761	1,43%	Sangat Rendah
2019	18.514.855.998	1.491.737.599.990	1,24%	Sangat Rendah
2020	18.309.278.410	1.228.604.336.761	1,49%	Sangat Rendah
2021	33.164.866.575	1.163.877.641.918	2,85%	Sangat Rendah
2022	16.457.803.277	1.543.581.871.533	1,07%	Sangat Rendah
RATA-RATA	17.808.680.229	1.246.439.932.866	1,57%	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kab. Mahakam Ulu yang diolah

Nilai DDF Kabupaten Mahakam Ulu periode 2016-2022 dalam kategori sangat rendah dengan rata-rata sebesar 1,57%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Mahakam Ulu belum bisa mandiri dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan daerah. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil untuk membiayai pembangunan daerah dan realisasi PAD selama 2016-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Di tahun 2022 PAD mengalami penurunan hamper 50% dibandingkan 2021. Pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan serta bantuan dari provinsi. Hal ini akan menyebabkan berbagai kemungkinan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Apabila dana Transfer dari Pusat atau dari Provinsi mengalami penurunan/perlambatan, maka

bisa sangat dipastikan kegiatan-kegiatan di pemerintahan juga akan mengalami perlambatan bahkan penundaan ataupun pembatalan.

3.1.1.Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Gambar 3.1
Tren Perolehan PAD 2016-2022

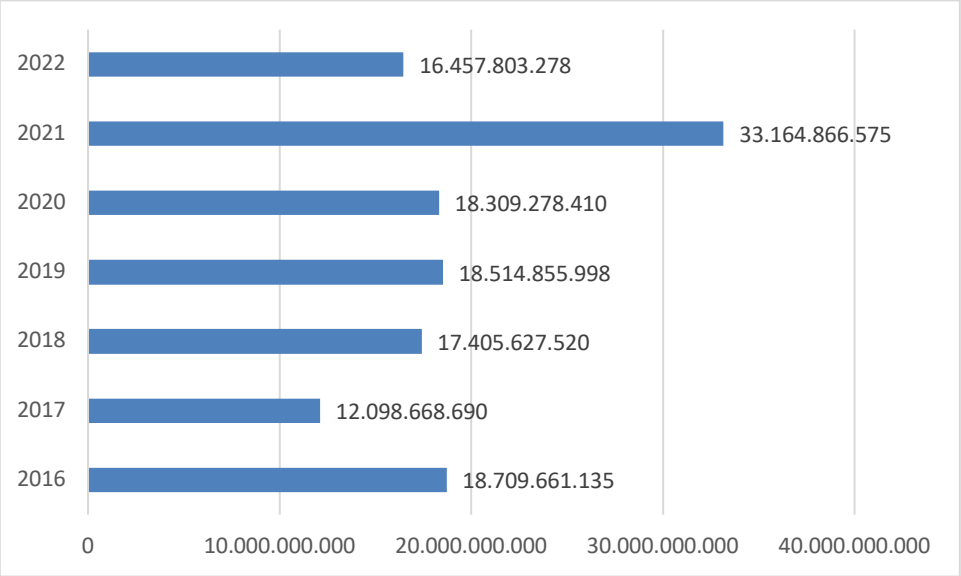

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kab. Mahakam Ulu yang diolah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mahakam Ulu periode 2016-2022 masih bersifat fluktuatif. Penurunan yang tajam terjadi pada periode 2021-2022 dari Rp33,1 milyar menjadi hanya Rp16,5 milyar. Penurunan PAD yang cukup tajam juga pernah terjadi pada periode 2016-2017.

Dalam hal pendapatan daerah, nilai pendapatan daerah selama 2016-2022 juga terlihat berfluktuasi. Pada periode 2021-2022 pendapatan daerah menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari Rp1.163 milyar menjadi Rp1.543 milyar atau naik sebesar 32,67%. Bila

dikaitkan dengan belanja daerah, pada periode 2021-2022 belanja daerah menunjukkan penurunan dari Rp1.217 milyar menjadi Rp1.169 milyar. Kenaikan pendapatan belanja daerah yang diikuti oleh penurunan belanja selama 2021-2022 berdampak pada surplus APBD yang cukup besar pada tahun 2022.

Gambar 3.2
Grafik Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Periode 2016-2022

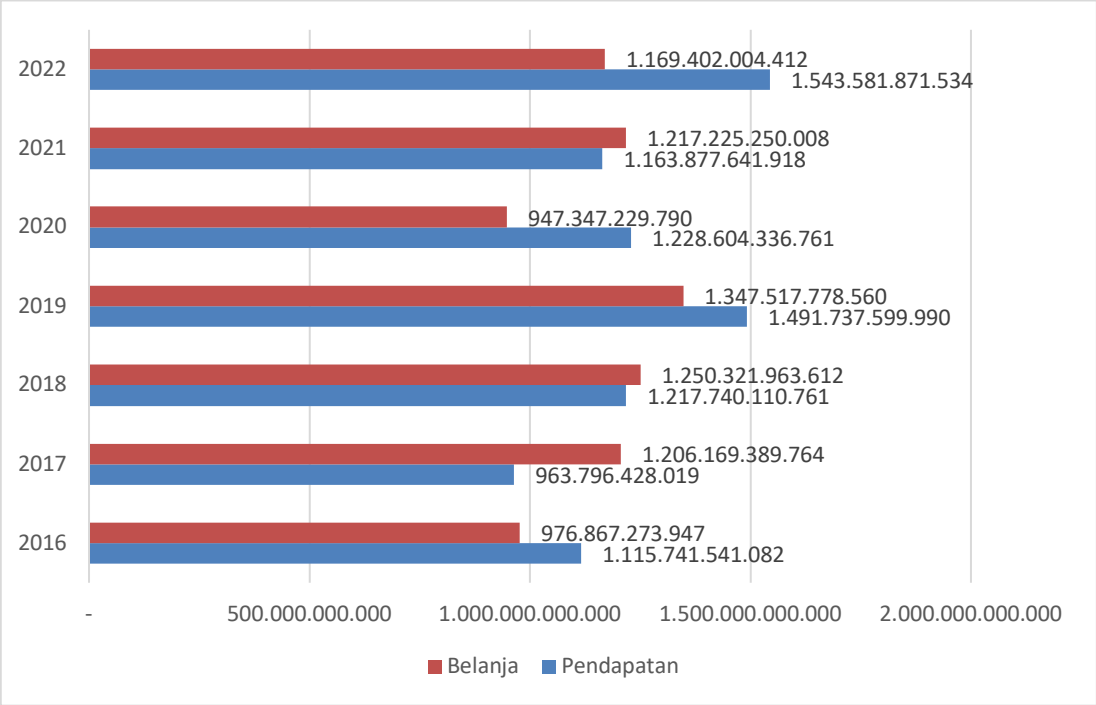

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab. Mahakam Ulu yang diolah.

Selama periode 2016-2022 rata-rata pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.246.439.932.866 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,56%. Proporsi pendapatan daerah rata-rata masih di dominasi oleh pendapatan transfer yaitu sebesar 95,60% sedangkan sisanya sebesar 2,82% dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan 1,57% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu rata-rata belanja daerah adalah Rp1.159.264.412.870 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,04%. Proporsi terbesar pada belanja daerah adalah untuk belanja operasional dengan rata-rata proporsi selama 2016-2022 sebesar 62,19%

dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,24%. Untuk belanja modal, rata-rata proporsi selama 2016-2022 adalah sebesar 26,64% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar -1,95%. Komponen belanja operasional terbesar adalah belanja barang dan jasa dengan rata-rata per tahun selama 2016-2022 sebesar Rp530.596.755.188 dan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,34%.

Selama 2016-2022 defisit APBD terjadi di tahun 2017, 2018, dan 2021 yang pembiayaannya dilakukan melalui Silpa. Rata-rata pembiayaan per tahun selama 2016-2022 adalah Rp123.728.276.289 dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan per tahun selama periode tersebut yaitu sebesar -0,38%. Besarnya Silpa tahun 2020 dan 2022 disebabkan karena adanya efisiensi dari belanja daerah terutama dari belanja operasional, yaitu factor belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Informasi APBD Kabupaten Mahakam Ulu periode 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Daerah	1.115.741.541.082	963.796.428.019	1.217.740.110.761	1.491.737.599.990	1.228.604.336.761	1.163.877.641.918	1.543.581.871.534	1.246.439.932.866	5,56
Pendapatan Asli Daerah	18.709.661.135	12.098.668.690	17.405.627.520	18.514.855.998	18.309.278.410	33.164.866.575	16.457.803.278	19.237.251.658	-2,11
Hasil Pajak Daerah	625.318.821	458.899.337	870.645.300	2.954.210.690	5.474.654.378	12.352.498.182	2.303.478.194	3.577.100.700	24,27
Hasil Retribusi Daerah	666.666.242	578.258.700	663.492.800	1.166.240.870	1.060.224.960	1.431.243.628	1.092.553.000	951.240.029	8,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	3.066.166	353.998.938	201.293.388	215.939.538	278.732.980	210.606.202	208,78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.417.676.072	11.061.510.653	15.868.423.254	14.040.405.500	11.573.105.684	19.165.185.227	12.783.039.104	14.558.477.928	-5,03
Pendapatan Transfer	1.065.219.536.347	891.350.077.918	1.144.372.046.641	1.395.253.601.792	1.210.267.191.951	1.121.092.861.343	1.527.124.068.256	1.193.525.626.321	6,19
Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat	503.268.623.500	558.420.838.291	552.099.879.947	591.784.827.374	524.109.924.202	994.563.066.572	1.392.963.173.258	731.030.047.592	18,49
Dana Alokasi Umum	479.139.794.000	470.722.849.000	470.722.849.000	497.410.048.000	451.971.660.000	443.010.427.000	442.586.663.455	465.080.612.922	-1,31
Dana Alokasi Khusus	23.634.942.000	87.697.989.291	76.368.544.292	94.374.779.374	59.377.181.202			68.290.687.232	-100,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	493.887.500	-	5.008.486.655	-	12.761.083.000			6.087.819.052	-100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	561.950.912.847	332.929.239.627	592.272.166.694	803.468.774.418	686.157.267.749	126.529.794.771	134.160.894.998	462.495.578.729	-21,24
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.812.343.600	60.347.681.411	55.962.436.600	77.969.142.200	27.866.400	9.619.914.000	-	33.677.054.887	-21,27
Pendapatan Lain-Lain	31.812.343.600	60.347.681.411	55.962.436.600	77.969.142.200	27.866.400	9.619.914.000	-	33.677.054.887	-21,27
Belanja Daerah	976.867.273.947	1.206.169.389.764	1.250.321.963.612	1.347.517.778.560	947.347.229.790	1.217.225.250.008	1.169.402.004.412	1.159.264.412.870	3,04
Belanja Operasional	626.681.555.424	754.280.007.243	828.055.780.052	863.779.938.438	574.079.025.155	643.137.526.899	758.757.952.883	721.253.112.299	3,24
Belanja Pegawai	151.441.217.025	169.371.046.842	147.755.858.235	155.096.446.993	161.551.746.598	167.647.932.451	214.057.911.252	166.703.165.628	5,94
Belanja Barang dan Jasa	449.208.878.788	569.465.037.541	667.043.848.190	687.465.500.325	367.187.771.437	457.636.094.064	516.170.155.969	530.596.755.188	2,34
Belanja Subsidi	3.679.017.000	1.546.299.000	687.378.000	1.492.013.120	1.492.013.120	0	0	1.270.960.034	-20,20
Belanja Hibah	10.716.000.000	3.604.727.500	5.035.127.327	14.405.488.000	39.764.572.000	13.742.498.384	25.982.887.328	16.178.757.220	15,91
Belanja Bantuan Sosial	11.636.442.611	10.292.896.360	7.533.568.300	5.320.490.000	4.082.922.000	4.111.002.000	2.546.998.334	6.503.474.229	-22,37
Belanja Modal	291.306.389.976	294.981.767.046	255.341.528.120	273.892.678.399	344.679.729.126	400.824.958.242	258.789.638.563	302.830.955.639	-1,95
Belanja Tidak Terduga	0	230.541.000	0	865.000.000	28.588.475.509	23.196.004.157	3.458.466.265	8.048.355.276	71,88
Belanja Transfer	58.879.328.547	156.677.074.475	166.924.655.440	208.980.161.723	-	150.066.760.710	148.395.946.701	148.320.654.599	16,66
SURPLUS/DEFISIT	138.874.267.135	-242.372.961.744	-32.581.852.851	144.219.821.430	281.257.106.971	-53.347.608.090	374.179.867.122	87.175.519.996	17,96
Pembiayaan Daerah	137.401.808.201	284.209.309.609	66.233.397.825	53.409.134.565	216.128.972.495	80.998.686.491	27.716.624.834	123.728.276.289	-23,42
Penerimaan Pembiayaan Daerah	137.401.808.201	289.209.309.609	66.233.397.825	53.409.134.565	216.128.972.495	83.848.686.491	27.716.624.834	124.849.704.860	-23,42
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	5.000.000.000	-	-		2.850.000.000	-	2.616.666.667	n.a.
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	276.276.075.336	41.836.347.864	33.651.544.975	197.628.955.995	497.386.079.467	27.651.078.401	401.896.491.955	210.903.796.285	6,45

Sumber: LKPJ Kabupaten Mahakam Ulu yang diolah.

3.1.2.Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Selama periode 2015-2021 total asset pemerintah daerah naik sebesar 110,97% dari Rp1.197 milyar menjadi Rp2.526 milyar. Rata-rata pertumbuhan total asset per tahun sebesar 13,25%. Komponen asset tetap dari 2015 ke 2021 naik sebesar 64,92% sedangkan asset lainnya nak sebesar 675,14%. Dari sisi Kewajiban, terlihat kewajiban jangka pendek dari 2015 ke 2021 bertambah 42,79% sementara ekuitas bertambah sebesar 81,04%.

Tabel 3.3
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2015-2021 (Rp)

AKUN	2015	2021	Kenaikan 2016-2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%)
TOTAL ASET	**1.197.192.407.142,26**	**2.525.764.617.978**	110,97	13,25
ASET LANCAR	**192.530.782.534,03**	**122.012.426.971**	-36,63	-7,32
Kas dan Setara Kas	137.404.585.769,29	29.227.672.070	-78,73	-22,74
Investasi Jangka Pendek				
Piutang Pendapatan	-	9.028.190.787,29		
Piutang Lainnya	7.854.975.321,74		-100,00	-100,00
Penyisihan Piutang				
Beban dibayar Dimuka		5.689.443.574,21		
Persediaan	47.271.221.443,00	204.059.124.852,03	331,68	27,60
Aset untuk Dikonsolidasikan				
Aset Lancar Lainnya				

INVESTASI JANGKA PANJANG	**3.305.012.959,22**	**5.589.443.622,50**	69,12	9,15
Investasi Nonpermanen	3.305.012.959,22	589.443.622,50	-82,17	-24,97
Investasi Permanen	-	5.000.000.000,00		
ASET TETAP	**989.351.294.815,08**	**1.631.615.432.930,70**	64,92	8,70
Tanah	234.377.681.030,00	152.912.118.080,00	-34,76	-6,87
Peralatan dan Mesin	123.510.069.664,08	224.096.110.843,08	81,44	10,44
Gedung dan Bangunan	148.595.446.915,00	346.602.716.826,33	133,25	15,16
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	565.885.754.053,00	1.158.379.416.535,90	104,70	12,68
Aset Tetap Lainnya	2.501.439.614,00	4.920.890.623,00	96,72	11,94
Konstruksi dalam Pengerjaan	47.831.862.209,00	220.741.527.587,39	361,49	29,03
Akumulasi Penyusutan	-133.350.958.670,00	-476.037.347.565,00	256,98	23,63
DANA CADANGAN	**-**	**0**		
Dana Cadangan				
ASET LAINNYA	**12.005.316.833,93**	**93.057.768.476,28**	675,14	40,68
Tagihan Jangka Panjang	-			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud	1.551.190.616,67	13.644.892.129,17	779,64	43,68
Aset Lain-Lain	10.454.126.217,26	79.412.876.347,11	659,63	40,21
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.197.192.407.142,26**	2.165.414.266.326,96	80,87	10,38
KEWAJIBAN	**5.156.960.084,67**	**7.363.647.904,76**	42,79	6,12
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.156.960.084,67**	**7.363.647.904,76**	42,79	6,12
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	515.808,00	509.769.088,64	98729,23	215,61
Utang Bunga				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			
Pendapatan Diterima di Muka		19.946.174,50		
Utang Belanja		3.447.042.343,28		
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.156.444.276,67	3.386.890.298,34	-34,32	-6,77
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**0**		
Utang Dalam Negeri	-			
Utang Jangka Panjang Lainnya				
EKUITAS	**1.192.035.447.057,59**	**2.158.050.618.422,20**	81,04	10,40
EKUITAS	**1.192.035.447.057,59**	**2.158.050.618.422,20**	81,04	10,40
Ekuitas	1.192.035.447.057,59	2.158.050.618.422,20	81,04	10,40

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, diolah *(data yang ada merupakan data terbaru)*

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017-2021, dapat di lihat pada tabel sebagai

berikut.

Tabel 3.4
Analisis Neraca Kabupaten Mahakam Ulu

No	Jenis Analisis	Hasil analisis					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	**Rasio Liquiditas**						
	a. Rasio Lancar	3,25	13,64	59,09	36,04	0,50	8,85
	b. Rasio Quick	1,50	4,61	31,38	11,04	0,19	5,43
2	**Rasio Solvabilitas**						
	a. Rasiio Total Hutang Terhadap Aset	0,0328	0,0095	0,0034	0,0043	0,096	0,0191
	b. Rasio hutang terhadap modal	0,0339	0,0096	0,0008	0,0043	0,11	0,0105

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

   Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, rasio lancar dari tahun 2015 sampai 2021 mengalami fluktuatif. Kondisi terparah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,50. Hal ini mengindikasi kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang jangka pendeknya melalui aset lancar hanya sebesar 0,50 kali. Rata-rata rasio lancer selama 2017-2021 adalah 8,85. Rasio lancar perlu dijaga jangan sampai menurun tiap tahunnya. Penurunan nilai rasio lancar dari tahun ke tahun memberi pertanda yang kurang baik dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

2. Rasio *Quick*

   Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, juga terjadi fluktuasi dengan rata-rata 5,43. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam membayar kewajiban jangka pendek cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan setiap tahunnya sehingga mencapai level diatas angka 10.

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

   Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,0191. Hal ini menunjukkan total aset pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu cukup baik karena masih dibawah angka 1.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal

   Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rata-rata rasio hutang terhadap modal sebesar 0,0105.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai disini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Proporsi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka persentasenya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun 2016	151.441.217.025	976.867.273.946	15,50%
2	Tahun 2017	169.371.046.842	1.211.169.389.763	13,98%
3	Tahun 2018	147.755.858.235	1.250.321.963.611	11,82%
4	Tahun 2019	155.096.446.993	1.347.517.778.559	11,51%
5	Tahun 2020	161.551.746.598	947.347.229.790	17,05%
6	Tahun 2021	167.647.932.451	1.220.075.250.008	13,74%
7	Tahun 2022	214.057.911.252	1.169.402.004.412	18,30%

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Kab. Mahakam Ulu, diolah.

Belanja pegawai setiap tahunnya mengalami fluktuatif cenderung meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan daerah. Akan tetapi proporsi belanja aparatur terbesar total pengeluaran masih kecil. Hal ini dikarenakan jumlah aparatur dilingkup pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu masih sedikit. Tahun 2022 rasio belanja aparatur mencapai 18,30% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang besarnya 13,74%. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan belanja kebutuhan aparatur namun di periode yang sama total

belanja daerah mengalami penurunan.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut:

- ***Akuntabilitas***, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan;
- ***Profesionalitas***, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah;
- ***Proporsionalitas***, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah;
- ***Transparansi***, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik;
- ***Pengawasan*** yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024-2026

a. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024-2026

Perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada periode 2016-2022 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017, penerimaan Pendapatan Daerah sudah mengalami penurunan dari

Rp1.115.741.541.082 menjadi Rp963.796.428.019 di tahun 2018 atau turun sebesar 13,62%. Pendapatan daerah selama 2017-2019 menunjukkan kenaikan yang stabil namun pada periode 2019-2021 kembali menunjukkan penurunan. DI tahun 2022 kondisi pendapatan daerah Kembali mengalami kenaikan. Meskipun bersifat fluktuatif, garis tren linier penerimaan Kabupaten Mahakam Ulu masih menunjukkan peningkatan/bernilai positif.

Gambar 3.3
Perkembangan dan Tren Perkembangan Penerimaan Pendapatan Kabupaten Mahakam Ulu, 2016-2022

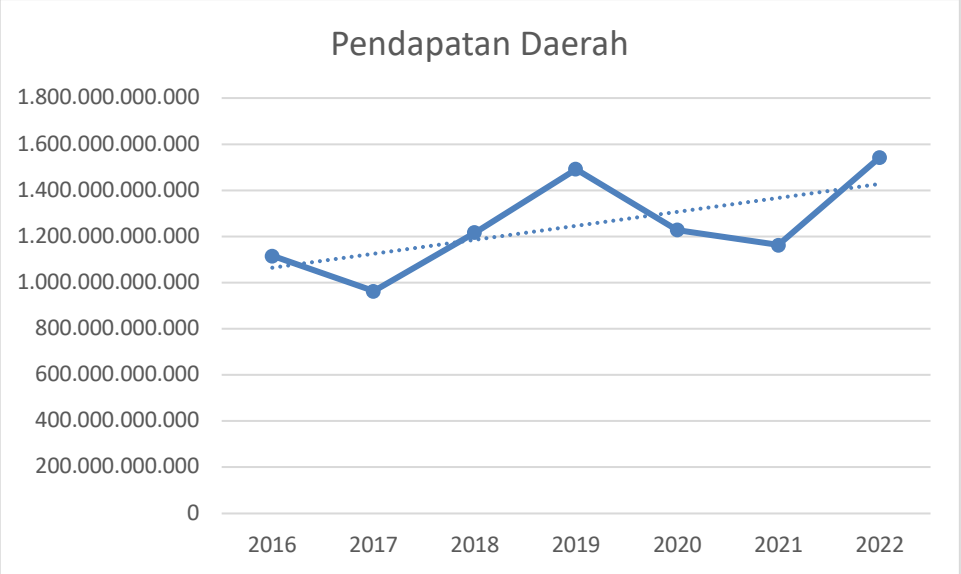

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2016-2022, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2021-2025, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi

produksi dan pemasaran;

b. Meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara *online* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
c. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
e. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan optimalisasi aset daerah;
f. Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
g. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah;
h. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan;
i. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

Proses perumusan proyeksi pendapatan Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2026 menggunakan asumsi:

- Pertumbuhan ekonomi naik meningkat setiap tahun dengan dengan dukungan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang meningkat sehingga berdampak pada dinamika perekonomian masyarakat serta mampu mendorong peningkatan PAD.
- Inflasi relatif stabil atau terkendali, tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan atau terjadi goncangan *(shock)* perekonomian.
- Program-program yang telah disusun pada periode sebelumnya dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien
- Situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global stabil yang ditandai dengan semakin membaiknya harga komoditas sumber daya alam.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2024-2026 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2024-2026

KOMPONEN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Penetapan 2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	**1.163.877.641.918**	**1.543.581.871.534**	**1.503.111.016.669**	**1.578.250.000.000**	**1.650.020.000.000**	**1.802.267.000.000**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33.164.866.575	16.457.803.278	11.240.054.701	13.150.000.000	14.470.000.000	16.167.000.000
Pendapatan Transfer	1.121.092.861.343	1.527.124.068.256	1.487.281.777.968	1.560.000.000.000	1.630.000.000.000	1.780.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.619.914.000	0	4.586.184.000	5.100.000.000	5.550.000.000	6.100.000.000
BELANJA DAERAH	**1.217.225.250.008**	**1.169.402.004.412**	**1.775.489.020.904**	**1.547.500.000.000**	**1.602.200.000.000**	**1.662.940.000.000**
Belanja Operasional	643.137.526.899	758.757.952.883	985.830.291.249	878.300.000.000	900.700.000.000	926.060.000.000
Belanja Modal	400.824.958.242	258.789.638.563	640.442.992.380	522.000.000.000	556.000.000.000	593.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	23.196.004.157	3.458.466.265	6.193.574.675	6.200.000.000	6.500.000.000	6.880.000.000
Belanja Transfer	150.066.760.710	148.395.946.701	143.022.162.600	141.000.000.000	139.000.000.000	137.000.000.000
SURPLUS/DEFISIT	**-53.347.608.090**	**374.179.867.122**	**-272.378.004.235**	**30.750.000.000**	**47.820.000.000**	**139.327.000.000**

b. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2024-2026

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada periode 2016-2022, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2024-2026 akan diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024-2026 terutama program-program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD.
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM, BUMD, BUMKam, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara.
4. Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
   a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
   b. Melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program;
   c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
6. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:

a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai *seed money* yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai *urban manager*;
c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

Proyeksi dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistika dengan menggunakan beberapa pertimbangan alat perhitungan seperti rata-rata pertumbuhan, rata-rata hitung, serta deviasi standar, Hal ini didasarkan pada kondisi data historis yang berfluktuatif sehingga dalam beberapa kasus tidak memungkinkan penggunaan satu metode saja. Selain itu juga dilakukan proses penyesuaian (adjustment) dari hasil perhitungan akhir.

Berdasarkan kebijakan diatas disertai prediksi pendapatan yang sudah dihitung, maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024-2026 disusun seperti sebagai berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Periode 2024-2026

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Penetapan 2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	1.217.225.250.008	1.169.402.004.412	1.775.489.020.904	**1.547.500.000.000**	**1.602.200.000.000**	**1.662.940.000.000**
Belanja Operasioanal	643.137.526.899	758.757.952.883	985.830.291.249	878.300.000.000	900.700.000.000	926.060.000.000
Belanja Pegawai	167.647.932.451	214.057.911.252	256.437.969.432	262.000.000.000	267.000.000.000	273.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	457.636.094.064	516.170.155.969	694.467.075.809	582.000.000.000	595.000.000.000	609.000.000.000
Belanja Subsidi	0	0	1.595.908.200	1.600.000.000	1.700.000.000	1.760.000.000
Belanja Hibah	13.742.498.384	25.982.887.328	25.976.837.808	26.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	4.111.002.000	2.546.998.334	7.352.500.000	6.700.000.000	7.000.000.000	7.300.000.000
Belanja Modal	400.824.958.242	258.789.638.563	640.442.992.380	522.000.000.000	556.000.000.000	593.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	23.196.004.157	3.458.466.265	6.193.574.675	6.200.000.000	6.500.000.000	6.880.000.000
Belanja Transfer	150.066.760.710	148.395.946.701	143.022.162.600	141.000.000.000	139.000.000.000	137.000.000.000

Sumber: Data diolah, 2023

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, maka asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan terutama SILPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik; dan
2) Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh.

Tabel 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah Periode 2024-2026

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Penetapan 2023	2024	2025	2026
Penerimaan Pembiayaan	83.848.686.491	27.716.624.834	277.378.004.235	144.000.000.000	151.200.000.000	158.760.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	2.850.000.000	-	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Pembiayaan Bersih	80.998.686.491	27.716.624.834	272.378.004.235	134.000.000.000	141.200.000.000	148.760.000.000

Sumber: Data diolah, 2023

3.3.2.Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penyusunan kebijakan kerangka keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Berdasarkan hasi perhitungan diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang belum dialokasikan kedalam belanja Prioritas I, II, dan III.

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2026

Uraian	2024	2025	2026
Pendapatan	1.578.250.000.000	1.650.020.000.000	1.802.267.000.000
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)			
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran			
Dikurangi:			
Belanja Wajib dan Mengikat	443.500.000.000	451.200.000.000	460.940.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Kapasitas Keuangan Daerah	**1.124.750.000.000**	**1.188.820.000.000**	**1.331.327.000.000**

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 3.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2026

Uraian	2024	2025	2026
Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	1.124.750.000.000	1.188.820.000.000	1.331.327.000.000
Proritas I	562.375.000.000	594.410.000.000	665.663.500.000
Prioritas II	393.662.500.000	416.087.000.000	465.964.450.000
Prioritas III	168.712.500.000	178.323.000.000	199.699.050.000
Total Belanja Prioritas	**1.124.750.000.000**	**1.188.820.000.000**	**1.331.327.000.000**

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158, Prioritas I akan dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar seperti alokasi fungsi pendidikan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah belanja daerah, fungsi kesehatan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah belanja daerah, fungsi pengawasan sejumlah 0,3% dari jumlah belanja daerah, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sejumlah 0,3% (nol koma tiga persen) dari jumlah belanja daerah. Prioritas II akan dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkat Prioritas III akan dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal terlebih pada Kabupaten baru seperti Mahakam Ulu ini yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan pembentukannya pada 11 Januari 2013 melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis terhadap data capaian pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun terakhir (2021 dan 2022), berikut permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Mahakam Ulu dalam pembangunan daerah.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab 2 dan menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh rumusan 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi Kab. Mahakam Ulu.	Perekonomian Kab. Mahakam ulu masih sangat mengandalkan sektor primer khususnya pertanian, perikanan dan perkebunan	Masyarakat Mahakam ulu masih menjadikan perkebunan, pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten) dan belum manjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
			Harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang cenderung tidak stabil dan sangat tergantung pada permintaan ekspor.
			Tingkat persaingan produk dari Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah lain menjadi lemah karena adanya ekonomi biaya tinggi.
		Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor unggulan lainnya seperti sektor Industri Kecil Menengah, industri kreatif dan industri pariwisata	Masih terbatasnya sarana dan prasana pendukung sektor Industri Kecil Menengah, industri kreatif dan industri pariwisata
			Masih rendahnya kualitas SDM dan kurangnya inovasi, sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di sektor pariwisata dan industri kecil menengah serta industri kreatif
			Lingkungan di Kabupaten Mahakam Ulu yang Kurang kondusif untuk investasi
2	Masih tingginya Angka kemiskinan di Kab. Mahakam Ulu, meskipun secara absolute jumlah penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan Kabupaten lain di Kalimantan timur	Sebagian besar masyarakat bekerja pada Sektor-sector yang memiliki nilai tambah ekonomi yang rendah atau dengan status Pekerja Keluarga	Terbatasnya lapangan kerja serta kurangnya alternatif ekonomi bagi masyarakat;
			Sebagian besar penduduk masih bekerja pada sektor informal dan tidak membutuhkan tenaga kerja terampil (*un-skill labour*)
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi lokal dalam penyediaan lapangan kerja
			Kurangnya balai pelatihan untuk melatih para pencari kerja guna meningkatkan SDM
			Masih rendahnya minat berwira usaha angkatan kerja
			Kualitas SDM yang masih rendah menyebabkan rendahnya produktivitas dan kreativitas;
			Minat SDM yang pendidikannya dibiayai oleh pemerintah daerah untuk kembali pulang membangun daerah masih kurang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bidang pertanian yang menjadi sektor primer perekonomian mahakam ulu, belum bisa memberikan kesejahteraan kepada para petani dan masyarkat lebih luas	Pertanian dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah sehingga hasilnya minim untuk perdagangan
			Pola bercocok tanam yang cenderung masih tradisional (berpindah-pindah) dan tergantung pada hasil hutan;
			Bidang pertanian Belum memanfaatkan teknologi tepat guna
			Lahan pertanian yang dikelola oleh masyarkat belum mempunyai legalitas yang jelas
		Masih tingginya biaya kebutuhan hidup di Kabupaten Mahakam Ulu.	Proses angkut barang memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi akibat akses jalan yang harus ditempuh cukup panjang yang menyebabkan tingginya biaya transpor ke dan dari Mahakam Ulu. Hal ini berdampak pada tingginya harga kebutuhan (baik barang konsumtif dan non konsumtif), dan barang yang keluar dari Mahakam Ulu menjadi terlalu mahal untuk di jual (bargaining position yang rendah).
			Ketergantungan terhadap produk daerah lain masih sangat tinggi
3	Masih rendahnya nilai Indek Pembangunan Manusia	masih rendahnya harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) walaupun secara statistik menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.	Banyaknya pekerja keluarga termasuk anak-anak usia sekolah yang dilibatkan dalam aktivitas ekonomi keluarga.
			Jangkauan wilayah penduduk dan lokasi sekolah yang berjauhan dan beberapa wilayah tidak terdapat transportasi darat
			Tingginya biaya transportasi (akses dari rumah menuju sekolah)
			Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah.
		Masih Rendahnya usia harapan hidup.	Kurangnya prasarana dan sarana kesehatan yang tersedia
			Distribusi obat yang masih terkendala dengan situasi geografis karena belum ada akses darat
			Terbatasnya fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan yang berkualitas
			Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan lingkungan sehat menyebabkan berbagai penyakit menular
4	Ancaman terjadinya penurunan	Terbatasnya daya dukung lingkungan dan belum optimalnya mitigasi resiko bencana	Belum tersedianya secara dejure regulasi PPLH di tingkat daerah
			Masih tingginya fasilitas MCK yang digunakan secara umum.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	kualitas lingkungan hidup		Belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam hal pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku perusak lingkungan
			Masih rendahnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana
		Masih banyaknya perumahan dan pemukiman kumuh	Penanganan Sampah Rumah Tangga yang belum tertangani dengan baik
			Masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan pendirian bangunan dari Pemerintah Daerah
5	Masih tingginya ketimpangan pembangunan di Mahakam Ulu.	Masih tingginya Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat	Kondisi tanah yang tidak stabil menjadikan nilai guna infrastruktur jalan seringkali dibawah target yang diharapkan
			Kondisi Geografis Kabupaten Mahakam Ulu membuat kesulitan dalam pembukaan lahan untuk membuka akses desa-desa yang masih terisolasi
			Kurangnya ketersediaan alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan percepatan perbaikan infrastruktur jalan
		Belum maksimalnya pemenuhan listrik masyarakat	Peta persebaran populasi penduduk yang berjauhan jarak satu dengan lainnya, sehingga penyediaan listrik PLN membutuhkan biaya yang besar
			Kurangnya kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN yang ada
			Tingginya biaya untuk menggunakan alternatif tenaga listrik lainnya
		Belum tersedianya jaringan air bersih ke rumah-rumah warga	Faktor geografis menyebabkan terhambatnya pembuatan jaringan air bersih
			Belum adanya PDAM/sejenisnya yang dapat menyuplai air bersih ke seluruh wilayah Mahakam Ulu
			Terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku.
			Masyarakat yang masih terbiasa dengan air dari sungai mahakam untuk kegiatan MCK
		Aksesibilitas telekomunikasi dan internet masih belum merata	Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu menyebabkan tidak meratanya kemampuan aksebilitas desa-desa untuk mengakses internet
6	Belum Optimalnya Implementasi reformasi birokrasi	Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu	masih adanya pelayanan publik yang kurang responsive, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		memenuhi harapan publik.	keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
			Belum ada nya alat ukur kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
		Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sinkronisasi antar dokumen baik dokumen perencanaan, penganggaran maupun dokumen evaluasi belum tertata dengan baik
			SDM yang masih terbatas baik dari kuantitas mauapun kualitas
			Minimnya ketersediaan dan publikasi data sektoral yang dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi
			Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelengaaran pemerintahan

Sumber : Analisis Tim Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu

1. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

1) Urusan Pendidikan

- Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama.
- Faktor ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga anak usia sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja setiap harinya di jam sekolah.
- Kondisi geografis Mahakam ulu menjadi kendala masyarakat mengakses Pendidikan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang menjangkau wilayah terpencil.
- Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang tinggi.
- Kurangnya sumber daya kompetensi guru dan kualifikasi tenaga kependidikan.
- Perseberan pendidik dan tenagan kependidikan yang belum merata.
- Masih rendahnya kesejahteraan guru Honorer.

- Belum terpenuhinya fasilitas dasar pembelajaran.
- Masih ada sekolah yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan).

2) Urusan Kesehatan

- Kurangnya jumlah dan mutu SDM kesehatan;
- Lemahnya manajemen dan kontrol dalam Sistem Pelayanan Kesehatan;
- Distribusi obat yang masih terkendala dengan situasi geografis karena belum ada akses darat;
- Belum terakreditasinya puskesmas secara menyeluruh;
- Penyediaan obat-obatan yang masih kurang optimal bahkan sering terkadi kekosongan obat;
- Penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit Demam Berdarah (DBD), Diare, Malaria, Tuberkulosis, ISPA dan Hepatitis belum mengalami penurunan dan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Status Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu saat ini klasifikasi tipe Pratama sesuai PMK 24 tahun 2014 sehingga jenis pelayanan yang diberikan masih terbatas karena dianggap setara dengan puskesmas;
- Masih rendahnya Jasa Pelayanan yang diterima oleh tenaga medis dengan spesialistik khusus dikarenakan salah satunya Jasa Pelayanan BPJS dalam bentuk kapitasi bukan pengklaiman INACBGs. Hal ini membuat kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM;
- Penggajian dokter spesialis yang belum sesuai standar IDI tahun 2013 juga menyebabkan kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM;

- Bangunan fisik RS. Pratama Gerbang Sehat Mahulu dibangun tidak mengikuti standarisasi khusus bagunan rumah sakit berdasarkan PMK RI Nomor 24 Tahun 2016;
- Sarana dan prasarana penunjang serta ijin operasional ruang Radiologi yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dioptimalkan;
- Belum tersedianya tenaga ahli, khususnya tenaga dengan kompetensi khusus seperti ATEM (Ahli Tehknik Elektro Medik);
- Belum tersedianya ruangan khusus untuk pemularasan jenazah, ruang CSSD, ruang pemulihan post tindakan operasi, ruang isolasi khusus dan lain-lain;
- Tidak tersedianya sumber air bersih di lingkungan rumah sakit;
- Sistem pengelolaan limbah medis yang belum memadai, hal ini disebabkan karena : tidak adanya pihak ke III dalam pengelolaan limbah dan belum ada regulasi terkait ijin penggunaan alat incenerator di RS belum jelas serta belum dilakukannya survei dampak lingkungan oleh lintas terkait;

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu membuat kesulitan dalam pembukaan lahan untuk membuka akses desa-desa yang masih terisolasi;
- Kemampuan sumber daya yang sangat terbatas, terutama sumber daya keuangan menjadikan program peningkatan kualitas jalan Kabupaten menjadi lambat;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah
- Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah,

- Kurangnya ketersediaan alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan percepatan perbaikan infrastruktur jalan;
- Peta persebaran populasi penduduk yang berjauhan jarak satu dengan lainnya, sehingga penyediaan listrik PLN membutuhkan biaya yang besar;
- Kurangnya kapasitas pembangkit tenaga listrik yang ada;
- Tingginya biaya untuk menggunakan alternatif tenaga listrik lainnya;
- Kewenangan Penanganan dan Pengelolaan Listrik ada pada PLN, sehingga Pemda tidak dapat melakukan intervensi penuh terhadap pengelolaan Listrik;
- Faktor geografis menyebabkan terhambatnya pembuatan jaringan air bersih;
- Belum adanya PDAM/sejenisnya yang dapat menyuplai air bersih ke seluruh wilayah Mahakam Ulu;
- Belum optimalnya Penanganan SPAM oleh UPTD;

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih rendah nya utilitas prasarana sarana umum
- Masih rendahnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, regestrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- Perlunya pendataan dan validasi lapangan terkait kebutuhan panataan kawasan pemukiman di Kabupaten Mahakam.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik
- Belum adanya persedian bahan logistik penanggulangan bencana
- Belum adanya data dukung pada perencanaan dan penganggaran dalam rangka penanggulangan bencana
- Masih minimnya jumlah SDM Aparatur yang berkompeten

- Masih belum adanya SDM Aparatur yang berbasis kompetensi teknis di bidang penanggulangan bencana
- Belum dibentuknya Kampung Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana
- Jarak tempuh ke Daerah rawan bencana cukup sulit di jangkau
- Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah.
- Masih kurangnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum perda yang berlaku
- Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman peyelengaraan Penanganan pembentukan relawan kebakaran
- Masih tersebar dan belum terbangun system informasi dan komunikasi terkait pencegahaan kebakaran secara terpadu dan terintregrasi
- Belum tersosialisasi secara luas paradigma baru penanggulangan kebakaran dan karthutla.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya memelihara dan menjaga keytentraman dan ketertiban serta ketaatan terhadap peraturan daerah dan keputusan daerah.
- Penganggaran di tingkat pemerintah kabupaten kurang sesuai dengan hasil musrenbang, sehingga usulan kegiatan pengurangan resiko (mitigasi) structural dan non stuktural, rehabiltasi dan rekonstruksi kurang mendapat perhatian dan prioritas
- Jumlah pos pemadam kebakaran yang belum memnuhi cakupan wilayah manajemen kebakaran pada 5 kecamatan, masih belum ada satupun pos pemadam kebakaran.

6) Urusan Sosial

- Belum adanya Fasilitas dan sarana prasarana pada Bidang Rehabilitasi Sosial berupa Rumah Singgah, Panti Sosial, dll.

- Kurang memadainya Fasilitas tanggap bencana berupa sarana Pendukung dalam proses tanggap bencana di Kabupaten Mahakam Ulu.

7) Urusan Tenaga Kerja

- Belum terbangunnya Balai Latihan Kerja yang di lengkapi dengan fasilitas guna menyiapkan tenaga kerja mahakam ulu yang handal dan sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Belum disusunnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dapat menjadi dasar dalam pemberian upah;
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
- Sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja belum selaras;
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- Lemahnya perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih Kurangnya koordinasi antar stockholder dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindugan anak.

9) Urusan Pangan

- Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi petani dalam mewujudkan kemampuan untuk menyediakan bahan pokok seperti beras.
- Peran BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) belum optimal dalam upaya kemandirian pangan.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Penyuluh Pertanian disemua kampung.

- Kelembagaan petani dan nelayan perlu ditingkatkan seiiring dengan meningkatnya penyediaan bahan pangan asal tanaman, ternak dan ikan.

10) Urusan Lingkungan Hidup

- Belum maksimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap integrasi hasil kajian lingkungan
- Rendahnya Pengawasan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembangunan
- Jumlah pegawai DLH berkualifikasi AMDAL masih terbatas
- Belum terpenuhinya kuantitas dan kapasitas SDM yang berkualifikasi teknis
- Minimnya pemahaman stakeholder dalam menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan
- Jumlah anggaran terkait PPLH belum memadai
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja terkait penyelenggaraan PPLH
- Nomenklatur DLH dan pelaksanaan kewenangan kelembagaan yang belum optimal
- Belum tersedianya data dan informasi tentang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Belum optimalnya sosialisasi dan fasilitasi terkait upaya PPLH.
- Belum Optimalnya distribusi sampah dari rumah tangga ke TPA dan masih 98% sampah belum tertangani.

11) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Belum optimalnya pengolahan Data dikarena Jaringan Koneksi Server yang belum memadai.

12) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih rendahnya motivasi Aparat Kampung dan Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan yang dilaksanakan di Kampung.
- Masih adanya Ego pribadi dari Aparat Kampung dengan Kelembagaan yang ada dimasyarakat (BPK) sehingga masih sering terjadi permasalahan di Kampung.
- Masih rendahnya Motivasi Aparatur Kampung melaksanakan pekerjaandi kantor.
- Kurang berfungsinya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam usaha ekonomi Kampung.
- Kurang maksimalnya Aparat Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga dalam penggunaanya masih ada yang tidak sesuai dengan RAB APBKam.
- Masih Rendahnya SDM yang dimiliki oleh Aparat kampung.
- Masih Rendahnya Pemeliharaan dan perawatan sanitasi lingkungan di masyarakat.

13) Urusan Perhubungan

- Kurangnya Sarana Dan Prasaran Fasilitas Penunjang LLAJ
- Kurang Optimalnya Penataan Dan Peningkatan Fungsi Angkutan Sungai Dan Penyebrangan
- Belum Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- Lemahnya Kesadaran Masyarakat Akan Keselamatan Dan Ketertiban Berlalu Lintas
- Belum Optimalnya SDM Sesuai Dengan Spesifikasi Keahlian Bidang Perhubungan

- Belum Optimalnya Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Penataan Dan Rekayasa Lalu Lintas
- Tidak Terakomodirnya Berapa Program Bidang Perhubungan Dalam SIPD Ex. Program Pengelolaan Penerbangan.

14) Urusan Komunikasi dan Informatika

- Rendahnya tingkat pemberdayaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat dan belum optimalnya penyebaran informasi pemerintah daerah;
- Rendahnya kapasitas layanan telekomunikasi dan kualitas jaringan internet di daerah;
- Masih rendahnya kapasitas sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dan internet pedesaan.

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Belum adanya kelembagaan yang khusus menangani urusan koperasi dan UKM;
- Belum adanya kelembagaan ekonomi dan keuangan yang memadai untuk membantu pengembangan kegiatan ekonomi di daerah;
- Orientasi bisnis masih ke sektor pertanian, sehingga belum terbuka pola pikir pengembangan ekonomi kreatif;
- Rendahnya minat berwirausaha masyarakat;
- Kurangnya kesediaan teknologi pendukung, material, SDM, Kemudahan Akses Pasar, dan Peran Komunitas;
- Penyerapan produk atas permintaan pasar masih minim;

16) Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya pemberian pelayanan kepada pemohon perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
- Belum optimalnya penanganan konsultasi dan pengaduan mengenai perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;

- Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan informasi dan data perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
- Belum optimalnya pemantauan terhadap penanaman modal;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap penanaman modal;
- Belum optimalnya pembinaan terhadap penanaman modal;

17) Urusan Kepemudaaan dan Olahraga

- Minimnya Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Kewirausahaan Pemuda
- Masih dominannya mindset menjadi pegawai di kalangan pemuda daripada menjadi usahawan akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda
- Minimnya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten
- Belum adanya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten Mahakam Ulu
- Belum adanya Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
- Minimnya Kegiatan Pembentukan Karakter Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- Masih minimnya Jumlah Pemuda atau Organiasi Kepemudaan yang menjalin kemitraan dengan Dunia Usaha secara kontinue
- Kurangnya kegiatan yang meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
- Belum ada inisiatif dari Cabor untuk mengajukan Kejuaraan Single event
- Belum pernah ada usulan penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten

- Minimnya jumlah dana yang diberikan untuk mengikuti Kejuaraan Multi event dan Single even
- Tidak tersedianya dana mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah
- Belum maksimal pembinaan karena Cabor tidak memiliki tempat dan peralatan latihan yang memadai serta anggaran pembinaan dan try out untuk atlet senior
- Tidak tersedianya dana untuk mengadakan Pemusatan Latihan Daerah dan Sport Science bagi Cabor
- Tidak tersedianya Pemusatan Latihan Lanjutan dan Pendidikan lanjutan yang menunjang kelanjutan prestasi atlet.
- Belum ada inisiatif untuk Pemberian Penghargaan Olahraga
- Sistem pendataan yang masih kurang memadai dari Cabor dan KONI
- Belum tersusun Standarisasi Mekanisme, Persyaratan, SOP, Pelaporan, Audit dll pada organisasi olahraga
- Kurangnya kemampuan dan inisiatif pengembangan organisasi keolahragaan
- Belum ada campur tangan pemerintah untuk melakukan penekanan bagi perusahaan yang beroperasi di Mahakam Ulu dan upaya cabor untuk mencari sendiri bapak angkat bagi masing masing cabor
- Belum ada inisiatif untuk memberi Penghargaan bagi organisasi keolahragaan Berprestasi
- Belum terbentuk Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia
- Belum terorganisir olahraga rekreasi masyarakat dan tradisional
- Belum ada inisiatif pembentukan olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Belum terorganisirnya olahraga Tradisional di masyarkat
- Minimnya anggaran untuk membentuk sistem informasi berbasis elektronik
- Minimnya anggaran untuk Pengembangan Kapasitasi Organisasi Kepramukaan tingkat daerah

- Minimnya anggaran untuk Pengembangan Kapasitasi SDM Kepramukaan tingkat daerah
- Minimnya anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- Minimnya anggaran untuk pemeliharaan Fasilitasi Kepramukaan di Bumi Perkemahan.

18) Urusan Statistik

- Minimnya data yang *up to date* sebagai bahan monitoring evaluasi pembangunan daerah;
- Banyaknya SDM di OPD yang belum mendapatkan pelatihan statistik;
- Pemahaman yang masih kurang tentang prosedur pelaksanaan statistik sektoral.

19) Urusan Persandian

- Keterbatasan fasilitas dan alat penunjang pelaksanaan kegiatan persandian;
- Minimnya informasi yang didapatkan oleh daerah tentang urgensi dan peran persandian untuk keamanan informasi di daerah;
- Tidak tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dasar bidang keamanan informasi.

20) Urusan Kebudayaan

- Belum memadainya literasi/buku dalam upaya pelestarian dan masih berupa budaya lisan yang diwariskan secara turun temurun sehingga rentan terdegradasi.
- Generasi penutur/narasumber semakin berkurang/terbatas
- Kurangnya fasilitas yang dapat memfasilitasi aktualisasi budaya
- Transformasi nilai budaya kurang berjalan dengan baik dan sering disalahgunakan.

- Kurangnya apresiasi dan penghargaaan terhadap budaya (seni dan kekayaan intelektual).
- Belum adanya muatan lokal di sekolah tentang budaya lokal daerah.
- Lokasi geografis menyulitkan untuk menjangkau setiap objek cagar budaya
- Belum penetapan (Cagar Budaya).

21) Urusan Perpustakaan

- Pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Lemahnya perbaikan kearsipan daerah.

22) Urusan Kearsipan

- Pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Lemahnya perbaikan kearsipan daerah.

23) Urusan Pariwisata

- Minimnya pengetahuan/kualitas SDM Parekraf yang memiliki mindset kreatif dan inovatif
- Minimnya semangat kewirausahaan yang tumbuh dari SDM parekraf/pelaku usaha untuk mengembangkan hasil pelatihan menjadi sebuah kegiatan/usaha produktif yang bernilai ekonomis
- Minimnya penelitian/riset mengenai Ekonomi Kreatif sebagai bahan acuan atau pedoman dalam pengembangan Ekraf
- minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan parekraf bagi pelaku usaha parekraf
- minimnya zona kreasi, pemasaran dan promosi jasa / produk ekraf
- minimnya pengetahuan pelaku ekraf tentang HKI
- belum terhimpunnya hasil karya yang akan di fasilitasi HKI

- mindset pelaku usaha pariwisata yang belum mau menerima perubahan dan perkembangan terhadap informasi dan inovasi terkait usaha pariwisata
- Enggan dalam memberi data usaha pariwisata
- rendahnya pengetahuan pelaku usaha pariwisata terhadap informasi maupun kebijakan usaha pariwisata.

24) Urusan Pertanian

- JUT / Jalan Produksi kurang memadai;
- Alsintan penunjang terbatas;
- Jaringan Irigasi belum ada (DI Bareq LH dan DI Long Melaham) / berfungsi optimal (DI Datah Bilang);
- Embung yang ada sangat kecil kapasitasnya dan tidak berfungsi;
- Irigasi Pompa berbahan bakar diesel sulit dioperasionalkan karena biaya tinggi;
- Terbatasnya penguasaan lahan pertanian petani;
- Terbatasnya kapasitas kerja petani ;
- Memerlukan waktu untuk bisa mengubah perilaku usahatani dan diperlukan model usahatani unggulan;
- Petani belum memahami sepenuhnya esensi LP2B.
- Belum optimalnya aplikasi teknologi anjuran
- Rendahnya kesuburan tanah
- Akses air irigasi terbatas
- Penerapan GAP belum optimal
- Terbatasnya prasarana penunjang lainnya
- Terbatasnya modal usahatani pelaku utama
- Minimnya kegiatan bimtek dan pelatihan teknis
- Belum terbangunnya mindset usahatani berorientasi pasar
- Lemahnya kelembagaan petani
- Belum terbangunnya mindset pemberdayaan dan kewirausahaan petugas pendamping

- Rendahnya tingkat PKA Petugas pendamping
- Rendahnya kesadaran petani
- Perubahan Iklim ekstrim
- Kondisi lahan dan lingkungan
- Pemilihan varietas belum mempertimbangkan resiko OPT / Penyakit
- Belum adanya sistem mitigasi banjir untuk penyesuaian musim tanam
- Belum diterapkannya pertanian dengan prinsip konservasi lahan
- Infrastruktur terbatas dan high cost
- Mutu hasil pertanian belum optimal
- Penanganan pasca panen belum optimal

25) Urusan Pendukung Daerah (Sekretariat Daerah dan DPRD)

- Rendahnya koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah
- Rendahnya koordinasi antar perangkat daerah
- Belum optimalnya pengawasan terhadap capaian kinerja kegiatan perangkat daerah bidang sumber daya alam
- Kurangnya pemetaan secara teknis pengelolaan potensi sumber daya alam
- Masih kurangnya kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- Masih rendahnya persentase kampung yang teraliri jaringan listrik
- Masih rendahnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti PLN
- Rendahnya Literasi data antar pemangku kepentingan dan OPD terkait yang terlibat dalam Pengendalian Inflasi
- Tidak tersedianya pengelola sarana dan prasarana di bidang perdagangan
- Tidak tersedianya sarana dan prasarana di bidang perdagangan
- Rendahnya koordinasi antar pemerintah daerah baik secara vertikal maupun horizontal dalam pengendalian inflasi

- Rendahnya koordinasi pemerintah daerah dan swasta dalam pengendalian inflasi
- Masih rendahnya harmonisasi dan sinkronisasi stakeholder terkait dan koordinasi para pemangku kepentingan
- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang memahami BLUD
- Masih Kurangnya Pemahaman yang sama antar perangkat daerah yang terkait terhadap penerapan BLUD terkait monitoring dan evaluasi
- Kurangnya pemahaman pegawai/perangkat daerah tentang BLUD
- Belum adanya regulasi pendukung pelaksanaan BLUD
- Rendahnya pengetahuan tentang pemahaman BLUD
- Masih rendahnya SDM pengelola penerapan pembentukan BLUD
- Belum tersusunnya regulasi pendukung pelaksanaan BLUD
- Belum adanya BUMD yang siap didirikan
- Belum adanya regulasi pendukung pendirian BUMD
- Belum adanya pemetaan, perumusan kebijakan dan kajian Pendirian BUMD.
- Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian di Setwan;
- Sering terjadi alih tugas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia serta rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dilingkuap setwan;
- Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di setwan;
- Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan dilingkup setwan
- Kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi setwan;
- Sering Terjadinya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan maupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Kurang disiplinnya Sekretariat dalam menyelesaikan tugas kesekretariatan;

26) Urusan Penunjang Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitan dan pengembangan daerah serta Perbatasan Daerah)

- Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- Kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan PAD yang belum optimal;
- Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal;
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman WP/WR untuk taat pajak;
- Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan;
- Belum maksimalnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan akses jaringan internet dikawasan perbatasan;
- Belum adanya pengelolaan wisata alam, seni budaya dan yang lainnya didaerah perbatasan;
- Data pendukung yang belum sesuai untuk pelayanan pembangunan di kawasan perbatasan;
- Kompetensi SDM kurang memahami dalam merumuskan penyusunan perencanaan dan cara menjabarkan RPJMD kedalam RENSTRA, dalam merumuskan indikator dan target belum sepenuhnya menghasilkan *outcome* dan *output*;
- Belum optimalnya pemahaman aparat perencana terhadap nomenklatur penyusunan dokumen;
- Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan dikarenakan sarana dan prasaran yang tidak memadai;
- Tidak optimalnya dimensi kelitbangan dalam pembangunan daerah;
- Belum adanya pemetaan potensi invoasi daerah;

27) Urusan Pengawasan (Inspektorat)

- Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu belum mencapai Level 3;
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih banyak yang memperoleh predikat dibawah CC sehingga mempengaruhi capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Belum optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI;
- Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu belum mencapai Level 3;
- Opini WTP atas LKPD telah tercapai namun masih berisiko tinggi terjadinya penurunan opini disebabkan terdapat temuan pemeriksaan yang berkategori *fraud*;
- Capaian kinerja aksi pencegahan korupsi terintegrasi Kabupaten Mahakam Ulu masih rendah (Capaian MCP);
- Perolehan Nilai SAKIP Inspektorat sudah baik namun masih terdapat rekomendasi penyempurnaan dalam implementasi SAKIP yang belum terlaksana;

28) Urusan Kewilayahan (Kecamatan)

- Relokasi kampung di wilayah perbatasan;
- Perlu adanya pengkajian mengenai kebutuhan hidup masyarkat terutama di daerah perbatasan;
- Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di kampung;
- Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (Rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten;
- Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- Administrasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum baik;

- Belum memadainya akses informasi dan komunikasi dibeberapa kampung dalam wilayah Kecamatan Long Pahangai;
- Pengelolaan Dana Kampung dan Dana Desa yang belum memadai dan masih terlambatnya proses perencanaan dan pelaporan;
- Masih terdapat akses transportasi yang belum memadai antar kampung dan antar kecamatan terutama akses jalan darat.

29) Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

- Pelayanan yang kurang professional;
- Masih Rendahnya Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsan di Masyarakat Khususnya generasi muda;
- Melemahnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama di daerah;
- Minimnya Pendidikan Politik Masyarakat dan Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
- Rendahnya Jumlah Ormas yang berpartisipasi akif dalam pembangunan;
- Rawan Terjadinya Konflik Sosial didaearah.

4.2 ISU - ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu stretegis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional dan isu strategis tingkat regional/daerah.

4.2.1 Isu-Isu Strategis Level Global

1. *Sustainable Development Goals* (*SDG's*) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*)

SDG's merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDG's (*Millenium Development Goals*), SDG's memiliki 5 (lima) pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 (tiga) tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 tujuan global berikut ini:

1) Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
2) Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
4) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;

6) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
7) Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
8) Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
9) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10) Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
11) Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12) Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
13) Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14) Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan;
15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16) Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17) Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan pada Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu, Kabupaten Mahakam Ulu ikut serta berperan aktif dalam mengimplementasikan agenda-agenda SDG's tersebut.

2. Resesi ekonomi global

Dunia saat ini sedang tak baik-baik saja. Ini terlihat dari terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan inflasi tinggi hingga ancaman resesi hingga krisis energi dan kelangkaan pangan, yang melanda berbagai negara di dunia. Ada negara yang sudah dinyatakan bangkrut. Ada pula yang masih berjuang meredam krisis biaya hidup yang kian menyakitkan. Krisis ekonomi global yang terjadi sebagai dampak dari pandemi covid – 19 dan konflik geopolitik dan dampak perang Ukraina-Rusia telah mengganggu rantai pasok pangan dan energi dunia. "Konflik geopolitik telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia," sebut Jokowi.

Ancaman resesi di tahun 2023 ini semakin menguat. Hal ini dibuktikan dari beberapa negara yang telah melaporkan rapor merah dalam ikhtisar ekonomi semesteran dan kuartalannya. Beberapa alasan pun meliputi amblesnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara-negara ini. Penyebabnya pun dari inflasi pasca kenaikan harga energi akibat perang Rusia-Ukraina hingga pembatasan Covid-19 yang masih belum dicabut oleh otoritas setempat (CNBC, 18/10/22). Beberapa negara yang sudah mengalami krisis ekonomi adalah Amerika Serikat, Inggris, Srilangka, Rusia dan Ukraina.

Hasil survei yang dilakukan Bloomberg yang disampaikan pada bulan Juli 2022, setidaknya terdapat 15 (lima belas) negara yang berpotensi

mengalami resesi ekonomi, yaitu Sri Lanka -yang mengalami ketidakstabilan ekonomi dan sosial baru-baru ini- menempati posisi pertama negara berpotensi resesi dengan presentase 85%, menyusul kemudian New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang dengan presentase 25%, sedangkan China, Hongkong, Australia, Taiwan, dan Pakistan dengan presentase 20%, Malaysia 13%, Vietnam dan Thailand 10%, Filipina 8%, Indonesia 3%, dan India 0%.

"Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek," kata Presiden dalam uraian Pidato Presiden Joko Widodo pada Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangan di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8/2022). Krisis ekonomi global akan sangat dirasakan pengaruhnya oleh pemerintah daerah yang perekonomiannya mengandalkan pada produk berorientasi ekspor seperti tambang batu bara dan kelapa sawit.

3. Transisi energi berkelanjutan dan penyediaan *clean energy*.

Transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah tengah melakukan pengurangan penggunaan batubara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi CCS/CCUS (Carbon Capture, Utilizaton and Storage), pengembangan Dimethyl Ether (DME) pengganti elpiji serta peningkatakan nilai tambah mineral melalui hilirisasi di dalam negeri.

Emisi sektor energi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 530 juta ton CO2e. Diperkirakan peak emisi terjadi sekitar tahun 2039 sebesar 706 juta ton CO2e. Emisi berkurang secara signifikan setelah tahun 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. Pada tahun 2060, emisi pada

pembangkit adalah nol. Sementara tingkat emisi 2060 pada skenario NZE masih sebesar 401 juta ton CO2e yang berasal dari sisi demand, utamanya dari sektor industri dan transportasi.

4. Revolusi Industri 4.0 serta transformasi ekonomi berbasis digital

Dunia dan tentunya Indonesia telah memasuki era digitalisasi serta revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad ke-20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Dengan kata lain, mesin industri telah menggunakan sistem otomatisasi berbasis komputer, yang tentunya tidak lagi semuanya dikendalikan oleh tenaga manusia. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah seiring teknologi informasi yang terus bergerak maju.

Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan-perubahan yang mungkin tak terduga sebelumnya. Seperti contohnya pertarungan antara taksi konvensional versus taksi online atau ojek pangkalan vs ojek online. Semua itu pada akhirnya berdampak kepada publik, dimana dalam hal ini publik diuntungkan dengan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan layanan transportasi dan bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan kata lain, teknologi online telah membawa perubahan yang besar terhadap peradaban manusia dan ekonomi.

Dalam pemerintahan, penggunaan konsep digitalasi merambah ke berbagai sektor. Mulai dari penggunaan berbagai macam aplikasi/sistem informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat guna memudahkan proses pelaporan dan evaluasi, sampai dengan konsep pembayaran/transaksi non tunai yang sudah mulai di terapkan. Akan tetapi semua hal demikian bisa dilaksanakan apabila infrastruktur pendukung teknologi ini sudah siap.

Hal inilah yang dapat menjadikan munculnya sebuah peluang baru di era industry 4.0. Salah satu diantaranya adalah peluang berbisnis era digital. Dimana, daya jangkau teknologi informasi tidak hanya berskala lokal tetapi hingga skala global. Melalui internet, akses informasi dapat dijangkau hingga ke berbagai penjuru dunia. Revolusi industri generasi empat tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Dapatkah Kabupaten Mahakam Ulu menyesuaikan diri dengan transformasi luar biasa ini?

4.2.2 Isu-Isu Strategis Level Nasional

1. Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024

Rencana penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serental di Indonesia pada tahun 2024, di mana Pilpres, Pileg (DPR/DPRD/DPD) pada bulan April 2024 dan Pilkada serentak pada bulan November 2024, akan menimbulkan banyak konsekuensi. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan beberapa dampak yang timbul jika pemilihan kepala daerah (pilkada) digabungkan dengan pemilu nasional pada 2024. Dampak pertama yakni kompleksitas masalah pada Pemilu 2019 akan terulang kembali. Pada 2019 lalu, pemilu tingkat eksekutif dan legislatif dilakukan serentak. Salah satu persoalan yang muncul terkait jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Dampak lainnya yakni penurunan tingkat identifikasi masyarakat terhadap partai politik. Hal ini terjadi intensitas interaksi antara pemilih dengan partai politik meningkat hanya pada agenda elektoral. Pasalnya pilkada pada 2022 dan 2023 akan ditiadakan dan digelar serentak pada 2024. Keserentakan ini, menurut Titi, juga akan berdampak pada melemahnya tingkat pastisipasi masyarakat dalam demokrasi. “Serupa dengan Pilkada 2020, pemerintah akan berusaha maksimal agar prosedural pemilu dan pilkada bisa berjalan baik,” ujar Titi.

Berbagai dampak tersebut di atas, perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pemilu serentak bisa berjalan dengan baik. Baik penyediaan dana pelaksanaan maupun dukungan lainnya. Di samping itu, hal ini menuntut KPU dan KPUD untuk melakukan terobosan dan inovasi terkait penyelenggaraan pemilu serentak. Bagi pemerintah daerah banyaknya dana yang terkuras untuk mendukung pelaksanaan pemilu serentak ini juga akan berpengaruh pada alokasi program prioritas daerah dalam APBD.

2. Perpindahan Ibukota Nusantara ke Kalimantan Timur

Terpilihnya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara tentunya ditanggapi pro dan kontra oleh berbagai pihak, tergantung sudut pandang masing-masing. Namun dari segi pertumbuhan perekonomian wilayah, semakin banyak kota semakin baik perekonomian suatu wilayah. Kota merupakan penyumbang PDB terbesar, sekitar 80% (Bank Dunia, 2016). Menurut data World Economic Forum, 2016, Di United Kingdom (Inggris) misalnya, London menyumbangkan lebih dari setengah GDP Britain, kemudian di Amerika, koridor Boston-NY-Washington ditambah LA Raya menyumbang sekitar sepertiga GDP Amerika. Berkaca pada data tersebut, semakin banyak kota di Kaltim, semakin baik bagi pertumbuhan perekonomian wilayah Kaltim.

Kota akan mendorong proses urbanisasi. Berdasarkan data Bank Dunia (2016) tiap 1% pertumbuhan urbanisasi berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan GDP (*Gross Domestric Product*), 13% di India, 10% di China, 7% di Thailand dan 4% di Indonesia. Kota merupakan tempat berkumpulnya orang yang sangat banyak. Konektivitas ini menimbulkan berbagai macam ide, meningkatkan pengetahuan dan inovasi. Dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan penduduk kota akan meningkat pula. Ditambah dengan inovasi, produktivitas penduduk perkotaan akan semakin meningkat sehingga pendapatan akan meningkat pula. Kondisi ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Kota tidak bisa berdiri sendiri. Kota butuh suplai pangan, kayu, batu bara, minyak dan sebagaianya dari area diluar perkotaan atau dari area hinterland. Seiring

dengan meningkatnya populasi kota, maka suplai yang dibutuhkan akan lebih besar. Diperkirakan penduduk IKN sekitar 1,5 juta orang.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara diyakini bakal memberikan dampak yang besar bagi sejumlah daerah di sekitarnya termasuk Kab Mahakam Ulu yang akan menjadi salah satu daerah penyokong ibu kota. Mahakam Ulu diharapkan mampu menjadi daerah yang mampu mensuplai kebutuhan berbagai hasil pertanian dan perkebunan untuk Ibu Kota Baru. Tentu saja dibutuhkan berbagai kreasi dan inovasi untuk mewujudkan menjadikan produk pertanian dan perkebunan dari Mahakam Ulu bisa bernilai jual tinggi di Ibu Kota baru.

3. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem

Pemerintah pada tahun 2030 melalui capaian Sustainable Development Goals (SDGs) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US$ 1,9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi terebut, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem sudah menjadi agenda prioritas pemerintah. Pada 4 Maret 2021 Presiden memberikan arahan dalam strategi percepatan pengentasan kemiskinan, agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0 persen. Target capaian ini menjadi 6 tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDGs. Diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan sasaran. Pada tahun 2021 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7

provinsi dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang mewakili sekitar 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional, yang artinya menyasar sekitar 2,1 juta penduduk miskin ekstrem atau sekitar 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

4. Percepatan Penanganan *Stunting*

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

5. Bonus demografi

Bonus demografi (*demografy devident*) merupakan istilah yang dikembangkan oleh ahli ekonomi Harvard, David Bloom dan David Canning, yang didefinisikan sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil turunnya fertilitas jangka panjang." Munculnya bonus demografi ditandai dengan ledakan penduduk usia kerja atau produktif, yakni usia 15 hingga 64 tahun. Sederhananya, bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang didapat karena bertambahnya usia produktif sebagai akibat penurunan fertilitas jangka panjang. Adapun yang dimaksud penurunan fertilitas jangka panjang ialah minimnya kelahiran atau jumlah bayi yang dilahirkan dalam satu tahun.

Isu terkait bonus demografi ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI, bapak K.H. Ma'ruf Amin dalam penyelenggaraan Musrenbangnas 2023 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Bonus demografi memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian. Dari sisi keuntungan, bonus demografi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah mereka yang produktif lebih banyak dari pada yang tidak produktif. Artinya beban ketergantungan akan semakin kecil dan perekonomian dapat tumbuh lebih tinggi karena didukung oleh tenaga kerja yang produktif. Hal ini juga mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dan memanfaatkan potensi ini dengan menyiapkan sebanyak mungkin lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan infrastruktur sosial, mengatur kebijakan migrasi internal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, jika pemerintah gagal dalam mengantisipasi dampak bonus demografi ini bukan tidak mungkin akan berdampak pada munculnya sejumlah masalah sosial di masyarakat.

4.2.3 Isu-Isu Strategis Level Regional/Daerah

1. Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Daerah

Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi luas wilayah Kabupaten tidak mengalami penambahan. Hal ini, berimplikasi pada meningkatnya kepadatan penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu. Pertumbuhan pendudukan yang tinggi memang dibutuhkan bagi daerah-daerah baru guna mengisi penduduk daerah. Harapannya, semakin banyak penduduk akan semakin tinggi pula tingkat

perekonomian. Akan tetapi, apabila terjadi ketimpangan antar daerah, akan menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Hal ini harus segera di antisipasi oleh pemerintah dengan membuatkan kebijakan-kebijakan sedini mungkin supaya sebaran penduduk bisa merata di semua daerah dan pembangunan bisa juga ikut merata.

2. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum terpecahkan di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi kemiskinan yang dicerminkan oleh persentase penduduk miskin pada tahun 2019 masih berada di atas 10 persen yaitu sebesar 11,25 persen dengan jumlah absolut sebesar 3.190 penduduk. Sebagaimana disebutkan dalam gambaran umum di atas, garis kemiskinan di Mahakam Ulu juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 588.756,-. Sehingga, kenaikan persentase penduduk miskin bisa jadi diakibatkan oleh rendahnya pendapatan penduduk sehingga tidak mampu memenuhi batas pengeluaran minimumnya. Upaya pemerintah daerah Mahakam Ulu dalam penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas petani yang notabenenya mendominasi peyerapan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas diyakini mampu mendongkrak pendapatan masyarakat. Disamping itu, penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang melibatkan masyarakat lokal oleh pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan juga dianggap mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah capaian kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini mencerminkan bahwa kemudahan akses masyarakat Mahakam Ulu dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan akselerasi sarana prasarana dan pemerataan kualitas serta kuantitas fasilitas

pendidikan, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan di seluruh kecamatan Mahakam Ulu.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Mahakam Ulu masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produkvitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbaharukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana,vdilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

5. Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Kabupaten

Mahakam Ulu juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang professional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan

Secara singkat, isu-isu strategis yang dihadapi Kab. Mahakam ulu untuk sisa Periode RPJMD seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Penentuan Isu Strategis Kab. Mahakam Ulu

No.	ISU STRATEGIS
ISU STRATEGIS LEVEL INTERNASIONAL	
1	Sustainable Development Goals (SDG's) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)
2	Resesi ekonomi global
3	Transisi energi berkelanjutan dan penyediaan clean energy.
4	Revolusi Industri 4.0 serta transformasi ekonomi berbasis digital
5	Transisi energi berkelanjutan dan penyediaan clean energy
ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL	
1	Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024
2	Perpindahan Ibukota Nusantara ke Kalimantan Timur
3	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem
4	Percepatan penanganan stunting
5	Bonus demografi
ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH	
1	Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Daerah
2	Tingginya Tingkat Kemiskinan
3	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	Ketimpangan Pendapatan dan pembangunan
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Sumber: Analisis Tim Pokja Penyusunan Perubahan RPJMD Kab.Mahulu

4.2.4. Kajian Atas Dokumen RTRW Kab. Mahakam Ulu 2016-2023

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui aksesibilitas secara seimbang dan merata untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata menuju masyarakat Mahakam Ulu yang sejahtera dan mandiri mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu antara lain:

a. Pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat;
b. Pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi sungai Mahakam yang terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
c. Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
d. Pengembangan kegiatan ekonomi wilayah secara mandiri pada kawasan budidaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah tersebut, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, antara lain:

1. Strategi pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat meliputi:

a. Mengembangkan sistem permukiman dan sistem prasarana wilayah sesuai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi;
b. Mengembangkan zona penyangga di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
d. Mengembangkan jalur distribusi pasokan barang untuk menjaga stabilitas ekonomi perbatasan;
e. Membuka pintu gerbang perbatasan dalam rangka kerjasama lintas batas dan peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan; dan
f. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

2. Strategi untuk pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi sungai Mahakam yang terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan meliputi:
   a. Memantapkan dan meningkatkan peranan PKSN Long Pahangai;
   b. Mengembangkan sistem permukiman berbasis fisiogeografis dan dukungan sistem transportasi kawasan ke dalam PKLp, PPK, dan PPL;
   c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi wilayah yang seimbang dan terpadu untuk mengatasi keterbatasan fisiogeografis wilayah;
   d. Mengembangkan sistem jaringan energi terbarukan berbasis sungai;
   e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi pada sistem pusat permukiman;
   f. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air untuk kebutuhan permukiman, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan perlindungan kualitas air sungai; dan

g. Mengembangkan sistem prasarana lingkungan berupa air minum, air limbah, drainase, dan persampahan berbasis karakteristik sistem pusat permukiman dan perlindungan kualitas air sungai.

3. Strategi untuk pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah meliputi:
   a. Memantapkan dan meningkatkan peranan PKSN Long Pahangai;
   b. Mengembangkan sistem permukiman berbasis fisiogeografis dan dukungan sistem transportasi kawasan ke dalam PKLp, PPK, dan PPL;
   c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi wilayah yang seimbang dan terpadu untuk mengatasi keterbatasan fisiogeografis wilayah;
   d. Mengembangkan sistem jaringan energi terbarukan berbasis sungai;
   e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi pada sistem pusat permukiman;
   f. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air untuk kebutuhan permukiman, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan perlindungan kualitas air sungai; dan
   g. Mengembangkan sistem prasarana lingkungan berupa air minum, air limbah, drainase, dan persampahan berbasis karakteristik sistem pusat permukiman dan perlindungan kualitas air sungai.
4. Strategi untuk pengembangan kegiatan ekonomi wilayah secara mandiri pada kawasan budidaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi:
   a. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang berkelanjutan dan rendah emisi;
   b. Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian hijau dengan komoditi unggulan bernilai ekonomi tinggi;
   c. Mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan hijau dengan komoditi unggulan bernilai ekonomi tinggi;
   d. Mengembangkan secara selektif dan terbatas kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditi unggulan bernilai ekonomi tinggi;

e. Mengembangkan secara selektif kawasan peruntukan pariwisata dengan obyek dan destinasi tujuan wisata bagi peminat khusus;
f. Mengembangkan kawasan peruntukan industri hijau untuk pengolahan komoditi unggulan pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
g. Mengembangkan secara selektif dan terbatas kawasan peruntukan budidaya kehutanan;
h. Membatasi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana; dan
i. Penguatan ekonomi masyarakat setempat melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari dan pemanfaatan limbah dari pengelolaan sumberdaya alam.

4.2.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu digambarkan dalam peta seperti pada gambar dibawah.

Gambar 4.1 Peta Rencana Struktur Ruang

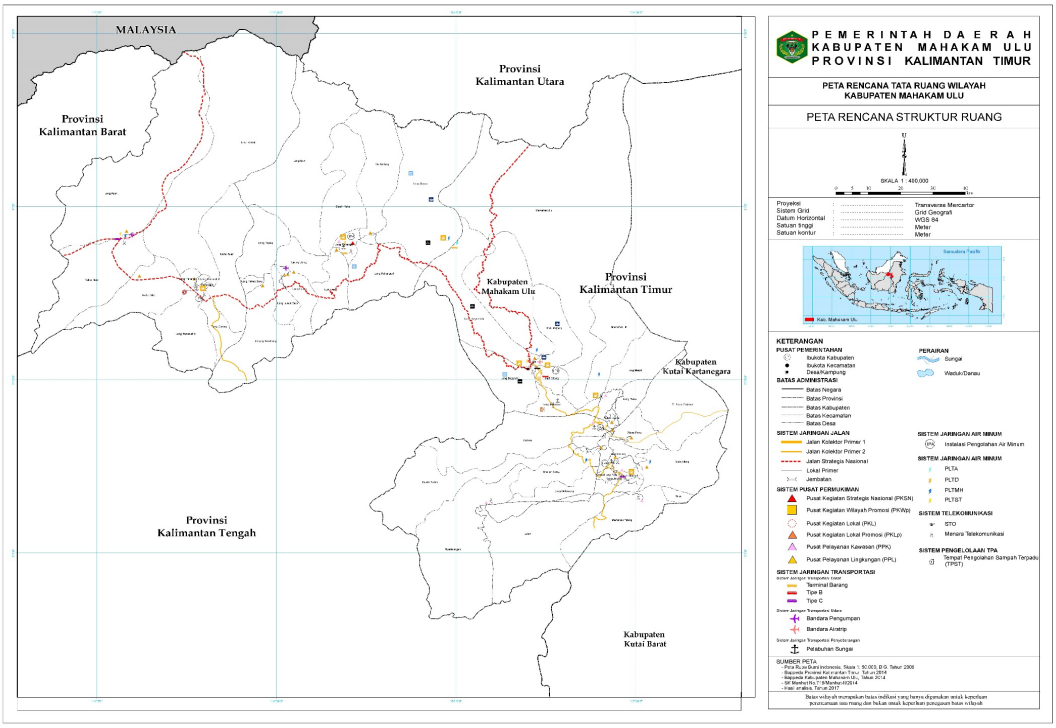

A. Rencana Sistem Kegiatan

Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Mahakam Ulu meliputi sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Rencana fungsi utama Kawasan perkotaan terdiri dari:

1. PKSN Long Pahangai terdapat di Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari;
2. PKWp meliputi perkotaan Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun;
3. PKL berupa pusat desa di Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari;
4. PKLp berupa perkotaan Long Hubung di Kecamatan Long Hubung; dan
5. PPK meliputi:
    a. PPK Long Apari di Kecamatan Long Apari;
    b. PPK Long Pahangai I di Kecamatan Long Pahangai;
    c. PPK Laham di Kecamatan Laham;
    d. PPK Mamahak Ilir di Kecamatan Long Bagun; dan
    e. PPK Datah Bilang Ilir di Kecamatan Long Hubung.

Sementara itu, pusat kegiatan desa berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL):

1. PPL di Kecamatan Long Bagun, meliputi:
    a. PPL Rukun Damai yang melayani Desa Rukun Damai, dan Desa Long Merah;
    b. PPL Batu Majang yang melayani Desa Batoq Kelo, dan Desa Batu Majang;
    c. PPL Long Hurai yang melayani Desa Long Hurai.
2. PPL di Kecamatan Long Hubung, meliputi:
    a. PPL Mamahak Teboq yang melayani Desa Mamahak Teboq, Desa Datah Bilang Baru, Desa Datah Bilang Ilir, Desa Datah Bilang Ulu, Desa Long Hubung, dan Desa Lutan;
    b. PPL Mata Libaq yang melayani Desa Mata Libaq;
    c. PPL Tri Pariq Makmur yang melayani Desa Tri Pariq Makmur;
    d. PPL Sirau yang melayani Desa Sirau, dan Desa Wana Pariq.
3. PPL di Kecamatan Laham, meliputi:

a. PPL Nyaribungan yang melayani Desa Nyaribungan;
b. PPL Danum Paroy yang melayani Desa Danum Paroy dan Desa Muara Ratah.

4. PPL di Kecamatan Long Apari, meliputi:
   a. PPL Noha Silat yang melayani Desa Noha Silat;
   b. PPL Naha Buan yang melayani Desa Naha Buan, Desa Long Keriok, Desa Long Paneneh I, Desa Long Paneneh II, Desa Long Paneneh III, Desa Tiong Bu'u, dan Desa Tiong Ohang.
5. PPL di Kecamatan Long Pahangai, meliputi:
   a. PPL Long Tuyoq yang melayani Desa Long Tuyoq, dan Desa Liu Mulang;
   b. PPL Long Lunuk yang melayani Desa Long Lunuk, dan Desa Long Lunuk Baru;
   c. PPL Long Isun yang melayani Desa Long Isun, Desa Datah Naha, Desa Lirung Ubing, dan Desa Naha Aruq; dan
   d. PPL Long Pakaq yang melayani Desa Delang Kerohong, Desa Long Pakaq, dan Desa Long Pakaq Baru.

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem prasarana utama terdiri dari Sistem jaringan transportasi darat; Sistem jaringan Sungai dan Penyeberangan; dan Sistem jarigan transportasi udara. Sedangkat sistem prasarana jaringan lainnya terdiri dari: Sistem Jaringan Energi; Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

- **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Sistem jaringan transportasi darat Kabupten Mahakam Ulu terdiri dari:

a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang terdiri dari:
   1) Jaringan jalan nasional (arteri primer) meliputi:
      a. Long Hubung - Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun - Long Pahangai;

b. Long Pahangai – Tiong Ohang - Batas Kalbar;
c. Tiong Ohang – Long Apri – perbatasan Malaysia;
d. Long Pahangai – Long Boh (Batas Kaltara).

2) Jaringan jalan kabupaten (lokal primer) berupa pengembangan dan peningkatan ruas jalan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi:
a. Ruas jalan poros - Mamahak Teboq;
b. Ruas jalan Mamahak Teboq – Datah Bilang;
c. Ruas jalan Datah Bilang – Long Hubung;
d. Ruas jalan Long Hubung Seberang – Matalibaq – Tripariq Makmur;
e. Ruas jalan Long Hubung Seberang – Laham;
f. Ruas jalan Long Gelawang - Nyaribungan;
g. Ruas jalan poros - Laham;
h. Ruas jalan poros - Long Hurai;
i. Ruas jalan poros – Mamahak Besar;
j. Ruas jalan poros – Batu Kelau;
k. Ruas jalan poros – Long Tuyoq;
l. Ruas jalan poros - Long Pahangai;
m. Ruas jalan poros – Long Lunuk;
n. Ruas jalan poros – Long Pakaq;
o. Ruas jalan poros – Tiong Ohang; dan
p. Ruas jalan Long Pahangai – Datah Suling.

3) Jembatan pada wilayah kabupaten meliputi:
a. Jembatan Long Bagun di Kecamatan Long Bagun;
b. Jembatan Long Melaham di Kecamatan Long Bagun;
c. Jembatan Desa Muara Ratah di Kecamatan Long Hubung;
d. Jembatan Long Pahangai di Kecamatan Long Pahangai;
e. Jembatan Mahakam Long Hubung di Kecamatan Long Hubung; dan
f. Jembatan Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari.

b. Terminal penumpang meliputi:
1) Terminal penumpang tipe A Kecamatan Ujoh Bilang;

2) Terminal penumpang tipe B di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun;
3) Terminal penumpang tipe C di Desa Data Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung;
4) Terminal penumpang tipe C di Desa Long Apari Kecamatan Long Apari;
5) Terminal barang (*logistic point*) di Desa Long Pahangai I Kecamatan Long Pahangai;
6) Terminal barang (*logistic point*) di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; dan
7) Terminal barang (*logistic point*) di Desa Laham Kecamatan Laham.

c. Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari:
1) Sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota;
2) Sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah berupa pelayanan trayek angkutan bus Antar Kabupaten Dalam Provinsi (AKDP);
3) Sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah kabupaten; dan
4) Sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah kabupaten.

- **Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terdiri dari:**

a. Alur pelayaran sungai meliputi:
1) Lintas Long Iram (Kabupaten Kutai Barat)–Long Bagun; dan
2) Lintas Long Bagun ke arah hulu menghubungkan Long Pahangai–Tiong Ohang–Long Apari.

b. Lintas penyeberangan sungai meliputi lintas Long Bagun Ulu-Batu Majang atau Long Bagun. Pelabuhan sungai meliputi:
1) Pelabuhan Tiong Ohang berada di Kecamatan Long Apari;
2) Pelabuhan Long Pahangai I berada di Kecamatan Long Pahangai;
3) Pelabuhan Induk Long Melaham berada di Kecamatan Long Bagun;
4) Pelabuhan Long Bagun berada di Kecamatan Long Bagun;
5) Pelabuhan Ujoh Bilang berada di Kecamatan Long Bagun;
6) Pelabuhan Laham berada di Kecamatan Laham; dan

7) Pelabuhan Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung.

3. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi laut Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

a. Bandar udara Datah Dawai ditetapkan di Kecamatan Long Pahangai sebagai bandar udara pengumpan;
b. Bandar udara Long Apari ditetapkan di Kecamatan Long Apari sebagai bandar udara pengumpan; dan
c. Bandar udara Ujoh Bilang ditetapkan di Kecamatan Long Bagun sebagai bandar udara pengumpan.

4. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

a. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik meliputi:

1) Pelayanan jaringan listrik sesuai potensi sumber daya masing masing desa dan/atau kecamatan meliputi jaringan listrik tenaga air, jaringan listrik tenaga surya, jaringan listrik diesel;
2) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Boh di Kecamatan Long Bagun untuk melayani seluruh wilayah kabupaten;
3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk melayani pusat kegiatan yang memiliki potensi sumber daya air yang mencukupi; dan
4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat (PLTST) untuk melayani pusat kegiatan yang memiliki potensi sumber daya energi matahari yang mencukupi.

b. Infrastruktur penyalur tenaga listrik dan saran pendukungnya

Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:

1) Pengembangan jaringan listrik berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) ditetapkan antar kecamatan di dalam kabupaten; dan
2) Pengembangan jaringan listrik berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR) ditetapkan antar desa di dalam satu kecamatan.

5. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

a. Sistem jaringan telokumunikasi yang ada berupa jaringa tetap yaitu jaringan kabel.
b. Jaringan tersebut meliputi pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Long Bagun; dan
c. Sistem jaringan nirkabel berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama di pusat kegiatan.

6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sumber air yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi sungai (DAS Mahakam) yang merupakan wilayah sungai strategis nasional dan waduk yang dikembangkan di sungai Boh di Kecamatan Long Bangun.

Sumberdaya air wilayah sungai berupa pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi, DAS dan/atau sungai yang meliputi:

1. Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai strategis nasional Mahakam berupa DAS Mahakam;
2. Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota berupa Sungai Mahakam; dan
3. Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai Kabupaten berupa anak sungai Sungai Mahakam.

Prasarana sumber air yang ada meliputi:

a. Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang meliputi:
   1) DI Datah Bilang dan Bilung di Kecamatan Long Hubung seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar; dan

2) DI Datah Bilang di Kecamatan Long Hubung seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.

b. Sistem pengelolaan air baku meliputi:
   1) Pemanfaatan air permukaan (sungai) sebagai sumber air baku;
   2) Pengoptimalan sumber mata air; dan
   3) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku.

   Sistem pengelolaan air baku dikembangkan untuk:
   1) Penyediaan air baku pertanian;
   2) Penyediaan air baku industri; dan
   3) Penyediaan air minum.

c. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi:
   1) Sistem penyediaan air bersih diselenggarakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat; dan
   2) Sistem penyediaan air bersih diselenggarakan dengan pola desentralisasi yang bersifat mandiri pada tiap area pelayanan yang dibagi berdasarkan kondisi fisiografis permukiman.

d. Sistem pengendalian banjir meliputi:
   1) Pembangunan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, berupa:
      a. Check dam;
      b. Tanggul;
      c. Dam pengendali; dan
      d. Saluran pembuangan.
   2) Perbaikan sumur resapan pada kawasan permukiman; dan
   3) Penataan daerah lingkungan sungai.

7. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

a. Sistem penyediaan air minum meliputi:

   Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum meliputi:
   1) IPA Long Apari berada di Kecamatan Long Apari;

2) IPA Long Pahangai berada di Kecamatan Long Pahangai;
3) IPA Ujoh Bilang berada di Kecamatan Long Bagun;
4) IPA Laham berada di Kecamatan Laham; dan
5) IPA Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung.

Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perkotaan meliputi:

1) PKWp Ujoh Bilang;
2) PKL Tiong Ohang;
3) PPK Long Pahangai I; dan
4) PPK Datah Bilang Ilir.

Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perdesaan meliputi:

1) PPK Mamahak Ilir dan PPK Long Apari;
2) PPL di Kecamatan Long Bagun meliputi PPL Rukun Damai, PPL Batu Majang, dan PPL Long Hurai;
3) PPL di Kecamatan Long Hubung meliputi PPL Sirau, PPL Mata Libaq; dan PPL Tri Pariq Makmur;
4) PPL di Kecamatan Laham meliputi PPL Danum Paroy, dan PPL Nyaribungan;
5) PPL di Kecamatan Long Apari meliputi PPL Naha Buan dan PPL Noha Silat; dan
6) PPL di Kecamatan Long Pahangai meliputi PPL Long Tuyoq, PPL Long Lunuk, PPL Long Isun, dan PPL Long Pakaq.

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
1) Sistem pembuangan air limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung.
2) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perdesaan berupa:
   - Sarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan perdesaan;
   - IPAL komunal pada kawasan permukiman padat, dan sarana umum.
3) Sistem jaringan limbah terpadu dikembangkan dengan sistem on site maupun off site pada pusat-pusat kegiatan, meliputi:

- PKWp Ujoh Bilang; dan
- PPK Datah Bilang Ilir.

c. Pengelolaan sistem jaringan persampahan

Sistem jaringan persampahan berupa:

1) Sistem persampahan terpadu pada kawasan perkotaan;
2) Sistem persampahan mandiri pada kawasan perdesaan.

Sistem persampahan terpadu pada kawasan perkotaan meliputi:

1) TPST Ujoh Bilang;
2) TPST Datah Bilang Ilir;
3) TPST Tiong Ohang; dan
4) TPST Long Pahangai I.

Sistem persampahan mandiri pada kawasan perdesaan meliputi:

1) PPK Mamahak Ilir dan PPK Long Apari;
2) PPL di Kecamatan Long Bagun meliputi PPL Rukun Damai, PPL Batu Majang, dan PPL Long Hurai;
3) PPL di Kecamatan Long Hubung meliputi PPL Sirau, PPL Mata Libaq, dan PPL Tri Pariq Makmur;
4) PPL di Kecamatan Laham meliputi PPL Danum Paroy, dan PPL Nyaribungan;
5) PPL di Kecamatan Long Apari meliputi PPL Naha Buan dan PPL Noha Silat; dan
6) PPL di Kecamatan Long Pahangai meliputi PPL Long Tuyoq, PPL Long Lunuk, PPL Long Isun, dan PPL Long Pakaq.

d. Sistem Jaringan Drainase

Sistem Jaringan Drainase kabupaten Mahakam Ulu Meliputi:

1) Jaringan drainase primer berupa jaringan Sungai Mahakam dan jaringan anak-anak sungai, tersebar pada Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung;
2) Jaringan drainase sekunder berupa saluran drainase dari pusat-pusat kegiatan menuju jaringan drainase primer; dan

3) Sumur resapan pada wilayah terbangun.

e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Bencana alam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu adalah bencana banjir, sistem jaringan evakuasi terhadap bencana tersebut terdiri dari:

1) Jalur evakuasi bencanaberupa jaringan jalan yang menuju kawasan bebas bencana; dan
2) Ruang evakuasi bencana beruparuang terbuka (*escape area*) yang cukup untuk membangun fasilitas tanggap darurat bencana dan dapat berupa bangunan publik yang bebas banjir.

4.2.4.2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Kabupaten Mahakam Ulu, terbagi menjadi dua yaitu Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya. Rencana pola ruang di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat secara jelas pada peta berikut ini.

Gambar 4.2
Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Mahakam Ulu

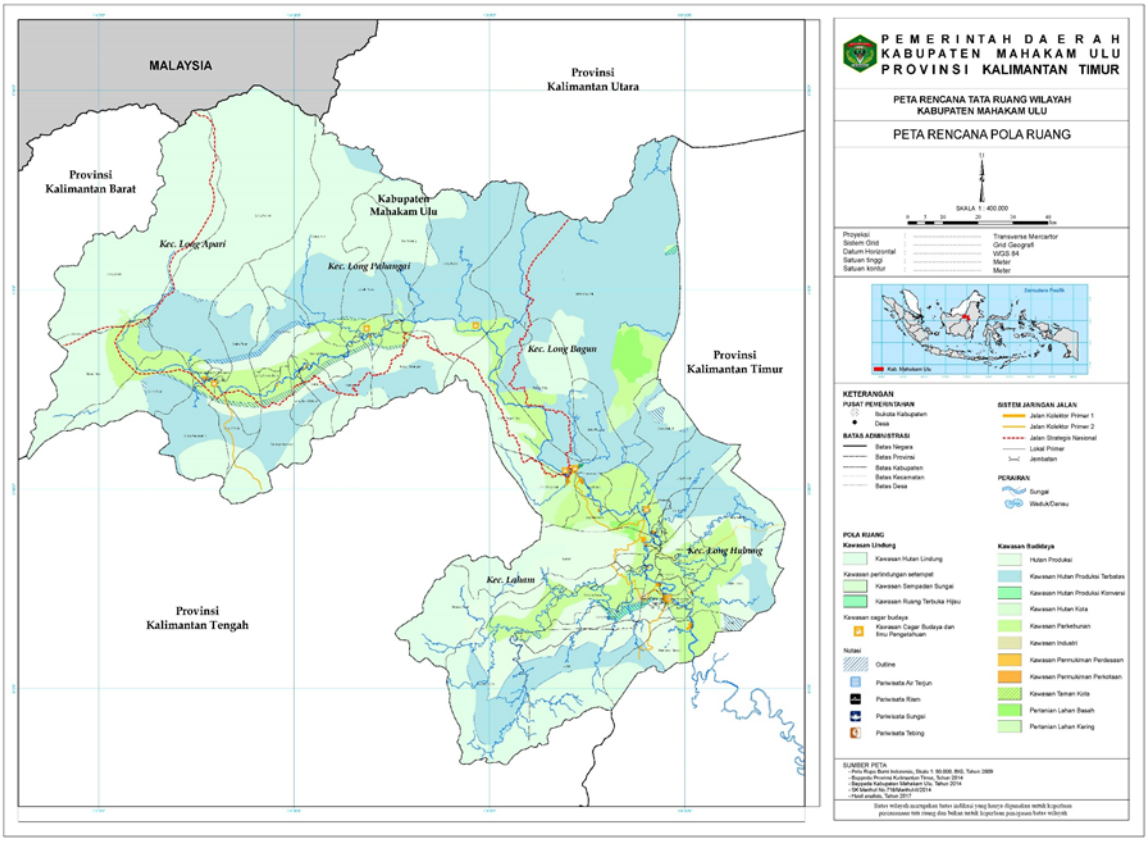

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung terbagi atas:

a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan hutan lindung dengan luasan kurang lebih 701.872 (tujuh ratus seribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat dengan luasan kurang lebih 7.022 (tujuh ribu dua puluh dua) hektar berupa:

1) Kawasan sempadan sungai, berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Kawasan ini meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk

sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Garis sempadan ditentukan pada:

A. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan dengan kriteria:
   - Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
   - Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
   - Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

B. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan dengan kriteria:
   - Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500 (lima ratus) km2, garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
   - Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km2, garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

C. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan dengan kriteria paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan

D. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Kawasan sempadan sungai ditetapkan di seluruh sungai terkait Wilayah Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu dan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kawasan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) atau 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:
   A. Ruang terbuka hijau publik seluas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perkotaan ditetapkan di:
      - Hutan kota
      - Taman kota
      - Taman pemakaman umum;
      - Jalur hijau sepanjang jalan dan sungai;
      - Taman RT;
      - Taman RW;
      - Taman Kelurahan; dan
      - Taman Kecamatan.
   B. Ruang terbuka hijau privat seluas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan perkotaan meliputi:
      - Pekarangan rumah tinggal;
      - Pekarangan gedung milik pemerintah daerah; dan
      - Pekarangan gedung milik masyarakat.
   C. Kawasan sekitar waduk yang ditetapkan dengan kriteria:
      - Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
      - Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
      - Kawasan sekitar waduk ditetapkan pada rencana waduk buatan di Sungai Boh, Kecamatan Long Bagun.

c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi berupa kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan:

1) Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
2) Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air; dan
3) Kawasan sekitar mata air ditetapkan pada seluruh mata air.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdapat di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah yang terdapat di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alamberupa kawasan bencana alam banjir pasang yang terdapat di:

1) Sebagian Kecamatan Long Bagun;
2) Sebagian Kecamatan Long Hubung; dan
3) Sebagian Kecamatan Laham.

e. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di:

1) Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Bagun;
2) Pemukiman Suku Dayak Punan di Kecamatan Long Bagun;
3) Permukiman Suku Dayak Kayan di Kecamatan Long Bagun;
4) Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Hubung;
5) Permukiman Suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Hubung;
6) Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Bagun;
7) Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Apari;
8) Balai Adat suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Pahangai; dan

9) Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Pahangai.

f. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

1) Kawasan perlindungan plasma nutfah dan/atau kawasan NKT terdapat di:
   - Habitat ikan Pesut Mahakam di sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung; dan
   - Habitat Badak di sebagian wilayah Kecamatan Laham dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung.
2) Kawasan koridor satwa dan/atau biota perairan yang dilindungi terdapat dikoridor satwa liar (bekantan dan orang utan) yang menghubungkan kawasan konservasi Taman Nasional Betung Kerihun, Kawasan Ekologis Muller, dan Taman Nasional Kayan Mentarang.

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas yang terdiri dari:
   - Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 653.006 (enam ratus lima puluh tiga ribu enam) hektar terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
   - Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 219.778 (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar terdapat Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
   - Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan kurang lebih 2.799 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) hektar terdapat Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, dan Kecamatan Laham.

b. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari:

- Kawasan hortikultura dengan luasan kurang lebih 22.670 (dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) hektar;
- Kawasan peruntukan tanaman pangan meliputi:
  1. Kawasan lahan pertanian pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 485 (empat ratus delapan puluh lima) hektar terdapat diseluruh kecamatan.
  2. Kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci yang dilengkapi zonasi kawasan dan ditetapkan melalui peraturan daerah.
  3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 13.839 (tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar yang terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.
- Kawasan peternakan yang tersebar diseluruh kecamatan atau pada seluruh wilayah kabupaten;
- Kawasan peruntukan perkebunan dengan luasan kurang lebih 251.100 (dua ratus lima puluh satu ribu seratus) hekta terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.

c. Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

Kawasan peruntukan perikanan berupa kawasan peruntukkan perikanan budidaya di:

- Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Bagun;
- Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Hubung;
- Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Laham;
- Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Apari; dan
- Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Pahangai.

d. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri dikembangkan dengan kegiatan utama industri berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan. Kawasan peruntukan industri dengan luasan kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) Ha dikembangkan di Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Laham.

e. Kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 41.024,61 Ha terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu:
   - Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Bagun;
   - Permukiman Suku Dayak Kayan di Kecamatan Long Bagun;
   - Pemukiman Suku Dayak Punan di Kecamatan Long Bagun;
   - Permukiman Suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Hubung;
   - Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Hubung;
   - Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Bagun;
   - Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Apari;
   - Balai Adat suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Pahangai;
   - Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Pahangai;
   - upacara adat Laliiq Ugaal Suku Dayak Bahau;
   - upacara adat Hudoq berada di Kecamatan Long Pahangai;
   - upacara adat Memlaai berada di Kecamatan Long Pahangai; dan
   - ritual pengobatan Mamat Bali Akang Suku Kenyah.

2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:
   - Kawasan Batu Dinding di Kecamatan Long Bagun;
   - Kawasan Batu Miliq di Kecamatan Long Pahangai;
   - Kawasan air terjun Haloq di Kecamatan Long Bagun;
   - Kawasan air terjun Ken'heq di Kecamatan Long Pahangai;
   - Kawasan air terjun Nyani di Kecamatan Long Pahangai;
   - Kawasan Sungai Alan di Kecamatan Long Bagun;
   - Kawasan Sungai Payang di Kecamatan Long Bagun;
   - Kawasan Sungai Tepai di Kecamatan Long Pahangai;

- Kawasan riam Haloq di Kecamatan Long Bagun;
- Kawasan riam Udang di Kecamatan Long Bagun;
- Kawasan riam panjang di Kecamatan Long Pahangai; dan
- Kelompok riam di hulu Sungai Mahakam di Kecamatan Long Apari.

f. Kawasan peruntukan permukiman meliputi:

Kawasan peruntukan permukiman dengan luasan kurang lebih 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) Ha terdiri atas:

- Kawasan permukiman perkotaan dengan luasan kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) Ha terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham.
- Kawasan permukiman perdesaan dengan luasan kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Ha terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.

g. Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:

1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan:
   - Pos perbatasan perbatasan yang berada di daratan sepanjang batas negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia yang terdapat di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai; dan
   - Koramil yang terdapat di Kecamatan Pahangai dan Kecamatan Long Bangun.
2) Kawasan peruntukan hutan adat terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
3) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan di kawasan areal penggunaan lain yang memiliki potensi mineral logam dan mineral bukan logam dan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.4.3 Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Berupa:
   1) Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Kalimantan–Malaysia berupa kawasan perbatasan darat ditetapkan di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
   2) Kawasan Strategis Nasional Heart of Borneo berupa kawasan dengan fungsi konservasi dan dalam kesepakatan tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) ditetapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa:
   1) Dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan industri pertanian.
   2) Dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu kawasan koridor sungai Mahakam.
   3) Dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan perbatasan Long Pahangai dan Long Apari.

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa:
   1) Dari sudut ekonomi, terdapat di:
      - Kawasan pemerintahan di Kecamatan Long Bagun;
      - Kawasan perdagangan dan jasa wilayah di Kecamatan Long Hubung;
      - Kawasan perdagangan dan jasa perbatasan di Kecamatan Long Apari; dan
      - Kawasan logistik perbatasan di Kecamatan Long Pahangai.
   2) Dari sudut kepentingan sosial budaya terdapat di:
      - Sebagian wilayah desa Datah Bilang di Kecamatan Long Hubung sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah;
      - Sebagian wilayah Desa Batu Majang di Kecamatan Long Bagun;
      - Sebagian wilayah Desa Long Tuyoq di Kecamatan Long Pahangai sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Penihing; dan

- Kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau di Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung.

3) Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan sekitar Sungai Ratah di Desa Nyaribungan Kecamatan Laham.

Tabel 4.3
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Mahakam Ulu

No	Kawasan Strategis	Keterangan
1	Nasional	a. Perbatasan Kalimantan–Malaysia di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai
		b. Heart of Borneo berupa di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu
2	Provinsi	a. Kawasan industri pertanian
		b. Kawasan koridor sungai Mahakam
		c. kawasan perbatasan Long Pahangai dan Long Apari
3	Kabupaten	**a. Dari sudut kepentingan ekonomi**
		1. Kawasan pemerintahan di Kecamatan Long Bagun;
		2. Kawasan perdagangan dan jasa wilayah di Kecamatan Long Hubung;
		3. Kawasan perdagangan dan jasa perbatasan di Kecamatan Long Apari; dan
		4. Kawasan logistik perbatasan di Kecamatan Long Pahangai.
		b. Dari sudut kepentingan sosial budaya
		5. Sebagian wilayah desa Datah Bilang di Kecamatan Long Hubung sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah;
		6. Sebagian wilayah Desa Batu Majang di Kecamatan Long Bagun;
		7. Sebagian wilayah Desa Long Tuyoq di Kecamatan Long Pahangai sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Penihing; dan
		8. Kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau di Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung.
		c. Dari sudut kepentingan fungsi
		1. Kawasan sekitar Sungai Ratah di Desa Nyaribungan Kecamatan Laham.

4.2.4.4. Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
d. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
h. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.4
Arahan Pemanfaatan Ruang Kab. Mahakam Ulu

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					20	20	20	2021	2022	2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**											
1.	**Perwujudan Pusat Kegiatan Kabupaten**											
	Pusat Kegiatan Perkotaan											
1.1	Percepatan Pengembangan PKSN											
	▪ Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan perbatasan; ▪ Pengembangan pusat pengembangan perhubungan udara perintis; ▪ Pengembangan Pusat logistik kabupaten dan local kecamatan/perbatasan; dan ▪ Pengembangan pusat permukiman perbatasan.	Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten								
1.2	Percepatan Pengembangan PKWp											
	▪ Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten; ▪ Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan; ▪ Pengembangan pusat pelayanan logistik local kecamatan dan regional (kecamatan terdekat di kabupaten lain); ▪ Pengembangan pusat ekonomi kabupaten; ▪ Pengembangan pelayanan pendukung perhubungan udara perintis; ▪ Pengembangan pelayanan pendukung wisata budaya dan wisata alam; ▪ Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten; dan ▪ Pengembangan pusat pelayanan pendidikan skala kabupaten.	perkotaan Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten								
1.3	Percepatan Pengembangan PKL											
	▪ Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan; ▪ Pengembangan pelayanan pendukung PKSN Long Pahangai dan Long Apari; ▪ Pengembangan pelayanan pendukung perhubungan udara perintis; ▪ Pengembangan pusat pengembangan wisata budaya dan wisata alam; ▪ Pengembangan pusat jasa lingkungan hutan; ▪ pelayanan pendukung logistik lokal kecamatan; dan ▪ Pengembangan pusat perekonomian wilayah perbatasan.	pusat desa di Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
1.4	Percepatan Pengembangan PKLp											
	▪ Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan; ▪ Pengembangan pusat pelayanan logistik lokal kecamatan dan kabupaten; ▪ Pengembangan pusat ekonomi kabupaten; dan ▪ Pengembangan pelayanan pendukung wisata budaya dan wisata alam.	perkotaan Long Hubung di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					20	20	20	2021	2022	2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037		
1.4	Percepatan Pengembangan PPK													
	▪ Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan ▪ Penyediaan puskesmas.			Desa Datah Bilang, Kecamatan Long Hubung; Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai; Desa Laham, Kecamatan Laham Desa Mamahak Ilir di Kecamatan Long Bagun;dan Desa Datah Bilang Ilir di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
1.5	Percepatan Pengembangan PPL													
	▪ Penyediaan pasar desa; dan ▪ Penyediaan puskesmas pembantu			Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari Desa Mamahak Ilir, Kec. Long Bagun Desa Nyaribungan, Kec. Laham Desa Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung Desa Long Pahangai di Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
2	**Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah Kabupaten**													
	Sistem Transportasi													
2.1	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Transportasi Darat													
a	Pengembangan dan pemantapan jaringa jalan arteri primer			a. Long Hubung -Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun - Long Pahangai b. Long Pahangai – Tiong Ohang - Batas Kalbar c. Tiong Ohang – Long Apri – perbatasan Malaysia d. Long Pahangai – Long Boh (Batas Kaltara)	APBN APBD	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
b	Pengembangan dan pemantapan jaringa jalan lokal primer			ruas jalan poros - Mamahak Teboq; ruas jalan Mamahak Teboq – Datah Bilang; ruas jalan Datah Bilang – Long Hubung; ruas jalan Long Hubung Seberang – Matalibaq – Tripariq Makmur; ruas jalan Long Hubung Seberang – Laham; ruas jalan Long Gelawang - Nyaribungan; ruas jalan poros - Laham; ruas jalan poros - Long Hurai; ruas jalan poros – Mamahak Besar; ruas jalan poros – Batu Kelau;	APBD	Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								ruas jalan poros – Long Tuyoq ruas jalan poros - Long Pahangai; ruas jalan poros – Long Lunuk; ruas jalan poros – Long Pakaq; ruas jalan poros – Tiong Ohang; dan ruas jalan Long Pahangai – Datah Suling.	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
c	Pembangunan jembatan							Kecamatan Long Bagun; Kecamatan Long Bagun; Kecamatan Long Hubung; Kecamatan Long Pahangai; Kecamatan Long Hubung; dan Kecamatan Long Apari.	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
d	Pengembangan terminal penumpang tipe A							Kecamatan Ujoh Bilang	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
e	Pengembangan terminal penumpang tipe B							Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
f	Peningkatan dan optimalisasi terminal penumpang tipe C							Desa Datah Bilang Ilir , Kecamatan Long Hubung Desa Long Apari Kecamatan Long Apari	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
g	Peningkatan dan optimalisasi terminal barang (*logistic point*)							Desa Long Pahangai I Kecamatan Long Pahangai; Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Desa Laham Kecamatan Laham	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
h	Alur pelayaran sungai							Long Iram (Kabupaten Kutai Barat) - Long Bagun; dan Long Bagun ke arah hulu menghubungkan Long Pahangai - Tiong Ohang - Long Apari.	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								
i	Lintas penyeberangan sungai							Long Bagun Ulu-Batu Majang atau Long Bagun.	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	20 21			20 22		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
j	Peningkatan dan optimalisasi pelabuhan							Desa Long Melaham Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung; Kecamatan Laham; Desa Tiong Ohang Kecamatan Long Apari; dan Desa Long Pahangai 1 Kecamatan Long Pahangai.	APBN APBD Swasta	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda, Dishub							
2.2	Jaringan Transportasi Udara															
a	Pembangunan bandar udara pengumpan							Desa Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai Kecamatan Long Apari Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dishub PT. Angkasapura							
b	Pembangunan airstrip							Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten							
c	Penetapan KKOP							Kecamatan Long Pahangai; Kecamatan Long Apari; dan Kecamatan Long Bagun.	APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dishub PT. Angkasapura							
2.3	Perwujudan Sistem Energi															
	Jaringan Kelistrikan															
a	Pengembangan Saluran Utama Tegangan Menengah (SUTM)							antar kecamatan; di dalam kabupaten	APBN APBD	PLN ESDM							
B	Pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)							antar desa di dalam satu kecamatan.									
c	Pengembangan PLTA							Desa Batoq Kelo Kecamatan Long Bagun.									
d	Pembangunan PLTMH							Kelompok permukiman yang memiliki potensi sumber daya air yang mencukupi	APBN APBD	PLN ESDM							
e	Pengembangan PLTST							Kelompok permukiman yang memiliki potensi sumber daya energi matahari yang mencukupi	APBN APBD	PLN ESDM							
f	Pengembangan PLTD							Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I; Kelompok Permukiman Long Tuyoq;	APBN APBD	PLN ESDM							

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	20 21			20 22		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								Kelompok Permukiman Long Lunuk; Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.								
2.4	**Jaringan Telekomunikasi**															
a	pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO)							Kecamatan Long Bagun	APBN APBD	TELKOM						
b	pengembangan jaringan mikro digital (nirkabel)							Semua kelompok permukiman	APBN APBD	TELKOM						
2.5	**Jaringan Sumberdaya Air**															
a	Pengelolaan dan pengamanan WS Strategis Nasional							Mahakam dan DAS Mahakam	APBN APBD	Dinas PU PDAM						
b	Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota							Mahakam	APBN APBD	Dinas PU PDAM						
c	pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai Kabupaten							Mahakam dan Sub DAS nya	APBN APBD	Dinas PU PDAM						
	Pengembangan waduk							Sungai Boh, Desa Batoq Kelo Kecamatan Long Bagun.								
d	Pemanfaatan daerah irigasi kewenangan provinsi							DI Datah Bilang dan Bilung di Kecamatan Long Hubung DI Data Bilang di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD	Dinas PU PDAM						
e	Pemanfaatan daerah irigasi kewenangan kabupaten							DI Bilung di Kecamatan Long Hubung DI Data Bilang* di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD	Dinas PU PDAM						
f	Penyediaan air bersih							Tiap area pelayanan yang dibagi berdasarkan kondisi fisiografis kelompok permukiman.	APBN APBD	Dinas PU PDAM						
g	Pengembangan sistem pengendali banjir berupa tanggul							Setiap kelompok permukiman	APBN APBD	APBN APBD Swadaya Masy.						
2.6	**Sistem Jaringan Persampahan**															
a	Pengembangan TPST							Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan TPST pada Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.	APBN APBD	Dinas PU						
b	Sistem persampahan terpadu dan mandiri							Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I	APBN APBD	Dinas PU						

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	20 21			20 22		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								Kelompok Permukiman Long Tuyoq; Kelompok Permukiman Long Lunuk; Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Rukun Damai; Kelompok Permukiman Mamahak Ilir; Kelompok Permukiman Batu Majang; Kelompok Permukiman Long Hurai; Kelompok Permukiman Danum Paroy; Kelompok Permukiman Nyaribungan; Kelompok Permukiman Sirau; Kelompok Permukiman Mata Libaq; dan Kelompok Permukiman Tri Pariq Makmur.									
2.7	**Sistem Jaringan Air Minum**															
a	Pengembangan instalasi pengolahan air bersih (IPA)							IPA Long Apari berada di Kecamatan Long Apari; IPA Long Pahangai berada di Kecamatan Long Pahangai; IPA Ujoh Bilang berada di Kecamatan Long Bagun; IPA Laham berada di Kecamatan Laham; dan IPA Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Dinas PU PDAM							
b	Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perkotaan							Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.	APBN APBD	Dinas PU PDAM							
c	Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perdesaan							Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I Kelompok Permukiman Long Tuyoq; Kelompok Permukiman Long Lunuk;	APBN APBD	Dinas PU PDAM							

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Rukun Damai; Kelompok Permukiman Mamahak Ilir; Kelompok Permukiman Batu Majang; Kelompok Permukiman Long Hurai; Kelompok Permukiman Danum Paroy; Kelompok Permukiman Nyaribungan; Kelompok Permukiman Sirau; Kelompok Permukiman Mata Libaq; dan Kelompok Permukiman Tri Pariq Makmur.									
2.9	**Sistem Jaringan Air Limbah**															
a	Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik *on site* maupun *off site*							Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.	APBN APBD	Dinas PU BLH						
b	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peruntukan industri							Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Dinas PU BLH						
2.9	**Sistem Jaringan Drainase**															
a	Pengembangan jaringan drainase primer							Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung;	APBN APBD	Dinas PU						
b	Pengembangan jaringan drainase sekunder							kelompok permukiman menuju jaringan drainase primer pada seluruh kelompok permukiman	APBN APBD	Dinas PU						
c	Pembuatan sumur resapan							Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.	APBN APBD	Dinas PU						
3.0	**Jalur Evakuasi Bencana**															
								jalur evakuasi bencana alam dapat berupa jaringan jalan yang menuju kawasan bebas banjir ruang evakuasi bencana alam dapat berupa ruang terbuka (escape area) yang cukup untuk	APBD	Dinas PU						

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								membangun fasilitas tanggap darurat bencana dan dapat berupa bangunan publik yang bebas banjir								
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**															
B.1.	**Kawasan Lindung**															
B.1.1	**Kawasan hutan lindung :**															
	▪ Penetapan kawasan hutan lindung; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan.							sebagian wilayah Desa Long Apari, sebagian wilayah Desa Long Keriok,sebagian wilayah Desa Naha Tifab,sebagian wilayah Desa Noha Silat, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Tuyoq, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Naha Aruq, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Mamahak Ilir, sebagian wilayah Desa Long Merah di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Laham, sebagian wilayah Desa Muara Ratah, sebagian wilayah desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Memahak Teboq, sebagian wilayah Desa Tri Pariq	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
				Makmur, sebagian wilayah Desa Mata Libaq di Kecamatan Long Hubung.												
B.1.2	**Kawasan resapan air:**															
	▪ Penetapan kawasan hutan lindung; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan.			sebagian wilayah Desa Long Apari, sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Naha Tifab, sebagian wilayah Desa Noha Silat, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Tuyoq, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Naha Aruq, dan sebagian wilayah Desa Long Pahangai II di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Mamahak Ilir, dan sebagian wilayah Desa Long Merah di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Laham, sebagian wilayah Desa Muara Ratah, dan sebagian wilayah Desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Memahak Teboq, sebagian wilayah Desa Tri Pariq Makmur, dan sebagian wilayah Desa Mata Libaq di Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN									
B.1.3.	**Kawasan Perlindungan Setempat:**															

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	20 21			20 22		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
	▪ Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; ▪ Penetapan batas kawasan lindung; ▪ Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; ▪ Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; ▪ Pengawasan kawasan lindung; ▪ Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan ▪ Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS. ▪ Pengembangan RTH									APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN								
a.	Kawasan sempadan sungai								seluruh sungai terkait Wilayah Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								
b.	Kawasan sekitar waduk								Sungai Boh, Kecamatan Long Bagun										
c.	Kawasan sekitar mata air								Seluruh mata air	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								
d.	Kawasan ruang terbuka hijau publik 20% dari luas kawasan ruang terbuka hijau								hutan kota di sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun, sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung; taman kota di sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun, sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung; taman pemakaman umum di sebagian wilayah Kecamatan Long Apari, sebagian wilayah Kecamatan Long Pahangai, sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun, sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung; dan jalur hijau sepanjang jalan arteri dan kolektor	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								
e.	Kawasan ruang terbuka hijau publik 10% dari luas kawasan ruang terbuka hijau								pekarangan rumah tinggal; pekarangan gedung milik pemerintah daerah; dan pekarangan gedung milik masyarakat.	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								
1.4	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan								Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Desa Rukun Damai dan Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun;	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								Pemukiman Suku Dayak Punan di Desa Long Merah Kecamatan Long Bagun; Permukiman Suku Dayak Kayan di Desa Rukun Damai Kecamatan Long Bagun; Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Desa Datah Bilang Kecamatan Long Hubung; Permukiman Suku Dayak Bahau di Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung; Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Tiong Ohang dan Desa Long Apari Kecamatan Long Apari; Balai Adat suku Dayak Bahau di Desa Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai; Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai; dan Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Long Bagun Kecamatan Long Bagun.									
1.5	Kawasan Konservasi															
	▪ Penetapan kawasan konservasi; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan.								Taman Nasional Betung Kerihun, dan Kawasan Suaka Alam	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN								
1.6	Kawasan Lindung Geologi															
	▪ Penetapan kawasan lindung geologi; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan Pengawasan.									APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN								
a	Kawasan Cagar alam Geologi								Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN								
b	Kawasan yang memberiperlindunganterhadap air tanah								Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					20	20	20	2021	2022	2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037		
									Bappeda, BPN					
1.5	Kawasan Rawan Bencana Banjir: ▪ Identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat; ▪ Pemetaan kawasan bencana alam; ▪ Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam; ▪ Melakukan upaya untuk mengurangi/ mentiadakan resiko bencana alam; ▪ Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; ▪ Peningkatan kapasitas masyarakat; ▪ Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; ▪ Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; ▪ Penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan ▪ Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.				Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; Kelompok Permukiman Rukun Damai; Kelompok Permukiman Mamahak Ilir; Kelompok Permukiman Batu Majang; Kelompok Permukiman Long Hurai; Kelompok Permukiman Danum Paroy; Kelompok Permukiman Nyaribungan; Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir; Kelompok Permukiman Sirau; Kelompok Permukiman Mata Libaq; dan Kelompok Permukiman Tri Pariq Makmur.	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								
1.6	Kawasan Lindung Lainnya:													
a.	Koridor satwa liar (bekantan dan orang utan)				kawasan konservasi TN Betung Kerihun, Kawasan Ekologis Muller, dan TN Kayan Mentarang	APBN APBD	Dinas Kehutanan Bappeda BPN							
b.	Habitat ikan Pesut Mahakam				sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung	APBN APBD	Dinas Kehutanan Bappeda BPN							
c.	Habitat Badak				sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Dinas Kehutanan Bappeda BPN							
B.2.	**Kawasan Budidaya**													
B. 2.1	**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi:**													
	▪ Penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; ▪ Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; ▪ Penetapan tata batas kawasan hutan produksi; ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; ▪ Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; ▪ Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; ▪ Pengembangan hasil hutan bukan kayu; ▪ Pengembangan tanaman hutan; dan ▪ Peningkatan pemasaran hasil produksi.													

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
a.	Kawasan hutan produksi terbatas							sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Naha Tifab, sebagian wilayah Desa Noha Silat, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Lirung Ubing, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Pahangai I, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II, sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Tuyoq, dan sebagian wilayah Desa Naha Aruq di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Hurai, sebagian wilayah Desa Long Merah, sebagian wilayah Desa Mamahak Ilir, sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu, dan sebagian wilayah Desa Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Mata Libaq, sebagian wilayah Desa Mamahak Teboq, dan sebagian wilayah Desa Tri Pariq Makmur di Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								
b.	Kawasan hutan produksi tetap							sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Long Penaneh I, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Long Penaneh III, sebagian wilayah	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Noha Silat, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Lirung Ubing, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Pahangai I, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II, sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Tuyoq, dan sebagian wilayah Desa Naha Aruq di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Hurai, dan sebagian wilayah Desa Long Melaham di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Danum Paroy, sebagian wilayah Desa Laham, sebagian wilayah Desa Long Gelawang, sebagian wilayah Desa Muara Ratah, dan sebagian wilayah Desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Datah Bilang Baru, sebagian wilayah Desa Datah Bilang Ilir, sebagian wilayah Desa Datah Bilang Ulu, sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Mata Libaq, sebagian wilayah Desa Mamahak Teboq, sebagian wilayah Desa Sirau, sebagian wilayah Desa Tri Pariq Makmur, dan sebagian wilayah Desa Wana Pariq di Kecamatan Long Hubung.									
c.	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi							sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Danum Paroy, dan sebagian wilayah	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								Desa Long Gelawang di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan di Kecamatan Long Hubung.											
B.2.2	**Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat:**															
								sebagian wilayah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung. sebagian wilayah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung. sebagian wilayah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung	APBN APBD	Dinas Kehutanan Bappeda BPN									
B.2.2	**Kawasan Peruntukan Pertanian**															
	▪ Pengembangan sarana dan prasarana; ▪ Pengembangan agroindustri; ▪ Pengembangan usaha tani terpadu; ▪ Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; ▪ Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; ▪ Penggembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; ▪ Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; ▪ Pengembangan perkebunan besar dengan perlibatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); ▪ Pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR; ▪ Peningkatan pemasaran hasil produksi; ▪ Pengembangan kawasan tanaman tahunan; ▪ Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan ▪ Penyusunan masterplan pertanian.															
a	Kawasan Holtikultura							Tersebar diseluruh kecamatan		APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN					
b	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan							Tersebar diseluruh kecamatan		APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
				Bappeda BPN												
c	Lahan Cadagan Pertanian Pangan		Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN											
B 2 2	**Kawasan Peruntukan Peternakan**															
	Kawasan peternakan		seluruh wilayah kabupaten	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN											
B.2.2	**Kawasan Peruntukan Perkebunan:**															
	Kawasan perkebunan		sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Long Penaneh I, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Long Penaneh III, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Naha Tifab, sebagian wilayah Desa Noha Silat, sebagian wilayah Desa Tiong Bu'u, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Lirung Ubing, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Pahangai I, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II, sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Pakaq Baru, sebagian wilayah Desa Long Tuyoq, dan sebagian wilayah Desa Naha Aruq di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Hurai, sebagian wilayah Desa Long Melaham, sebagian	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN											

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								wilayah Desa Long Merah, sebagian wilayah Desa Mamahak Ilir, sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu, sebagian wilayah Desa Rukun Damai, dan sebagian wilayah Desa Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Danum Paroy, sebagian wilayah Desa Laham, sebagian wilayah Desa Long Gelawang, sebagian wilayah Desa Muara Ratah, dan sebagian wilayah Desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Datah Bilang Baru, sebagian wilayah Desa Datah Bilang Ilir, sebagian wilayah Desa Datah Bilang Ulu, sebagian wilayah Desa Long Hubung, sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Mata Libaq, sebagian wilayah Desa Memahak Teboq, sebagian wilayah Desa Sirau, sebagian wilayah Desa Tri Pariq Makmur, dan sebagian wilayah Desa Wana Pariq di Kecamatan Long Hubung.									
B.2.2	**Kawasan Peruntukan Perikanan:**															
	Kawasan peruntukan perikanan budidaya							sepanjang Sungai Mahakam dan anaksungainya di Kecamatan Long Apari; sepanjang Sungai Mahakam dan anaksungainya di Kecamatan Long Pahangai; sepanjang Sungai Mahakam dan anaksungainya di Kecamatan Long Bagun;dan sepanjang Sungai Mahakam dan anaksungainya di Kecamatan Laham; sepanjang Sungai Mahakam dan anaksungainya di Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan								
B.2.4	**Kawasan Peruntukan Industri:**															
	▪ Penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; ▪ Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; ▪ Pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi; ▪ Peningkatan sistem pemasaran; ▪ Pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri; ▪ Pengembangan klaster-klaster Industri menengah;							Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Laham								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	20 21			20 22		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
	▪ Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; ▪ Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan; ▪ Pengembangan aneka produk olahan; dan ▪ Peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan UMKM.															
B 2 5	**Kawasan Peruntukan Pertambangan**															
	▪ Penataan dan pengendalian kawasan pertambangan ▪ Tata batas kawasan pertambangan ▪ Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; ▪ Peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan pertambangan			APBN APBD	Bappeda, Dinas PUPR dan BPN											
B.2.6	**Kawasan Peruntukan Pariwisata:**															
	▪ Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; ▪ Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; ▪ Tata batas obyek- obyek wista; ▪ Pengembangan satuan kawasan wisata; ▪ Pengembangan obyek wisata utama; ▪ Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan ▪ Peningkatan akomodasi dan infrastruktur															
a.	Kawasan desa adat			APBN APBD	Dinas Pariwisata											
					Pemukiman Suku Dayak Kenyah di sebagian wilayah Desa Rukun Damai dan sebagian wilayah Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun; Permukiman Suku Dayak Kayan di sebagian wilayah Desa Rukun Damai Kecamatan Long Bagun; Pemukiman Suku Dayak Punan di sebagian wilayah Desa Long Merah Kecamatan Long Bagun; Permukiman Suku Dayak Bahau di sebagian wilayah Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung; Pemukiman Suku Dayak Kenyah di sebagian wilayah Desa Datah Bilang Kecamatan Long Hubung; Balai Adat suku Dayak Penihing di sebagian wilayah Desa Tiong Ohang dan sebagian wilayah Desa Long Apari Kecamatan Long Apari; Balai Adat suku Dayak Bahau di sebagian wilayah Desa Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai; Balai Adat suku Dayak Penihing di sebagian wilayah Desa Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai; dan											

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	20 21			20 22		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								Balai Adat suku Dayak Penihing di sebagian wilayah Desa Long Bagun Kecamatan Long Bagun.								
b.	Kegiatan ritual upacara adat							upacara adat Laliiq Ugaal Suku Dayak Bahau ritual pengobatan Beliant Sentiuq dan Beliant Bawo Suku Dayak Benuaq dan Tunjung upacara adat Hudoq berada di Kecamatan Long Pahangai; upacara adat Memlaai berada di Kecamatan Long Pahangai; dan ritual pengobatan Mamat Bali Akang Suku Kenyah	APBN APBD	Dinas Pariwisata								
c.	Kawasan peruntukan pariwisata alam							Kawasan Batu Dinding di Desa Long Melaham Kecamatan Long Bagun; Kawasan air terjun Haloq di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; Kawasan air terjun Ken'heq di Desa Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai; Kawasan air terjun Nyani di Desa Datah Maring Kecamatan Long Pahangai; Kawasan Sungai Alan di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun; Kawasan Sungai Payang di Kecamatan Long Bagun; Kawasan Sungai Tepai di Desa Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai; Kawasan riam Haloq di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; Kawasan riam Udang di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; Kawasan riam panjang di Desa Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai; dan Kelompok riam di hulu Sungai Mahakam di Kecamatan Long Apari.	APBN APBD	Dinas Pariwisata								
B.2.7	**Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan:**															
	▪ Penyusunan RP3KP perkotaan dan perdesaan; ▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RP3KP untuk wilayah perkotaan; ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman perkotaan; ▪ Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan; ▪ Pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan							Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.	APBN APBD	Bappeda BPN Dinas PU								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
	▪ Pengembangan, penataan dan pembangunan prasarana kawasan permukiman perkotaan (jalan lingkungan, pedestrian, dermaga, sarana transportasi, telekomunikasi) ▪ Pengembangan, penataan dan pembangunan sarana kawasan permukiman perkotaan (sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, air limbah, air minum, persampahan, dan drainase)															
B.2.8	**Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan:**															
	▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RP3KP untuk wilayah perdesaan; ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman perdesaan; ▪ Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh perdesaan; ▪ Pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan ▪ Pengembangan, penataan dan pembangunan prasarana kawasan permukiman perdesaan (jalan lingkungan, pedestrian, dermaga, sarana transportasi, telekomunikasi) ▪ Pengembangan, penataan dan pembangunan sarana kawasan permukiman perkotaan (sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, air limbah, air minum, persampahan, dan drainase) ▪ Pengembangan jaringan jalan desa; ▪ Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan	Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I Kelompok Permukiman Long Tuyoq; Kelompok Permukiman Long Lunuk; Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Rukun Damai; Kelompok Permukiman Mamahak Ilir; Kelompok Permukiman Batu Majang; Kelompok Permukiman Long Hurai; Kelompok Permukiman Danum Paroy; Kelompok Permukiman Nyaribungan; Kelompok Permukiman Sirau; Kelompok Permukiman Mata Libaq; dan Kelompok Permukiman Tri Pariq Makmur.	APBN APBD	Bappeda BPN Dinas PU								
B.2.9	**Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan**	Kecamatan Long Apari; dan Kecamatan Long Pahangai.	APBN APBD	Bappeda BPN Dinas PU TNI												
B.3 0	**Kawasan peruntukan hutan adat**	sebagian wilayah Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Kecamatan Laham; dan	APBN APBD	Kementerian Kehutanan Bappeda Dinas Pertanian dan Kehutanan												

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	20 21			20 22		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
								sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung								
C	**Perwujudan Kawasan Strategis**															
	▪ Peningkatan kawasan perbatasan ▪ Pengelolaan kawasan perbatasan ▪ Pengamanan kawasan perbatasan terutama batas negara															
a	Kawasana Strategis Nasional															
1	Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Kalimantan–Malaysia							Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD	Kemenetrian Dalam Negeri, BNPP, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Pengelola Perbatasan						
2	Kawasan Strategis Nasional Heart of Borneo							seluruh kecamatan		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Kehutanan						
b	Kawasana Strategis Provinsi															
1	Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi							Kawasan industri pertanian	APBD Provinsi dan Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindutrian, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPN						
2	Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya							kawasan koridor sungai Mahakam	APBD Provinsi dan Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Pengelola Perbatasan						
3	Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal							kawasan perbatasan Long Pahangai dan Long Apari	APBD Provinsi dan Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Pengelola Perbatasan						
c	Kawasan Strategis Kabupaten															
1	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi															
	- kawasan pemerintahan							Kecamatan Long Bagun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	- kawasan perdagangan dan jasa wilayah							Kecamatan Long Hubung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan						
	- kawasan perdagangan dan jasa perbatasan							Kecamatan Long Apari	APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Pengelola Perbatasan						
	- kawasan logistik perbatasan							Kecamatan Long Pahangai	APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Pengelola Perbatasan						
2	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya															
	- kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah							Kecamatan Long Hubung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan						
	- sebagian wilayah Desa Batu Majang							Kecamatan Long Bagun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan						

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					20	20	20	2021			2022		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037	
	- sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Penihing			di Kecamatan Long Pahangai	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan										
	- kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau			Kecamatan Long Hubung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan										
3	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup			Kawasan sekitar Sungai Ratah di Desa Nyaribungan Kecamatan Laham	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup										

4.2.5 Kajian Atas Dokumen RPJPD Kab. Mahakam Ulu 2016-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu memasuki tahapan 5 (lima) tahun ke-2 (2021-2025). Berikut ini adalah sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun ke-2 ini :

a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
   2) Penerapan keterbukaan informasi publik;
   3) Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
   4) Pembangunan pemerintahan yang bersih;
   5) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
b. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) Peningkatan kompetensi aparatur;
   2) Peningkatan sistem manajemen aparatur dalam membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi.
c. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM);
   2) Penyelenggaraan maklumat pelayanan pada seluruh perangkat daerah.
d. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian;
   2) Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, *on-farm*, hilir dan *supporting system*;
   3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan petani;

4) Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian.

e. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan melakukan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

f. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya;
2) Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata;
3) Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata;
4) Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan.

g. Meningkatnya investasi daerah, dengan arah kebijakan melakukan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

h. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat, dengan arah kebijakan melakukan pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi.

i. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/ perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya, dengan arah kebijakan melakukan pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya.

j. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga diantaranya melalui pengembangan energi baru dan terbarukan;
2) Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi rumah tangga;
3) Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
4) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
5) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat;
6) Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;

7) Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat;
8) Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat.

k. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di kawasan perbatasan, dengan arah kebijakan melakukan percepatan pengembangan permukiman.

l. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas pendidikan;
2) Peningkatan kualitas kesehatan;
3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
4) Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah;
5) Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan.

m. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya lokal, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Penguatan budaya lokal sebagai karakter dan bagian dari kehidupan bermasyarakat;
2) Peningkatan peran aktif kelembagaan adat dalam pembangunan.

n. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hutan dan sungai yang ramah lingkungan;
2) Pengembangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

o. Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Menjaga kualitas tanah, air dan udara;
2) Meningkatnya pengelolaan persampahan;
3) Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan;
4) Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai.

p. Sasaran: Terpeliharanya kawasan *Heart of Borneo* di Kabupaten Mahakam Ulu,

degan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pengembangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai pada tingkat desa;
2) Perlindungan keanekaragaman hayati di hutan dan sungai;
3) Penurunan emisi karbon.

Tabel 4.5
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Ke-2 (2021-2025)

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
1.1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2. Penerapan keterbukaan informasi publik
	3. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
	4. Pembangunan pemerintahan yang bersih
	5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
1.2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah	1. Peningkatan kompetensi aparatur
	2. Peningkatan sistem manajemen aparatur dalam membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi
1.3. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM)
	2. Penyelenggaraan maklumat pelayanan pada seluruh perangkat daerah
2.1. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	1. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian
	2. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, *on-farm*, hilir dan supporting system
	3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
	4. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
2.2. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat	1. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
2.3. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya
	2. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata
	3. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata
	4. Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan
2.4. Meningkatnya investasi daerah	1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
	2. Peningkatan kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha masyarakat
2.5. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat	1. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi
3.1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	1. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya
3.2. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga diantaranya melalui pengembangan energi baru dan terbarukan
	2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi rumah tangga
	3. Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
	4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
	5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat
	6. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat
	7. Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat
	8. Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat
3.3. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di kawasan perbatasan	1. Percepatan pengembangan permukiman
4.1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	1. Peningkatan kualitas pendidikan
	2. Peningkatan kualitas kesehatan
	3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
	4. Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah
	5. Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan
4.2. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya local	1. Penguatan budaya lokal sebagai karakter dan bagian dari kehidupan bermasyarakat
	2. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat dalam pembangunan
5.1. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan	1. Peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hutan dan sungai yang ramah lingkungan
	2. Pengembangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam
5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Menjaga kualitas tanah, air dan udara
	2. Meningkatnya pengelolaan persampahan

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
	3. Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan
	4. Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai
5.3. Terpeliharanya kawasan *Heart of Borneo* di Kabupaten Mahakam Ulu.	1. Pengembangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai pada tingkat desa.
	2. Perlindungan keanekaragaman hayati di hutan dan sungai
	3. Penurunan emisi karbon

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Mahakam Ulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
MISI 1. Mewujudkan Sistem Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)				
1.1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien	Capaian kinerja pemerintah daerah	-	B	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
				2. Penerapan keterbukaan informasi publik
				3. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
				4. Pembangunan pemerintahan yang bersih
				5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
1.2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan (%)	30	95	1. Peningkatan kompetensi aparatur
				2. Peningkatan sistem manajemen aparatur dalam membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi
1.3. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	-	3	1. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM)

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
	pelayanan publik			2. Penyelenggaraan maklumat pelayanan pada seluruh perangkat daerah
MISI 2. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal				
2.1. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	78,24% (angka sangat sementara 2015)	70%	1. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian
				2. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, *on-farm*, hilir dan supporting system
				3. Peningkatan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
				4. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
2.2. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat	Swasembada pangan	-	Swasembada	1. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
2.3. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	5%	1. Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya
				2. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata
				3. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata
				4. Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan
2.4. Meningkatnya investasi daerah	Nilai PMA dan PMDN	40 M	120 M	1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
2.5. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat	Jenis produk unggulan	5	9	1. Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk mengasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi
				2. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
MISI 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi dan Sinergis dengan Pengembangan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI				
3.1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	Indeks Konektivitas Kabupaten	-	1,2	1. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya
3.2. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan infrastruktur dasar sesuai dengan SPM (%)	-	100	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga diantaranya melalui pengembangan energi baru dan terbarukan
				2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi rumah tangga
				3. Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
				4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
				5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat
				6. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat
				7. Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat
				8. Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat
3.3. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam	Jumlah wilayah permukiman terpadu yang dikembangkan	-	5 (1 di setiap kecamatan)	1. Percepatan pengembangan permukiman

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
Ulu khususnya kawasan perbatasan				
MISI 4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Nilai Budaya Masyarakat yang Berkarakter serta Kelembagaan Masyarakat yang Produktif dan Harmonis				
4.1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,89	70	1. Peningkatan kualitas pendidikan
				2. Peningkatan kualitas kesehatan
				3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
				4. Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah
				5. Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan
4.2. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya lokal	Cakupan kampung yang melestarikan budaya lokal (%)	100	100	1. Penguatan budaya lokal sebagai karakter dan bagian dari kehidupan bermasyarakat
				2. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat dalam pembangunan
MISI 5. Memelihara Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan				
5.1. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan	Jumlah kegiatan ekonomi masyarakat yang merusak lingkungan	-	0	1. Peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hutan dan sungai yang ramah lingkungan
				2. Pengembangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam
5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	85	1. Menjaga kualitas tanah, air dan udara
				2. Meningkatnya pengelolaan persampahan
				3. Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
				4. Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai
5.3. Terpeliharanya kawasan *Heart of Borneo* di Kabupaten Mahakam Ulu.	Persentase kawasan HoB yang terpeliharanya	-	100	1. Pengembangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai pada tingkat desa.
				2. Perlindungan keanekaragaman hayati di hutan dan sungai
				3. Penurunan emisi karbon

Sumber: Analisis TIM Penyusunan RPJMD 2021

4.2.6 Kajian Atas Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timut 2024-2026 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman penyusunan perubahan perencanaan jangka menengah daerah di Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan *anak* dari provinsi Kalimantan Timur. Dalam RKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, masih di uraikan beberapa masalah pokok dalam lingkup daerah di provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Belum meratanya nilai IPM Kabuten/Kota di Kalimantan Timur.
2. Meningkatnya Kemiskinan.
3. Struktur ekonomi yang belum sesuai dengan karakteristik social/ekonomi-demografi.
4. Laju pertumbuhan ekonomi masih dibawah regional Kalimantan dan nasional.
5. Kerentanan kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan disemua sector.

6. Belum terpenuhinya kualitas layanan infrastruktur untuk mendukung konektivitas kawasan sentra produksi dan pusat industri (intra dan Intern).
7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan beberapa permasalahan pokok diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menentukan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur 2024-2026 antara lain:

Tabel 4.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing	• **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** • **Tingkat Pengangguran Terbuka**
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tujuan 2: **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**	• **Laju Pertumbuhan Ekonimi (LPE)** • **Tingkat Kemiskinan** • **Index Gini**
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non M<igas dan Batubara
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	• **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** • **Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)**

Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	• Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Indeks Kualitas Air Laut • Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK sector kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)
Saaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bairan energy bariu terbarukan
Tujuan 4: **Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	• Indeks Kepuasan Masyarakat • Sistem Merit • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tingkat maturitas SPIP

Arah kebijakan dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Mahakam Ulu antara lain:

Tabel 4.8
Arah Kebijakan Dan Fokus Pembangunan RPD Prov. Kalimantan Timur Untuk Kab. Mahakam Ulu

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	INDIKASI FOKUS PEMBANGUNAN
Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
	Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
	Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
	Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
	Optimalisasi *Boarding School*
	Pemberian tambahan insentif bagi seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di daerah pedalaman dan 3T (GTK)
Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Sapras Fasyankes Tingkat Pertama di daerah

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	INDIKASI FOKUS PEMBANGUNAN
Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan Perbatasan
	Pembangunan Jembatan Perbatasan
	Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
	Pembangunan jaringan distribusi listrik
	Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa
	Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat
Pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
	Pengendalian KARHUTLA
	Rehabilitasi diluar kawasan hutan
	Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
	Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara ambier passive sampler
	Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup

4.2.7 Penelaahan Atas Dokumen RPJMD Daerah Lain

Penelahaan dokumen RPJMD daerah lainnya dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunaan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah sekitar, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau

pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten sekitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mahakam Ulu adalah Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka kebijakan terkait antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

No	Nama Daerah	Periode RPJM	Kerjasama/Kebijakan Yang Terkait Kab. Mahakam Ulu
1.	Kutai Barat	RPJMD 2021-2026	Tidak ada Kerjasama/kebijakan secara spesifik antara kedua daerah yang termuat dalam RPJMD
2.	Kutai Kartanegara	RPJMD 2021-2026	Tidak ada Kerjasama/kebijakan secara spesifik antara kedua daerah yang termuat dalam RPJMD

4.2.8 Kajian KLHS Mahakam Ulu 2021 - 2026

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pasal 2 disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan".

4.2.7.1 Capaian TPB Kabupaten Mahakam Ulu

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, dari 220 (dua ratus dua puluh) indikator nasional, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 204 (dua ratus empat) indikator yang merupakan indikator yang relevan dengan kewenangan dan kebutuhan daerah. Rincian dari 204 (dua ratus empat) indikator tersebut berupa 84 (delapan puluh empat) indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 64 (enam puluh empat) indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, 8 (delapan) indikator belum dilaksanakan dan belum ada target, serta 48 (empat puluh delapan) indikator tidak memiliki data. Capaian indikator TPB Kabupaten Mahakam Ulu terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar dibawah in:

Tabel 4.9 Capaian TPB Kabupaten Mahakam Ulu

NO	Deskripsi TPB	SS	SB	TT	NA	Total	Ketercapaian (%)
1	TPB 01. Tanpa Kemiskinan	8	11	2	3	24	33,33
2	TPB 02. Tanpa Kelaparan	6	3	0	2	11	54,55
3	TPB 03. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16	11	0	4	31	51,61
4	TPB 04. Pendidikan Berkualitas	5	6	0	2	13	38,46
5	TPB 05. Kesetaraamn Gender	4	5	0	5	14	28,57
6	TPB 06. Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	3	3	9	18	16,67
7	TPB 07. Energi Bersih dan Terjangkau	0	1	0	1	2	0
8	TPB 08. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	4	0	5	19	52,63
9	TPB 09. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5	4	0	2	11	45,45
10	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	5	3	0	3	11	45,45
11	TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	2	3	0	4	9	22,22

NO	Deskripsi TPB	SS	SB	TT	NA	Total	Ketercapaian (%)
12	TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	0	1	4	5	0
13	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim	1	0	0	1	2	50
14	TPB 14. Sumeber daya kelautan	0	0	0	0	0	0
15	TPB 15. Ekosistem Daratan	3	0	0	0	3	100
16	TPB 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	12	6	0	3	21	57,14
17	TPB 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	4	4	2	0	10	41,18
	Jumlah Indikator Status Capaian	**84**	**64**	**8**	**48**	**204**	
	Persentase Jumlah Indikator	**41,18%**	**31,37%**	**3,92%**	**23,53%**	**100,00%**	

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam ulu, 2023

4.2.7.2 Isu-Isu Strategis Hasil Kajian TPB

Rumusan isu pembangunan bekelanjutan strategis diperoleh melalui hasil perhitungan GAP (selisih) antara target RPJMN dengan capaian RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu terhadap setiap indikator yang bersangkutan. Tidak semua indikator yang dihitung termasuk dalam isu strategis pembangunan bekelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), belum dilaksanakan dan belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Hasil identifikasi isu tersebut maka diperoleh isu strategis sebagai berikut

Tabel 4.10 Isu-Isu Strategis berdasarkan Hasil Kajian TPB

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan
2	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan
3	Belum adanya pelibatan dewan adat dayak dalam pembangunan
4	Penanggulangan Bencana Alam yang belum optimal
5	Pengelolaan limbah dan sanitasi
6	Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
7	Peningkatan Angka Kemiskinan

No	Isu Strategis
8	Peningkatan Sumber Daya Manusia masih terbatas
9	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata
10	Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga
11	Produktivitas pangan yang rendah

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam ulu, 2023

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 tidak merubah Visi dan misi yang berada pada RPJMD 2021-2026 murni yang merupakan gambaran otentik Kabupaten Mahakam Ulu dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

5.1. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu periode 2021-2026 adalah:

"Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan"

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Mahakam Ulu

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	**Mahulu Untuk Semua**	**Mahulu** adalah kabupaten Mahakam Ulu, sebuah wilayah administratif dan geografis setingkat kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. **"Untuk Semua"** mengandung arti bahwa seluruh atau segenap masyarakat Mahakam Ulu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan tanpa diskriminasi, baik wilayah, agama, ras, etnis, kondisi fisik dan gender.
2.	**SEJAHTERA**	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009) oleh Universitas Indonesia, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah bahwa masyarakat Mahakam Ulu melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Mahakam Ulu. Untuk merealisasikan visi ini, maka tata kelola pemerintahan di Mahakam Ulu akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Mahakam Ulu memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Kabupaten Mahakam Ulu.
3.	**BERKEADILAN**	Pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026 mengedepankan pada konsep pembangunan berkeadilan. Pembangunan akan lebih fokus pada program-program dalam rangka memperkecil ketidakmerataan/ketimpangan kesejahteraan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah ibu kota pemerintahan saja, akan tetapi pemerataan pembangunan juga akan dilakukan pada seluruh wilayah penyangga Kabupaten Mahakam Ulu serta daerah terluar (perbatasan) sesuai dengan konsep pembangunan pada RTRW. Mahakam Ulu memandang paradigma pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, selanjutnya Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pembangunan yang merata diyakini merupakan solusi

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		yang paling tepat dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu. Diharapkan dengan konsep pembangunan yang berkeadilan, seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dapat ikut berpartisipasi dalam memajukan perekonomian Mahakam Ulu.

Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembangunan yang adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Mahakam Ulu. Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 sudah selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 dan visi Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Gambar 5.1 Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Mahakam Ulu

Visi Mahakam Ulu yang menitik beratkan pada point “sejahtera” dan “berkeadilan” telah selaras dengan visi Provinsi dan Nasional point “berdaulat”, yang mempunya makna memiliki kemantapan dalam ekonomi dan ketercukupan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat Mahakam Ulu.

5.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

1. ***Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan***

   Misi ini menitik beratkan pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan adil memiliki makna pembangunan ke depan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam ulu sehingga diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis, yaitu untuk meningkatkan integritas pertahanan dan keamanan nasional dikarenakan Mahakam Ulu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain.

   Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang, dapat dikelola secara transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

2. ***Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal***

Misi ini akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kualitas taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat harus mampu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu secara bijak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menggali potensi-potensi kemandirian melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga (*home industry*), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, serta penguatan daya saing para pedagang keliling. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan.

Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan berkontribusi besar terhadap perekonomian Mahakam Ulu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah

wirausaha di Mahakam Ulu meningkat dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat potensi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Mahakam Ulu dengan mengusung konsep *Ecotourism* berbasis budaya yang merupakan konsep pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengedepankan kebudayaan dan kearifanan lokal akan mencoba menjadikan pariwisata sebagai salah satu unsur pendorong ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan berkembangnya pariwisata, akan bermunculan industri-industri kreatif mayarakat sebagai pendamping sektor wisata yang bersinergi dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata.

3. ***Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi***

   Misi ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Mahakam Ulu melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

   Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal, termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi, tindak pidana dan lain-lain). Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta

mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, harus diwujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, tertib, bersih, dan asri, di mana masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

4. ***Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel***

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah akan melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Selain untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di atas juga disusun dalam rangka untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dengan skema keterkaitan antara visi dan misi Mahakam Ulu dengan visi misi provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.2
Skema keterkaitan Visi–Misi
RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dengan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023

Gambar 5.3
Skema keterkaitan Visi–Misi
RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dengan
RPJMN 2020-2024

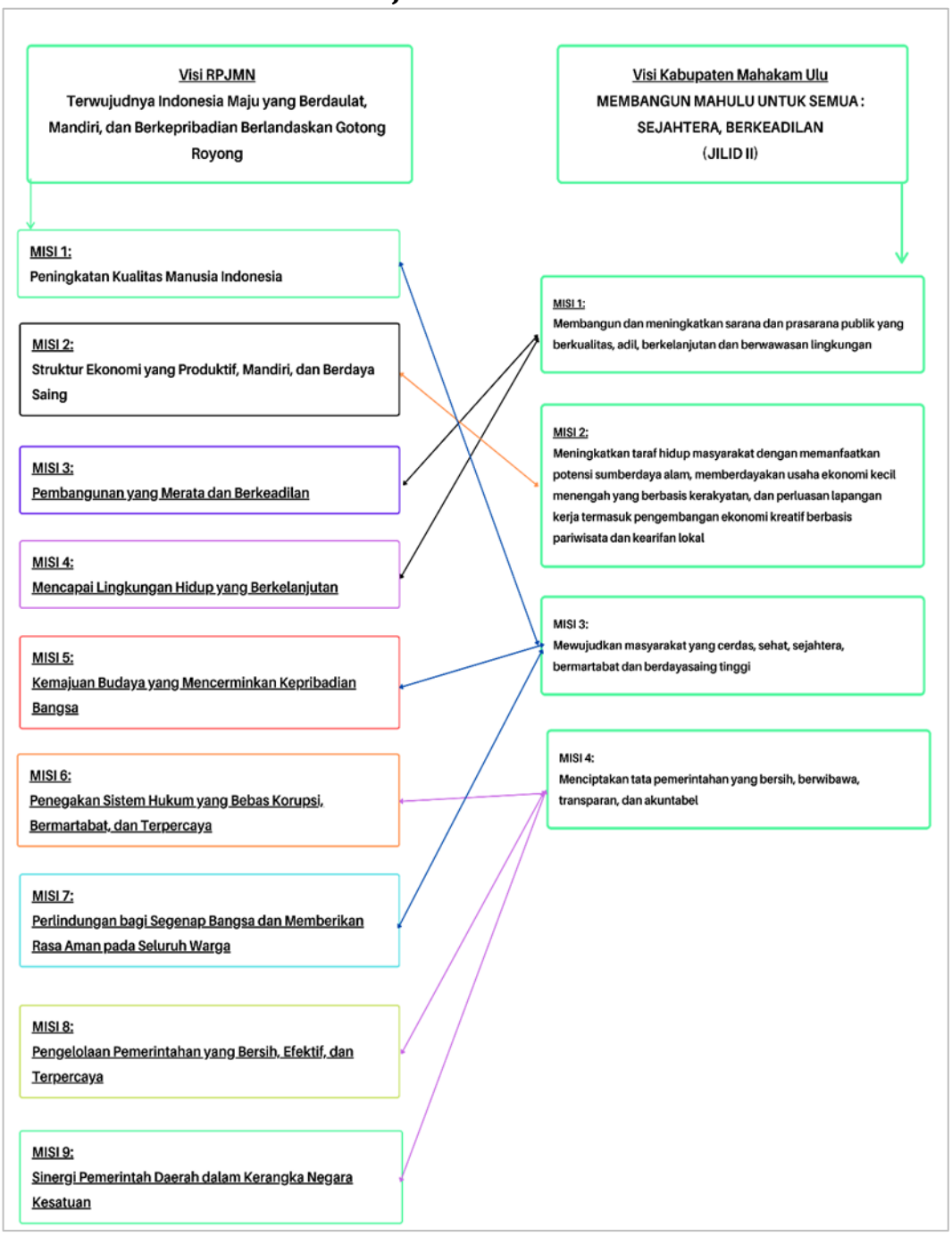

Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021-2026 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi tolok ukur dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu selama periode 2021-2026. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan indikator makro pembangun yang terdiri dari Indeks Desa Membangun, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator makro ini merupakan penunjuk atas dampak (*impact*) pembangunan lokal, regional, dan nasional. Dengan hubungan, bahwa tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator makro pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu bisa dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Mahakam Ulu

No	Indikator Pembangunan	RPJMN 2020-2024					Indikator Pembangunan	Perubahan RPJMD Prov Kaltim 2019-2023	RPD Prov. Kaltim 2024-2026			Indikator Pembangunan	Realisasi			RPJMD Kab. Mahakam Ulu 2021-2026			
		2020	2021	2022	2023	2024		2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8	5,7	7,1	8	8,5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,66	4-5	4-5	4-5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,22	1,27	0,91	1,71	2,39	3,23	4,38
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	5,25	4,66	4,11	3,35	Tingkat Kemiskinan (%)	5,9	5,78	5,67	5,55	Tingkat Kemiskinan (%)	11,44	11,9	11,55	11,39	10,94	10,50	10,09
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,2	6	5,8	5,4	5,1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,63	5,46	5,3	5,14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	3,14	2,44	2,42	2,40	2,36	2,32
4							Indek Pembangunan Manusia	77,75	78,14	78,53	78,92	Indek Pembangunan Manusia	67,09	67,95	68,75	69,32	69,90	70,48	71,07
5							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,68	75	75,1	75,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,12	80,65	82,65	83,67	84,935	86,2	87,47
6							Indeks Reformasi Birokrasi	68,81 (B)	69,00 (B)	69,5 (B)	70,01 (B)	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B	B	B
8							Indeks Gini	0,308	0,307	0,306	0,305	Indeks Gini	0,259	0,27	0,288	0,274	0,260	0,248	0,236
10												PDRB Per Kapita (Juta Rp) *Atas Harga Berlaku	85,38	90,17	94,51	100,42	106,71	113,39	120,48

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah /Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran serta terdapat 20 (dua puluh) indikator dan target pembangunan per tahun yang diletakkan beriringan pada setiap tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun 6 (enam) tujuan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Keenam tujuan pembangunan Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021-2026 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGDs dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel 5.3
Keselarasan RPJMD dengan SDG's

NO	TUJUAN RPJMD	TUJUAN SDG's			
1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Energi Bersih dan terjangkau	Industri, Inovasi dan Infrastuktur	Berkurangnya Kesenjangan
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penanganan Perubahan Iklim	Ekosistem Daratan	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Ekosistem Lautan
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tanpa Kelaparan	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Kemitraan untuk mencapai Tujuan
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tanpa Kemiskinan	Kesetaraan Gender		
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kehidupan sehat dan Sejahtera	Pendidikan Berkualitas		
6	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh			

Sumber: rumusan tim RPJMD Mahulu

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Misi	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi		Target RKPD	Target			Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	**Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar**	**Indek Gini**	**0,259**	**0,27**	**0,288**	**0,274**	**0,260**	**0,248**	**0,236**	**0,236**
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	27.45%	6,36%	13,07%	5%	5%	5%	5%	60,52%
		Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	24,00%	28,19%	31,39%	34,89%	38,39%	42,09%	45,99%	45,99%
		Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri listrik	95,78	99,74	99,5	99,6	99,7	99,7	99,9	99,9
		Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	84,00%	87,00%	90,80%	94,00%	96,00%	98,00%	99%	99%

No	Misi	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi		Target RKPD	Target			Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	15,43%	16,43%	18,43%	20,43%	22,43%	24,43%	26,43%	26,43%
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**80,12**	**80,65**	**82,65**	**83,67**	**84,935**	**86,2**	**87,47**	**87,47**
		Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	77,90	50	61,88	66,88	71,88	79,38	86,88	86,88
			Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	82,78	93,98	92,56	93,56	94,56	96,06	97,56	97,56
			Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	79,00	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**-0,22**	**1,27**	**0,91**	**1,71**	**2,39**	**3,23**	**4,38**	**4,38**

No	Misi	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi		Target RKPD	Target			Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	75,18	74,71	74,53	74,23	73,93	73,63	73,33	73,33
		Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	17,53	18,66	19,18	19,22	19,26	19,31	20,31	20,31
		Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)*	2.815	*2.694.979.781.570	*351.334.825.000	350	360	365	370	370
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	**PDRB Per Kapita meningkat dari 85,38 Menjadi 120,48 Di Akhir Periode**	**85,38**	**90,17**	**94,51**	**100,42**	**106,71**	**113,39**	**120,48**	**120,48**
		Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	11,44	11,90	11,55	11,39	10,94	10,50	10,09	10,09

No	Misi	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi		Target RKPD	Target			Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	3,14	2,44	2,22	2,02	1,83	1,72	2,32
3	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**67,09**	**67,95**	**68,75**	**69,32**	**69,90**	**70,48**	**71,07**	**71,07**
		Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	7,97	8,81	8,36	8,46	9,00	9,21	9,26	9,26
			Harapan Lama Sekolah	12,51	12,61	12,62	12,70	12,80	13,00	13,20	13,20
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,10	72,33	72,35	72,49	72,64	72,78	73,15	73,15
4	Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel	**Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**C**	**C**	**CC**	**CC**	**B**	**B**	**B**	**B**
		Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	na	98,34	n.a	98,44	98,54	98,64	98,74	98,74
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP	CC (50,09)	CC (50,57)	CC (50,98)	CC (51,87)	CC (52,78)	CC (53,70)	CC (54,63)	CC (54,63)

No	Misi	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi		Target RKPD	Target			Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pemerintahan Daerah									
		Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju	6	7	8	10	12	15	20	20
			Jumlah Desa Tertinggal	15	14	8	7	6	4	2	2
	4	**23**	**27**								

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026. Strategi Pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

Rumusan Strategi selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembagunan tahunan (*milestone*) Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026.

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, serta analisis potensi dan hambatan internal dan lingkungan eksternal maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam

mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD

Secara umum, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Serta Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kab. Mahakam Ulu 2021-2026

VISI:

"Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan"

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
Misi 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Pembangunan aksesibilitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kawasan cepat tumbuh	1. Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi guna memenuhi kebutuhan transportasi pada jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan jalan antar kampung
			2. Singkronisasi kebijakan sektor transportasi, pengembangan wilayah dan pembangunan perekonomian.
			3. Perencanaan transportasi antar wilayah guna mengurangi kesenjangan aksesibilitas, secara terpadu, terintegrasi dan seuai dengan karakteristik kecamatan.
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Peningkatan sarana dan prasarana serta distribusi jaringan air baku	1. Membangun PDAM Mahakam Ulu.
			2. Mengembangkan dan membangun teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum.
			3. Membangun SPAM dan instalasi air bersih di ibukota kabupaten dan sekitarnya.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung
			5. Pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perdesaan
	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Peningkatan akses ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan	1. Pembangunan jenis pembangkit tenaga listrik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah
			2. Koordinasi dengan PLN untuk perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas listrik
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak provider jaringan telekomunikasi	Optimalisasi fasilitas jaringan internet setiap kampung
	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Memberikan stimulus/bantuan rumah layak huni kepada masyarakat	1. Pendataan rumah tidak layak huni
			2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
			3. Pemberian bantuan pembangunan rumah layah huni bagi masyarakat tidak mampu
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Pendayagunaan sumber daya alam (SDA) sebagai pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, bertanggungjawab dan sesuai serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi	1. Peningkatan sarana prasarana MCK
			2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang berpotensi merusak lahan, air dan udara
			3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap hal-hal yang berpotensi merusak lahan, air dan udara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
		pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).	4. Pengendalian penebangan hutan di hulu sungai
			5. Pencegahan kebakaran hutan
			6. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
			7. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
			8. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
Misi 2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal			
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Penyediaan bantuan alsinta, saprodi dan modal usaha;
			2. Pembagian lahan pertanian kepada kelompok tani
			3. Pengembangan kawasan pertanian;
			4. Peningkatan kualitas SDM
			5. Revitalisasi kelompok tani
			6. Optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
		Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan	Menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN untuk menampung hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
	Meningkatnya peran sektor	Meningkatkan peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Peningkatan kualitas SDM dan minat pelaku usaha;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	(UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam dalam mendukung perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat	2. Identifikasi potensi peluang usaha UMKM dan ekonomi kreatif dan BUMKam;
			3. Bantuan peralatan dan modal usaha;
			4. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk melalui pemanfaatan IT;
			5. Menjalin kerjasama dengan perusahaan menengah dan besar di luar Mahakam Ulu
	Meningkatnya investasi daerah	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan daya saing investasi dengan daerah lain	1. Peningkatan kualitas SDM aparatur;
			2. Optimalisai peran lembaga pelayanan investasi satu atap;
			3. Promosi peluang dan potensi investasi daerah;
			4. Pengembangan infrastruktur pendukung;
			5. Kemudahan dalam berinvestasi;
			6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah provinsi dan pusat maupun dengan investor.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan warga terdampak COVID-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, serta bantuan perumahan;
			2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi warga miskin dan warga pasca COVID-19;
			4. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMKampung, dan pengembangan kewirausahaan;
			5. Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan .
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Memperluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal dalam upaya mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja atau program pada karya, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;
			2. Penyediaan lapangan usaha kerja yang banyak menyerap tenaga kerja;
			3. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;
			4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal;
			5. Mendorong berkembangnya usaha dan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat lokal.
Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi			
Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Harapan lama	Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah	1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum tersedia.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
Sumber Daya Manusia	sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Non Formal dan Kesetaraan	2. Pemenuhan akses pendidikan bagi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar bagi siswa tidak mampu.
			3. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Penambahan lembaga pendidikan non formal dan Peningkatan mutu layanan pendidikan non formal kesetaraan	4. Memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian untuk lembaga pendidikan non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM)
		Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan	5. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui DIKLAT, PPG, dan Pelatihan Guru
			6. Merevitalisasi kelompok Kerja Guru Jenjang Pendidikan PAUD dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik.
			7. Pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1
		Peningkatan Kompetensi Sumber daya manusia	8. Pemberian bantuan kuangan dalam bentuk beasiswa kepada peserta didik dan mahasiswa asal kabupaten mahakam ulu
	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan;
			2. Peningkatan sarana dan parasarana kesehatan, khususnya Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu;
			3. Peningkatan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan RS Pertama Gerbang Mahulu dan upaya penanggulangan penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, malaria, tuberkulosis, ISPA dan hepatitis;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			4. Perbaikan manajemen dalam penyediaan dan pendistribusian obat/farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
			5. Penurunan prevalensi stunting.
			6. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
			7. Meningkatkan status akreditasi seluruh Puskesmas;
			8. Perbaikan sistem renumerasi bagi dokter spesialis.
Misi 4: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel			
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Mewujudkan birokrasi dengan pelayanan publik berkualitas	1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan
			2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas personil penyelenggara pelayanan publik
			3. Pembentukan saluran pengaduan, operasional desk pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan IT, media sosial dan media siaran dalam upaya penerapan paradigma pelayanan pubik yang fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan *(customer-driven government*).
			4. Pengembangan prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan transparan
			5. Pengembangan kebijakan yang mendukung Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan (STPP)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			6. Optimalisasi penerapan sistem evaluasi kinerja yang didukung dengan sistem insentif dan sanksi guna mendorong kinerja aparatur pemerintah yang efektif;
			7. Peningkatan sosialisasi terhadap standar prosedur, standar waktu dan standar biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
			8. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan dan keuangan daerah
			9. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga APIP
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah
			2. Peningkatan kualitas SDM aparatur perencana, pendapatan, keuangan dan aset daerah
			3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
			4. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sistem perencanaan dan keuangan daerah
			5. Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			6. Penguatan database aset daerah
			7. Sosialisasi peraturan perpajakan
			8. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sistem perencanaan dan keuangan daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			9. Penyusunan pedoman teknis perencanaan dan keuangan daerah
			10. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah
			11. Optimalisasi upaya pendataan, penilaian, pencatatan dan pengelolaan aset daerah dengan pemanfaatan IT
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan Kampung yang baik	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung
			2. Pembinaan aparatur pemerintah kampung dalam perencanaan, dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan Kampung
			3. Fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan kampung
			4. Penataan batas wilayah kampung
			5. Mendorong kerjasama antar kampung
			6. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah. Dengan mempedomani tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan di atas, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup;
3. Peningkatan sumber daya pertanian dan perkebunan sehingga dapat mendorong meningkatnya produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan
4. Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyat
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, serta dengan melihat 5 (lima) Sasaran Prioritas Nasional dan arah kabijakan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dalam bentuk tema/tahapan pembangunan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah 6.1 ini:

Gambar 6.1
Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Mahakam Ulu
2021-2026

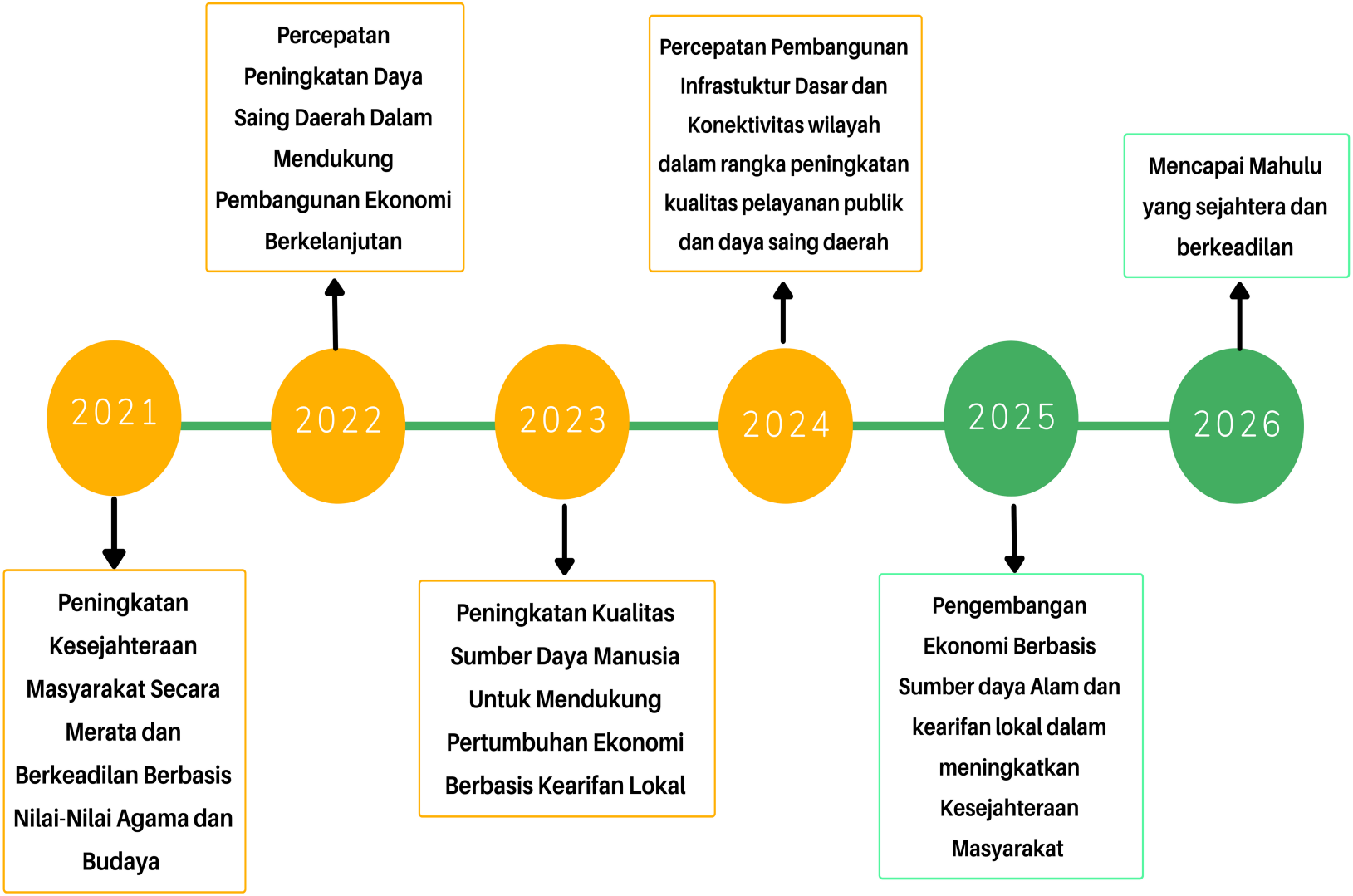

Selanjutnya dari tema pembangunan tahunan Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021-2026 tersebut dirumuskan Fokus Prioritas Pembangunan dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan dengan urgensitas tinggi. Oleh karena itu, setiap tema RKPD memiliki fokus sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini:

1. **Tema RKPD Tahun 2021*: "Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan budaya"***, dengan fokus pembangunan berupa:
   a. Percepatan pemerataan pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
   b. Pengembangan pendidikan kejuruan dan pelatihan ketenagakerjaan;
   c. Peningkatan produktivitas pertanian, perdagangan dan jasa;
   d. Percepatan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
   e. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah,
2. **Tema RKPD Tahun 2022*: "Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"***, dengan fokus pembangunan berupa:
   a. Peningkatan Produksi Pertanian melalui Melalui intensifikasi , diversifikasi produk dan manajemen pemasaran, serta peningkatan fungsi jaringan irigasi;
   b. Pengembangan Komoditas tanaman pangan berupa padi ladang , dan komoditas tanaman perkebunan berupa kakao , karet dan kelapa sawit;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan;
   d. Pengembangan listrik, pembangunan rumah layak huni dan penyediaan air bersih dan sanitasi layak.
3. **Tema RKPD Tahun 2023*: "Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal"***, dengan fokus pembangunan berupa:
   a. Peningkatan kualitas dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan
   b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
   c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasarkerja
   d. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)

e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
f. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
g. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
h. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
i. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
j. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
k. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya
l. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
m. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat

4. **Tema RKPD Tahun 2024*: "Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konetivitas wilayah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saiang daerah"***, dengan fokus pembangunan berupa:
   a. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya
   b. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya
   c. Pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air bersih
   d. Percepatan pengembangan permukiman
   e. Pemerataan jaringan telekomunikasi sampai ketingkat kampung
   f. Peningkatan jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan jalan antar kampung
   g. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perhubungan
   h. Peningkatan sarana prasarana MCK
   i. Peningkatan Kualitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   j. Peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan aparatur pengelola keuangan daerah
   k. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur pemerintahan kampun
   l. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa

m. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
n. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman

5. **Tema RKPD Tahun 2025*: "Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat"***, dengan fokus pembangunan berupa:
   a. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian
   b. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, on-farm, hilir dan supporting system
   c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
   d. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
   e. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
   f. Membangun pusat pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam di setiap kampung
   g. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
   h. Membangun kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha masyarakat
   i. Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk mengasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi
   j. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi
   k. Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan Badan Usaha Milik Kampung
   l. Penyiapan pelatihan angkatan kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa
   m. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
   n. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
   o. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir
6. **Tema RKPD Tahun 2026*: "Mencapai Mahulu yang Sejahtera dan Berkeadilan"***, dengan fokus pembangunan berupa:

a. Pemerataan kualitas SDM di semua bidang
b. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar
c. Pemerataan Konektifiktas telekomunikasi
d. Memperkuat pasar-pasar dalam memasarakan hasil produk masyarakat
e. Menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat
f. Meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan lingkungan
g. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani
h. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan

6.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

6.3.1. Program Prioritas I: Belanja Wajib Dan Mengikat Serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti:

a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
d) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

6.3.2. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik/Program aksi pada saat kampanye.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026, memiliki 10 janji kampanye / program aksi yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. 10 janji kampanye tersebut antara lain:

1) Menjadikan Rumah Tangga sebagai basis Pemberdayaan Social Ekonomi Masyarakat melalui Program Ketahanan Keluarga sebesar Rp. 3 s.d 6 juta per Kepala Keluarga per Tahun;
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Pariwisata dan Aksesibilitas Wilayah:
    a. Melanjutkan Program alokasi dana Kampung Rp. 3 s.d 6 Milyar per kampung per tahun.
    b. Melanjutkan dan memastikan realisasi program alokasi dana RT Rp. 100 s.d 300 juta per RT pertahun.
    c. Memperbaiki dan meningkatkan jalan kampung dan jalan antar kampung.
    d. Menambah armada/retasi dan meningkatkan layanan (SOA) Speed Gratis bagi warga tidak mampu dan Subsidi bagi warga yang mampu.
    e. Membangun, memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan komunikasi publik termasuk akses internet. (telephone, WA, Youtube, SMS dll).
    f. Membangun Jembatan Long Melaham dan Jembatan Sungai Ratah.
    g. Membangun Jembatan Gantung Permanen Delang Kerohong - Long Pakaq Baru dengan Long Kuling & Jembatan Parallel Perbatasan.
    h. Membangun Jembatan Gantung Permanen Long Pahangai - Datah Suling dan kampung sekitar. Membangun Jembatan Gantung Sungai Pariq Tri Pariq Makmur - Matalibaq.
    i. Membangun Jalan Tering-Long Bagun & Long Pahangai - Tiong Ohang.
    j. Membangun Bandara Ujoh Bilang.

k. Mengembangkan Kawasan Batu Dinding sebagai Pusat Wisata, Budaya dan Aktifitas Warga antara lain melalui pembangunan : Sport Centre, Gedung Pemuda dan Pusat Kebudayaan.
l. Membangun pusat pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam di setiap kampung.

3) Meningkatkan pembangunan dan peningkatan jaringan listrik, khususnya listrik mandiri yang murah, aman dan berkelanjutan.
   a. Membangun dan mengembangkan sumber daya listrik yang cukup bagi masyarakat.
   b. Membangun jaringan listrik di setiap kampung.
   c. Program pemasangan Sambungan Rumah (SR) Gratis.
   d. Meningkatkan layanan listrik minimal 12 jam setiap kampung dan listrik 24 jam di ibukota kecamatan bekerja sama dengan PLN.
   e. Membangun tower untuk memperluas jaringan listrik ibu kota ke daerah Batu Majang dan sekitarnya.
4) Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih yang murah, berkualitas, dan terjamin.
   a. Memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pengolahan air minum di setiap kampung, membangun dan mengembangkan “PAM Desa”.
   b. Mengembangkan dan membangun teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum.
   c. Membangun SPAM dan instalasi air bersih di ibukota kabupaten dan sekitarnya.
   d. Membangun PDAM Mahakam Ulu.
5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalu optimalisasi potensi sumberdaya daerah berbasis perdayaan masyarakat ,pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan.
   a. Program pembagian lahan pertanian seluas 2 hektar per anggota kelompok tani
   b. Melakukan pemetaan potensi masing-masing Kampung untuk pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

dalam rangka menciptakan produk unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif.

c. Program pengembangan UMKM berbasis kampung dan kawasan, dengan konsep menciptakan produk unggulan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kampung.
d. Membangun kerjasama dengan perusahaan dalam penyiapan dan penyerapan tenaga kerja lokal.
e. Peningkatan ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kelompok usaha kerajinan, kuliner dan lain-lain.
f. Meningkatkan keterampilan kaum muda melalui penyiapan Balai Latihan Kerja.
g. Program Bantuan Modal Usaha bagi kaum muda dan perempuan yang telah memiliki keterampilan usaha.
h. Menyiapkan sarana dan prasarana olah raga dan seni untuk meningkatkan potensi kaum muda/milenial di setiap kampung.
i. Membangun balai kerajinan seni ukir dan anyaman.
j. Menyiapkan tenaga pelatih/instruktur seni ukir, seni tari dan seni anyam dengan sistem kontrak (TKK/TNP).

6) Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat kampung, guna percepatan dan pemerataan pembangunan.
   a. Program pengembangan otonomi kampung melalui optimalisasi Undang-Undang Desa, khususnya untuk peningkatan partisipasi, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan dari/oleh/untuk masyarakat kampung.
   b. Program peningkatan insentif bagi perangkat dan Adat Kampung.
   c. Program pembentukan/revitalisasi BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat kampung.
   d. Optimalisasi peran masyarakat kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung.

7) Peningkatan kesejahteraan petani dengan mengembangkan bantuan permodalan, penerapan manajemen teknologi pertanian berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan.
   a. Membangun ketahanan pangan melalui modernisasi di pertanian lahan kering dan pembangunan persawahan untuk menuju swasembada pangan.
   b. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi perkebunan kakao.
   c. Program dana bantuan biaya tanam padi bagi petani pada saat musim tanam.
   d. Program revitalisasi kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan.
   e. Program bantuan bibit dan pupuk organik.
   f. Program pengawasan dan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, poktan dan gapoktan.
   g. Program penyediaan kredit usaha pertanian.
8) Penataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan.
   a. Program peningkatan sumberdaya manusia dengan menyediakan beasiswa minimal 500 paket tiap tahun untuk jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. (dalam dan luar Negeri).
   b. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP termasuk membangun SMP unggulan di setiap kecamatan.
   c. Membangun asrama pelajar di setiap kecamatan dan asrama mahasiswa/mahasiswi.
   d. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
   e. Program standarisasi pelayanan pendidikan di sekolah negeri
   f. Program tambahan insentif bagi guru swasta, sekolah minggu, guru TPQ/TPA, guru ngaji, takmir masjid, pastor dan pendeta.
   g. Program bantuan buku paket, LKS dan seragam sekolah bagi siswa-siswi sekolah negeri dan swasta.
   h. Bantuan pakaian seragam untuk guru sekolah negeri dan swasta.
   i. Program percepatan sertifikasi guru tanpa potongan dan pungutan.
   j. Optimalisasi fasilitas jaringan internet di sekolah-sekolah.

k. Memperioritaskan TKK untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS.

9) Penataan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan manusiawi.
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Pratama, Puskesmas di setiap Kecamatan dan PUSTU di setiap kampung.
   b. Program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
   c. Membangun rumah tunggu di setiap rumah sakit untuk menampung keluarga pasien.
   d. Membangun rumah duka transit di Ibu Kota Kabupaten.
   e. Meningkatkan kualitas layanan PUSKESMAS Terapung.
   f. Program bantuan pakaian seragam dan peningkatan insentif tenaga medis dan non medis.
   g. Program 1 Puskesmas minimal 2 dokter umum.
   h. Program alokasi dana untuk revitalisasi posyandu anak, ibu, dan lansia.
   i. Program alokasi dan bantuan untuk lansia, penyandang disfabelitas, janda dan duda yang sudah tidak produktif serta penderita penyakit kronis (stroke berat, depresi akut, kebutaan, kelainan jiwa dan lain-lain).
   j. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
   k. Program peningkatan kualitas tenaga medis dan nonmedis.

10) Penataan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel.
   a. Membangun pusat pemerintahan Kabupaten Mahulu yang terintegrasi.
   b. Menyelenggarakan kantor pemerintahan berjalan untuk memberikan pelayanan publik dalam pengurusan KTP, KK, akta lahir, akta kematian, akta perkawinan sipil, dan perijinan dengan sistem “jemput bola”.
   c. Program pembebasan biaya pelayanan administrasi kependudukan dasar (KTP, KK, akte kelahiran, akta perkawinan sipil, akta kematian dan surat nikah).
   d. Mendorong terciptanya pelayanan publik yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menetapkan standar waktu, standar biaya dan standar prosedur.

e. Menerapkan sistem lelang jabatan untuk posisi-posisi penting di pemerintahan dalam rangka menempatkan orang yang kompeten dan kredibel pada posisi yang tepat.
f. Program lelang jabatan Camat dan Kepala Dinas.
g. Memberikan keteladanan kepemimpinan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
h. Meningkatkan profesionalisme, etos kerja aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.
i. Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.
j. Mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui konsep *mobile services* dan pelayanan satu pintu (*One Stop Services*).

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian Program Prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.2 dan Program Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.2
Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
1	Menjadikan Rumah Tangga Sebagai Basis Pemberdayaan Social Ekonomi Masyarakat Melalui Program Ketahanan Keluarga Sebesar Rp. 3 S.D 6 Juta Per Kepala Keluarga Per Tahun.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
2	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Prasarana Publik Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Pariwisata Dan Aksesibilitas Wilayah.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
3	Pembangunan Dan Peningkatan Jaringan Listrik Khususnya Listrik Mandiri Yang Murah, Aman Dan Berkelanjutan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Yang Murah, Berkualitas, Dan Terjamin.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
	Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan, Dan Ramah Lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Umkm	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Sekretariat Daerah
6	Pemberdayaan Pemerintahan Dan Masyarakat Kampung, Guna Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan.	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
7	Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Mengembangkan Bantuan Permodalan, Penerapan Manajemen Teknologi Pertanian Berbasis Kerakyatan Dan Berwawasan Lingkungan.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
8	Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu, Merata Dan Berkeadilan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
9	Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis Yang Berkualitas Dan Manusiawi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Penataan Dan Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Transparan, Profesional Dan Akuntabel.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penggelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan

Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kab. Mahakam Ulu Periode 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan							**178.622.219.320**		**211.098.589.161**		**365.573.100.258**		**325.652.813.526**		**359.726.188.330**		**389.912.281.234**		**1.830.585.191.829**	
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar				**Indeks Gini**	**0,259**	**0,27**	**176.347.031.420**	**0,288**	**208.348.589.161**	**0,274**	**361.823.100.258**	**0,260**	**321.902.813.526**	**0,248**	**355.976.188.330**	**0,236**	**386.162.281.234**	**0,236**	**1.810.560.003.929**	
Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan				**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**	**27.45%**	**6,36%**	**143.331.082.920**	**13,07%**	**167.054.611.319**	**5%**	**221.368.540.254**	**5%**	**207.893.028.922**	**5%**	**216.606.619.122**	**25%**	**221.432.927.422**	**25%**	**2.123.697.267.620**	
1	03	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,50%	5%	4.937.814.000	10%		10%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	88%	24.937.814.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	tda					15%	500.000.000	15%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	30%	2.500.000.000	30%	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	124.271.820.620	5,00%	153.980.691.320	5%	195.982.319.954	5%	171.850.078.022	5%	171.850.078.022	5%	171.850.078.022	30%	989.785.065.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	0	8.728.448.300	0	11.064.121.900	0	15.164.410.100	0	18.992.950.900	0	26.706.541.100	5%	30.532.849.400	5%	111.189.321.700	Dinas Perhubungan
				Rasio Ijin Trayek	0	0		0		0		0		0		5%		5%		
				Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0	0		0		0		0		0		5%		5%		
				Pemasangan Rambu-rambu	10	0		0		20		25		30		35		35		
				Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0	0		0		0		0		0		10%		10%		
				Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0	0		0		0		0		0		10%		10%		
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	15593org/ 87,9 ton	19637 Org/1215 ton	5.393.000.000	20.379Org /43.393 ton	2.009.798.099	15200 Org/150 ton	4.721.810.200	15500 Org/170 ton	9.550.000.000	15700 Org/200 ton	10.550.000.000	16000 Org/ 220 ton	11.550.000.000	16000 Org/ 220 ton	989.785.065.960	Dinas Perhubungan
				Jumlah Arus penumpang pelayaran	773	19637		20379		800		820		850		870		870		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih				**Persentase Capaian Akses Air Minum Layak**	**24,00**	**28,19**	**1.952.130.200**	**31,39**	**7.218.168.500**	**34,89**	**12.314.340.900**	**38,39**	**25.000.000.000**	**42,09**	**25.000.000.000**	**45,99**	**25.000.000.000**	**45,99**	**96.484.639.600**	
1	03	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2%	8,00%	1.952.130.200	10,00%	7.218.168.500	20,00 %	12.314.340.900	25,00 %	25.000.000.000	30,00 %	25.000.000.000	33,00 %	25.000.000.000	33,00 %	96.484.639.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik				**Presentase KK yang dialiri listrik**	**95,78**	**99,74**	**0**	**99,5**	**0**	**99,6**	**1.275.000.000**	**99,7**	**3.000.000.000**	**99,7**	**3.000.000.000**	**99,9**	**3.000.000.000**	**99,9**		
1	04	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%					30,43 %	1.275.000.000	35,43 %	3.000.000.000	45,43 %	3.000.000.000	55,43 %	3.000.000.000	55,43 %	10.275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet				**Cakupan Layanan Telekomunikasi**	**84,00%**	**87,00%**	**10.387.370.300**	**90,80%**	**9.821.788.342**	**94,00 %**	**18.129.262.304**	**96,00 %**	**25.359.784.604**	**98,00 %**	**50.719.569.208**	**99%**	**76.079.353.812**	**100%**	**190.497.128.570**	
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	10.387.370.300	100%	9.821.788.342	100%	18.129.262.304	100%	25.359.784.604	100%	50.719.569.208	100%	76.079.353.812	100%	190.497.128.570	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni				**Rasio rumah layak huni**	**15,43**	**16,43%**	**20.676.448.000**	**18,43%**	**24.254.021.000**	**20,43 %**	**108.735.956.800**	**22,43 %**	**60.650.000.000**	**24,43 %**	**60.650.000.000**	**26,43 %**	**60.650.000.000**	**26,43 %**	**335.616.425.800**	

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	03	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	na	40%	15.655.487.700	50%	23.936.742.500	60%	102.456.221.200	70%	50.000.000.000	80%	50.000.000.000	90%	50.000.000.000	90%	292.048.451.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	15,43%	na		na		30,43 %	500.000.000	35,43 %	5.000.000.000	40,43 %	5.000.000.000	50,43 %	5.000.000.000	50,43 %	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	5.020.960.300	20,00%	317.278.500	25,00 %	5.779.735.600	30,00 %	5.650.000.000	40,00 %	5.650.000.000	50,00 %	5.650.000.000	50,00 %	28.067.974.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**80,12**	**80,65**	**2.275.187.900**	**82,65**	**2.750.000.000**		**3.750.000.000**	**83,67**	**3.750.000.000**	**84,94**	**3.750.000.000**	**86,2**	**3.750.000.000**	**87,47**	**20.025.187.900**	
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara				**Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air**	**77,90**	**50**	**2.275.187.900**	**61,88**	**2.750.000.000**	**66,88**	**3.750.000.000**	**71,88**	**3.750.000.000**	**79,38**	**3.750.000.000**	**86,88**	**3.750.000.000**	**86,88**	**20.025.187.900**	
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	**82,78**	**93,98**		**92,56**		**93,56**		**94,56**		**96,06**		**97,56**		**97,56**		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	**79,00**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	na	na	750.000.000	na	750.000.000	66,88	750.000.000	71,88	750.000.000	79,38	750.000.000	86,88	750.000.000	86,88	4.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	50%	50%	110.187.900	60%	500.000.000	70%	500.000.000,0	75%	500.000.000,0	80%	500.000.000,0	85%	500.000.000,0	85%	2.610.187.900	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	20%	1.415.000.000	30%	1.500.000.000	40%	2.500.000.000	50%	2.500.000.000	60%	2.500.000.000	75%	2.500.000.000	75%	12.915.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal							**21.137.922.200**		**25.695.138.526**		**57.224.700.000**		**65.699.918.250**		**72.021.793.283**		**73.338.506.933**		**317.190.563.191**	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas				**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**-0,22**	**1,27**	**12.518.945.700**	**0,91**	**16.766.281.126**	**1,71**	**44.668.958.900**	**2,39**	**53.095.254.250**	**3,23**	**58.882.763.283**	**4,38**	**59.836.673.633**	**4,38**	**245.768.876.891**	

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				**Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)**	**75,18**	**74,71**	**7.201.735.800**	**74,53**	**13.767.970.500**	**74,23**	**23.941.297.400**	**73,93**	**27.978.169.900**	**73,63**	**31.614.969.800**	**73,33**	**31.675.000.000**	**73,33**	**136.179.143.400**	
2	09	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	105%	106%	0	107%	0	108%	0	109%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	747.587.500	92,8	1.192.411.900	94	951.879.200	95,2	500.000.000	96,2	500.000.000	97,98	500.000.000	98,98	4.391.878.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	166.532.700	330 Ton	47.253.300	345 Ton	400.775.800	350 Ton	500.000.000	365 Ton	500.000.000	380 Ton	500.000.000	380 Ton	2.114.561.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	519.941.700	150 Ton	28.838.600	165 Ton	790.472.200	180 Ton	1.000.000.000	195 Ton	1.000.000.000	110 Ton	1.000.000.000	110 Ton	4.339.252.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	1,57	1,81	2.093.193.600	2,08	8.955.057.500	2,39	9.834.000.000	2,63	13.613.200.100	2,89	17.200.000.000	3,18	17.150.000.000	3,18	68.845.451.200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	1,60%		1,70%		1,80 %		1,90 %		2,00 %		2,10 %		2,10 %		
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%	3,30%		3,40%		3,50 %		3,60 %		3,70 %		3,80 %		3,80 %		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%		1,40%		1,50 %		1,60 %		1,70 %		1,80 %		1,80 %		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	2.633	3.000	893.489.100	3.600	379.817.900	4.000	9.834.000.000	4.200	6.914.969.800	4.500	6.914.969.800	4.500	6.925.000.000	23.800	31.862.246.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	2.300 Ha	500 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	2.780.991.200	5 BPP dan 50 WKPP	3.164.591.300	5 BPP dan 50 WKPP	2.130.170.200	5 BPP dan 50 WKPP	4.450.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.500.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.600.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	21.625.752.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				di BPP dan WKPP yang difasilitasi																
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	320 Lembaga	400 Lembaga		450 Lembaga		500 Lembaga		550 Lembaga		600 Lembaga		650 Lembaga		650 Lembaga		
Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam				**Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)**	**17,53**	**18,66**	**3.872.780.400**	**19,18**	**1.950.546.400**	**19,22**	**16.536.969.300**	**19,26**	**19.730.013.950**	**19,31**	**21.342.016.043**	**20,31**	**21.643.318.449**	**20,31**	**85.075.644.541**	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	na		-		-		-	50%	250.000.000	75%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	na		-		79.250.000		-	25%	250.000.000	50%	250.000.000	75%	250.000.000	75%	829.250.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											(17)	(18)	(19)
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	4	6	2.150.000.000	16	434.366.700	29	13.050.000.000	29	14.150.000.000	29	15.100.000.000	29	14.650.000.000	29	59.534.366.700	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan Mancanegara	5	10	1.172.780.400	10	911.586.100	30	2.000.000.000	50	2.300.000.000	55	2.645.000.000	60	3.041.750.000	215	12.071.116.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700		3000		200		300		350		400		6950		
				Presentase PAD Sektor Pariwisata						2%		3%		3%		4%		12%		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif Unggulan	20	25	500.000.000	60	435.443.600	70	808.696.300	85	2.000.000.000	105	2.200.000.000	130	2.420.000.000	130	8.364.139.900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	na	25%	50.000.000	35%	89.900.000	20%	678.273.000	20%	780.013.950	20%	897.016.043	20%	1.031.568.449	20%	3.526.771.441	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya investasi daerah				**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)***	**2.815**	***2.694.979.781.570**	**1.444.429.500**	***351.334.825.000**	**1.047.764.226**	**350**	**4.190.692.200**	**360**	**5.387.070.400**	**365**	**5.925.777.440**	**370**	**6.518.355.184**	**1.100**	**24.514.088.950**	

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	36 Proyek	17 Proyek	535.255.700	38 Proyek	463.748.680	55 Proyek	1.686.457.200	63 Proyek	2.290.105.400	73 Proyek	2.519.115.940	84 Proyek	2.771.027.534	84 Proyek	10.265.710.454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor			-		-	55 investor	534.235.000	63 investor	929.965.000	73 investor	1.022.961.500	84 investor	1.125.257.650	84 investor	3.612.419.150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupakan Pelyanan Penanman Modal	100%	100%	909.173.800	100%	584.015.546	100%	1.970.000.000	100%	2.167.000.000	100%	2.383.700.000	100%	2.622.070.000	100%	10.635.959.346	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				**PDRB Per Kapita (Juta Rp) *Atas Harga Berlaku**	**85,38**	**90,17**	**8.618.976.500**	**94,51**	**8.928.857.400**	**100,42**	**12.555.741.100**	**106,71**	**12.604.664.000**	**113,39**	**13.139.030.000**	**120,48**	**13.501.833.300**	**120,48**	**71.421.686.300**	
Berkurangnya angka kemiskinan				**Angka Kemiskinan (%)**	**11,44**	**11,90**	**8.493.976.500**	**11,55**	**7.333.857.400**	**11,39**	**10.380.741.100**	**10,94**	**9.929.664.000**	**10,50**	**9.964.030.000**	**10,09**	**10.001.833.300**	**10,09**	**58.176.686.300**	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68.84%	68.84%	1.304.633.000	72%	363.416.000	72%	2.436.000.000	81%	2.436.000.000	91%	2.436.000.000	100%	2.436.000.000	100%	13.484.633.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	100%	33.33%	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	83,33	6.400.000.000	100%	6.400.000.000	100%	38.400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	20%	20%	200.000.000	20%	200.000.000	40%	500.000.000	60%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK	600 KK	589.343.500	600 KK	370.441.400	350 KK	1.044.741.100	400 KK	343.664.000	450 KK	378.030.000	500 KK	415.833.300	500 KK	3.142.053.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**3,49**	**3,14**	**125.000.000**	**2,44**	**1.595.000.000**	**2,42**	**2.175.000.000**	**2,40**	**2.675.000.000**	**2,36**	**3.175.000.000**	**2,38**	**3.500.000.000**	**2,32**	**13.245.000.000**	
2	07	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0	-	10%	725.000.000	20%	750.000.000	30%	875.000.000	40%	1.000.000.000	50%	1.025.000.000	50%	4.375.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	07	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0%	0%	125.000.000	65%	550.000.000	70%	700.000.000	75%	850.000.000	80%	1.000.000.000	85%	1.125.000.000	85%	4.350.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	07	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap	0%	0%	-	70%	320.000.000	75%	725.000.000	80%	950.000.000	85%	1.175.000.000	90%	1.350.000.000	90%	4.520.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				kebijakan pemerintah daerah																
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi							**125.508.331.974**		**153.918.571.773**		**161.924.571.100**		**190.101.447.679**		**210.082.411.172**		**231.811.771.522**		**1.073.347.105.220**	
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				**Indek Pembangunan Manusia**	**67,09**	**67,95**	**125.508.331.974**	**68,75**	**153.918.571.773**	**69,32**	**161.924.571.100**	**69,90**	**190.101.447.679**	**70,48**	**210.082.411.172**	**71,07**	**231.811.771.522**	**71,07**	**1.073.347.105.220**	
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat				**Angka rata-rata lama sekolah**	**7,97**	**8,81**	**93.087.827.874**	**8,36**	**98.784.789.273**	**8,46**	**102.091.910.300**	**9,00**	**178.631.658.699**	**9,21**	**198.189.892.404**	**9,26**	**219.443.348.918**	**9,26**	**890.229.427.468**	
				Harapan Lama Sekolah	**12,51**	**12,61**		**12,62**		**12,70**		**12,80**		**0,54**		**13,20**		**13,20**		
1	01	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	100,42	109,7	75.924.515.160	73,02	69.862.803.224	80,35	101.169.169.700	80,73	139.249.020.740	90,27	154.420.057.749	90,47	170.757.811.317	90,47	711.383.377.891	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
				APM SD/MI	89,29	90,15		74,91		80,73		90,15		90,36		90,78		90,78		
				APK SD/MI	102,16	100,68		82,16		100,60		100,70		100,80		100,90		100,90		
				APM SMP/MTs	69,77	90,15		63,55		71,30		71,75		72,65		73,00		73,00		
				APK SMP/MTs	97,40	98,03		82,16		90,00		93,55		98,33		100,00		100,00		
				APS 5-6 Tahun Paud	80,75	80,75		80,74		80,50		80,60		80,80		90,00		90,00		
				APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	98,03	98,03		99,35		99,40		90,45		90,57		90,67		90,67		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				APS 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	3,51	3,51		0,52		2,53		3,85		4,55		5,67		5,67		
1	01	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan	na							100%	3.000.000.000	100%	3.600.000.000	100%	4.320.000.000	100%	10.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	68,00%	70,00%	397.276.000	80,00%	490.155.000	84,00%	922.740.600	86,00%	1.489.329.000	92,00%	1.787.194.800	93,00%	2.144.633.760	93,00%	7.231.329.160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	16.766.036.714	100,00%	28.431.831.049			100,00%	34.893.308.959	100,00%	38.382.639.855	100,00%	42.220.903.840	100,00%	160.694.720.417	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat				**Umur Harapan Hidup (Tahun)**	**72,10**	**72,33**	**32.420.504.100**	**72,35**	**55.133.782.500**	**72,49**	**59.832.660.800**	**72,64**	**11.469.788.980**	**72,78**	**11.892.518.768**	**73,15**	**12.368.422.605**	**73,15**	**183.117.677.753**	
1	02	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,30	0,27	31.203.951.200	0,27	54.158.475.300	0.15	58.421.613.000	0,10	2.840.556.800	0,5	3.032.130.800	0	3.248.676.400	0	152.905.403.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9		17		7		6		5		4		4		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	2		0		2		1		1		0		0		
				Rasio posyandu	1: 50 balita	1 : 50 balita		1 : 50 balita		1 : 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				per satuan balita																
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,17	1,20		1,23		1,23		1,23		1,23		1,23		1,23		
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,07		0,07		0.07		0,07		0,07		0,07		0,07		
				Prevalensi stunting	27%	11%		7%		18%		14%		12%		10%		10%		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	61 Org/ rujukan	100		1		70		50		40		40		40		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	88%	44.44%		100%		91%		92%		93%		94%		94%		
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0.00039		0.00063		0.56		0,53		0,50		0,47		0,47		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus	35 Kasus		143 Kasus		41 Kasus		41 Kasus		41 Kasus		42 Kasus		42 Kasus		
				Angka kejadian Malaria	14	14		11		0		0		0		0		0		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	0.14		0.05		2		2		1		1		1		
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97 persen	98		99		100%		97,00		98,00		98,00		98,00		
1	02	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 71	1 : 70	403.097.800	1 : 70	208.285.200	1 : 70	676.766.000	1 : 80	20.885.200	1 : 83	20.885.200	1 : 86	20.885.200	1 : 86	1.350.804.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 59	1 : 90		1 : 90		1 : 90		1 : 66		1 : 68		1 : 70		1 : 70		
				Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%	100%		16.66%		90%		90%		90%		90%		90%		
1	02	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	100 Persen	243.596.500	100 Persen		-		100 persen	6.752.576.600	100 persen	6.752.576.600	100 persen	6.752.576.600	100 persen	20.501.326.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen	100 Persen		100 Persen		-		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		
				Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	100 Persen		0		-		50 Persen		50 Persen		50 Persen		50 Persen		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	02	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	100 Persen	569.858.600	100 Persen	767.022.000	75%	734.281.800	76 persen	861.575.500	77 persen	993.311.800	78 persen	1.143.308.600	78 persen	5.069.358.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3,2 persen (630 RT)	600 RT		600 RT		800 RT		850		900		950		950		
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	21 KLB	1573		260		23 KLB		24KLB		25KLB		26 KLB		26 KLB		
1	02	7	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Presentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama	na	-	-	-	-	-	-	20%	994.194.880	40%	1.093.614.368	60%	1.202.975.805	60%	3.290.785.053	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel							**636.724.083.530**		**709.064.228.897**		**871.355.067.645**		**968.421.828.156**		**1.046.003.658.498**		**1.125.137.484.839**		**5.348.608.163.352**	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**C**	**C**	**636.724.083.530**	**CC**	**709.064.228.897**	**CC**	**871.355.067.645**	**B**	**968.421.828.156**	**B**	**1.046.003.658.498**	**B**	**1.125.137.484.839**	**B**	**5.348.608.163.352**	
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas				**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**na**	**98,34**	**4.975.858.600**	**n.a**	**13.347.042.100**	**98,44**	**18.827.243.100**	**98,54**	**20.333.105.800**	**98,64**	**21.313.735.500**	**98,74**	**21.047.413.000**	**98,74**	**99.844.398.100**	

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	03	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,00%	3.965.858.600	75,00%	4.104.602.100	80,00 %	8.115.939.000	80,00 %	8.015.550.800	82,50 %	8.399.323.200	85,00 %	7.171.598.000	85,00 %	39.772.871.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,00%	10.000.000	78,00%	10.000.000	81,00 %	749.999.100	81,00 %	1.500.000.000	82,50 %	1.728.212.300	84,00 %	1.700.000.000	84,00 %	5.698.211.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99,00%	99,20%	-	99,35%	5.400.515.000	99,50 %	5.753.645.000	99,65 %	6.003.365.000	99,80 %	6.229.650.000	100,00%	6.656.195.000	100,00%	30.043.370.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	62%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	100%	-	100%	2.731.925.000	100%	3.007.660.000	100%	3.343.550.000	100%	3.485.910.000	100%	3.948.980.000	100%	16.518.025.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki	94%	95%		97%		98%		99%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				akta kelahiran																
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Bagun	100%	100%	-	100,00%	-	0,00 %	-	100,00	170.640.000	100,00%	170.640.000	100,00%	170.640.000	100,00%	511.920.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Apari	100%	100%	250.000.000	100,00%	275.000.000	0,00 %	300.000.000	100,00	325.000.000	100,00%	325.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	1.825.000.000	Kecamatan Apari
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat	100%	100%	250.000.000	100,00%	275.000.000	0,00 %	300.000.000	100,00	325.000.000	100,00%	325.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	1.825.000.000	Kecamatan Laham

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Laham																
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Hubung	100%	100%	250.000.000	100,00%	275.000.000	0,00%	300.000.000	100,00	325.000.000	100,00%	325.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	1.825.000.000	Kecamatan Long hubung
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Pahangai	100%	100%	250.000.000	100,00%	275.000.000	0,00%	300.000.000	100,00	325.000.000	100,00%	325.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	1.825.000.000	Kecamatan Long Pahangai
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah				**Predikat SAKIP**	**CC (50,09)**	**CC (50,57)**	**340.399.782.705**	**CC (50,98)**	**397.386.334.421**	**CC (51,87)**	**508.614.958.495**	**CC (52,78)**	**584.803.600.856**	**CC (53,70)**	**646.572.333.498**	**CC (54,63)**	**709.709.403.579**	**CC (54,63)**	**3.187.486.413.554**	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	B	BB	17.324.569.300	BB	17.359.336.100	BB	18.967.670.700	BB	16.962.451.000	BB	17.967.670.700	A	15.967.670.700	A	104.549.368.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	BB	2.627.961.699	BB	6.143.600.893	BB	10.981.707.000	BB	4.940.235.300	BB	11.241.864.400	A	11.473.725.900	A	47.409.095.192	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	B	BB	13.841.296.732	BB	15.526.881.827	BB	20.720.358.900	BB	23.680.554.500	BB	23.834.554.500	A	23.834.554.500	A	121.438.200.959	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Inspektorat	B	BB	5.744.578.550	BB	6.837.171.981	BB	7.399.846.660	BB	10.211.253.361	BB	12.140.128.273	A	13.273.916.926	A	*55.606.895.751*	*Inspektorat*
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	7.043.932.700	BB	8.951.013.200	BB	8.651.119.500	BB	8.865.471.000	BB	9.000.000.000	A	9.500.000.000	A	52.011.536.400	Satuan Polisi Pamong Praja
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah	B	BB	4.984.938.576	BB	5.229.060.099	BB	7.519.712.800	BB	8.494.428.500	BB	10.329.099.200	A	8.472.120.000	A	45.029.359.175	Badan Pendapatan Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	na		-	C	*3.310.992.600*	CC	*7.392.432.600*	CC	*17.934.838.800*	CC	*16.685.795.100*	B	*17.245.795.100*	B	62.569.854.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	B	BB	*28.907.561.050*	BB	*27.893.778.658*	BB	*29.340.876.024*	BB	*46.590.558.372*	BB	*36.959.045.972*	A	*40.220.000.000*	A	209.911.820.076	Sekretariat DPRD

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	BB	9.031.273.000	BB	15.764.625.600	BB	9.016.434.200	BB	9.894.391.100	BB	9.134.070.100	A	9.820.682.600	A	62.661.476.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	B	BB	8.340.246.500	BB	10.175.713.400	BB	61.514.606.000	BB	69.912.660.900	BB	70.611.932.200	A	72.188.932.200	A	292.744.091.200	Dinas Perhubungan
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	B	BB	5.791.600.000	BB	6.435.111.100	BB	7.150.123.500	BB	7.865.135.800	BB	8.651.649.400	A	9.516.814.400	A	45.410.434.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	B	BB	43.792.405.500	BB	48.658.228.400	BB	*54.064.698.200*	BB	59.471.168.000	BB	65.418.284.800	A	71.960.113.300	A	343.364.898.200	Sekretariat Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	B	BB	9.642.161.200	BB	12.395.941.077	BB	*11.914.741.100*	BB	12.665.827.600	BB	13.932.410.400	A	15.325.651.400	A	75.876.732.777	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Negara	na		-	C	4.405.408.041	CC	*5.170.860.961*	CC	*5.579.969.548*	CC	6.430.000.000	B	6.692.500.001	B	28.278.738.551	Badan Pengelola Perbatasan Negara

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Kesbangpol	na	CC	7.007.336.300	CC	7.785.929.200	CC	*8.651.032.500*	CC	9.516.135.700	C	10.467.749.300	C	11.514.524.300	C	54.942.707.300	Badan Kesbangpol
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	BB	5.915.819.200	BB	6.573.132.400	BB	*7.303.480.500*	BB	8.033.828.500	BB	8.837.211.400	A	9.720.932.500	A	46.384.404.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	BB	19.328.909.368	BB	20.197.223.660	BB	*32.948.964.600*	BB	40.492.599.900	BB	69.409.706.500	A	93.292.491.100	A	275.669.895.128	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	B	BB	6.304.472.600	BB	7.004.969.500	BB	*7.783.299.500*	BB	8.561.629.400	BB	9.417.792.400	A	10.359.571.600	A	49.431.735.000	Dinas Lingkungan Hidup
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	B	BB	4.682.830.705	BB	7.274.903.977	BB	*8.002.394.400*	BB	*8.802.633.800*	BB	*9.682.897.200*	A	*10.651.186.900*	A	49.096.846.982	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	BB	52.599.131.625	BB	*62.806.710.508*	BB	*85.164.060.450*	BB	97.973.452.475	BB	107.728.471.653	A	118.614.835.252	A	524.886.661.962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	A	4.978.150.000	A	29.868.900.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	BB	62.153.059.400	BB	*69.058.954.900*	BB	*68.845.613.600*	BB	75.730.175.000	BB	83.303.192.500	A	91.633.511.700	A	450.724.507.100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	BB	685.269.900	BB	761.411.000	BB	*846.012.200*	BB	930.613.400	BB	1.023.674.800	A	1.126.042.200	A	5.373.023.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Bagun	na	CC	3.278.787.600	CC	3.643.097.300	CC	*4.047.885.900*	CC	4.452.674.500	C	4.897.941.900	C	5.387.736.100	C	25.708.123.300	Kecamatan Long Bagun
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Hubung	na	CC	3.947.299.500	CC	4.385.888.300	CC	*4.873.209.200*	CC	5.360.530.100	C	5.896.583.100	C	6.486.241.400	C	30.949.751.600	Kecamatan Long Hubung
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Laham	na	CC	4.128.710.900	CC	4.587.456.500	CC	*5.097.173.900*	CC	5.606.891.300	C	6.167.580.400	C	6.784.338.500	C	32.372.151.500	Kecamatan Laham
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Pahangai	na	CC	4.535.760.800	CC	5.039.734.200	CC	*5.599.704.700*	CC	6.159.675.200	C	6.775.642.700	C	7.453.207.000	C	35.563.724.600	Kecamatan Long Pahangai

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Apari	na	CC	3.781.720.000	CC	4.201.910.000	CC	*4.668.788.900*	CC	5.135.667.800	C	5.649.234.600	C	6.214.158.000	C	29.651.479.300	Kecamatan Long Apari
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah				**Opini BPK (WTP)**	**WTP**	**WTP**	**41.763.442.225**	**WTP**	**41.070.852.376**	**WTP**	**78.175.566.050**	**WTP**	**88.210.384.500**	**WTP**	**93.497.261.500**	**WTP**	**100.111.998.660**	**WTP**	**434.731.317.099**	
5	01	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	11.325.000.000	95%	4.917.479.400	96%	5.816.293.800	96%	7.221.438.000	96%	7.943.581.800	97%	8.737.939.900	97%	45.961.732.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%		95%		96%		96%		96%		97%		97%		
5	01	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	100%	100%	7.200.000.000	95%	6.652.318.000	96% %	7.071.867.500	96% %	8.642.741.500	96% %	8.257.259.400	97%	8.200.000.100	97%	37.766.927.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%		95%		96% %		96% %		96% %		97%		97%		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%		95%		96% %		96% %		96% %		97%		97%		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan	0%	0%		100%	265.585.312	100%	100.000.000	100%	296.208.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	1.350.864.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	181%	379%	3.860.554.170	64%	3.599.293.064	100%	2.182.992.250	100%	4.315.060.400	100%	3.895.875.000	100%	4.295.875.000	100%	22.149.649.884	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	##########	100%	13.189.196.100	100%	14.654.662.300	100%	33.273.791.800	100%	36.601.171.000	100%	40.261.288.100	100%	44.287.417.000	100%	182.267.526.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase SILPA terhadap APBD	0	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	60%	62%	3.832.087.400	64%	8.862.629.000	66%	26.496.956.000	68%	26.996.956.000	69%	27.996.956.000	70%	28.996.956.000	70%	123.182.540.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	61%	71%	1.738.825.355	75%	1.433.704.461	79%	2.314.452.000	82%	2.807.932.400	86%	3.287.648.560	89%	3.697.264.967	89%	15.279.827.743	Inspektorat
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	42%	54%		58%		59%		59%		59%		60%		60%		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pemeriksaan Inspektorat																
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80%	82%		83%		84%		84%		84%		85%		85%		
				Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	617.779.200	Level 2	685.180.839	Level 3	919.212.700	Level 3	1.328.877.200	Level 3	1.594.652.640	Level 3	1.626.545.693	Level 3	6.772.248.272	Inspektorat
				Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	31%	33%		43.1%		50%		51%		52%		53%		53%		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik				**Jumlah Desa Maju**	**6**	**7**	**249.585.000.000**	**8**	**257.260.000.000**	**10**	**265.737.300.000**	**12**	**275.074.737.000**	**15**	**284.620.328.000**	**20**	**294.268.669.600**	**20**	**1.626.546.034.600**	
				Jumlah Desa Tertinggal	**15**	**14**		**8**		**7**		**6**		**4**		**2**		**2**		
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	76%	237.000.000.000	78%	244.110.000.000	80%	251.433.300.000	82%	258.976.299.000	84%	266.745.588.000	86%	274.747.955.600	86%	1.533.013.142.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	9	5	650.000.000	5	715.000.000	5	786.500.000	5	865.150.000	5	951.665.000	5	1.046.831.500	5	5.015.146.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	100%	2.750.000.000	100%	2.495.000.000	100%	2.709.500.000	100%	2.945.450.000	100%	3.204.995.000	100%	3.490.494.500	100%	17.595.439.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6	7.925.000.000	28	8.680.000.000	34	9.548.000.000	40	10.502.800.000	46	11.553.080.000	52	12.708.388.000	52	60.917.268.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6		42		50		58		66		74		82		
				Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%		21,6%		24,6%		27,6%		30,6%		33,6%		33,6%		
				Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%		6,0%		8,0%		10,0%		12,0%		14,0%		14,0%		
				Persentase PKK aktif	51,2%	60,0%		63,0%		66,0%		69,0%		72,0%		75,0%		75,0%		
				Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%		52,0%		54,0%		56,0%		58,0%		60,0%		60,0%		
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%		28,0%		30,0%		32,0%		34,0%		36,0%		36,0%		

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0%	20%	-	40,00%	-	0,00 %	-	80%	145.310.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	545.310.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Apari
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Laham
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyaraka	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long hubung

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				t di wilayah kecamatan																
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long Pahangai
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	3	-	3	-	4	-	5	379.728.000	10	705.000.000	11	815.000.000	11	1.899.728.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Apari
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Laham
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long hubung

Kode			Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				pemerintahan desa																
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long Pahangai
TOTAL ANGGARAN							**961.992.557.024**		**1.099.776.528.357**		**1.456.077.439.003**		**1.549.876.007.611**		**1.687.834.051.282**		**1.820.200.044.528**		**8.575.756.627.805**	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan membahas seluruh program yang dirumuskan selama periode 2021-2026 beserta indikator kinerja, kerangka pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang diperinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Selengkapnya mengenai kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dapat di lihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, Kabupaten Mahakam Ulu

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Laporan		APBD	Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEUANGAN (BELANJA DAERAH)		1.217.225.250.008	1.169.402.004.412	1.775.489.020.904	1.547.500.000.000	1.602.200.000.000	1.662.940.000.000
	BELANJA OPERASI	**643.137.526.899**	**758.757.952.883**	**985.830.291.249**	**878.300.000.000**	**900.700.000.000**	**926.060.000.000**
	- Belanja Pegawai	167.647.932.451	214.057.911.252	256.437.969.432	262.000.000.000	267.000.000.000	273.000.000.000
	- Belanja Barang dan Jasa	457.636.094.064	516.170.155.969	694.467.075.809	582.000.000.000	595.000.000.000	609.000.000.000
	- Belanja Subsidi	-	-	1.595.908.200	1.600.000.000	1.700.000.000	1.760.000.000
	- Belanja Hibah	13.742.498.384	25.982.887.328	25.976.837.808	26.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000
	- Belanja Bantuan Sosial	4.111.002.000	2.546.998.334	7.352.500.000	6.700.000.000	7.000.000.000	7.300.000.000
	- Belanja Modal	**400.824.958.242**	**258.789.638.563**	**640.442.992.380**	**522.000.000.000**	**556.000.000.000**	**593.000.000.000**
	- Belanja Tidak Terduga	**23.196.004.157**	**3.458.466.265**	**6.193.574.675**	**6.200.000.000**	**6.500.000.000**	**6.880.000.000**
	BELANJA TRANSFER	**150.066.760.710**	**148.395.946.701**	**143.022.162.600**	**141.000.000.000**	**139.000.000.000**	**137.000.000.000**

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**340.399.782.705**		**397.386.334.421**		**508.614.958.495**		**585.803.600.856**		**647.572.333.498**		**710.709.403.579**		**3.190.486.413.554**	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	B	BB	17.324.569.300	BB	17.359.336.100	BB	18.967.670.700	BB	16.962.451.000	BB	17.967.670.700	A	15.967.670.700	A	104.549.368.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	BB	2.627.961.699	BB	6.143.600.893	BB	10.981.707.000	BB	4.940.235.300	BB	11.241.864.400	A	11.473.725.900	A	47.409.095.192	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	B	BB	13.841.296.732	BB	15.526.881.827	BB	20.720.358.900	BB	23.680.554.500	BB	23.834.554.500	A	23.834.554.500	A	121.438.200.959	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Inspektorat	B	BB	5.744.578.550	BB	6.837.171.981	BB	7.399.846.660	BB	10.211.253.361	BB	12.140.128.273	A	13.273.916.926	A	55.606.895.751	Inspektorat
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	7.043.932.700	BB	8.951.013.200	BB	8.651.119.500	BB	8.865.471.000	BB	9.000.000.000	A	9.500.000.000	A	52.011.536.400	Satuan Polisi Pamong Praja
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	B	BB	4.984.938.576	BB	5.229.060.099	BB	7.519.712.800	BB	8.494.428.500	BB	10.329.099.200	A	8.472.120.000	A	45.029.359.175	Badan Pendapatan Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	na		-	C	3.310.992.600	CC	7.392.432.600	CC	17.934.838.800	CC	16.685.795.100	B	17.245.795.100	B	62.569.854.200	Badan Penanggulangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			PEMERINTAHAN DAERAH																	Bencana Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	B	BB	28.907.561.050	BB	27.893.778.658	BB	29.340.876.024	BB	46.590.558.372	BB	36.959.045.972	A	40.220.000.000	A	209.911.820.076	Sekretariat DPRD
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	BB	9.031.273.000	BB	15.764.625.600	BB	9.016.434.200	BB	9.894.391.100	BB	9.134.070.100	A	9.820.682.600	A	62.661.476.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	B	BB	8.340.246.500	BB	10.175.713.400	BB	61.514.606.000	BB	69.912.660.900	BB	70.611.932.200	A	72.188.932.200	A	292.744.091.200	Dinas Perhubungan
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	B	BB	5.791.600.000	BB	6.435.111.100	BB	7.150.123.500	BB	7.865.135.800	BB	8.651.649.400	A	9.516.814.400	A	45.410.434.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	B	BB	43.792.405.500	BB	48.658.228.400	BB	54.064.698.200	BB	59.471.168.000	BB	65.418.284.800	A	71.960.113.300	A	343.364.898.200	Sekretariat Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	B	BB	9.642.161.200	BB	12.395.941.077	BB	11.914.741.100	BB	12.665.827.600	BB	13.932.410.400	A	15.325.651.400	A	75.876.732.777	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Badan Pengelola Perbatasan Negara	na		-	C	4.405.408.041	CC	5.170.860.961	CC	5.579.969.548	CC	6.430.000.000	B	6.692.500.001	B	28.278.738.551	Badan Pengelola Perbatasan Negara
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	na	CC	7.007.336.300	CC	7.785.929.200	CC	8.651.032.500	CC	9.516.135.700	C	10.467.749.300	C	11.514.524.300	C	54.942.707.300	Badan Kesbangpol
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	BB	5.915.819.200	BB	6.573.132.400	BB	7.303.480.500	BB	8.033.828.500	BB	8.837.211.400	A	9.720.932.500	A	46.384.404.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
																				Perlindungan Anak
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	BB	19.328.909.368	BB	20.197.223.660	BB	32.948.964.600	BB	40.492.599.900	BB	69.409.706.500	A	93.292.491.100	A	275.669.895.128	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	B	BB	6.304.472.600	BB	7.004.969.500	BB	7.783.299.500	BB	8.561.629.400	BB	9.417.792.400	A	10.359.571.600	A	49.431.735.000	Dinas Lingkungan Hidup
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	B	BB	4.682.830.705	BB	7.274.903.977	BB	8.002.394.400	BB	8.802.633.800	BB	9.682.897.200	A	10.651.186.900	A	49.096.846.982	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	BB	52.599.131.625	BB	62.806.710.508	BB	85.164.060.450	BB	97.973.452.475	BB	107.728.471.653	A	118.614.835.252	A	524.886.661.962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	A	4.978.150.000	A	29.868.900.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	BB	62.153.059.400	BB	69.058.954.900	BB	68.845.613.600	BB	76.730.175.000	BB	84.303.192.500	A	92.633.511.700	A	453.724.507.100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	BB	685.269.900	BB	761.411.000	BB	846.012.200	BB	930.613.400	BB	1.023.674.800	A	1.126.042.200	A	5.373.023.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Kecamatan Long Bagun	na	CC	3.278.787.600	CC	3.643.097.300	CC	4.047.885.900	CC	4.452.674.500	C	4.897.941.900	C	5.387.736.100	C	25.708.123.300	Kecamatan Long Bagun
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Kecamatan Long Hubung	na	CC	3.947.299.500	CC	4.385.888.300	CC	4.873.209.200	CC	5.360.530.100	C	5.896.583.100	C	6.486.241.400	C	30.949.751.600	Kecamatan Long Hubung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Kecamatan Laham	na	CC	4.128.710.900	CC	4.587.456.500	CC	5.097.173.900	CC	5.606.891.300	C	6.167.580.400	C	6.784.338.500	C	32.372.151.500	Kecamatan Laham
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Kecamatan Long Pahangai	na	CC	4.535.760.800	CC	5.039.734.200	CC	5.599.704.700	CC	6.159.675.200	C	6.775.642.700	C	7.453.207.000	C	35.563.724.600	Kecamatan Long Pahangai
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Kecamatan Long Apari	na	CC	3.781.720.000	CC	4.201.910.000	CC	4.668.788.900	CC	5.135.667.800	C	5.649.234.600	C	6.214.158.000	C	29.651.479.300	Kecamatan Long Apari
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**472.069.438.980**		**435.057.893.144**		**629.834.859.654**		**566.591.336.807**		**584.711.981.863**		**605.291.515.075**		**3.287.425.970.923**	
1	**01**		**URUSAN BIDANG PENDIDIKAN**				**76.396.591.960**		**70.542.958.224**		**102.091.910.300**		**144.723.349.740**		**160.864.252.549**		**178.373.845.077**		**732.992.907.851**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	01	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	100,42	109,7	75.924.515.160	73,02	69.862.803.224	80,35	101.169.169.700	80,73	139.249.020.740	90,27	154.420.057.749	90,47	170.757.811.317	90,47	711.383.377.891	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
				APM SD/MI	89,29	90,15		74,91		80,73		90,15		90,36		90,78		90,78		
				APK SD/MI	102,16	100,68		82,16		100,60		100,70		100,80		100,90		100,90		
				APM SMP/MTs	69,77	90,15		63,55		71,30		71,75		72,65		73,00		73,00		
				APK SMP/MTs	97,40	98,03		82,16		90,00		93,55		98,33		100,00		100,00		
				APS 5-6 Tahun Paud	80,75	80,75		80,74		80,50		80,60		80,80		90,00		90,00		
				APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	98,03	98,03		99,35		99,40		90,45		90,57		90,67		90,67		
				APS 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	3,51	3,51		0,52		2,53		3,85		4,55		5,67		5,67		
1	01	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan	na							100%	3.000.000.000	100%	3.600.000.000	100%	4.320.000.000	100%	10.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	01	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	68,00%	70,00%	397.276.000	80,00%	490.155.000	84,00%	922.740.600	86,00%	1.489.329.000	92,00%	1.787.194.800	93,00%	2.144.633.760	93,00%	7.231.329.160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	100,00%	100,00%	74.800.800					100,00 %	260.000.000	100,00 %	332.000.000	100,00 %	426.400.000	100,00 %	1.093.200.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	0%			100%	190.000.000			100%	725.000.000	100%	725.000.000	100%	725.000.000	100%	2.365.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				32.420.504.100		55.133.782.500		59.832.660.800		10.475.594.100		10.798.904.400		11.165.446.800		179.826.892.700	
1	02	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,30	0,27	31.203.951.200	0,27	54.158.475.300	0.15	58.421.613.000	0,10	2.840.556.800	0,5	3.032.130.800	0	3.248.676.400	0	152.905.403.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9		17		7		6		5		4		4		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	2		0		2		1		1		0		0		Keluarga Berencana
				Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita	1 : 50 balita		1 : 50 balita		1 : 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,17	1,20		1,23		1,23		1,23		1,23		1,23		1,23		
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,07		0,07		0.07		0,07		0,07		0,07		0,07		
				Prevalensi stunting	27%	11%		7%		18%		14%		12%		10%		10%		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	61 Org/ rujukan	100		1		70		50		40		40		40		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	88%	44.44%		100%		91%		92%		93%		94%		94%		
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0.00039		0.00063		0.56		0,53		0,50		0,47		0,47		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus	35 Kasus		143 Kasus		41 Kasus		41 Kasus		41 Kasus		42 Kasus		42 Kasus		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Angka kejadian Malaria	14	14		11		0		0		0		0		0		
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	0.14		0.05		2		2		1		1		1		
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97 persen	98		99		100%		97,00		98,00		98,00		98,00		
1	0 2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 71	1 : 70	403.097.800	1 : 70	208.285.200	1 : 70	676.766.000	1 : 80	20.885.200	1 : 83	20.885.200	1 : 86	20.885.200	1 : 86	1.350.804.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 59	1 : 90		1 : 90		1 : 90		1 : 66		1 : 68		1 : 70		1 : 70		
				Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%	100%		16.66%		90%		90%		90%		90%		90%		
1	0 2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	100 Persen	243.596.500	100 Persen		-		100 persen	6.752.576.600	100 persen	6.752.576.600	100 persen	6.752.576.600	100 persen	20.501.326.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen	100 Persen		100 Persen		-		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		
				Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	100 Persen		0		-		50 Persen		50 Persen		50 Persen		50 Persen		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	02	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	100 Persen	569.858.600	100 Persen	767.022.000	75%	734.281.800	76 persen	861.575.500	77 persen	993.311.800	78 persen	1.143.308.600	78 persen	5.069.358.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3,2 persen (630 RT)	600 RT		600 RT		800 RT		850		900		950		950		
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	21 KLB	1573		260		23 KLB		24KLB		25KLB		26 KLB		26 KLB		
1	02	7	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Presentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama	na	-	-	-	-	-	-	20%	994.194.880	40%	1.093.614.368	60%	1.202.975.805	60%	3.290.785.053	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**347.294.613.020**		**292.977.127.120**		**435.554.575.254**		**372.278.607.022**		**372.278.607.022**		**372.278.607.022**		**2.192.662.136.560**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	03	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,50%	5%	4.937.814.000	10%		10%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	88%	24.937.814.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2%	8,00%	1.952.130.200	10,00%	7.218.168.500	20,00%	12.314.340.900	25,00%	25.000.000.000	30,00%	25.000.000.000	33,00%	25.000.000.000	33,00%	96.484.639.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Akses Air Limbah Layak	tda					10,00%	36.020.000	15,00%	8.000.000.000	20,00%	8.000.000.000	23,00%	8.000.000.000	23,00%	24.036.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	0 3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	tda					15%	500.000.000	15%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	30%	2.500.000.000	30%	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	0 3	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	na	40%	15.655.487.700	50%	23.936.742.500	60%	102.456.221.200	70%	50.000.000.000	80%	50.000.000.000	90%	50.000.000.000	90%	292.048.451.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	0 3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	tda	0,23	173.130.849.600	0,38	67.835.089.800	0,53	49.964.779.000	0,68	39.000.000.000	0,83	39.000.000.000	0,98	39.000.000.000	0,98	407.930.718.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	0 3	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkunganny a	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	na	40%	23.110.20 8.100	50%	35.814.06 0.600	60%	52.859.090. 200	70%	54.500.000. 000	80%	54.500.000. 000	90%	54.500.000. 000	90%	275.283.35 8.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	0 3	1 0	Program Penyelenggar aan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	124.271.8 20.620	5,00%	153.980.6 91.320	5%	195.982.31 9.954	5%	171.850.07 8.022	5%	171.850.07 8.022	5%	171.850.07 8.022	30%	989.785.06 5.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	0 3	1 1	Program Pengembang an Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	tda	5%	330.411.2 00	5%	131.979.2 00	5%	283.905.00 0	5%	500.000.00 0	5%	500.000.00 0	5%	500.000.00 0	25%	2.246.295.4 00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	tda	10%	3.905.891.600	10%	4.060.395.200	10%	16.157.899.000	10%	15.928.529.000	10%	15.928.529.000	10%	15.928.529.000	60%	71.909.772.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**5.020.960.300**		**317.278.500**		**7.645.169.600**		**13.875.000.000**		**13.875.000.000**		**13.875.000.000**		**54.608.408.400**	
1	04	2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	15,43%					30,43%	500.000.000	35,43%	5.000.000.000	40,43%	5.000.000.000	50,43%	5.000.000.000	50,43%	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	04	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	5.020.960.300	20,00%	317.278.500	25,00%	5.779.735.600	30,00%	5.650.000.000	40,00%	5.650.000.000	50,00%	5.650.000.000	50,00%	28.067.974.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%					30,43%	1.275.000.000	35,43%	3.000.000.000	45,43%	3.000.000.000	55,43%	3.000.000.000	55,43%	10.275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	15,43%					47,43%	90.434.000	59,43%	225.000.000	74,43%	225.000.000	89,43%	225.000.000	89,43%	765.434.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**1.354.652.600**		**7.421.086.800**		**13.972.299.700**		**14.500.541.945**		**16.156.973.892**		**18.860.372.176**		**64.062.288.412**	
1	05	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	98%	557.621.200	98%	732.958.400	100%	6.350.000.000	100%	8.203.638.700	100%	9.900.000.000	75%	11.687.352.200	75%	29.227.931.800	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penegakan PERDA	75%	0%		82%		75%		75%		80%		75%		75%		
01	05	3	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan kebencanaan	-	-	0	100%	2.542.253.700	100%	3.105.462.300	100%	3.571.281.645	100%	4.106.973.892	100%	4.723.019.976	100%	18.048.991.512	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Kampung Tangguh Bencana	5 %	9%		0%		4%		12%		20%		30%		30%		
				Cakupan Penanggulangan Bencana	3 kampung	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	tda	60%		70%		80%		80%		80%		100%		100%		
				Nilai Indeks Ketahan Daerah (IKD)	tda	0,20		0,25		0,30		0,35		0,40		0,45		0,45		
1	05	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	797.031.400	100%	4.145.874.700	100%	4.516.837.400	100%	2.725.621.600	100%	2.150.000.000	100%	2.450.000.000	100%	16.785.365.100	Satuan Polisi Pamong Praja
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**9.582.117.000**		**8.665.660.000**		**10.738.244.000**		**10.738.244.000**		**10.738.244.000**		**10.738.244.000**		**63.273.337.000**	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68.84%	68.84%	1.304.633.000	72%	363.416.000	72%	2.436.000.000	81%	2.436.000.000	91%	2.436.000.000	100%	2.436.000.000	100%	13.484.633.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempua

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
																				n dan Perlindungan Anak
1	0 6	0 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	33.33%	33.33%	1.577.484.000	66,67	1.602.244.000	66,67	1.602.244.000	66,67	1.602.244.000	83,33	1.602.244.000	100	1.602.244.000	100%	9.588.704.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0 6	0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	100%	33.33%	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	83,33	6.400.000.000	100%	6.400.000.000	100%	38.400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0 6	0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.800.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**294.551.514.917**		**302.514.500.341**		**338.128.858.354**		**377.181.596.304**		**437.466.069.273**		**483.285.336.495**		**2.128.380.812.285**	
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**125.000.000**		**1.695.000.000**		**2.325.000.000**		**2.875.000.000**		**3.425.000.000**		**3.800.000.000**		**14.245.000.000**	
2	07	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	0%	0%	-	80%	100.000.000	70%	150.000.000	80%	200.000.000	90%	250.000.000	100%	300.000.000	100%%	1.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	07	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0	-	10%	725.000.000	20%	750.000.000	30%	875.000.000	40%	1.000.000.000	50%	1.025.000.000	50%	4.375.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	07	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0%	0%	125.000.000	65%	550.000.000	70%	700.000.000	75%	850.000.000	80%	1.000.000.000	85%	1.125.000.000	85%	4.350.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	07	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0%	0%	-	70%	320.000.000	75%	725.000.000	80%	950.000.000	85%	1.175.000.000	90%	1.350.000.000	90%	4.520.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**2.400.000.000**		**3.200.000.000**		**4.000.000.000**		**4.800.000.000**		**5.650.000.000**		**6.450.000.000**		**26.500.000.000**	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	75%	1.050.000.000	80%	1.400.000.000	85%	1.750.000.000	90%	2.100.000.000	95%	2.450.000.000	100%	2.800.000.000	100%	11.550.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0%	65%		70%		75%		80%		85%		100%		100%		
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0%	55%		65%		75%		85%		95%		100%		100%		
				Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	0%	70%		75%		80%		85%		90%		100%		100%		
				Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%		
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0%	75%	300.000.000	80%	400.000.000	85%	550.000.000	90%	700.000.000	95%	900.000.000	100%	1.050.000.000	100%	3.900.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan Gender	0%	60%	250.000.000	70%	300.000.000	80%	350.000.000	90%	400.000.000	96%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	2.250.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	0%	50%	300.000.000	60%	400.000.000	70%	500.000.000	80%	600.000.000	90%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	3.300.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			GENDER DAN ANAK																	Perlindungan Anak
2	0 8	0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	0%	40%	350.000.000	60%	450.000.000	70%	500.000.000	76%	550.000.000	80%	600.000.000	90%	650.000.000	100%	3.100.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0 8	0 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	0%	50%	150.000.000	60%	250.000.000	70%	350.000.000	80%	450.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000	100%	2.400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**0 9**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**955.777.600**		**1.192.411.900**		**1.147.042.200**		**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**10.795.231.700**	
2	0 9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	105%	106%	0	107%	0	108%	0	109%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																	
2	09	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	747.587.500	92,8	1.192.411.900	94	951.879.200	95,2	500.000.000	96,2	500.000.000	97,98	500.000.000	98,98	4.391.878.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14%	13.50%	119.437.500	42%	0	35%	75.216.000	25%	800.000.000	15%	800.000.000	10%	800.000.000	10%	2.594.653.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	85%	88.752.600	85%	0	85%	119.947.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	808.699.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				-		-		-		**1.220.000.000**		**1.270.000.000**		**1.320.000.000**		**3.810.000.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara									1.220.000.000		1.270.000.000		1.320.000.000		3.810.000.000	Dinas Perhubungan
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**3.825.187.900**		**5.000.000.000**		**6.100.000.000**		**6.100.000.000**		**6.100.000.000**		**6.100.000.000**		**33.225.187.900**	
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	800.000.000	100%	1.500.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	4.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	na	na	750.000.000	na	750.000.000	66,88	750.000.000	71,88	750.000.000	79,38	750.000.000	86,88	750.000.000	86,88	4.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	50%	50%	110.187.900	60%	500.000.000	70%	500.000.000,0	75%	500.000.000,0	80%	500.000.000,0	85%	500.000.000,0	85%	2.610.187.900	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	50%	50%	750.000.000	60%	750.000.000	70%	750.000.000	75%	750.000.000	80%	750.000.000	85%	750.000.000	85%	4.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Cakupan MHA yang berdayakan	100%	0		0		100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan pendidikan dan pelatihan masyarakat	100%	0		0		100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	na	0		0		2 Kel/Org	250.000.000	2 Kel/Org	250.000.000	2 Kel/Org	250.000.000	2 Kel/Org	250.000.000	8 Kel/Org	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	na	0		0		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	20%	1.415.000.000	30%	1.500.000.000	40%	2.500.000.000	50%	2.500.000.000	60%	2.500.000.000	75%	2.500.000.000	75%	12.915.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL**				**2.238.760.000**		**2.238.760.000**		**2.534.760.000**		**2.368.760.000**		**2.720.760.000**		**2.720.760.000**		**14.822.560.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			KEPENDUDUKAN DAN																	
2	1 2	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99,00%	99,20%	1.300.400.000	99,35%	1.300.400.000	99,50%	1.422.400.000	99,65%	1.300.400.000		1.551.400.000	100,00 %	1.551.400.000	100,00 %	8.426.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	62%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
2	1 2	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	100%	576.494.000	100%	576.494.000	100%	676.494.000	100%	676.494.000		688.494.000	100%	688.494.000	100%	3.882.964.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	94%	95%		97%		98%		99%		100%		100%		100%		
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan informasi dan inovasi kependudukan			261.866.000		261.866.000		310.866.000		261.866.000		350.866.000		350.866.000		1.798.196.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	715.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**248.325.000.000**		**256.000.000.000**		**264.477.300.000**		**273.289.699.000**		**282.455.328.000**		**291.993.669.600**		**1.616.540.996.600**	
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	76%	237.000.000.000	78%	244.110.000.000	80%	251.433.300.000	82%	258.976.299.000	84%	266.745.588.000	86%	274.747.955.600	86%	1.533.013.142.600	Dinas Pemberdayaan Masyarak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
																				at dan Kampung
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah kerja sama antar desa	9	5	650.000.000	5	715.000.000	5	786.500.000	5	865.150.000	5	951.665.000	5	1.046.831.500	5	5.015.146.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	100%	2.750.000.000	100%	2.495.000.000	100%	2.709.500.000	100%	2.945.450.000	100%	3.204.995.000	100%	3.490.494.500	100%	17.595.439.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6	7.925.000.000	28	8.680.000.000	34	9.548.000.000	40	10.502.800.000	46	11.553.080.000	52	12.708.388.000	52	60.917.268.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6		42		50		58		66		74		82		
				Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%		21,6%		24,6%		27,6%		30,6%		33,6%		33,6%		
				Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%		6,0%		8,0%		10,0%		12,0%		14,0%		14,0%		
				Persentase PKK aktif	51,2%	60,0%		63,0%		66,0%		69,0%		72,0%		75,0%		75,0%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%		52,0%		54,0%		56,0%		58,0%		60,0%		60,0%		
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%		28,0%		30,0%		32,0%		34,0%		36,0%		36,0%		
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.880.406.500**		**2.611.671.100**		**2.380.759.600**		**785.887.500**		**820.253.500**		**858.056.800**		**11.337.035.000**	
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2.22%	2.22%	345.575.000	2.22%	138.546.600	2.22%	385.564.500	2.22%	274.747.500	2.22%	274.747.500	2.22%	274.747.500	2.22%	1.693.928.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		3	Program Pembinaan	Ratio Akseptor KB	73%	80%		81%		75%		76%		77%		78%		78%		Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	14		Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%	91%	2.945.488.000	91%	2.102.683.100	91%	950.454.000	91%	167.476.000	91%	167.476.000	91%	167.476.000	91%	6.501.053.100	, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK	600 KK	589.343.500	600 KK	370.441.400	350 KK	1.044.741.100	400 KK	343.664.000	450 KK	378.030.000	500 KK	415.833.300	500 KK	3.142.053.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**14.121.448.300**		**13.073.919.999**		**19.886.220.300**		**28.542.950.900**		**37.256.541.100**		**42.082.849.400**		**51.296.116.600**	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	0	8.728.448.300	0	11.064.121.900	0	15.164.410.100	0	18.992.950.900	0	26.706.541.100	5%	30.532.849.400	5%	39.746.116.600	Dinas Perhubungan
				Rasio Ijin Trayek	0	0		0		0		0		0		5%		5%		
				Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0	0		0		0		0		0		5%		5%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Pemasangan Rambu-rambu	10	0		0		20		25		30		35		35		
				Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0	0		0		0		0		0		10%		10%		
				Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0	0		0		0		0		0		10%		10%		
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	15593org/ 87,9 ton	19637 Org/1215 ton	5.393.000.000	20.379Org /43.393 ton	2.009.798.099	15200 Org/150 ton	4.721.810.200	15500 Org/170 ton	9.550.000.000	15700 Org/200 ton	10.550.000.000	16000 Org/ 220 ton	11.550.000.000	16000 Org/ 220 ton	11.550.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah Arus penumpang pelayaran	773	19637		20379		800		820		850		870		870		
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5054	5500	22.000.000.000	3652	28.000.000.000	5900	33.000.000.000	6000	35.500.000.000	6500	43.500.000.000	7000	8.100.000.000	7000	170.100.000.000	Dinas Perhubungan
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**12.789.452.084**		**10.834.797.228**		**19.551.382.304**		**27.309.784.604**		**53.099.569.208**		**78.579.353.812**		**202.164.339.240**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0 KIM	0 KIM	2.402.081.784	1 KIM	1.013.008.886	1 KIM	1.422.120.000	1 KIM	1.950.000.000	1 KIM	2.380.000.000	1 KIM	2.500.000.000	5 KIM	11.667.210.670	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	10.387.370.300	100%	9.821.788.342	100%	18.129.262.304	100%	25.359.784.604	100%	50.719.569.208	100%	76.079.353.812	100%	190.497.128.570	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				-		**79.250.000**		-		**1.875.000.000**		**1.900.000.000**		**2.000.000.000**		**5.775.000.000**	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan pelayanan perizinan Usaha Smpan pinjam	na							100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	975.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang diawasi	na							100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase KSP/USP Sehat	na		-		-		-	25%	250.000.000	50%	250.000.000	75%	250.000.000	75%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	na		-		-		-	50%	350.000.000	75%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.050.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase perberdayaan dan perlindungan koperasi	na		-		-		-	50%	250.000.000	75%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	na		-		-		-	50%	250.000.000	75%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	na		-		79.250.000		-	25%	250.000.000	50%	250.000.000	75%	250.000.000	75%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**1.861.178.800**		**1.504.284.341**		**5.205.475.700**		**6.626.853.900**		**7.287.778.465**		**8.045.906.363**		**30.531.477.569**	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	36 Proyek	17 Proyek	535.255.700	38 Proyek	463.748.680	55 Proyek	1.686.457.200	63 Proyek	2.290.105.400	73 Proyek	2.519.115.940	84 Proyek	2.771.027.534	84 Proyek	10.265.710.454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	na	0%	-	0%	-	55 investor	534.235.000	63 investor	929.965.000	73 investor	1.022.961.500	84 investor	1.125.257.650	84 investor	3.612.419.150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupakan Pelyanan Penanman Modal	100%	100%	909.173.800	100%	584.015.546	100%	1.970.000.000	100%	2.167.000.000	100%	2.383.700.000	100%	2.622.070.000	100%	10.635.959.346	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
																				Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase investor yang ber investasi	43%	0%	130.939.400	0%	330.183.715	55%	614.783.500	60%	814.783.500	65%	937.001.025	70%	1.077.551.179	70%	3.905.242.319	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	100%	100%	285.809.900	100%	126.336.400	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	2.112.146.300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**150.000.000**		**2.000.000.000**		**3.066.136.850**		**6.175.545.000**		**14.200.000.000**		**19.848.290.000**		**44.439.971.850**	
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif	0%	0%	150.000.000	0%	1.000.000.000	13%	1.782.765.400	13%	700.000.000	50%	2.980.000.000	63%	2.410.000.000	63%	9.022.765.400	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Persentase wirausaha muda	0%	0%		0%		0%		0%		22,73%		25,45%		25,45%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			KEPEMUDAAN	Presentasi Pemuda yang dibina	0%	0,06%		0,24%		0,24%		0,20%				0,60%		0,60%		
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	17	0	-	14	1.000.000.000	32	505.730.000	33	4.475.545.000	36	9.500.000.000	37	13.328.290.000	37	27.809.565.000	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0		0		12,50%		0,00%		62,50%		81,08%		81,08%		
				Cakupan pembinaan atlet muda	0	0		0				20,00%		30,00%		40,00%		40,00%		
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentasi Organisasi kepramukaan yang aktif		0	-	0	-	16,67%	777.641.450	25,00%	1.000.000.000	33,33%	1.720.000.000	41,67%	4.110.000.000	41,67%	7.607.641.450	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**351.579.200**		**345.447.945**		**812.000.000**		**1.731.286.000**		**4.100.000.000**		**2.250.000.000**		**9.590.313.145**	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	0%	0%	351.579.200	0%	345.447.945	25%	812.000.000	30%	1.731.286.000	40%	4.100.000.000	50%	2.250.000.000	50%	9.590.313.145	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				perencanaan pembangunan daerah																Persandian
2	**2 1**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**534.612.233**		**333.866.628**		**950.000.000**		**1.248.000.000**		**1.850.000.000**		**1.800.000.000**		**6.716.478.861**	
2	2 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0%	0%	534.612.233	0%	333.866.628	20%	950.000.000	30%	1.248.000.000	45%	1.850.000.000	50%	1.800.000.000	50%	6.716.478.861	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
2	**2 2**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2.443.112.300**		**1.255.091.200**		**4.392.781.400**		**8.432.829.400**		**11.520.839.000**		**11.626.450.520**		**39.671.103.820**	
2	2 2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya lokal yang dikembangkan	100%	100%	1.755.120.100	100%	810.142.000	100%	2.617.698.400	100%	3.757.746.400	100%	3.845.756.000	100%	3.951.367.520	100%	16.737.830.420	Dinas Pendidikan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
																				Kebudayaan
2	2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	0%							100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	2.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	2	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah	0%							100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	687.992.200	100%	444.949.200	100%	1.775.083.000	100%	3.775.083.000	100%	3.775.083.000	100%	3.775.083.000	100%	14.233.273.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	0%									100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	6.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**2**	**3**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**				**550.000.000**		**550.000.000**		**650.000.000**		**650.000.000**		**660.000.000**		**660.000.000**		**3.720.000.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			PERPUSTAKAAN																	
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.587 Pengunjung	1.587 Pengunjung	550.000.000	1.600 Pengunjung	450.000.000	1.650 Pengunjung	550.000.000	1.700 Pengunjung	550.000.000	1.750 Pengunjung	560.000.000	1.800 Pengunjung	560.000.000	1.800 Pengunjung	3.220.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5963 Judul	1.200 Judul		1.200 Judul		1.200 Judul		1.200 Judul		1.200 Judul		1.200 Judul		6.000 Judul		
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasioanl dan Naskah kuno yang dilestarikan	0	0	-	15	100.000.000	15	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	30	500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				-		**600.000.000**		**650.000.000**		**650.000.000**		**650.000.000**		**650.000.000**		**3.200.000.000**	
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0%	0%	-	40%	300.000.000	50%	350.000.000	50%	350.000.000	55%	350.000.000	60%	350.000.000	60%	1.700.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0%	0%	-	50%	150.000.000	60%	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	70%	150.000.000	70%	750.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	24	4	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	0%	0%	-	40%	150.000.000	50%	150.000.000	55%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	750.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.824.508.400		16.862.287.400		42.781.109.700		50.297.328.050		56.156.985.843		57.368.318.449		234.290.537.841	
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**686.474.400**		**76.091.900**		**1.191.248.000**		**1.850.000.000**		**1.850.000.000**		**1.900.000.000**		**7.553.814.300**	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	166.532.700	330 Ton	47.253.300	345 Ton	400.775.800	350 Ton	500.000.000	365 Ton	500.000.000	380 Ton	500.000.000	380 Ton	2.114.561.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	519.941.700	150 Ton	28.838.600	165 Ton	790.472.200	180 Ton	1.000.000.000	195 Ton	1.000.000.000	110 Ton	1.000.000.000	110 Ton	4.339.252.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	50%	80%	0	80%	0	85%	0	85%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			DAN PERIKANAN																	dan Pertanian
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	0%	4%	0	20%	0	40%	0	60%	200.000.000	80%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	650.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**3.872.780.400**		**1.871.296.400**		**16.536.969.300**		**19.230.013.950**		**20.842.016.043**		**21.143.318.449**		**83.496.394.541**	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	4	6	2.150.000.000	16	434.366.700	29	13.050.000.000	29	14.150.000.000	29	15.100.000.000	29	14.650.000.000	29	59.534.366.700	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan Mancanegara	5	10	1.172.780.400	10	911.586.100	30	2.000.000.000	50	2.300.000.000	55	2.645.000.000	60	3.041.750.000	215	12.071.116.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700		3000		200		300		350		400		6950		
				Presentase PAD Sektor Pariwisata						2%		3%		3%		4%		12%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif Unggulan	20	25	500.000.000	60	435.443.600	70	808.696.300	85	2.000.000.000	105	2.200.000.000	130	2.420.000.000	130	8.364.139.900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	na	25%	50.000.000	35%	89.900.000	20%	678.273.000	20%	780.013.950	20%	897.016.043	20%	1.031.568.449	20%	3.526.771.441	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**6.065.253.600**		**13.014.899.100**		**22.102.892.400**		**25.567.314.100**		**29.314.969.800**		**29.375.000.000**		**125.440.329.000**	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	1,57	1,81		2,08		2,39		2,63		2,89		3,18		3,18		Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	1,60%	2.093.193.600	1,70%	8.955.057.500	1,80%	9.834.000.000	1,90%	13.613.200.100	2,00%	17.200.000.000	2,10%	17.150.000.000	2,10%	68.845.451.200	dan Pertanian
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%	3,30%		3,40%		3,50%		3,60%		3,70%		3,80%		3,80%		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%		1,40%		1,50%		1,60%		1,70%		1,80%		1,80%		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	2.633	3.000	893.489.100	3.600	379.817.900	4.000	9.834.000.000	4.200	6.914.969.800	4.500	6.914.969.800	4.500	6.925.000.000	23.800	31.862.246.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	2.300 Ha	500 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,50%	80,50%	188.267.200	80,10%	357.756.400	80,80%	254.722.200	81,60%	200.000.000	82,80%	200.000.000	83,50%	200.000.000	83,50%	1.400.745.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90,00%	90,10%	37.714.500	90,20%	60.446.000	90,30%	50.000.000	90.40%	239.144.200	90.50%	350.000.000	90.60%	350.000.000	90.60%	1.087.304.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	10.00%	40%	71.598.000	50%	97.230.000	60%	0	70.00%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	618.828.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	2.780.991.200	5 BPP dan 50 WKPP	3.164.591.300	5 BPP dan 50 WKPP	2.130.170.200	5 BPP dan 50 WKPP	4.450.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.500.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.600.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	21.625.752.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	320 Lembaga	400 Lembaga		450 Lembaga		500 Lembaga		550 Lembaga		600 Lembaga		650 Lembaga		650 Lembaga		
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**200.000.000**		**1.250.000.000**		**1.950.000.000**		**2.400.000.000**		**2.650.000.000**		**3.400.000.000**		**11.850.000.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	1.350.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi perdagangan yang aktif	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	750.000.000	100%	2.150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	20%	20%	200.000.000	20%	200.000.000	40%	500.000.000	60%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pengusaha yang dibina	0 Pengusaha	2 Pengusaha	-	2 Pengusaha	200.000.000	2 Pengusaha	200.000.000	2 Pengusaha	350.000.000	2 Pengusaha	350.000.000	2 Pengusaha	400.000.000	2 Pengusaha	1.500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	na	1 Kecamatan	-	1 Kecamatan	200.000.000	2 Kecamatan	400.000.000	2 Kecamatan	400.000.000	3 Kecamatan	500.000.000	5 Kecamatan	750.000.000	5 Kecamatan	2.250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	-	2 Pelaku Usaha	250.000.000	3 Pelaku Usaha	350.000.000	3 Pelaku Usaha	250.000.000	3 Pelaku Usaha	250.000.000	3 Pelaku Usaha	350.000.000	3 Pelaku Usaha	1.450.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				-		**650.000.000**		**1.000.000.000**		**1.250.000.000**		**1.500.000.000**		**1.550.000.000**		**5.950.000.000**	
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang dikembangkan	na	1 IKM	-	1 IKM	250.000.000	3 IKM	500.000.000	3 IKM	750.000.000	5 IKM	750.000.000	5 IKM	750.000.000	5 IKM	3.000.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	250.000.000	100%	1.300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	Presentasi Izin Usaha Industri yang diverifikasi	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	550.000.000	100%	1.650.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			INDUSTRI NASIONAL																	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				18.100.688.300		28.372.620.410		67.398.267.250		80.873.961.700		88.054.561.700		103.144.561.700		280.807.178.200	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**				**2.720.995.200**		**14.903.562.010**		**48.463.623.050**		**40.322.073.600**		**27.873.885.500**		**31.773.885.500**		**60.920.542.000**	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan urusan keekretariat bidang pemerintahan dan kesra	na	100%	475.146.400	100%	11.597.203.500	100%	42.164.737.550	100%	31.348.188.100	100%	18.000.000.000	100%	21.500.000.000	100%	25.500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	na	63.97%	2.245.848.800	71.09%	3.306.358.510	50%	6.298.885.500	50%	8.973.885.500	60%	9.873.885.500	80%	10.273.885.500	95%	35.420.542.000	Bagian PBJ
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**				**15.379.693.100**		**13.469.058.400**		**18.934.644.200**		**40.551.888.100**		**60.180.676.200**		**71.370.676.200**		**219.886.636.200**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
4	02	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD	100%	100%	15.379.693.100	100%	13.469.058.400	100%	18.934.644.200	100%	40.551.888.100	100%	60.180.676.200	100%	71.370.676.200	100%	219.886.636.200	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				60.148.732.984		71.798.012.225		91.707.752.950		138.210.331.859		145.935.298.355		155.545.252.540		655.247.192.701	
5	**01**		**PERENCANAAN**				**18.525.000.000**		**11.569.797.400**		**12.888.161.300**		**15.864.179.500**		**16.200.841.200**		**16.937.940.000**		**83.728.660.000**	
5	01	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	11.325.000.000	95%	4.917.479.400	96%	5.816.293.800	96%	7.221.438.000	96%	7.943.581.800	97%	8.737.939.900	97%	45.961.732.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%		95%		96%		96%		96%		97%		97%		
5	01	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	100%	100%	7.200.000.000	95%	6.652.318.000	96%%	7.071.867.500	96%%	8.642.741.500	96%%	8.257.259.400	97%	8.200.000.100	97%	37.766.927.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%		95%		96%%		96%%		96%%		97%		97%		dan Pengembangan Daerah
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%		95%		96%%		96%%		96%%		97%		97%		
5	**02**		**KEUANGAN**				**20.881.837.670**		**27.382.169.676**		**62.053.740.050**		**68.209.395.400**		**72.414.119.100**		**77.850.248.000**		**328.950.581.084**	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan	0%	0%		100%	265.585.312	100%	100.000.000	100%	296.208.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	1.350.864.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	181%	379%	3.860.554.170	64%	3.599.293.064	100%	2.182.992.250	100%	4.315.060.400	100%	3.895.875.000	100%	4.295.875.000	100%	22.149.649.884	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAA	Penetapan APBD	1.522.641.755.020	100%	13.189.196.100	100%	14.654.662.300	100%	33.273.791.800	100%	36.601.171.000	100%	40.261.288.100	100%	44.287.417.000	100%	182.267.526.300	Badan Pengelola Keuangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			N KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	0	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		dan Aset Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	60%	62%	3.832.087.400	64%	8.862.629.000	66%	26.496.956.000	68%	26.996.956.000	69%	27.996.956.000	70%	28.996.956.000	70%	123.182.540.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**				**3.965.858.600**		**4.104.602.100**		**8.115.939.000**		**8.015.550.800**		**8.399.323.200**		**7.171.598.000**		**39.772.871.700**	
5	03	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,00%	3.965.858.600	75,00%	4.104.602.100	80,00%	8.115.939.000	80,00%	8.015.550.800	82,50%	8.399.323.200	85,00%	7.171.598.000	85,00%	39.772.871.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**16.776.036.714**		**28.441.831.049**		**749.999.100**		**36.393.308.959**		**40.110.852.155**		**43.920.903.840**		**166.392.931.817**	
5	04	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,00%	10.000.000	78,00%	10.000.000	81,00%	749.999.100	81,00%	1.500.000.000	82,50%	1.728.212.300	84,00%	1.700.000.000	84,00%	5.698.211.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
																				Daya Manusia
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	16.766.036.714	100,00%	28.431.831.049			100,00 %	34.893.308.959	100,00 %	38.382.639.855	100,00 %	42.220.903.840	100,00 %	160.694.720.417	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				-		-		**6.439.562.700**		**6.439.562.700**		**6.439.562.700**		**6.439.562.700**		**25.758.250.800**	
5	05	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20%					20%	6.439.562.700	40%	6.439.562.700	40%	6.439.562.700	60%	6.439.562.700	60%	25.758.250.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na					20%		20%		40%		60%		60%		
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	na					30%		60%		80%		90%		90%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na					10%		50%		60%		80%		80%		
5	**06**		**PENGELOLAAN PERBATASAN**				-		**299.612.000**		**1.460.350.800**		**3.288.334.500**		**2.370.600.000**		**3.225.000.000**		**10.643.897.300**	
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	na		-	21.74%	299.612.000	43.47%	1.460.350.800	65.22%	3.288.334.500	86.95%	2.370.600.000	100%	3.225.000.000	100%	10.643.897.300	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				2.356.604.555		2.118.885.300		3.233.664.700		4.136.809.600		4.882.301.200		5.323.810.660		22.052.076.015	
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**				**2.356.604.555**		**2.118.885.300**		**3.233.664.700**		**4.136.809.600**		**4.882.301.200**		**5.323.810.660**		**22.052.076.015**	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	61%	71%	1.738.825.355	75%	1.433.704.461	79%	2.314.452.000	82%	2.807.932.400	86%	3.287.648.560	89%	3.697.264.967	89%	15.279.827.743	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	42%	54%		58%		59%		59%		59%		60%		60%		
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80%	82%		83%		84%		84%		84%		85%		85%		
				Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	617.779.200	Level 2	685.180.839	Level 3	919.212.700	Level 3	1.328.877.200	Level 3	1.594.652.640	Level 3	1.626.545.693	Level 3	6.772.248.272	Inspektorat
				Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	31%	33%		43.1%		50%		51%		52%		53%		53%		
7			UNSUR KEWILAYAHAN				1.769.600.000		1.747.880.000		1.747.880.000		3.226.528.000		3.706.490.000		3.816.490.000		16.014.868.000	
7	**01**		**KECAMATAN**				**1.769.600.000**		**1.747.880.000**		**1.747.880.000**		**3.226.528.000**		**3.706.490.000**		**3.816.490.000**		**16.014.868.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0%	20%	-	40,00%	-	0,00%	-	80%	145.310.000	100,00 %	200.000.000	100,00 %	200.000.000	100,00 %	545.310.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kamtibmas	100%	100%	-	100,00%	-	0,00%	-	100%	100.410.000	100,00 %	100.410.000	100,00 %	100.410.000	100,00 %	301.230.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	100.000.000	11	100.000.000	11	200.000.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	3	-	3	-	4	-	5	379.728.000	10	705.000.000	11	815.000.000	11	1.899.728.000	Kecamatan Long Bagun

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			PEMERINTAHAN DESA																	
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Apari
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Apari
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000	12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Apari
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Apari

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Apari
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Laham
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Laham
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000	12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Laham

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Laham
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Laham
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Long hubung
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long hubung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000	12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Long hubung
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Long hubung
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long hubung
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Long Pahangai

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long Pahangai
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000	12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Long Pahangai
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Long Pahangai
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long Pahangai
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				1.599.290.000		5.059.400.000		5.589.400.000		6.059.400.000		6.489.400.000		6.889.400.000		31.686.290.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.599.290.000		5.059.400.000		5.589.400.000		6.059.400.000		6.489.400.000		6.889.400.000		31.686.290.000	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan wawasan Kebangsaan	98%	90%	204.332.000	92%	850.000.000	93%	950.000.000	94%	1.050.000.000	95%	1.150.000.000	97%	1.250.000.000	97%	5.454.332.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	92%	82%	877.400.000	86%	1.709.400.000	87%	1.909.400.000	90%	2.059.400.000	92%	2.159.400.000	92%	2.259.400.000	92%	10.974.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase Ormas/LSM yang dibina	89,17%	80%	106.700.000	84,00%	300.000.000	86,00%	350.000.000	90,00%	400.000.000	90,00%	450.000.000	90,00%	500.000.000	90%	2.106.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3		-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			KEMASYARAKATAN																	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi	98%	90%	228.690.000	92%	450.000.000	93%	480.000.000	94%	500.000.000	95%	550.000.000	96%	600.000.000	96%	2.808.690.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	82,82%	83%	182.168.000	85%	1.750.000.000	87%	1.900.000.000	89%	2.050.000.000	90%	2.180.000.000	92%	2.280.000.000	92%	10.342.168.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL							1.201.820.160.841		1.260.917.813.241		1.689.036.751.103		1.812.380.893.176		1.974.975.421.731		2.131.374.088.497		9.846.391.339.518	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik

secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 mengalami perubahan karena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu secara rinci dapat di lihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026

No	Indikator	Realisasi Tahun		RKPD	Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,27	0,91	1,71	2,39	3,23	4,38
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,9	11,55	11,39	10,94	10,50	10,09
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,14	2,44	2,42	2,40	2,36	2,32
4	Indek Pembangunan Manusia	67,95	68,75	69,32	69,90	70,48	71,07
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,65	82,65	83,67	84,94	86,20	87,47
6	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B	B	B
7	Indeks Gini	0,27	0,288	0,274	0,260	0,248	0,236
8	PDRB Per Kapita (Juta Rp) *Atas Harga Berlaku	90,17	94,51	100,42	106,71	113,39	120,48

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Mahakam Ulu 2021 - 2026

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	85,38	90,17	94,51	100,42	106,71	113,39	120,48	120,48
2	Indek Pembangunan Manusia	67,09	67,95	68,75	69,32	69,90	70,48	71,07	71,07
3	Tingkat Kemiskinan (%)	11,44	11,9	11,55	11,39	10,94	10,50	10,09	10,09
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,22	1,27	0,91	1,71	2,39	3,23	4,38	4,38
5	Indeks Gini	0,259	0,270	0,288	0,274	0,260	0,248	0,236	0,236
6	Angka rata-rata lama sekolah	7,97	8,81	8,36	8,46	9,00	9,21	9,26	9,26
7	Harapan Lama Sekolah	12,51	12,61	12,62	12,70	12,80	13,00	13,20	13,20
8	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,10	72,33	72,35	72,49	72,64	72,78	73,15	73,15
9	Tingkat pengangguran terbuka	3,49	3,14	2,44	2,42	2,4	2,36	2,32	2,32
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	5,00%	5%	5%	5%	5%	30%
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,12	80,65	82,65	83,67	84,935	86,2	87,47	87,47
3	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	77,90	50	61,88	66,88	71,88	79,38	86,88	86,88
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	82,78	93,98	92,56	93,56	94,56	96,06	97,56	97,56
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	79,00	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B	B	B	B
7	Nilai Akip	CC (50,09)	CC (50,57)	CC (50,98)	CC (51,87)	CC (52,78)	CC (53,70)	CC (54,63)	CC (54,63)

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	na	98,34	n.a	98,44	98,54	98,64	98,74	98,74
ASPEK PELAYANAN UMUM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	APK PAUD	100,42	109,7	73,02	80,35	80,73	90,27	90,47	90,47
2	APM SD/MI	89,29	90,15	74,91	80,73	90,15	90,36	90,78	90,78
3	APK SD/MI	102,16	100,68	82,16	100,60	100,70	100,80	100,90	100,90
4	APM SMP/MTs	69,77	90,15	63,55	71,30	71,75	72,65	73,00	73,00
5	APK SMP/MTs	97,40	98,03	82,16	90,00	93,55	98,33	100,00	100,00
6	APS 5-6 Tahun Paud	80,75	80,75	80,74	80,50	80,60	80,80	90,00	90,00
7	APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	98,03	98,03	99,35	99,40	90,45	90,57	90,67	90,67
8	APS 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	3,51	3,51	0,52	2,53	3,85	4,55	5,67	5,67
9	Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan	na	-	-	-	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	68,00%	70,00%	80,00%	84,00%	86,00%	92,00%	93,00%	93,00%
11	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	0%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	na	100,00%	95,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Persentase Pencapaian Mutu Pelayanan Dasar	na	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Angka usia harapan hidup	72,10	72,3	72,3	72,49	72,64	72,78	73,15	73,15
2	Persentase balita gizi buruk	0,30	0,27	0,27	0.15	0,10	0,5	0	0
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9	17	7	6	5	4	4
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	2	0	2	1	1	0	0
5	Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita	1 : 50 balita	1 : 50 balita	1 : 50 balita	1: 50 balita	1: 50 balita	1: 50 balita	1: 50 balita
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,17	1,20	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0.07	0,07	0,07	0,07	0,07
8	Prevalensi stunting	27%	11%	7%	18%	14%	12%	10%	10%
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	61 Org/ rujukan	100	1	70	50	40	40	40
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	88%	44.44%	100%	91%	92%	93%	94%	94%
11	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0.00039	0.00063	0.56	0,53	0,50	0,47	0,47
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus	35 Kasus	143 Kasus	41 Kasus	41 Kasus	41 Kasus	42 Kasus	42 Kasus
13	Angka kejadian Malaria	14	14	11	0	0	0	0	0
14	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	0.14	0.05	2	2	1	1	1
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97 persen	98	99	100%	97,00	98,00	98,00	98,00
16	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 71	1 : 70	1 : 70	1 : 70	1 : 80	1 : 83	1 : 86	1 : 86
17	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 59	1 : 90	1 : 90	1 : 90	1 : 66	1 : 68	1 : 70	1 : 70
18	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%	100%	16.66%	90%	90%	90%	90%	90%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
21	Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	100%	100%	-	50%	50%	50%	50%
22	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	100%	100%	75%	76%	77%	78%	78%
23	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3,20%	3,20%	3,20%	5%	10%	15%	20%	20%
24	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB	21 KLB	1573	260	23 KLB	24KLB	25KLB	26 KLB	26 KLB
25	Presentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama	na	-	-	-	20%	40%	60%	60%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,50%	5%	10%	10%	20%	20%	20%	88%
2	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2%	8,00%	10,00%	20,00%	25,00%	30,00%	33,00%	33,00%
3	Capaian Akses Air Limbah Layak	tda			10,00%	15,00%	20,00%	23,00%	23,00%
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	tda			15%	15%	25%	30%	30%
5	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	na	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
6	Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	tda	0,23	0,38	0,53	0,68	0,83	0,98	0,98
7	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	na	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	5,00%	5%	5%	5%	5%	30%
9	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	tda	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Ketaatan terhadap RTRW	tda	10%	10%	10%	10%	10%	10%	60%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	15,43%			30,43%	35,43%	40,43%	50,43%	50,43%
2	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%			30,43%	35,43%	45,43%	55,43%	55,43%
4	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	15,43%			47,43%	59,43%	74,43%	89,43%	89,43%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	98%	98%	100%	100%	100%	75%	75%
2	Persentase Penegakan PERDA	75%	0%	82%	75%	75%	80%	75%	75%
3	Cakupan pelayanan kebencanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kampung Tangguh Bencana	5 %	9%	0%	4%	12%	20%	30%	30%
5	Cakupan Penanggulangan Bencana	3 kampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	tda	60%	70%	80%	80%	80%	100%	100%
7	Nilai Indeks Ketahan Daerah (IKD)	tda	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,45
8	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68.84%	68.84%	72%	72%	81%	91%	100%	100%
3	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	33.33%	33.33%	66,67	66,67	66,67	83,33	100	100%
4	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	100%	33.33%	66,67	66,67	66,67	83,33	100%	100%
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	0%	0%	80%	70%	80%	90%	100%	100%%
2	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0	10%	20%	30%	40%	50%	50%
3	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0%	0%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
4	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0%	0%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0%	65%	70%	75%	80%	85%	100%	100%
3	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
4	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0%	55%	65%	75%	85%	95%	100%	100%
5	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	0%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
7	Rasio KDRT	0%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
8	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
9	Indeks Kesetaraan Gender	0%	60%	70%	80%	90%	96%	100%	100%
10	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
11	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	0%	40%	60%	70%	76%	80%	90%	100%
12	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	0%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	105%	106%	107%	108%	109%	110%	110%	110%
2	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	92,8	94	95,2	96,2	97,98	98,98
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14%	13.50%	42%	35%	25%	15%	10%	10%
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	na	na	na	66,88	71,88	79,38	86,88	86,88
3	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	50%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
4	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	50%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
5	Cakupan MHA yang berdayakan	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pendidikan dan pelatihan masyarakat	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	na	0	0	2 Kel/Org	2 Kel/Org	2 Kel/Org	2 Kel/Org	8 Kel/Org
8	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	na	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	20%	30%	40%	50%	60%	75%	75%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase perekaman KTP-el	99,00%	99,20%	99,35%	99,50%	99,65%	99,80%	100,00%	100,00%
2	Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	62%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	94%	95%	97%	98%	99%	100%	100%	100%
6	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Ketersediaan informasi dan inovasi kependudukan								
9	Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	86%
2	Jumlah kerjasama antar desa	9	5	5	5	5	5	5	5
3	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6	28	34	40	46	52	52
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6	42	50	58	66	74	82
6	Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%	21,6%	24,6%	27,6%	30,6%	33,6%	33,6%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%	6,0%	8,0%	10,0%	12,0%	14,0%	14,0%
8	Persentase PKK aktif	51,2%	60,0%	63,0%	66,0%	69,0%	72,0%	75,0%	75,0%
9	Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%	52,0%	54,0%	56,0%	58,0%	60,0%	60,0%
10	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%	28,0%	30,0%	32,0%	34,0%	36,0%	36,0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Total Fertility Rate	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
2	Ratio Akseptor KB	73%	80%	81%	75%	76%	77%	78%	78%
3	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK	600 KK	600 KK	350 KK	400 KK	450 KK	500 KK	500 KK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Persentase layanan angkutan darat	0	0	0	0	0	0	5%	5%
2	Rasio Ijin Trayek	0	0	0	0	0	0	5%	5%
3	Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0	0	0	0	0	0	5%	5%
4	Pemasangan Rambu-rambu	10	0	0	20	25	30	35	35
5	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0	0	0	0	0	0	10%	10%
6	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0	0	0	0	0	0	10%	10%
7	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	15593org/ 87,9 ton	19637 Org/1215 ton	20.379Org /43.393 ton	15200 Org/150 ton	15500 Org/170 ton	15700 Org/200 ton	16000 Org/ 220 ton	16000 Org/ 220 ton
8	Jumlah Arus penumpang pelayaran	773	19637	20379	800	820	850	870	870

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5054	5500	3652	5900	6000	6500	7000	7000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0 KIM	0 KIM	1 KIM	1 KIM	1 KIM	1 KIM	1 KIM	5 KIM
2	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Cakupan pelayanan perizinan Usaha Smpan pinjam	na				100%	100%	100%	100%
2	Presentase Koperasi yang diawasi	na				100%	100%	100%	100%
3	Presentase KSP/USP Sehat	na				25%	50%	75%	75%
4	Presentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	na				50%	75%	100%	100%
5	Presentase perberdayaan dan perlindungan koperasi	na				50%	75%	100%	100%
6	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	na				50%	75%	100%	100%
7	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	na				25%	50%	75%	75%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	36 Proyek	17 Proyek	38 Proyek	55 Proyek	63 Proyek	73 Proyek	84 Proyek	84 Proyek
2	Jumlah Investor	na	0%	0%	55 investor	63 investor	73 investor	84 investor	84 investor
3	Cakupakan Pelyanan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase investor yang ber investasi	43%	0%	0%	55%	60%	65%	70%	70%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Presentase Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif	0%	0%	0%	13%	13%	50%	63%	63%
2	Persentase wirausaha muda	0%	0%	0%	0%	0%	22,73%	25,45%	25,45%
3	Presentasi Pemuda yang dibina	0%	0,06%	0,24%	0,24%	0,20%		0,60%	0,60%
4	Cakupan pembinaan olahraga	17	0	14	32	33	36	37	37
5	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0	0	12,50%	0,00%	62,50%	81,08%	81,08%
6	Cakupan pembinaan atlet muda	0	0	0		20,00%	30,00%	40,00%	40,00%
7	Presentasi Organisasi kepramukaan yang aktif		0	0	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	41,67%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0%	0%	0%	25%	30%	40%	50%	50%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0%	0%	0%	20%	30%	45%	50%	50%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase Budaya lokal yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	0%				100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pembinaan Sejarah	0%				100%	100%	100%	100%
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pengelolaan Permuseuman	0%					100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	na	10%	10%	15%	20%	30%	40%	40%
7	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	na	11	15	16	17	18	19	19
8	Jumlah Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	na	10	10	15	20	30	40	40
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.587 Pengunjung	1.587 Pengunjung	1.600 Pengunjung	1.650 Pengunjung	1.700 Pengunjung	1.750 Pengunjung	1.800 Pengunjung	1.800 Pengunjung
2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5963 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	6.000 Judul
3	Jumlah Koleksi Nasioanl dan Naskah kuno yang dilestarikan	0	0	15	15	20	25	30	30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0%	0%	40%	50%	50%	55%	60%	60%
2	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0%	0%	50%	60%	65%	70%	70%	70%
3	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	0%	0%	40%	50%	55%	60%	60%	60%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	330 Ton	345 Ton	350 Ton	365 Ton	380 Ton	380 Ton
2	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	150 Ton	165 Ton	180 Ton	195 Ton	110 Ton	110 Ton
3	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	50%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	90%
4	Presentase Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	0%	4%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	4	6	16	29	29	29	29	29
2	Jumlah wisatawan Mancanegara	5	10	10	30	50	55	60	215
3	Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700	3000	200	300	350	400	6950
4	Presentase PAD Sektor Pariwisata	na	0%	0%	2%	3%	3%	4%	12%
5	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif Unggulan	20	25	60	70	85	105	130	130
6	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	na	25%	35%	20%	20%	20%	20%	20%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	1,57	1,81	2,08	2,39	2,63	2,89	3,18	3,18
2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%	1,90%	2,00%	2,10%	2,10%
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%	3,30%	3,40%	3,50%	3,60%	3,70%	3,80%	3,80%
4	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%	1,40%	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%	1,80%
5	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	2.633	3.000	3.600	4.000	4.200	4.500	4.500	23.800
6	Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	2.300 Ha	500 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha
7	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha
8	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,50%	80,50%	80,10%	80,80%	81,60%	82,80%	83,50%	83,50%
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90,00%	90,10%	90,20%	90,30%	90.40%	90.50%	90.60%	90.60%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	10.00%	40%	50%	60%	70.00%	80%	90%	90%
11	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP
12	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	320 Lembaga	400 Lembaga	450 Lembaga	500 Lembaga	550 Lembaga	600 Lembaga	650 Lembaga	650 Lembaga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Cakupan Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana distribusi perdagangan yang aktif	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	20%	20%	20%	40%	60%	100%	100%	100%
4	Jumlah Pengusaha yang dibina	0 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha
5	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	na	1 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan
6	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Jumlah IKM yang dikembangkan	na	1 IKM	1 IKM	3 IKM	3 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM
2	Cakupan Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentasi Izin Usaha Industri yang diverifikasi	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SEKRETARIAT DAERAH								

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan pelaksanaan urusan keekretariat bidang pemerintahan dan kesra	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	na	63.97%	71.09%	50%	50%	60%	80%	95%
	SEKRETARIAT DPRD								
1	Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PERENCANAAN								
1	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	95%	96%	96%	96%	97%	97%
2	persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%	95%	96%	96%	96%	97%	97%
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	100%	100%	95%	96%%	96%%	96%%	97%	97%
4	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	95%	96%%	96%%	96%%	97%	97%
5	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%	95%	96%%	96%%	96%%	97%	97%
	KEUANGAN								
1	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	181%	379%	64%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penetapan APBD	1.522.641.755.020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase SILPA terhadap APBD	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	60%	62%	64%	66%	68%	69%	70%	70%
	KEPEGAWAIAN								
1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,00%	75,00%	80,00%	80,00%	82,50%	85,00%	85,00%
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,00%	78,00%	81,00%	81,00%	82,50%	84,00%	84,00%
2	Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20%			20%	40%	40%	60%	60%
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na			20%	20%	40%	60%	60%
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	na			30%	60%	80%	90%	90%
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na			10%	50%	60%	80%	80%
	PENGELOLA PERBATASAN								
1	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	na		21.74%	43.47%	65.22%	86.95%	100%	100%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	61%	71%	75%	79%	82%	86%	89%	89%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	42%	54%	58%	59%	59%	59%	60%	60%
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80%	82%	83%	84%	84%	84%	85%	85%
4	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6	Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	31%	33%	43.1%	50%	51%	52%	53%	53%
UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN LONG BAGUNG								
1	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Bagun	100%	100%	100,00%	0,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0%	20%	40,00%	0,00%	80%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kamtibmas	100%	100%	100,00%	0,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11	11	11	11	11	11	11	11
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	3	3	4	5	10	11	11
	KECAMATAN LONG APARI								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Long Apari	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN LAHAM								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Laham	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN LONG HUBUNG								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Long Hubung	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN LONG PAHANGAI								

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Long Pahangai	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan wawasan Kebangsaan	98%	90%	92%	93%	94%	95%	97%	97%
2	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	92%	82%	86%	87%	90%	92%	92%	92%
3	Persentase Ormas/LSM yang dibina	89,17%	80%	84,00%	86,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90%
4	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi	98%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
5	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	82,82%	83%	85%	87%	89%	90%	92%	92%

BAB IX
PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 menjadi panduan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah pengesahan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026, maka secara hirarkis RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan perubahan tersebut yang secara substansi menguatkan pencapaian pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk dapat mewujudkan Visi Bupati **"Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan"**, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas, dan demokratis; (2) Tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*); (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu; (4) Keberpihakan kepada rakyat (*pro-poor policy*); (5) Partisipasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha; serta (6) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah diharapkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang sejahtera dan berkeadilan bagi semua sesuai dengan visi Bupati Mahakam Ulu terpilih.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah hingga akhir periode RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga

dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) Mengingat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sekarang akan berakhir pada tahun 2024, maka pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati periode sekarang atas pelaksanaan RPJMD Mahakam Ulu 2021-2026 hanya sampai tahun pelaksanaan 2024;
2) Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu di tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 dan 2026 tetap berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026 ini hingga tersusunnya RPJMD periode berikutnya setelah Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu yang baru terpilih;

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Agar RPJMD dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Bupati Mahakam Ulu berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026;
2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026;
3) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan didukung oleh instansi vertikal, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik- baiknya;

4) Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
5) Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 setiap tahunnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun berkenaan;
6) Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; dan
7) Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, dan program dalam RPJMD diperlukan instrumen antara lain perangkat daerah dan sumber daya manusia (SDM), maka penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada perubahan RPJMD 2021-2026 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggungjawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus

operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi.